



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengamankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi misi dan Program Bupati.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

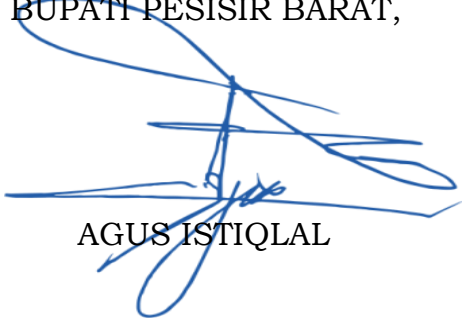
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

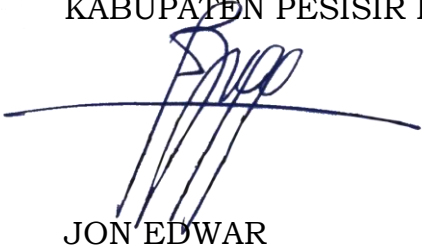
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada Tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI PESISIR BARAT,



AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 28 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,



JON EDWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan RPJPD ini, Pemerintah berpedoman dan berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta landasan operasional Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang bertujuan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan *Stakeholders* lainnya) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah ini mempedomani dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, serta mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD. RPJPD disusun berdasarkan analisis kondisi daerah, isu strategis, saran serta masukan dan analisis perencanaan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berbagai analisis maupun rumusan kebijakan terkait perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta pemangku kepentingan. Diharapkan Peraturan Daerah yang disusun ini dapat menjadi rujukan dan acuan arah pembangunan pada perencanaan 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan pemerintah daerah.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024
NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I – 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya..... I – 5
1.3.1 Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 I – 7
1.3.2 Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 I – 8
1.3.3 Hubungan antara RJPDP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2030-2034, RPJMD Tahun 2035-2039 dan RPJMD Tahun 2040-2045..... I – 10
1.3.4 Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037..... I – 11
1.3.5 Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045..... I – 20
1.3.6 Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2016-2030 I – 25
1.4 Maksud dan Tujuan..... I – 27
1.4.1 Maksud I – 27
1.4.2 Tujuan..... I – 27
1.5 Sistematika Penulisan I – 28

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II – 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II – 57
2.3 Aspek Daya Saing II – 77

2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	II - 112
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II – 152
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II – 175
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II – 193

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III – 1
3.1.1	Permasalahan Pembangunan pada Aspek Sosial	III – 1
3.1.2	Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ekonomi.....	III – 3
3.1.3	Permasalahan Pembangunan pada Aspek Kewilayahan dan Infrastruktur.....	III – 3
3.1.4	Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan	III – 4
3.1.5	Permasalahan Hasil KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	III – 5
3.2	Isu Strategis	III – 12
3.2.1	Isu Strategis Berdasarkan Perkembangan Daerah	III - 13
3.2.2	Isu Strategis Hasil KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	III – 32
3.2.3	Isu Strategis Pokok Pembangunan Daerah	III – 35

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1	Visi.....	IV – 2
4.1.1.	Pesisir Barat yang Maju.....	IV – 2
4.1.2.	Pesisir Barat yang Mandiri.....	IV – 3
4.1.3.	Pesisir Barat Berkelanjutan.....	IV - 3
4.2	Misi.....	IV – 11
4.2.1.	Misi ke 1, Transformasi Sosial.....	IV-12
4.2.2.	Misi ke 2, Transformasi Ekonomi	IV-12
4.2.3.	Misi ke 3, Transformasi Tata Kelola.....	IV-12
4.2.4.	Misi ke 4, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	IV-13
4.2.5.	Misi ke 5, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IV-13
4.2.6.	Misi ke 6, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.....	IV-13
4.2.7.	Misi ke 7, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	IV-13
4.2.8.	Misi ke 8, Kestinambungan Pembangunan.....	IV-14

4.3 Upaya Super Prioritas (Game Changer) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 IV-14

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan..... V-1

5.1.1.Arah Kebijakan Periode 2025-2029 V-2

5.1.2.Arah Kebijakan Periode 2030-2034 V-3

5.1.3.Arah Kebijakan Periode 2035-2039 V-3

5.1.4.Arah Kebijakan Periode 2040-2045 V-4

5.2. Sasaran Pokok..... V-41

5.2.1.Arah Pembangunan Daerah..... V-42

5.2.2.Arah Kebijakan Transformasi..... V-43

5.2.3.Indikator Utama Pembangunan Daerah V-43

BAB VI. PENUTUP

6.1. Pedoman Transisi VI-1

6.2. Kaidah Pelaksanaan VI-2

6.2.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan VI-2

6.2.2 Kerangka Pengendalian dan Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) VI-3

6.2.3 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan VI-6

6.2.4 Sistem Insentif..... IV-8

6.2.5 Mekanisme Perubahan IV-8

6.2.6 Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Proses Perencanaan IV-9

6.3 Pembiayaan Pembangunan VI-10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Arah Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 I-15

Tabel 1.2. Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 I-21

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat II-3

Tabel 2.2. Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat II-4

Tabel 2.3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat..... II-5

Tabel 2.4. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan II-6

Tabel 2.5. Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat..... II-9

Tabel 2.6. Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat II-10

Tabel 2.7. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 II-18

Tabel 2.8. Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 II-29

Tabel 2.9. Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat . II-33

Tabel 2.10. Luas Daya Dukung Lahan Potensial, Kendala, dan Limit..... II-40

Tabel 2.11. Rentang Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung..... II-40

Tabel 2.12. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat II-41

Tabel 2.13. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat..... II-41

Tabel 2.14. Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat II-42

Tabel 2.15. Daya Dukung Air Permukaan per-Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat..... II-42

Tabel 2.16. Daya Dukung Pangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 ..II-43

Tabel 2.17. Daya Tampung Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2023..... II-44

Tabel 2.18. BAU dan Skenario Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif..... II-45

Tabel 2.19. BAU dan Skenario Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat..... II-46

Tabel 2.20. BAU dan Skenario Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus KawinII-46

Tabel 2.21.	BAU dan Skenario Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	II-46
Tabel 2.22.	BAU dan Skenario Laju Pertumbuhan PDB Perkapita.....	II-46
Tabel 2.23.	BAU dan Skenario PDB Perkapita.....	II-46
Tabel 2.24.	BAU dan Skenario Persentase Tenaga Kerja Formal	II-46
Tabel 2.25.	Capaian IKLH Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025	II-47
Tabel 2.26.	Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-47
Tabel 2.27.	Tabel 2.27 Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat	II-48
Tabel 2.28.	Jumlah Pelanggan Listrik PT PLN Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel 2.29.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (SemesterI)	II-51
Tabel 2.30.	Data Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-53
Tabel 2.31.	Data Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-55
Tabel 2.32.	Data Penduduk Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-55
Tabel 2.33.	Lokasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-60
Tabel 2.34.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023	II-62
Tabel 2.35.	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023.....	II-64
Tabel 2.36.	Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.37.	Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.38.	Analisis Faktor Determinan AKI dan AKB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-68
Tabel 2.39.	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-69
Tabel 2.40.	Data Pelayanan TB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-70
Tabel 2.41.	Data Kasus HIV Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-71
Tabel 2.42.	Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat.....	II-75

Tabel 2.43.	Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Pesisir Barat.....	II-76
Tabel 2.44.	Warisan Budaya Kabupaten Pesisir Barat.....	II-76
Tabel 2.45.	PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah)	II-78
Tabel 2.46.	PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	II-81
Tabel 2.47.	PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	II-81
Tabel 2.48.	PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	II-83
Tabel 2.49.	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)	II-84
Tabel 2.50.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2021-2022	II-85
Tabel 2.51.	Data Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-88
Tabel 2.52.	Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-88
Tabel 2.53.	Data Pendidikan Tingkat SMP Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-89
Tabel 2.54.	Angka Buta Huruf Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel 2.55.	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022.....	II-91
Tabel 2.56.	Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022.....	II-92
Tabel 2.57.	Indikator Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-92
Tabel 2.58.	Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-93
Tabel 2.59.	Capaian Kemampuan Literasi/Numerasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-93
Tabel 2.60.	Jumlah Tenaga Kerja Persektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.61.	Jumlah Pencari Kerja AK-1 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-96
Tabel 2.62.	Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat	II-100

Tabel 2.63.	Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat	II-100
Tabel 2.64.	Lintasan Trayek Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-101
Tabel 2.65.	Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-101
Tabel 2.66.	Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-103
Tabel 2.67.	Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2.68.	Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022	II-104
Tabel 2.69.	Penerima Manfaat Layanan SPAM Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2022.....	II-107
Tabel 2.70.	Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2.71.	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 – 2021	II-110
Tabel 2.72.	Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-115
Tabel 2.73.	Delineasi Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022	II-116
Tabel 2.74.	Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022	II-117
Tabel 2.75.	Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022	II-118
Tabel 2.76.	Aksesibilitas Air Minum, Air Limbah, dan Persampahan Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	II-120
Tabel 2.77.	Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2018-2022	II-122
Tabel 2.78.	Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	II-122
Tabel 2.79.	Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	II-123
Tabel 2.80.	Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	II-123
Tabel 2.81.	Cadangan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-124

Tabel 2.82.	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-127
Tabel 2.83.	Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023	II-127
Tabel 2.84.	Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023	II-128
Tabel 2.85.	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022	II-130
Tabel 2.86.	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022	II-130
Tabel 2.87.	Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat	II-132
Tabel 2.88.	Pelaksanaan Krui Surfing International Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022	II-133
Tabel 2.89.	Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat.....	II-134
Tabel 2.90.	Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-134
Tabel 2.91.	Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022.....	II-135
Tabel 2.92.	Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-135
Tabel 2.93.	Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022	II-136
Tabel 2.94.	Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-137
Tabel 2.95.	Prasarana Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..	II-137
Tabel 2.96.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-138
Tabel 2.97.	Jumlah Produksi Sayuran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kuintal).....	II-139
Tabel 2.98.	Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kg)	II-139
Tabel 2.99.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (ton) (i).....	II-141
Tabel 2.100.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (ii)	II-142

Tabel 2.101.	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2022	II-143
Tabel 2.102.	Kasus Penyakit Hewan Ternak Menular Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-143
Tabel 2.103.	Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan	
	Kecamatan Tahun 2022.....	II-145
Tabel 2.104.	Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2022	II-145
Tabel 2.105.	Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pesisir Barat	
	Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 (ton)	II-147
Tabel 2.106.	Data Pemasaran Industri Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2022	II-148
Tabel 2.107.	Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-149
Tabel 2.108.	Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-152
Tabel 2.109.	Skala Penilaian Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2005-2025	II-155
Tabel 2.110.	Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2005-2025	II-158
Tabel 2.111.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2025-2045	II-179
Tabel 2.112.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-179
Tabel 2.113.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	
	Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-180
Tabel 2.114.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-183
Tabel 2.115.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-184
Tabel 2.116.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2025-2045	II-187
Tabel 2.117.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-189
Tabel 2.118.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten	

	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-191
Tabel 2.119.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-191
Tabel 3.1	Permasalahan Daerah Hasil Analisis KLHS RPJPD	
	Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045.....	III-6
Tabel 3.2	Isu Strategis Hasil Analisis KLHS RPJPD Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	III-33
Tabel 3.3	Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	III-35
Tabel 3.4	Pemetaan Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten	
	Pesisir Barat Tahun 2025-2045	III-37
Tabel 4.1	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD	
	Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.2	Penyelarasan Indikator dan Target Sasaran Visi RPJPD Provinsi	
	dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	IV-8
Tabel 5.1.	Pentahapan dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan dan Tahapan	V-5
Tabel 5.3.	Arah Pembangunan Daerah	V-42
Tabel 5.4.	Arah Kebijakan Transformasi	V-43
Tabel 5.5.	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah.	V-44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025-2045..... I-4

Gambar 1.2. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen RPJMD I-6

Gambar 1.3. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota I-6

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat..... II-2

Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat..... II-4

Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Barat..... II-6

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat..... II-8

Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat II-10

Gambar 2.6. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Barat II-12

Gambar 2.7. Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Pesisir Barat..... II-13

Gambar 2.8. Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi
Kabupaten Pesisir Barat II-14

Gambar 2.9. Peta Bahaya Gempa Kabupaten Pesisir Barat..... II-15

Gambar 2.10. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten Pesisir Barat II-16

Gambar 2.11. Peta Bahaya Longsor Kabupaten Pesisir Barat II-17

Gambar 2.12. Lokasi Bencana per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2022 II-28

Gambar 2.13. Kejadian Bencana Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2022 II-29

Gambar 2.14. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Barat II-31

Gambar 2.15. Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat..... II-32

Gambar 2.16. Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Pesisir Barat..... II-33

Gambar 2.17. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten
Pesisir Barat..... II-37

Gambar 2.18. Peta Daya Dukung Lahan II-39

Gambar 2.19. Rasio Elektrifikasi dan Energi Baru Terbarukan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2018-2022 II-48

Gambar 2.20. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2018-2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Barat II-52

Gambar 2.21. Persentase Penduduk Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan..... II-52

Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat

Tahun 2018-2022	II-53
Gambar 2.23. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2018-2022	II-58
Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023	II-58
Gambar 2.25. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2019-2023	II-59
Gambar 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat 2019-2023	II-59
Gambar 2.27. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023	II-60
Gambar 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2.29. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023	II-63
Gambar 2.30. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2020-2023	II-63
Gambar 2.31. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.32. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.33. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.34. Kematian Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Ibu Nifas di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-67
Gambar 2.35. Kematian Bayi (0-11 bulan) di Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2018-2022	II-67
Gambar 2.36. Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2018-2022	II-70
Gambar 2.37. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2020-2023	II-72
Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2020-2023	II-73
Gambar 2.39. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2023	II-73
Gambar 2.40. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019-2023	II-74
Gambar 2.41. Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-86
Gambar 2.42. Perbandingan Penduduk yang Bekerja, Pengangguran dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat	
Tahun 2018-2022	II-87
Gambar 2.43. Kondisi Bangunan Ruang Kelas PAUD Kabupaten	

Pesisir Barat Tahun 2019-2022	II-89
Gambar 2.44. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-90
Gambar 2.45. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-90
Gambar 2.46. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022.....	II-91
Gambar 2.47. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-94
Gambar 2.48. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-95
Gambar 2.49. Klasifikasi Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-96
Gambar 2.50. Pelaku Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-97
Gambar 2.51. Angka Ketergantungan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-98
Gambar 2.52. Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, serta Jumlah Penduduk Lansia Tahun 2025-2035.....	II-98
Gambar 2.53. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035	II-99
Gambar 2.54. Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022	II-102
Gambar 2.55. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-104
Gambar 2.56. Kondisi Jalan Rusak Berat Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022.....	II-105
Gambar 2.57. Target Jalan Mantab Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026	II-106
Gambar 2.58. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022.....	II-106
Gambar 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2022	II-108
Gambar 2.60. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	II-111
Gambar 2.61. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	II-111
Gambar 2.62. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.....	II-112
Gambar 2.63. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023	II-112
Gambar 2.64. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023.....	II-114
Gambar 2.65. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Barat 2021-2023...	II-118
Gambar 2.66. Jumlah Rumah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022	II-118
Gambar 2.67. Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak	

Tahun 2018-2022	II-119
Gambar 2.68. Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Tahun 2018-2022	II-119
Gambar 2.69. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022	II-121
Gambar 2.70. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2028-2023	II-126
Gambar 2.71. Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung Tahun 2021-2023	II-126
Gambar 2.72. Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023	II-127
Gambar 2.73. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023.....	II-129
Gambar 2.74. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton).....	II-131
Gambar 2.75. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-131
Gambar 2.76. Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-132
Gambar 2.77. Kunjungan Wisata Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2028-2023	II-136
Gambar 2.78. Produksi Padi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton)	II-138
Gambar 2.79. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 (Ha).....	II-140
Gambar 2.80. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2010-2022	II-143
Gambar 2.81. Jenis Sasaran Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022	II-146
Gambar 2.82. Jumlah Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2028-2022 ..	II-147
Gambar 2.83. Kontribusi Industri Pengelolaan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022	II-150
Gambar 2.84. Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang Menggunakan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022	II-150
Gambar 2.85. Perbandingan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2-18-2022 (dalam juta rupiah) 2025-2045	II-151
Gambar 2.86. Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Tahap III	II-156
Gambar 2.87. Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV	II-156
Gambar 2.88. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-176
Gambar 2.89. Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-laki Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045	II-177

Gambar 2.90. Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 II-178

Gambar 2.91. Gambaran Demografi Kabupaten Pesisir barat Tahun 2025-2045 II-182

Gambar 2.92. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045(unit) II-183

Gambar 2.93. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (liter/orang/tahun)..... II-185

Gambar 2.94. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (liter/orang/tahun)..... II-185

Gambar 2.95. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (kwh)..... II-188

Gambar 2.96. Proyeksi Penyediaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (unit) II-189

Gambar 2.97. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (ton/tahun)..... II-189

Gambar 2.98. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (unit) II-190

Gambar 2.99. Jumlah Peserta Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (murid) II-192

Gambar 2.100 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (ruang belajar)) II-192

Gambar 6.1. Kerangka Pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045 VI-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai penerus kemerdekaan, pemerintahan negara wajib menjaga kemerdekaan dengan pembangunan yang demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak menyurutkan semangat negara dalam bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dalam mencapai visi dan misi abadi negara tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai kelanjutan dari tahapan pembangunan jangka panjang sebelumnya, yang diharapkan menjadi simpul pengikat seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selama 20 tahun ke depan. Dengan melaksanakan RPJPN 2025-2045, maka tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, Indonesia menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah termuda di Provinsi Lampung, dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak berdirinya pada tahun 2012. Tantangan pembangunan sebagai daerah tertinggal tentunya menjadi pelecut semangat untuk terus bekerja mengejar ketertinggalan dari daerah lain dalam kerangka untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika pembangunan dalam kurun waktu pelaksanaan 2 (dua) periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedikit telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah

bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis dan terarah untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah sebagai modal dasar pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pembangunan yang merata masyarakat akan memperoleh kesempatan kerja dan berusaha, akses pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik yang baik. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pembangunan daerahnya terarah dan mencapai tujuan yang dicita-citakan adalah dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan dirumuskan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional tentu merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah juga mempedomani aturan antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD dan RKPD.

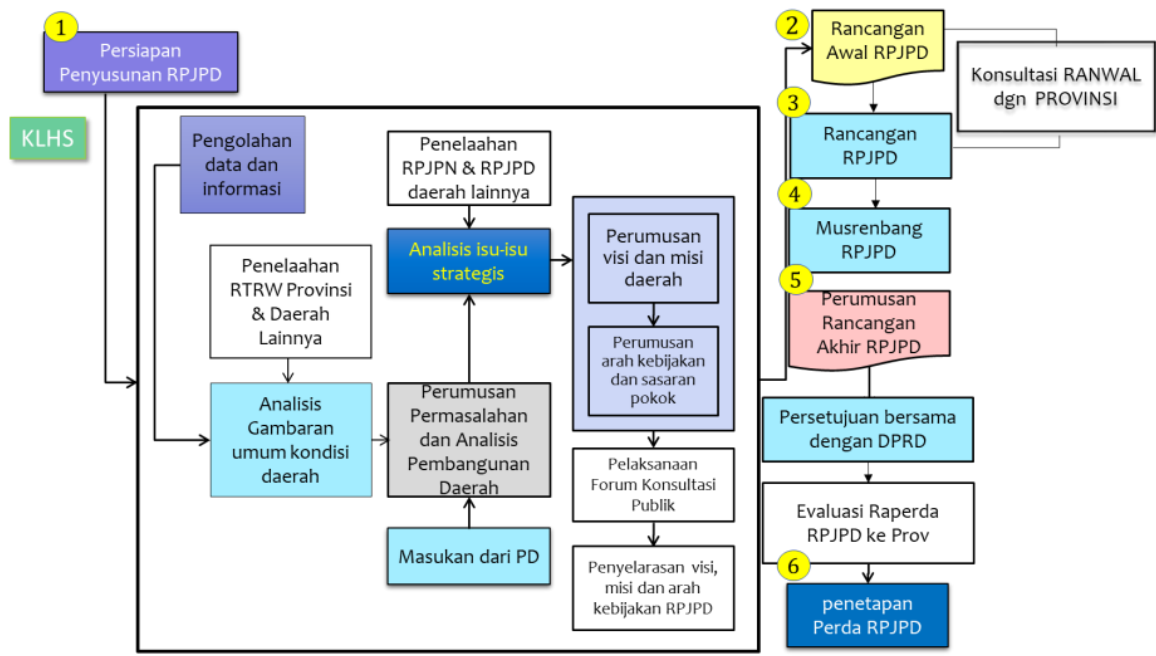
Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 merupakan awal dari rangkaian siklus dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain:

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumber daya, dan memperhatikan durasi perencanaan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi: (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan Musrenbang, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Dalam pelaksanaan tahapan ini, selain melibatkan pemerintahan daerah, juga melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 melalui berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah pekon, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Sumber: Pasal 17-40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

Dalam kaitannya sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional, RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan konsep mencapai tujuan pembangunan bernegara dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan daya saing daerah serta daya saing sumber daya manusia, dengan senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan menuju *net zero emission*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

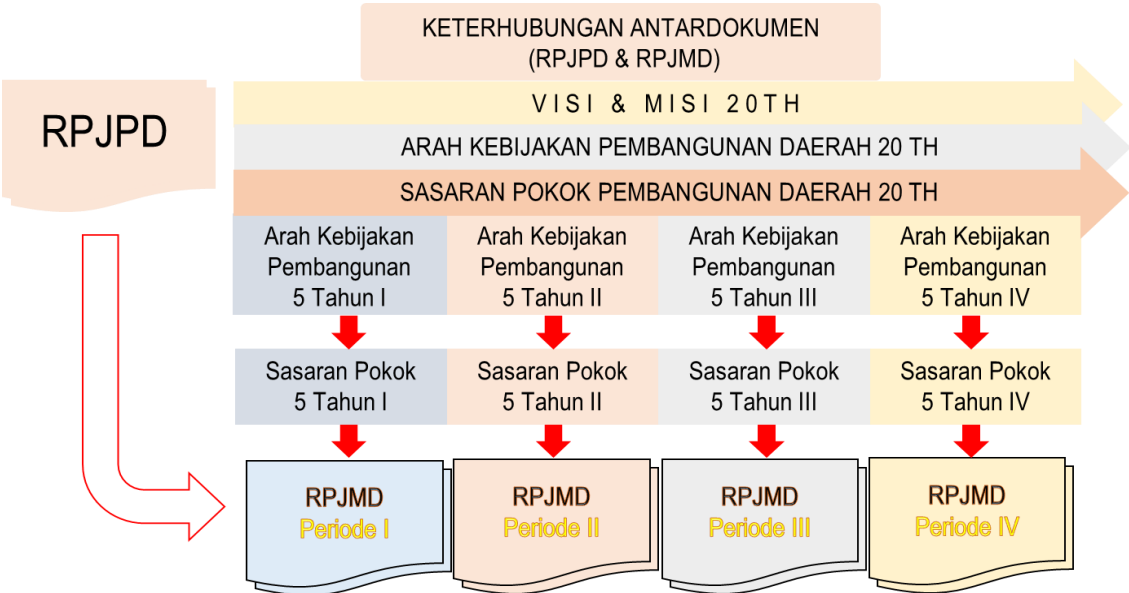
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

RPJPD bermuatan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dan menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD untuk 5 (lima) tahun. Hubungan antar dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:

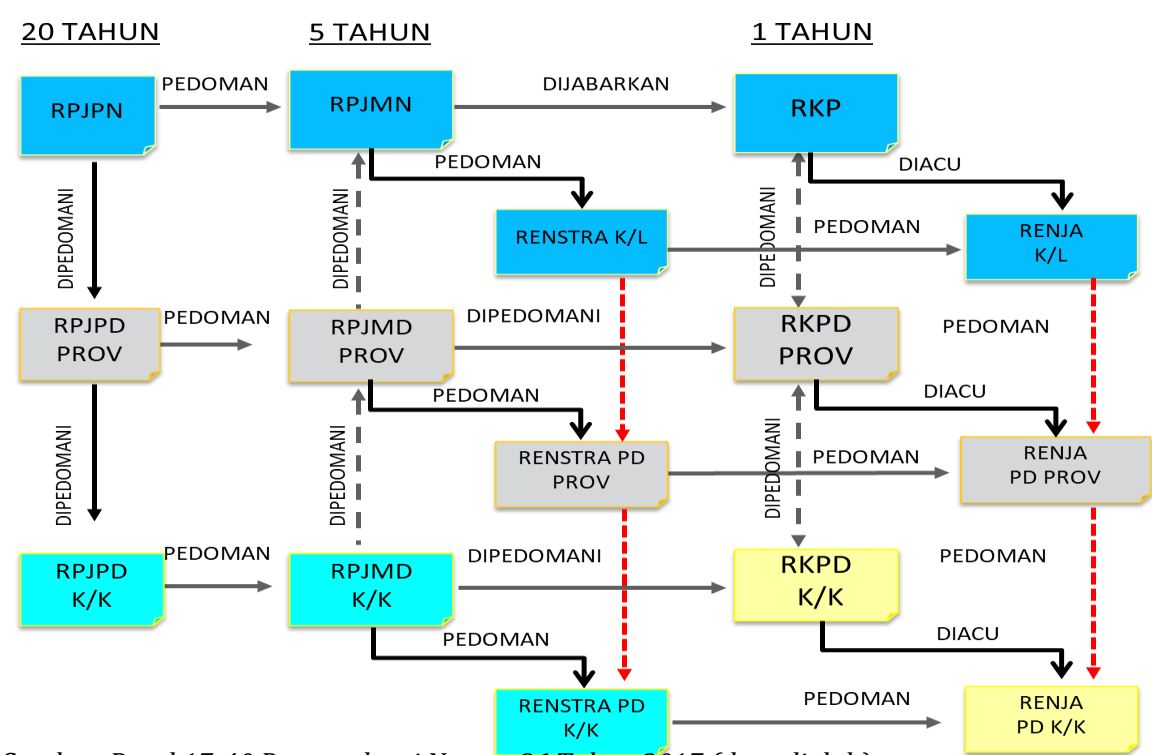
Gambar 1.2. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen RPJMD



Sumber: Pasal 17-40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme dalam penyusunan RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota juga dilaksanakan secara berjenjang; dimana substansi dalam RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota akan berpedoman pada RPJPD dan RPJPD Pemerintah Provinsi, serta RTRW Pemerintah Kabupaten/Kota dan dokumen sektoral lainnya.

Gambar 1.3. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sumber: Pasal 17-40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (data diolah)

1.3.1. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2005-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap tahap pembangunan. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, geopolitik dan geoeкономии serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi yaitu

- (i) Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen);
- (ii) Kemiskinan menurun (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen);
- (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia);
- (iv) Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan
- (v) Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- (i) Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial (Misi 1), Transformasi Ekonomi (Misi 2), dan Transformasi Tata Kelola (Misi 3);
- (ii) Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi (Misi 4) serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Misi 5); dan
- (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas (Misi 6), Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan (Misi 7) serta Agenda Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan (Misi 8).

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Namun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 17 arah pembangunan dalam pelaksanaan 8 misi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu:

- a. Transformasi Sosial
 - 1. Kesehatan untuk Semua
 - 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
 - 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
- b. Transformasi Ekonomi

4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 5. Penerapan Ekonomi Hijau
 6. Transformasi Digital
 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- c. Transformasi Tata Kelola
9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Berikutnya, arah pembangunan untuk Landasan Transformasi, sebagai berikut :

- a. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
 11. Stabilitas Ekonomi Makro
 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
- b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
13. Beragaman Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1.3.2. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Lampung. Proses penyusunannya tetap berpegang pada pencapaian dari Visi Abadi Indonesia, yaitu: Merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur. RPJPD Provinsi Lampung disusun dengan mempertimbangkan faktor internal, yaitu: (i) Aspek Geografis; (ii) Aspek Kependudukan; (iii) Pencapaian Pembangunan; dan (iv) Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan. Lebih lanjut faktor eksternal yang berpengaruh adalah (i) Megatrend Global; (ii) Kebijakan Pembangunan Nasional; dan (iii) Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Visi pembangunan Provinsi Lampung untuk RPJPD Tahun 2025-2045 adalah Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan, yang dalam rangka pencapaian visi tersebut difokuskan pada 5 tujuan yaitu:

- a. Pendapatan Penduduk dalam Kategori *High Income* ditandai dengan nilai (i) Pendapatan Perkapita kisaran Rp.328-384juta (21.867-25.600 US Dollar) dan (ii) Kontribusi Sektor Industri dalam PDRB 26-28%; (iii) Pembangunan Ekonomi Biru dengan nilai indeks mencapai 250,73;
- b. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan ditandai dengan capaian (i) Tingkat Kemiskinan 3,0-2,5% dan (ii) Rasio Gini 0,202-0,197; (iii) Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,5%; (iv) Persentase Desa Mandiri 30-33%;
- c. Daya Saing Daerah ditandai dengan Indeks Daya Saing di angka 4;
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat ditandai dengan (i) Indeks Modal Manusia 0,68-0,70 dan (ii) Indeks Pembangunan Manusia 79,54-80,72; dan
- e. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun pada level 93,17%.

Visi Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan untuk tahun 2025-2045 disusun dalam 8 misi pembangunan dalam 3 domain transformasi, sebagai berikut:

I. Transformasi Pembangunan Daerah

Misi ke 1 Transformasi Sosial;

Misi ke 2 Transformasi Ekonomi;

Misi ke 3 Transformasi Tata Kelola;

II. Landasan Transformasi

Misi ke 4 Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah;

Misi ke 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

III. Kerangka Implementasi Transformasi

Misi ke 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

Misi ke 7 Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;

Misi ke 8 Kestinambungan Pembangunan.

Pelaksanaan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dilakukan melalui 4 pentahapan pembangunan RPJPD dalam 4 tahapan,yaitu:

RPJPD Tahun 2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan

RPJPD Tahun 2030-2034: Percepatan Transformasi Pembangunan

RPJPD Tahun 2035-2039: Eksistensi Daerah Skala Nasional

RPJPD Tahun 2040-2045: Perwujudan Visi Pembangunan

1.3.3. Hubungan antara RJPDP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2030-2034, RPJMD Tahun 2035-2039 dan RPJMD Tahun 2040-2045

RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RPJMD serta digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Tema dalam RPJPD menjadi arahan Visi RPJMD, Arah kebijakan RPJPD menjadi arahan Misi RPJMD dan Sasaran Pokok RPJPD menjadi arahan Tujuan dan/atau Sasaran RPJMD.

Pelaksanaan RPJPD dijabarkan dalam 4 (empat) periodisasi RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang memuat program prioritas kepala daerah dan Indikator Kinerja Utama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 setiap 5 tahun akan dijabarkan ke dalam RPJMD, mulai RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2030-2034, RPJMD Tahun 2035-2039, dan RPJMD Tahun 2040-2045. Keempat periodisasi RPJMD tersebut harus memiliki benang merah/tonggak dalam proses pencapaian menuju pencapaian sasaran secara keseluruhan dalam periode 25 (dua puluh lima) tahun perencanaan daerah. Dalam hal ini, sasaran pokok dari RPJPD merupakan *milestone* dari setiap periode RPJMD.

a. RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pada RPJMD Tahap I ini adalah Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan.

Selanjutnya, arahan penyusunan misi RPJMD Tahap I, berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut: (i) Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial (ii) Hilirisasi SDA khususnya pada sektor pertanian dan Perikanan (iii) Penguatan produktivitas tenaga kerja (iv) Penguatan reformasi birokrasi (v) Kualitas ASN berbasis merit (vi) Digitalisasi pelayanan publik (vii) Memperkuat ketangguhan keamanan dan kemandirian ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan (viii) Pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

b. RPJMD Tahun 2030-2034

Arah kebijakan pada RPJMD Tahap II ini adalah Percepatan Transformasi Pembangunan.

Untuk arahan penyusunan misi RPJMD Tahap II, pembangunan pada tahap II RPJPD fokus pada percepatan transformasi pembangunan menuju daerah maju. Pada agenda transformasi sosial dititikberatkan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Untuk agenda transformasi ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Fokus agenda transformasi tata kelola adalah pemenuhan reformasi birokrasi secara utuh; pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi; dan peningkatan kesejahteraan ASN. Pada agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas

ekonomi makro daerah diarahkan pada percepatan pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan. Dan fokus pada ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.

c. RPJMD Tahun 2035-2039

Arah kebijakan pada RPJMD Tahap III ini adalah Eksistensi Daerah Skala Nasional.

Lebih lanjut, arahan penyusunan misi RPJMD Tahap III, berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut: Fokus transformasi sosial pada penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada pemantapan kemandirian daerah; eksistensi Pesisir Barat di Indonesia dan internasional; dan pariwisata maju dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Di agenda transformasi tata kelola diarahkan pada pemerintahan yang efektif; dan ASN yang produktif dan kompetitif. Pada agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro dan eksistensinya diakui di Indonesia. Sedangkan arah kebijakan pada agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.

d. RPJMD Tahun 2040-2045

Arah kebijakan pada RPJMD Tahap IV ini adalah Perwujudan Visi Pembangunan.

Berikutnya, arahan penyusunan misi RPJMD Tahap IV, berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut: fokus utama pada transformasi sosial adalah SDM Pesisir Barat yang unggul. Titik berat transformasi ekonomi untuk perwujudan masyarakat maju dan mandiri; dan masyarakat sipil yang produktif dan unggul. Di agenda transformasi tata kelola diarahkan pada regulasi dan tata kelola yang berintegritas; pemerintahan yang adaptif dan taat asas; serta keberlanjutan ASN yang inovatif. Arah kebijakan di agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah Pesisir Barat yang aman, nyaman, berdemokrasi substansial dan berpengaruh di Indonesia. Dan mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan adalah fokus pada agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

1.3.4. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 160 huruf b ditegaskan bahwa penyusunan RPJPD selain berpedoman

pada RPJPN juga berpedoman RTRW dalam hal ini RTRW Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Hubungan antara RPJMD dan RTRW sebagaimana ketentuan Pasal 160 adalah dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

- a. kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkumat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
- b. kawasan strategis provinsi, meliputi
 - 1) Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkumat.
 - 2) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
 - b. Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;
 - c. Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan
 - d. Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - a. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - 1) meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;
 - 2) mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - 3) mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - 4) membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.
 - b. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.
 - 1) mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
 - 2) membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan
 - 3) Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.
 - c. pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
 - 1) mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;

- 2) memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
 - 3) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - 4) menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
 - 5) meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
- d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
- 1) mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan
 - 2) mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan.
- e. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - 2) meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
 - 3) mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
 - 4) melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - 5) mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
- 1) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsinya khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfaatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Arah Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi
A	Pengembangan Struktur Ruang		
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan		
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah
		Pembangunan dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah
		Pengembangan Kawasan pariwisata	Pesisir Barat
		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah
		Pengembangan SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangkunat
		Pengembangan Kawasan Pariwisata	Bangkunat
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangkunat
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangkunat
		Pengembangan Kawasan Industri	Bangkunat
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Selatan
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan
		Pengembangan Kawasan Industri	Pesisir Selatan
		Pengembangan Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan
A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Lemong

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi
		Pengembangan kawasan pariwisata	Lemong
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong
A1.5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembangan kawasan pariwisata	Ngambur
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambur
A1.6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembangan kawasan pariwisata	Krui Selatan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan
A1.7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembangan kawasan pariwisata	Way Krui
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Way Krui
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembangan kawasan pariwisata	Karya Penggawa
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Penggawa
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembangan kawasan Pariwisata	Ngaras
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Utara
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang
		Pengembangan Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang
A2	Sistem Prasarana Utama		
A2.1	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi
		dan Jalan Lingkungan	
		Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Bangkunat, Lemong
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat
		Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat
A2.2	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat
A3	Sistem Prasarana lainnya		
A3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)	Pesisir Barat
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat
		Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan		
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat
		Pembanguunan TPS	Pesisir Barat
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah
A3.3.3	Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat
		Pembangunan IPLT	Pesisir Barat
		Pembangunan sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat
		Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat
B	Pengembangan Pola Ruang		
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya		
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat
		Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pesisir Barat
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat
		Pengembangan Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat
		Pengembangan Budidaya Peternakan	Pesisir Barat
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat
		Pengembangan Kawasan Pertanian melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan-kawasan Potensial	Pesisir Barat
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelayan	Pesisir Barat
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi
B1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat
		Pembangunan Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkumat
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkumat
B1.4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat
		Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat
		Pengembangan Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat
B1.5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat
		Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat
		Pengembangan Perumahan Rakyat	Pesisir Barat
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat
		Pembangunan dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat
		Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat
C	Pengembangan Kawasan Strategis		
C1	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang
		Pengembangan Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

1.3.5. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dan/atau kebijakan, rencana, dan program dari masing-masing Perangkat Daerah. Di dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2051-2045, integrasi KLHS ke dalam RPJPD dilakukan sejak penyusunan Rancangan Awal RPJPD. Adapun rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Pilar	Isu Strategis	Rekomendasi
1	Sosial	1 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Dalam rangka mencapai target nasional pada indikator menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, maka perlu dilakukan upaya-upaya tambahan atau skenario yang dapat dioptimalkan agar tercapai angka 65% pada Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di tahun 2045 antara lain: a. Meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan yang merata; b. Sosialisasi pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil dan saat menyusui serta edukasi tentang ASI eksklusif kepada ibu hamil; c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada bayi dan ibu menyusui serta posyandu yang terjadwal dengan baik; dan d. Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu. Beberapa Skenario yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dalam rangka mempertahankan capaian Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian antara lain: a. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				produktivitas pertanian; b. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; c. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; d. Tidak melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Perda LP2B; dan e. Optimalisasi penggunaan bahan organik dan pembatasan penggunaan bahan kimia/pestisida dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian. Skenario yang tepat dalam rangka mempertahankan capaian tersebut antara lain: a. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas peternakan maupun perikanan; b. Pemberian bantuan pakan kepada kelompok budidaya perikanan maupun peternakan; c. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan bagi Masyarakat; d. Pengembangan balai benih ikan di Kecamatan Bangkumat, Pesisir Tengah, Lemong, Pesisir Selatan, dan Karya Penggawa; e. Penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif; dan f. Penguatan kelompok masyarakat dan nelayan dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan.
		2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Adapun Skenario atau langkah-langkah upaya tambahan untuk mencapai target sebesar 7,5% di tahun 2045 pada indikator tersebut antara lain: a. Pemberdayaan seluruh potensi unggulan daerah yang mampu menciptakan pasar sendiri hingga taraf nasional; b. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung; c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dan peternakan; d. Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin; dan

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				e. Memberikan bantuan rumah swadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Dalam mewujudkan target sesuai dengan Skenario yaitu di angka 80% pada tahun 2045 untuk indikator Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin perlu dilakukan upaya-upaya tambahan sebagai berikut: a. Optimalisasi pelayanan kesehatan dan KB; b. Optimalisasi penyaluran alkon kepada masyarakat; dan c. Peningkatan pendidikan moralitas kepada pelajar tentang bahaya seks bebas. Dengan target sesuai Skenario tahun 2045 di angka 94,13% perlu langkah-langkah dan upaya tambahan yang harus dilakukan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat antara lain: a. Optimalisasi taraf pendidikan dan wajib belajar 9 tahun; b. Program bantuan dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu; dan c. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan.
		3	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Untuk mencapai target terhadap indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target padaTPB Prioritas ketiga perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: a. Memberikan bantuan rumah swadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; b. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; c. Menyediakan IPAL Komunal di masing-masing kecamatan; d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				sumbu daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan; e. Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air bersih; f. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih, sanitasi, dan permukiman layak huni; g. Pemeliharaan catchment area di sekitar DAS; dan h. Optimalisasi pengelolaan sampah di sekitar area sungai.
2	Ekonomi	1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada Tahun 2045 untuk mencapai angka sesuai dengan Skenario perlu dilakukan upaya-upaya tambahan terhadap indikator Laju pertumbuhan PDRB Perkapita sebagai berikut: a. Meningkatkan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah; b. Meningkatkan pengembangan teknologi industri khususnya teknologi hasil pertanian/perkebunan, dan c. Peningkatan penataan sistem distribusi daerah yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian berusaha, dan perlindungan konsumen.
3	Lingkungan	1	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Untuk dapat mempertahankan capaian maupun mencapai target pada seluruh indikator tersebut upaya atau Skenario yang akan dilakukan antara lain: a. Pengembangan infrastruktur dalam konsep pembangunan inklusif dan penerapan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi bencana; b. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; c. Pembangunan jaringan jalan, jembatan, dan drainase; d. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Pesisir Barat; e. Pengembangan Bandara dan pelabuhan nelayan di Kabupaten Pesisir Barat; f. Pengembangan serta bantuan modal kepada UMKM; g. Kerjasama penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM;

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				h. Pembangunan TPS3R di masing masing Kecamatan; i. Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Bank Sampah di setiap Kecamatan; dan j. Peningkatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
		2	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Dalam hal mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya sebagaimana tujuan pada TPB 13, upaya-upaya tambahan atau Skenario yang akan dilakukan berupa: a. Peningkatan keandalan prasarana, sarana dan utilitas pendukung penanggulangan bencana dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, tepat guna, dan tepat sasaran serta Desa/Pekon Tangguh Bencana; b. Peningkatan penganggaran penanggulangan bencana; c. Penyusunan dokumen Masterplan strategi penanggulangan bencana; d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana untuk Tim SAR dan TRC; e. Pengembangan infrastruktur dalam konsep pembangunan inklusif dan penerapan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi bencana; f. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyelamatan dini; dan g. Meningkatkan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

1.3.6. Hubungan antara RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2016-2030

Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030. Program ini diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs bersifat komprehensif dan transformatif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan ke-17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan

Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendaknya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sesuai dengan kewenangan daerah) merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.
2. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.
3. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
5. Penggunaan institusi dan tata kelola (good governance) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerangka hukum yang adil dan merata;
- c. Pelayanan public yang responsif;
- d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.
- e. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- f. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;
- g. Sumber Daya Publik dikelola secara efektif dan efisien.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Substansi dalam dokumen RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, pentahapan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung serta RTRW. Seluruh uraian dalam RPJPD tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 penyusunannya dimaksudkan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan 4 (empat) RPJMD, yaitu: (a) RPJMD Tahun 2025-2029, (b) RPJMD Tahun 2030-2034, (c) RPJMD Tahun 2035-2039, dan (d) RPJMD Tahun 2040-2045;
2. Menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang di daerah;

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 adalah:

1. Memberikan ruang partisipasi kepada seluruh pelaku pembangunan untuk berkontribusi bagi daerah;
2. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Menjabarkan visi dan misi daerah yang lebih terukur ke dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2045 sebagai pedoman bagi pelaku pembangunan yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan
4. Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah melalui penetapan sasaran pokok Kabupaten Pesisir Barat dalam jangka waktu 20 tahun ke depan;
5. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyediakan stolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan struktur penyajian dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisis terhadap indikator yang paling dapat menampilkan dan menjelaskan kondisi dan perkembangan daya saing daerah, berupa kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

2.3 Aspek Daya Saing

Analisis terhadap indikator yang paling dapat menampilkan dan menjelaskan kondisi dan perkembangan daya saing daerah, berupa ekonomi, daya saing sumber daya manusia, infrastruktur dan iklim investasi.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Analisis terhadap kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan pada evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 yang menjadi salah satu dasar untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Pada sub bab ini menyajikan gambaran dinamika kependudukan daerah yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan untuk dilayani dan juga dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah.

Analisis dilakukan pada proyeksi kependudukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dan kaitannya dengan kebutuhan akan peningkatan jumlah penduduk terhadap ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum daerah.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan proyek strategis nasional yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah serta arah kebijakan

pembangunan wilayah sarana dan prasarana daerah yang terangkum dalam RPJPN.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menyajikan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan. Selanjutnya permasalahan pembangunan tersebut menjadi salah satu komponen dalam perumusan isu-isu strategis daerah hingga tahun 2045.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka panjang.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau yang dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Permasalahan yang disajikan merujuk pada hasil identifikasi dan rumusan permasalahan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan.

3.2 Isu Strategis

Menjelaskan Isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang berasal dari lingkup global, kebijakan nasional maupun regional atau daerah. Isu-isu strategis yang dituangkan dalam dokumen dihasilkan dalam tahap perumusan. Hal terpenting yang adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat, atau berpengaruh dimasa datang terhadap daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bagian bab ini menyajikan visi dan misi daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045

4.1 Visi

Memberikan deskripsi tentang visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan isu strategis. Visi RPJPD menjelaskan tentang kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, pada tahun 2045

4.2 Misi

Mendeskripsikan mengenai upaya-upaya pokok yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan hingga tahun 2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan disertai indikator dan target pencapaian yang terukur kedalam tahapan pembangunan sesuai dengan periodisasi RPJMD.

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Menguraikan tentang koridor arahan yang menjelaskan keterkaitan antara Misi dengan sasaran pokok, yang diorientasikan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah. Arah kebijakan tersebut melekat pada empat tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD yang merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang RPJPD.

5.2 Sasaran Pokok

Berisi pernyataan ringkas yang merepresentasikan keadaan yang diharapkan pada periode perencanaan jangka panjang, dapat dikuantifikasi dan tercermin menjadi rumusan indikator yang spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

BAB VI PENUTUP

Dalam bagian ini diuraikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada masa transisi dan kaidah pelaksanaan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, guna mewujudkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

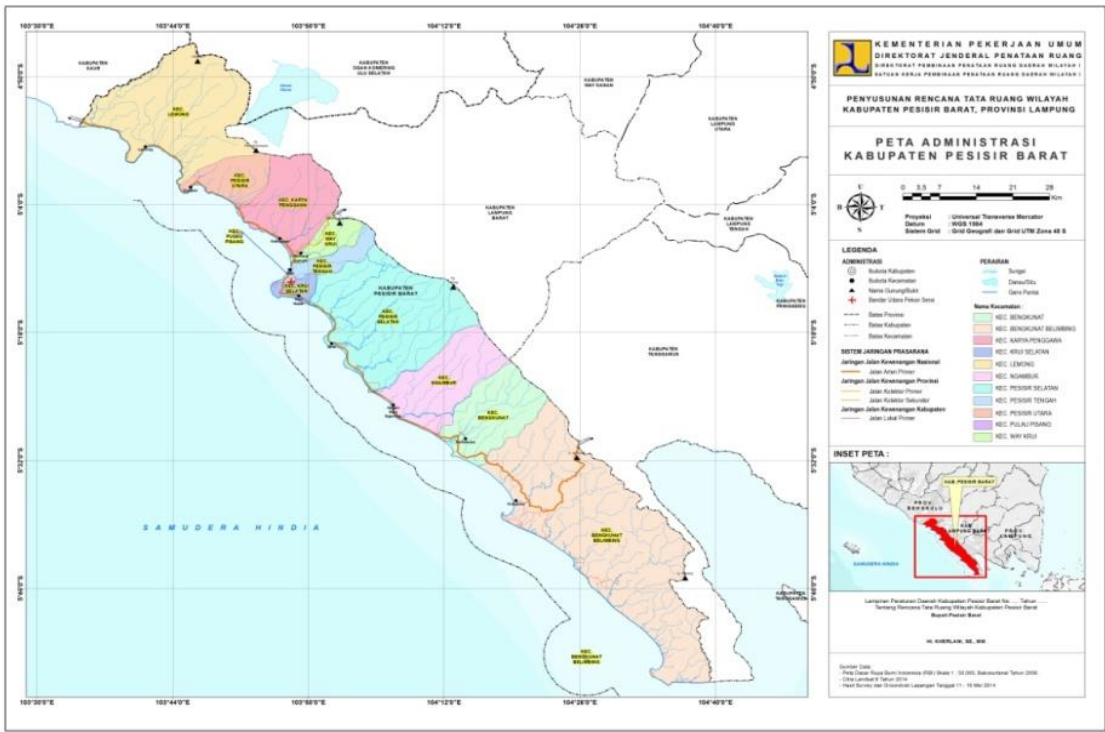
Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang berada di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat :4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104°, 50', 0" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.939,598 Km² (data berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2022) atau 11,21% dari luas wilayah Provinsi Lampung, serta memiliki garis pantai 221,5 Km (daratan dan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km (*berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesai, 2017*).

Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 kelurahan,

dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bangkumat dengan luas 943,70 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km².

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Luas(Ha)
1	Pesisir Selatan	45.204
2	Pesisir Tengah	13.194
3	Pesisir Utara	13.260
4	Karya Penggawa	21.053
5	Lemong	43.733
6	Ngaras	23.120
7	Ngambur	33.182
8	Bangkumat	94.257
9	Way Krui	3.657
10	Krui Selatan	3.111
11	Pulau Pisang	148

Sumber : Bappelitbangda, 2024

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi daerah, Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut);
2. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut);
3. Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut). Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu diantaranya Gunung *Pugung* (1.964 m). Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan pemukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kolektor kontur tajam.

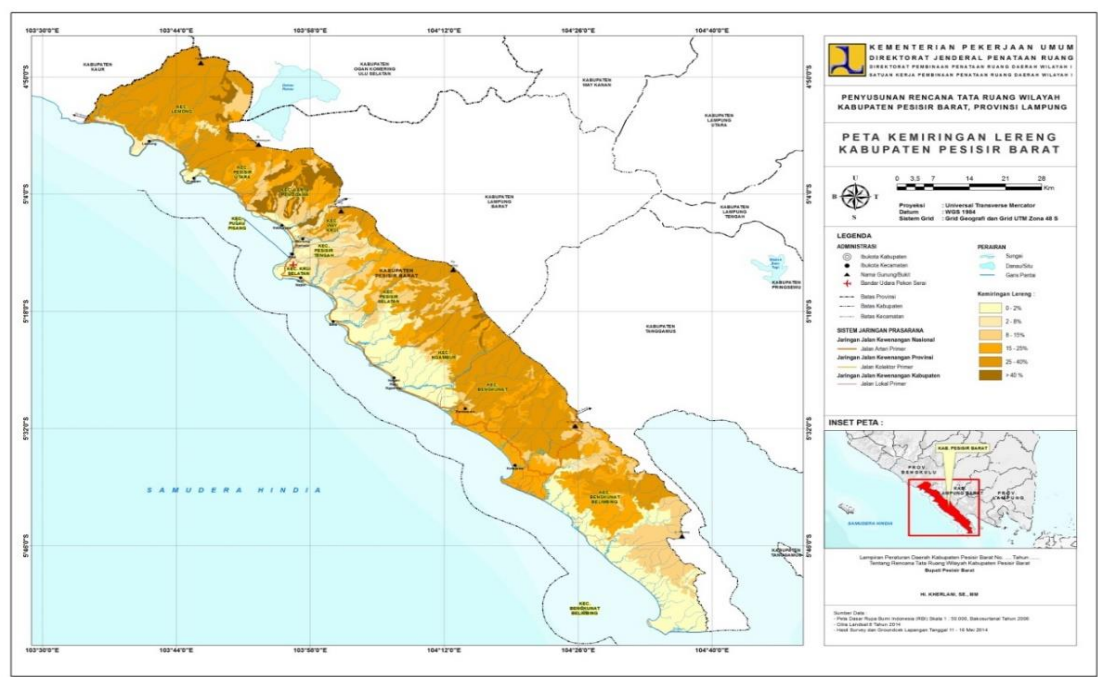
Secara umum kemiringan lereng bervariasi dari datar sampai sangat terjal. Sebagian besar wilayah Pesisir Barat berlereng miring sampai sangat terjal sebesar 70 % dari seluruh luasan wilayah Pesisir Barat. Wilayah ini memanjang dari utara ke selatan di sepanjang Patahan Semangka. Wilayah terjal sampai sangat terjal dengan kemiringan 25% – 40% dan >40% terdapat di Kecamatan Lemong (Pekon Lemong, Malaya, Bandar Pugung, Pagar Dalam, Hutan, Balam), sebagian besar wilayah Kecamatan Karya Penggawa, dan Kecamatan Ngaras (Pekon Marang, Biha, Mon, Gedung Cahya, Kota Baru). Wilayah dengan kemiringan lahan antara datar (0 – 0,2%) sampai landai (0,2 – 2%) terdapat di pantai barat Kecamatan Pesisir Selatan dan Ngaras.

Secara fisiografis daerah Pesisir Barat dibedakan atas 3 (tiga) bagian yakni daerah pesisir di bagian barat dengan kemiringan 0 sampai dengan 15 persen, daerah pegunungan yang merupakan daerah Bagian Tengah dengan kemiringan 15 sampai dengan atau lebih dari 40 persen, daerah bergelombang dengan kemiringan lahan 2 sampai 40 persen. Ketinggian wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu:

- a. Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 meter dpl
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 200 - 1000 meter dpl,
- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 meter dpl

Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan pada umumnya mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 500 meter dpl. Bentuk bentang alam sepanjang pesisir barat datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar antara 3 – 5 persen. Di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Barat Barat terdapat gunung-gunung dan bukit.

Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.2. Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Tinggi (m)	Letak
1	Gunung Pugung	1.964	Pesisir Utara

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Kecamatan tertinggi adalah Way Krui dengan ketinggian 39 mdpl dan terendah adalah Karya Penggawa dengan data -0,28 mdpl. Sementara untuk Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten Krui yang berada di Kecamatan Pesisir

Tengah adalah Kecamatan Bangkumat di sisi selatan dengan jarak 64 Km dan Kecamatan Lemong di sisi utara dengan jarak tempuh 54 km.

Tabel 2.3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat

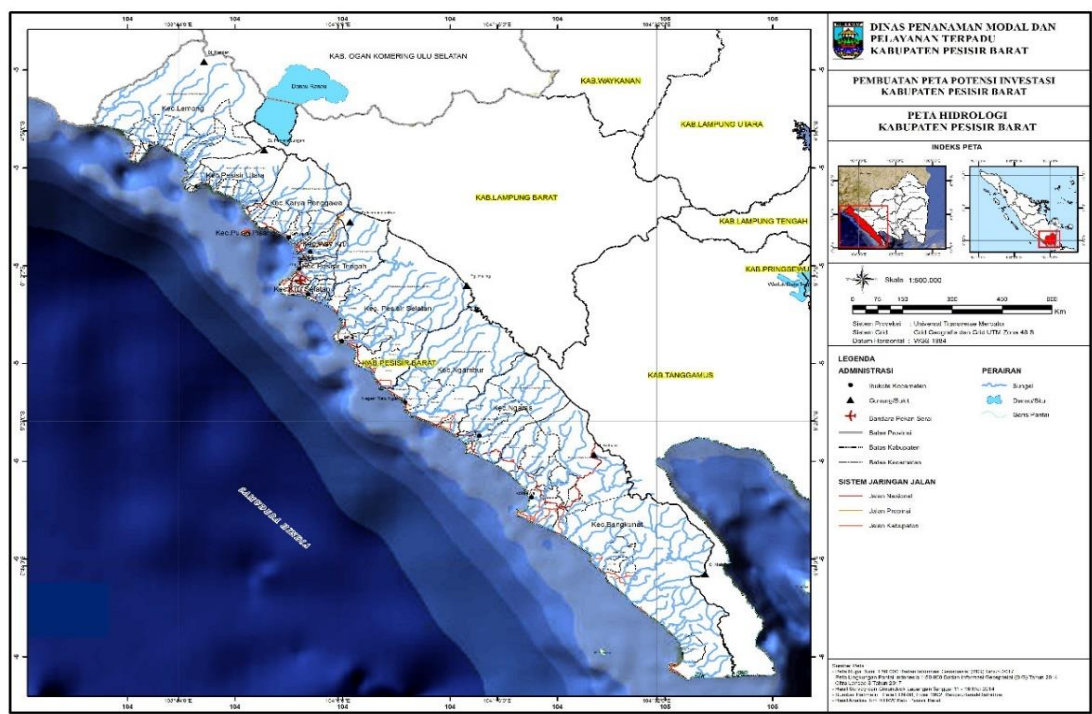
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Pesisir Selatan	7	25,00
2	Pesisir Tengah	1	1,00
3	Pesisir Utara	4	28,50
4	Karya Penggawa	-0,28	10,00
5	Lemong	58	54,00
6	Ngaras	5	64,20
7	Ngambur	11	46,50
8	Bangkumat	13	64,00
9	Way Krui	39	10,00
10	Krui Selatan	14	8,50
11	Pulau Pisang	0,1	15,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab, 2023

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander). Sungai – sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut.

Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Pada bagian timur Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Besai, Way Seputih dan sebagainya. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (*sediment load*) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) praktis daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (*run off*) makin besar, sungai-sungai yang mengalir ke sebelah timur menjadi terganggu kestabilannya. Umumnya sungai-sungai yang mengalir ke sebelah barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora penutup tanah dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai sumber mata air.

Tabel 2.4. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama DAS
1	Lemong	1. DAS Selayan; 2. DAS Mengkudu; 3. DAS Halami; 4. DAS Simpang Balak; 5. DAS Amaisano; 6. DAS Atau; 7. DAS Walur.
2	Pesisir Utara	1. DAS Tanjung Alur; 2. DAS Bayuk; 3. DAS Balam; 4. DAS Batu Lawang; 5. DAS Nata; 6. DAS Gedau;

No	Kecamatan	Nama DAS
		7. DAS Way Kendaway; 8. DAS Way Pemancar.
3	Karya Penggawa	1. DAS Tembakak; 2. DAS Kebuduk; 3. DAS Kebuduk Tunggal; 4. DAS Karwi; 5. DAS Nukak; 6. DAS La Ay; 7. DAS Hanuan.
4	Way Krui	1. DAS Way Krui; 2. DAS Toulunik; 3. DAS Way Ngison,
5	Pesisir Tengah	1. DAS Mahnai; 2. DAS Way Batu; 3. DAS Way Tuwok.
6	Pesisir Selatan	1. DAS Tanjung Jati; 2. DAS Biha; 3. DAS Way Tenumbang; 4. DAS Marang.
7	Ngambur	1. DAS Ngambur Bunak; 2. DAS Temuli; 3. DAS Sumber Agung; 4. DAS Ngambur.
8	Ngaras	1. DAS Ngaras; 2. DAS Surabalak; 3. DAS Titan; 4. DAS Titan Kanan.
9	Bangkunat	1. DAS Bambang; 2. DAS Ceringin; 3. DAS Heni. 4. DAS Pemerihan; 5. DAS Cangup; 6. DAS Babuta; 7. DAS Napaliut; 8. DAS Manangakiri; 9. DAS Betung; 10. DAS Nipah; 11. DAS Paya; 12. DAS Panagon Hilir; 13. DAS Pariago; 14. DAS Kawat Kiri; 15. DAS Kawat Kecil; 16. DAS Haru; 17. DAS Belimbing; 18. DAS Sleman; 19. DAS Balak; 20. DAS Kejadian; 21. DAS Tirompedaka; 22. DAS Asahan; 23. DAS Cang; 24. DAS Kaur Gading; 25. DAS Muaratanco; 26. DAS Belambang; 27. DAS Way Pintau; 28. DAS Tampang.

Sumber : Dinas PU dan PR (data diolah), 2023

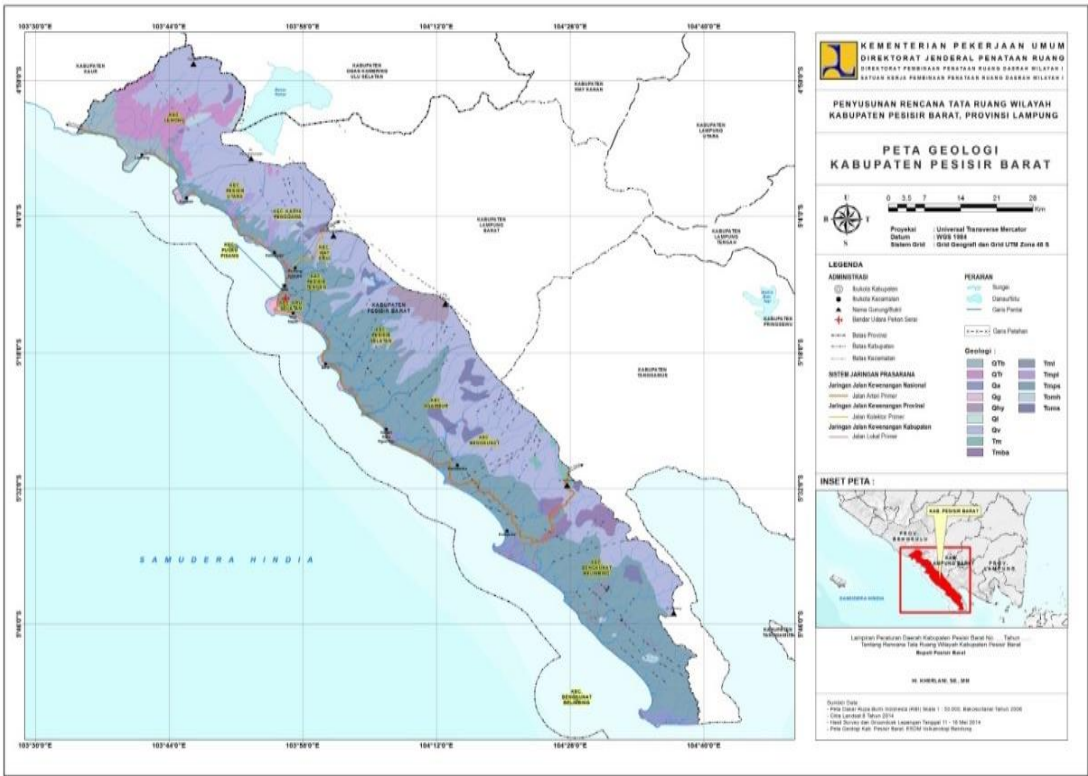
2.1.1.4. Kondisi Geologi

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Pesisir Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit batu gamping, metamorf, tufa Lampung, dan alluvium. Formasi tufa masam dari debu gunung api di sekitar Bukit Barisan. Sedangkan endapan gunung api menutupi sebagian besar wilayah dan kadang-kadang dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1:250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989) dalam Bakosurtanal (2004), Pesisir Barat terdiri dari batuan Vulkan Tua (Old Quarternary Young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, dan Batuan Intrusive. Litologi yang dominan adalah jenis vulkanik, seperti Andesit – Basaltik. Jenis batuan ini menyebar hampir di semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Karya Penggawa yang mempunyai jenis batuan gamping. Batuan sedimen (alluvium) menyebar di sepanjang pantai Barat, yaitu di kaki lereng Bukit Barisan.

Sedangkan berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (Old Quarternary Young), Formasi simpang aur, formasi ranau, formasi bal, atuan intrusive sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:

- 1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Termasuk Krui dan Bintuhan.
- 2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Tabel 2.5. Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
1	Januari	22.0	27.8	99.99	56.0	82.6	100
2	Februari	19.4	28.5	99.99	55.0	81.3	98.0
3	Maret	22.2	29.1	99.99	56.0	79.5	100
4	April	22.2	30.0	99.99	56.0	78.2	98.0
5	Mei	21.6	30.3	99.99	58.0	80.2	98.0
6	Juni	21.6	29.7	99.99	58.0	79.4	100
7	Juli	19.8	29.8	99.99	51.0	75.9	98.0
8	Agustus	22.0	29.6	99.99	53.0	77.9	100
9	September	20.8	29.3	99.99	56.0	79.8	100
10	Oktober	22.0	30.5	99.99	51.0	75.7	100
11	November	18.4	29.2	99.99	59.0	81.3	100
12	Desember	22.6	28.6	99.99	58.0	83.9	100

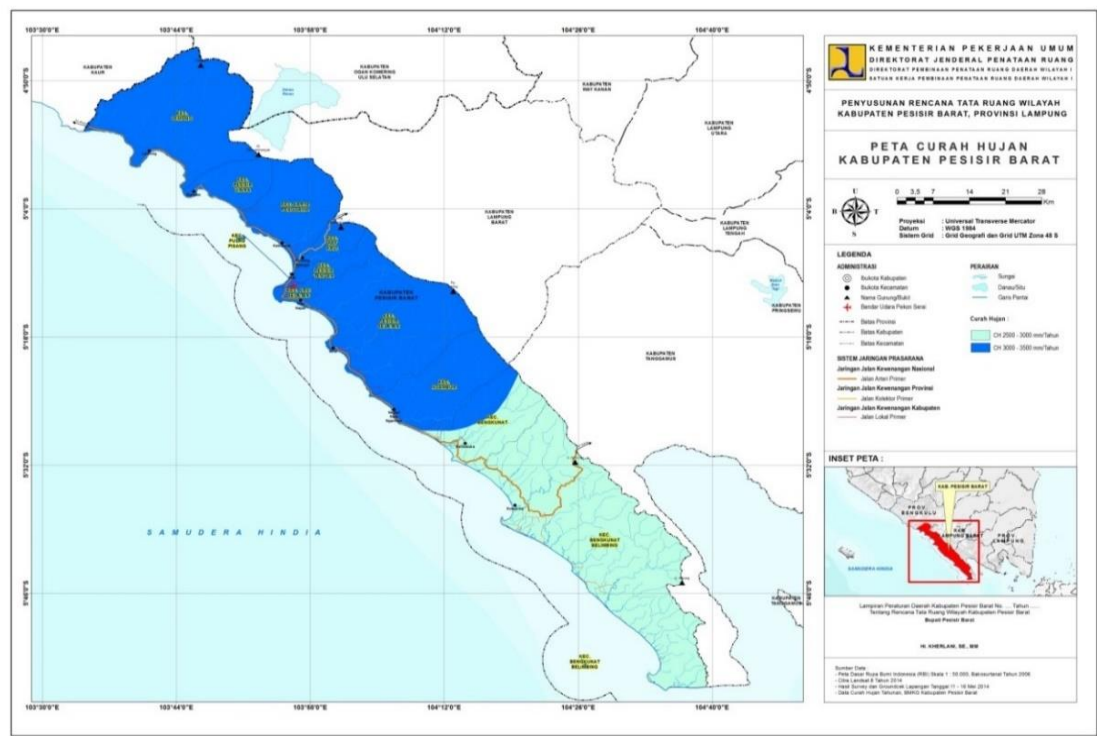
Sumber : BPS Pesisir Barat, 2021

Secara umum Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan 2 (dua) angin/musim setiap tahunnya. Pada bulan November sampai dengan bulan Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut, bulan Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 70 km/hari. Temperatur udara maksimum 33°C dan temperatur minimum 22°C. Rata-rata kelembaban udara sekitar 80-88 persen, akan semakin tinggi pada daerah yang lebih rendah.

Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500–3.500 milimeter per tahun atau 140–221 milimeter per bulan. Tinggi curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas:

- a. Curah hujan antara 2500 – 3000 mm per tahun
- b. Curah hujan antara 3000 – 3500 mm per tahun

Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.6. Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	282.9	22	20.4
2	Februari	280.5	19	37.9
3	Maret	439.3	22	48.1
4	April	230.2	7	49.5
5	Mei	138.8	13	50.6
6	Juni	65.1	9	49.2
7	Juli	14.3	6	49.0
8	Agustus	50.8	7	47.1
9	September	156.8	14	43.4
10	Oktober	69.6	13	49.2
11	November	236.6	18	30.0
12	Desember	351.9	20	53.1

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

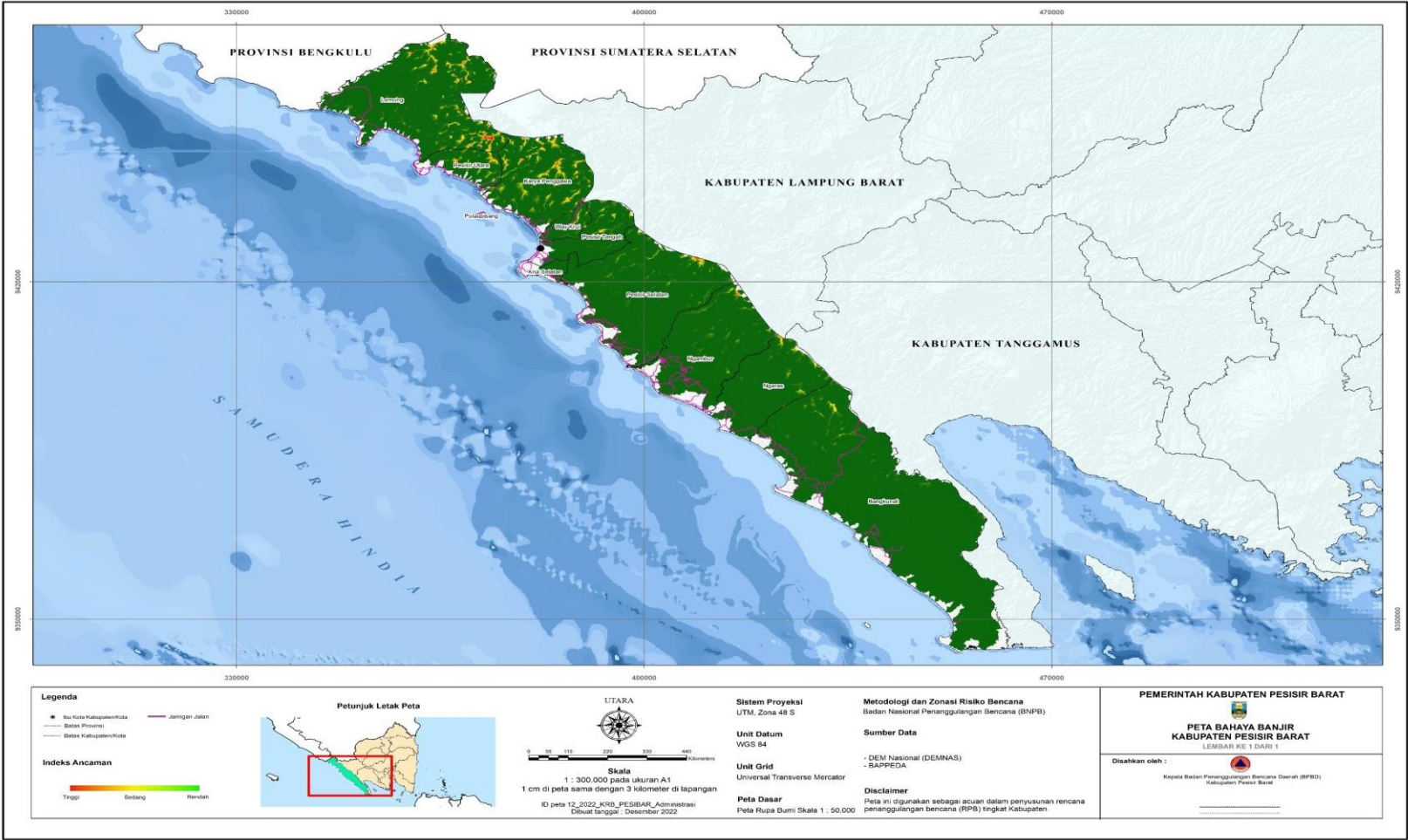
2.1.1.6. Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Tondobala, 2012). Rawan bencana yang dimaksud adalah daerah yang memiliki kemungkinan suatu bahaya akan terjadi, bahaya tersebut akibat dari kondisi geografis, geologis, demografis ataupun karena ulah manusia. Contoh daerah rawan bencana adalah

seperti kawasan rawan gempa, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang ekstrim, dan lain sebagainya.

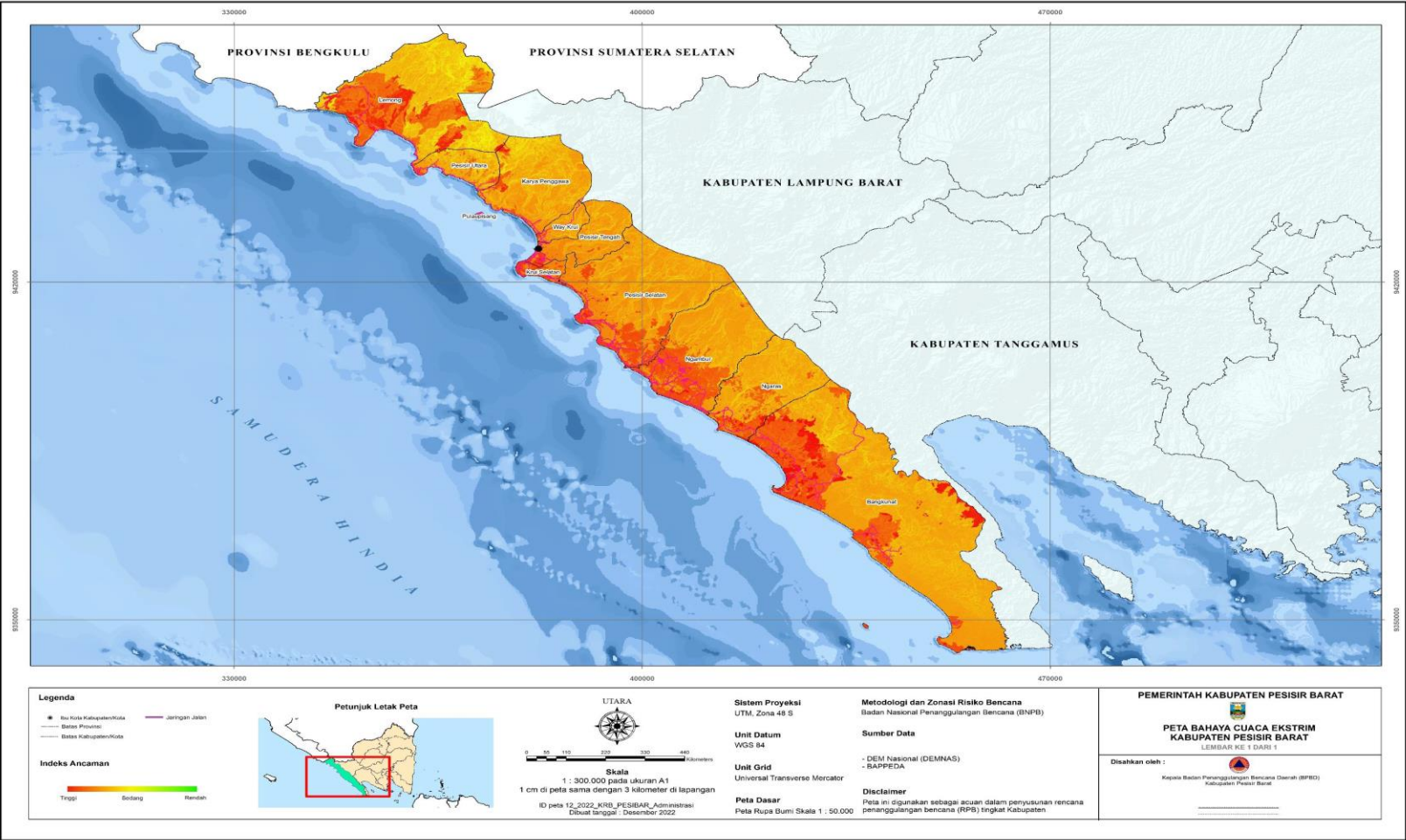
Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan **indeks risiko bencana** tertinggi di Provinsi Lampung dengan data pada tahun 2023 sebesar 189,70 dengan kelas risiko **“tinggi”**. Berikut peta untuk masing-masing resiko bencana:

Gambar 2.6. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Barat



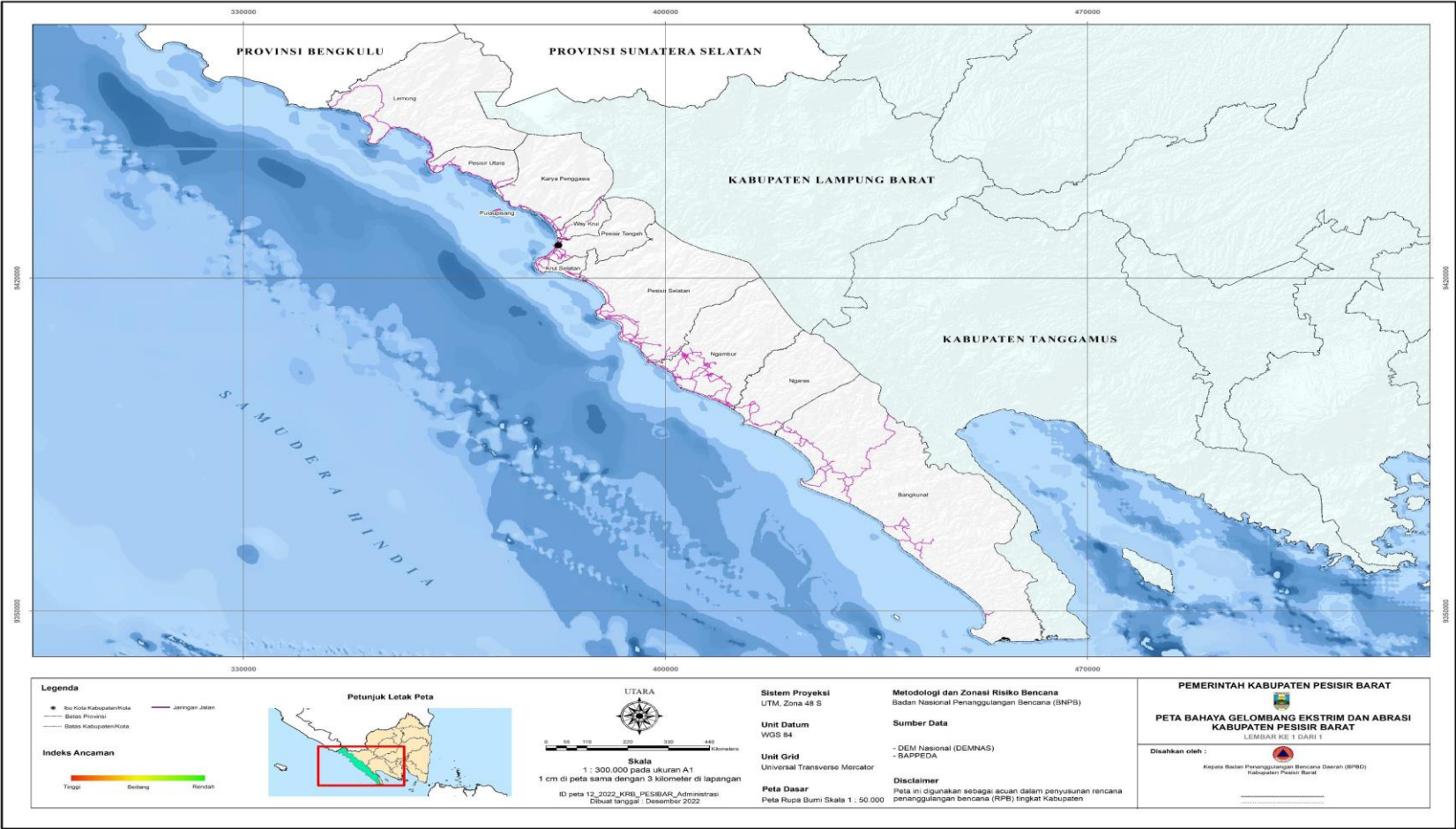
Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Gambar 2.7. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Pesisir Barat



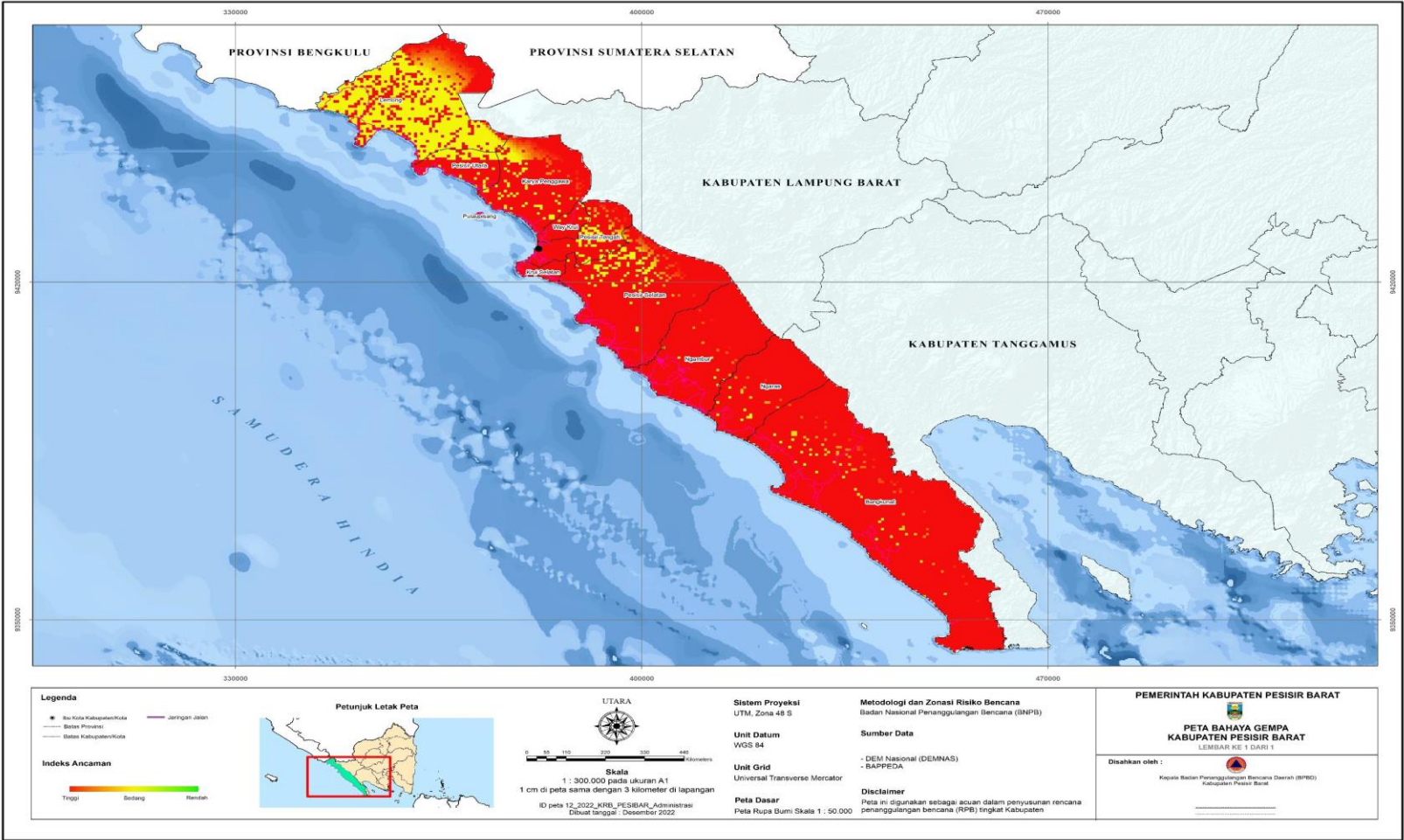
Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Gambar 2.8.Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Pesisir Barat



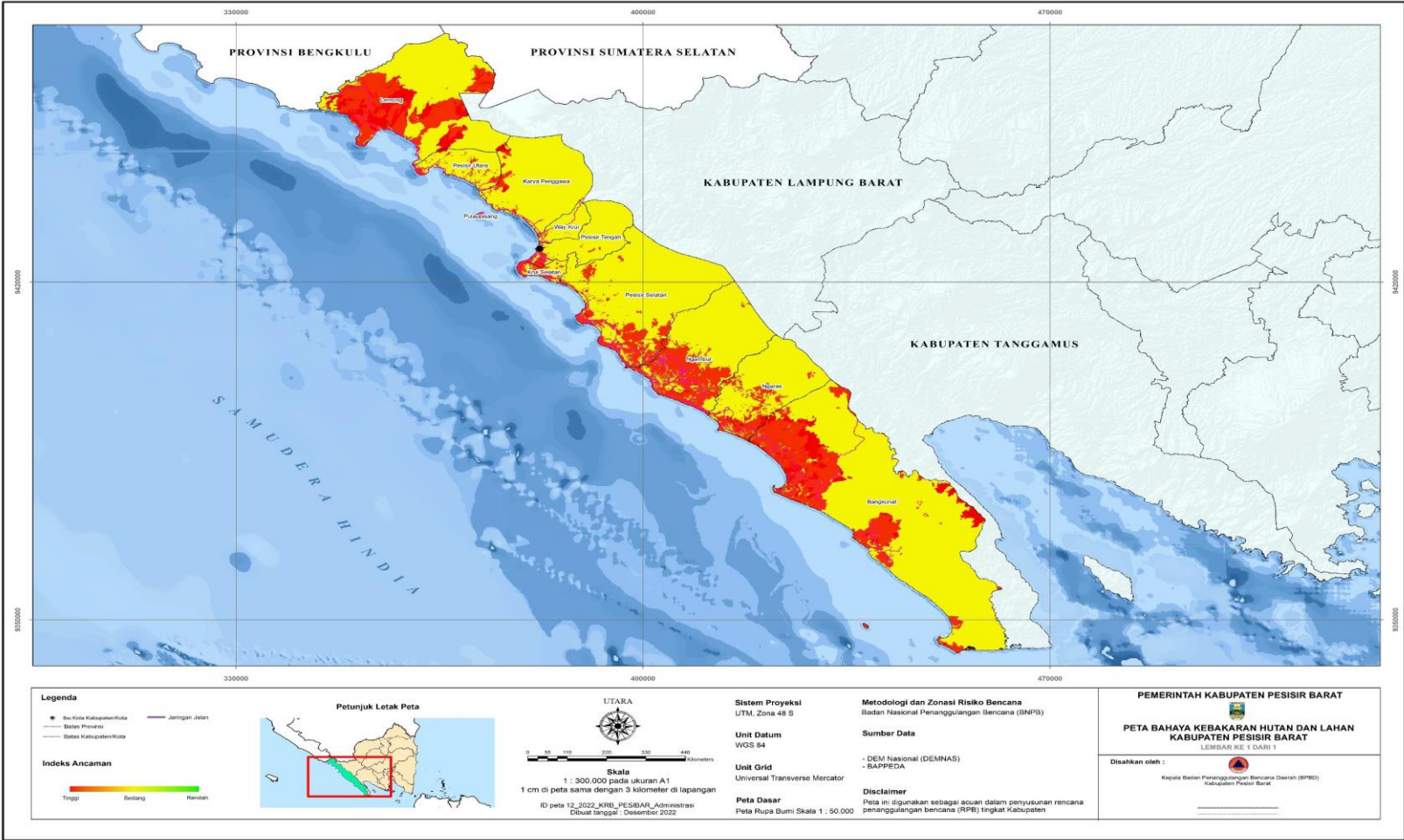
Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Gambar 2.9. Peta Bahaya Gempa Kabupaten Pesisir Barat



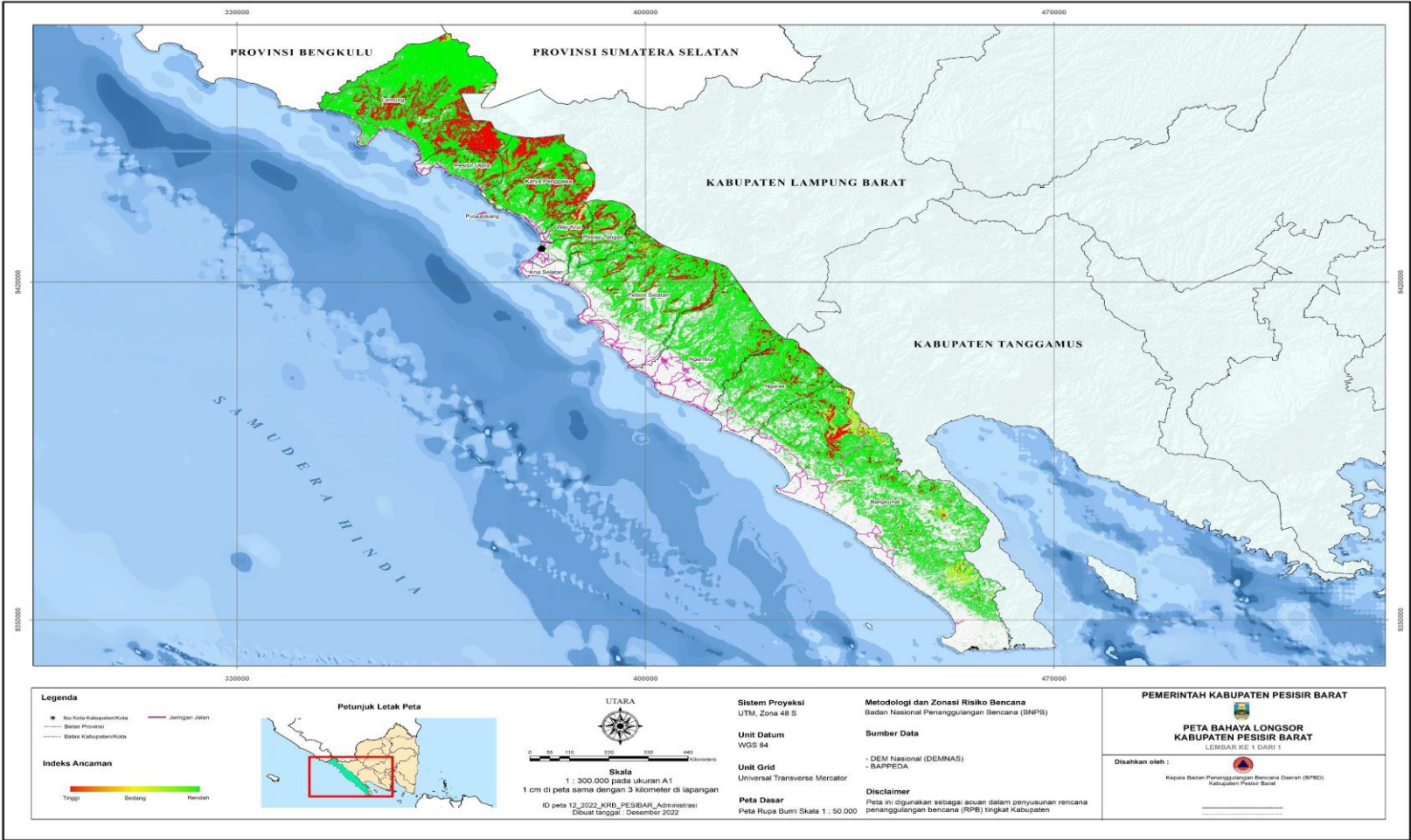
Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Gambar 2.10. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Gambar 2.11. Peta Bahaya Longsor Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022

Berdasarkan pada data tahun 2022, kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pesisir Barat hampir semuanya masih bersifat lokal/kecamatan dan/atau maksimal kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang telah lalu, dimana daerah-daerah yang terkena bencana sifatnya kecil (lokal) dalam lingkup desa/pekon hingga maksimal beberapa desa/pekon atau kecamatan sebab tidak sampai mengakibatkan adanya evakuasi penduduk secara masif. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui dinas/instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) secara umum masih mampu untuk menangani bencana-bencana dimaksud.

Pada tahun 2022 setidaknya telah terjadi 70 kasus bencana, yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
1	14 Januari 2022, Gempa Bumi	Pusat gempa di sebelah barat daya Kota Pandeglang, Banten	Terjadi gempa bumi dengan skala 6,6 SR, berpusat di laut arah barat daya Jota Pandeglang, Banten yang turut drasakan getarannya di sebagian wilayah Pesisir Barat
2	5 Februari 2022, Banjir	Pekon Sukarame, Tenumbang, Kec. Pesisir Selatan	Terjadi kejadian banjir luapan di titik wilayah pekon - pekon terdampak. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini hanya saja rumah tergenang.
3	5 Februari 2022, Tanah Longsor	KM 20 Jalan lintas Liwa-Krui	Terjadi kejadian tanah longsor yang menyebabkan longsoran menutupi badan jalan dengan ketinggian 3 meter sepanjang 10 meter.
4	6 Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan lintas barat sedayu bangkumat	Terjadi kejadian pohon tumbang di wilayah Jalur Sedayu – Bangkumat yang menyebabkan lumpuh total alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan dan evakuasi badan jalan
5	7, Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Way Sindi Asahan, Karya Penggawa	Terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat.
6	17 Februari 2022, Kebakaran	Pekon Negeri Ratu Ngambur, Ngambur	Terjadi kebakaran 1 unit rumah atas nama Bapak Murzaidi
7	22 Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan lintas Liwa – Krui	Terjadi kejadian pohon tumbang di jalur lintas Liwa Krui yang menyebabkan terganggunya alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan badan jalan.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
8	28 Februari 2022, Kebakaran	Pekon Gedung Cahaya Kuningan, Ngambur	Terjadi kejadian kebakaran 2 unit rumah a.n Misnan dan Katini dengan total kerugian mencapai 90 jt
9	20 Maret 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Marang, Pesisir Selatan	Terjadi peristiwa kapal nelayan hanyut di tengah laut akibat mati mesin. Petugas BPBD bersama dengan pihak terkait melakukan penyelamatan.
10	20 Maret 2022, Cuaca Ekstrim	Km 9 Jalur Liwa – Krui	Terjadi kejadian pohon tumbang diwilayah Jalur Liwa – Krui yang menyebabkan lumpuh total alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan dan evakuasi badan jalan hingga akhirnya jalan kembali normal.
11	10 April 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Way Batang, Lemong	Terjadi peristiwa 1 korban tenggelam di laut dan meninggal dunia
12	4 Mei 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Walur, Pesisir Utara	Terjadi peristiwa 2 korban tenggelam di pantai benawang pekon walur kecamatan pesisir utara dan meninggal dunia
13	26 Mei 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Bangkunat, Muara Tamiyang	Terjadi peristiwa 1 korban terseret arus ombak dan tenggelam, diketemukan mengapung meninggal dunia
14	25 Juni 2022, Cuaca Ekstrim	Pal 6 jalur liwa krui	Terjadi peristiwa pohon tumbang mengakibatkan arus lalu lintas sempat terhenti. Petugas BPBD melakukan pembersihan
15	29 Juni 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon waysindi, karya penggawa	Terjadi peristiwa pohon tumbang mengakibatkan arus lalu lintas sempat terhenti. Petugas BPBD melakukan pembersihan
16	6 Juli 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Laut Siging, Kec. Bangkunat	Terjadi peristiwa 1 korban tenggelam dan meninggal dunia
17	12 Juli 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Tangamus, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Tangamus, Lampung yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
18	20 Juli 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Seluma, Bengkulu	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Seluma, Bengkulu yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
19	25 Juli 2022, Kebakaran	Dusun Citta Mulya, Pekon Way Haru, Kec, Bangkunat	Terjadi kebakaran 1 unit rumah atas nama Bapak Hendri
20	31 Juli 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa Krui, Pal 9, Dusun 4 Pekon Labuhan Mandi	pohon tumbang akibat angin kencang menimpa kabel listrik PLN di Jalan Lintas Liwa Krui, Pal 9, Dusun 4 Pekon Labuhan Mandi
21	13 Agustus 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 7 Pekon Labuhan Mandi.	Hujan lebat yg terjadi di sekitar Kab. Pesisir Barat khususnya lokasi terdampak pohon tumbang di Jalan Liwa-Krui Pal 7 Pekon Labuhan Mandi menyebabkan Pohon Tumbang. Sempat terjadi macet total disekitar lokasi.
22	23 Agustus 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Kaur, Bengkulu	Terjadi gempabumi dengan skala 6,5 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Kaur, Bengkulu yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
23	24 Agustus 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,0 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
24	29 Agustus 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Dusun 3 Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, Lampung	Hujan tidak kunjung reda di sekitar lokasi menyebabkan terjadi Longsor dan Pohon Tumbang hingga menutup jalan.
25	4 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di 49km Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
26	5 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 4,6 SR, berpusat di 63km Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
27	9 September 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pantai Karang Nyimbor, Pekon Tanjung Setia, Kec. Pesisir Selatan	1 Nelayan sedang mencari ikan terbawa arus pada saat Gelombang Tinggi dan meninggal dunia

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
28	13 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Tangamus, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 4,9 SR, berpusat di 53km Barat Daya Tangamus, Lampung yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
29	15 September 2022, Kebakaran	Pekon Penggawa Lima Ilir, Kec. Way Krui	kebakaran disebabkan konsleting listrik dan menimpa 3 rumah warga atas nama Aprizal, Amrul Haq dan Arifin
30	21 September 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Dusun 3 Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Tanah Longsor bekas Longsoran sebelumnya
31	24 September 2022, Banjir	Pekon Negeri Ratu Ngaras, Pekon Rajabasa, Pekon Bandarjaya, Pekon Mulangmaya, Pekon Pardasuka, Kec. Ngaras	dipicu hujan intensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan banjir yang mengenai 191 Rumah Warga dari 5 Pekon di Kec. Ngaras dengan ketinggian air sekitar 100cm
32	5 Oktober 2022, Banjir	Pekon Walur, Kec. Krui Selatan	Genangan dan Saluran drainase belum memadai, tinggi mencapai 20 cm - 40 cm yang menutupi bahu jalan utama wisata walur mengakibatkan 30 Rumah Warga terendam. Banjir juga menghambat akses jalan wisata.
33	5 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jl. Lintas Barat Km 28 Hutan Kawasan Sedayu, Kec. Bangkumat	Hujan yg melanda dari Malam hingga Dini hari menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan dan menghambat akses jalan.
34	6 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon Padang Dalam, Kec. Ngaras	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
35	6 Oktober 2022, Tanah Longsor	Pal 10 dan Pal 11 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
36	12 Oktober 2022, Banjir	Pekon Sukarame, Tenumbang, Kec. Pesisir Selatan	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Tenumbang hingga menggenangi 20 rumah warga dan bahu jalan, banjir setinggi 100 cm -150 cm
37	12 Oktober 2022, Banjir	Pekon Suka Mulya, Kec. Lemong	Hujan lebat yang terjadi sejak pagi hingga sore menyebabkan banjir dan ambusnya jembatan di pemangku 4 simpang lunak sehingga lumpuhnya aktifitas masyarakat.
38	14 Oktober 2022, Banjir	Pekon Kota Batu, Pekon Negeri Ratu Ngaras, Pekon Rajabasa, Pekon Bandarjaya, Pekon Mulangmaya, Pekon Pardasuka, Kec. Ngaras	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Ngaras diperkirakan ratusan rumah warga tinggi banjir sekitar 100 cm -150 cm
39	14 Oktober 2022, Banjir	Pekon Sukabanjar, Kec. Ngambur	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Ngambur dan diperkirakan puluhan rumah warga dan 1 sekolah tergenang, tinggi banjir sekitar 100-150 cm
40	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Tembakak Way Sindi, Kec. Karya Penggawa	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan debit air Way Tembakak menjadi tinggi dan meluap sehingga terjadi abrasi. 2 Perahu Nelayan, 14 rumah, 1 Masjid, 2 Sekolah, 1 Balai Pekon, 1 Gardu PLN dan 4 Jembatan terdampak.
41	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Laay, Kec. Karya Penggawa	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan debit air Way Laay menjadi tinggi dan meluap sehingga terjadi abrasi sungai dan ambusnya sebagian Jalan Jembatan Way Laay (Ruas Jalan Nasional)

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
42	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Gedau, Kec. Pesisir Utara	Hujan deras dengan durasi lama menyebabkan meluapnya Way Gedau sehingga menyebabkan banjir bandang. Banjir menyebabkan saluran pipa air bersih terputus, saluran irigasi rusak dan menggenang area persawahan.
43	20 Oktober 2022, Banjir	Pekon Baturaja dan Pekon Kerbang Langgar, Kec. Pesisir Utara	Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama mengakibatkan banjir bandang pada sejumlah aliran sungai di Pekon Baturaja dan Pekon Kerbang Langgar. Debit air juga mengikis pondasi jembatan di Pekon Baturaja
44	22 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet.
45	25 Oktober 2022, Tanah Longsor	Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
46	26 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon Seray, Kec. Pesisir Tengah	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan di sekitar jalur wisata pekon walur.
47	26 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
48	27 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Barat KM 23, Kec. Bangkumat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
49	27 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat KM 18, Pekon Pemerihan, Kec. Bangkumat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
50	27 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat KM 20 Kec. Bangkumat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
51	27 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
52	27 Oktober 2022, Banjir	Pekon Padang Raya dan Pekon Balai Kencana, Kec. Krui Selatan	Hujan deras yang tak kunjung reda serta belum memadainya saluran drainase menyebabkan terjadinya Genangan banjir. Beberapa rumah warga, kebun dan sawah terdampak banjir.
53	10 November 2022, Cuaca Ekstrim	Tanjakan Kapur, Jalan Lintas Barat Kota Agung-Krui, Kec. Bangkumat	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan pada pagi hari
54	12 November 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8, Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan pada pagi hari
55	13 November 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8, Pal 9, dan Pal 11 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang di 3 titik di Pekon Labuhan Mandi
56	13 November 2022, Banjir	Pekon Baturaja Kec. Pesisir Utara	Dipicu oleh Hujan dengan Intensitas Tinggi dan Durasi Lama mengakibatkan banjir bandang pada aliran sungai di Way Singarupa Pekon Baturaja. Jembatan Way Singarupa yang sebelumnya pondasinya terkikis oleh abrasi kembali terkikis oleh banjir bandang sehingga sebagian bahu jalan harus ditutupi rambu-rambu lalu lintas. Akses lalu lintas hanya bisa dilewati kendaraan bermotor dan pejalan kaki sedangkan kendaraan R4 dan R6 dilarang melintas.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
57	13 November 2022, Banjir	Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Utara	Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama mengakibatkan banjir bandang pada aliran sungai Way Tenumbang
58	13 November 2022, Banjir	Pekon Penengahan dan Pekon Laay, Kec. Karya Penggawa	Curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama mengakibatkan debit air Way La'ay menjadi tinggi dan meluap hingga terjadi banjir bandang yang berdampak pada kerusakan dan kerugian yang dialami warga.
59			<u>Pekon Penengahan:</u> *kerusakan tanggul daerah aliran sungai sepanjang 125 meter *5 Unit Rumah Warga mengalami Rusak Ringan karena terseret arus banjir <u>Pekon Laay:</u> *Jembatan La'ay terputus dan menghambat akses jalan lalu lintas *7 unit Warung/Kios Warga Hanyut, 3 Unit Rumah Rusak Berat, 3 Unit Rumah Rusak Ringan, 1 Unit Fasilitas Umum (Masjid AL-MUHAJIRIN), dan merendam 60 Rumah Warga serta Sawah milik warga seluas 5 Hektar
60	13 November 2022, Tanah Longsor	Dusun Way Karwi, Pekon Way Sindi Tembakak, Kec. Karya Penggawa	Curah hujan yang deras beserta angin kencang mengakibatkan tebing yang berada di sekitar lokasi kejadian longsor hingga menimbun bahu jalan dan menimpa 1 Unit Rumah Warga. 3 korban tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
61	13 November 2022, Tanah Longsor	Pekon Penengahan, Kec. Lemong	Dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan longsor di yg menutupi akses jalan raya +- 20 meter dan ketinggian longsor tanah 3 meteran. Longsor juga menimpa 1 Unit Rumah dengan kondisi Rusak Berat dan 1 Unit Kendaraan R4 yang sedang melewati
62	13 November 2022, Tanah Longsor	Pekon Malaya, Kec. Lemong	Dipicu intensitas hujan tinggi dengan durasi yang lama mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang menimpa 1 Unit Rumah Warga atas nama Bpk. RADAM yang berada di Pemangku 04 Batu Bulan dengan kondisi Rusak Berat
63	11 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Ilahan Kecamatan Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan 4 Pohon Damar tumbang dan mengakibatkan akses jalan petani menuju ilahan tersendat. Pada pukul 12.00 TRC BPBD berhasil mengevakuasi Pohon
64	11 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa- Krui Pal 6 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 16.00 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 17.00 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan
65	12 Desember 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Penggilingan Marang Pekon Bandar Jaya, Kec. Pesisir Selatan	1 korban nelayan tewas tenggelam akibat perahu terbalik dihantam gelombang pasang. Korban ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi kritis dan segera dibawa ke Puskesmas Biha, namun korban meninggal dunia

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
66	14 Desember 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat Pekon Bambang, Kec. Lemong	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang mengakibatkan tanah longsor serta pohon tumbang yang menutupi akses bahu jalan hingga terjadi macet total selama 3 jam dari jam 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB bisa kembali dilintasi kendaraan umum dan direncanakan besok (15/12/2022) untuk dilanjutkan pembersihan sisa longsor menggunakan Eksapator
67	17 Desember 2022, Gempa Bumi	Barat Daya SUMUR-BANTEN	Terjadi gempa bumi dengan skala 5,2 SR, berpusat di 75Km Barat Daya SUMUR, Banten yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
68	19 Desember 2022, Gempa Bumi	Barat Daya TANGGAMUS-LAMPUNG	Terjadi gempa bumi dengan skala 5,3 SR, berpusat di 47Km Barat Daya TANGGAMUS-LAMPUNG yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
69	22 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 17.45 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 18.20 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan
70	28 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Seluruh Daerah Pesisir Barat	Angin Kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan beberapa kerusakan yang dialami masyarakat hingga koridor yang ada di Kompleks Kantor Bupati pecah dihantam Tenda yang dibawa angin kencang, gelombang laut pun ikut menghantam sebagian rumah/kios/warung masyarakat yg ada di sekitaran pantai

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
71	30 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 9 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 15.20 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 16.00 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan

Sumber : BPBD, 2023

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana terbanyak pada tahun 2022 berada pada Kecamatan Way Krui dengan 19 kejadian bencana. Sementara itu Kecamatan Pulau Pisang tidak ada kejadian bencana. Jumlah terbanyak di Kecamatan Way Krui sangat dipengaruhi dengan kondisi geografis wilayahnya yang terdapat hutan TNBBS serta DAS besar yang berhulu di TNBSS. Bahwa sering terjadi tanah longsor dan pohon tumbang pada ruas jalan nasional Krui-Liwa yang membelah area TNBBS.

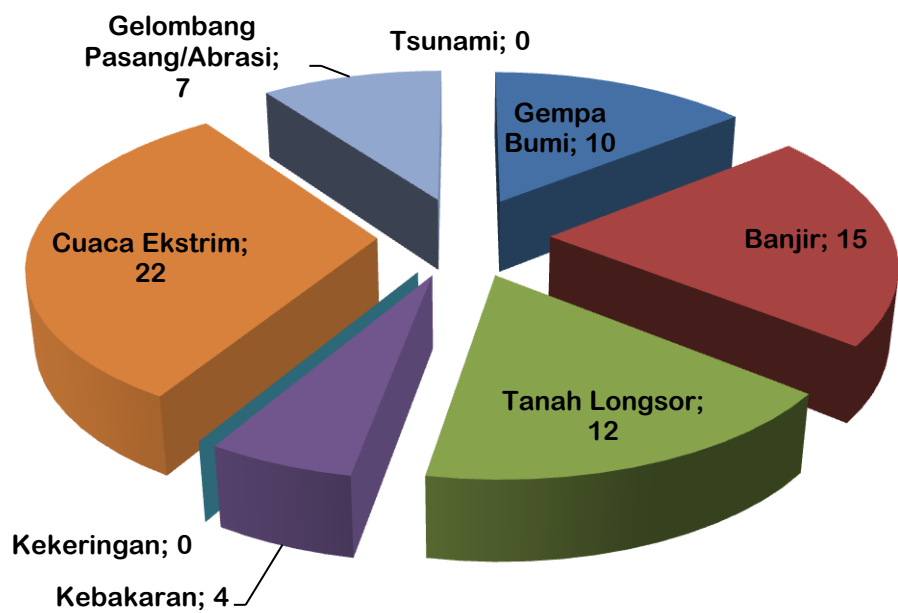
Gambar 2.12. Lokasi Bencana per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : BPBD, 2023

Sementara itu, pada tahun 2022 kejadian bencana terbanyak adalah cuaca ekstrim sebanyak 22 kejadian yang pada akhirnya berujung pada kejadian banjir dan gelombang pasang. Berikut adalah data kejadian bencana pada tahun 2022.

Gambar 2.13. Kejadian Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : BPBD, 2023

Kesiapan suatu daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Harus diakui bahwa jumlah sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat sangat minim, terlebih bila dibandingkan dengan luasan wilayah. Keterbatasan dana merupakan penyebab utama dari minimnya sarana dan prasarana dimaksud. Berikut ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.8. Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sistem Elektronik Peringatan Dini Bencana Gempa dan Tsunami (WRS)	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	4 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 4	2 Unit	1 Unit Truk Kurang Baik; 1 Unit Mobil Rescue Rusak
4	Perahu Karet	3 Unit	2 Unit Baik; 1 Unit Rusak

Sumber : BPBD, 2023

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Ketahanan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar 0,30.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358 Ha, hal ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai Daerah Tangkapan Air (*catchment area*). Sementara itu rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi pada (a) kawasan lindung dan (b) kawasan budidaya.

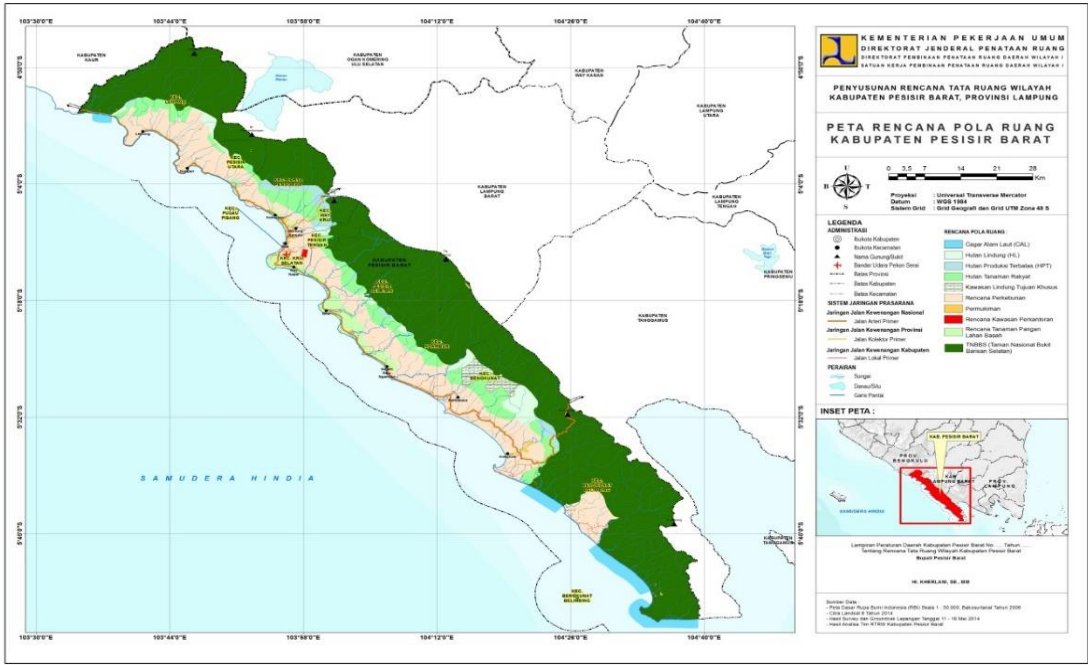
Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung secara garis besar mencakup pada 5 (lima) fungsi perlindungan, sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 9.580 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih 4.803 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 1.389 Ha; Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih 681 Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 775 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 156 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 484 Ha; dan Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 894 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya adalah kawasan resapan air yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 6.030 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih 1.539 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 74Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih 15 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 120 Ha; Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih 1.110 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 26 Ha; dan Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 1.300 Ha.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi : (a) kawasan sempadan pantai; (b) kawasan sempadan sungai; (c) kawasan sekitar danau/waduk; dan (d) kawasan ruang terbuka hijau.
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, terdiri atas: (a) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luasan kurang lebih 186.565 Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; (b) kawasan Cagar Alam Laut dengan luasan kurang lebih 8.878 Ha, terdapat di Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Lemong; (c) cagar budaya terdapat di seluruh Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas (a) Kawasan rawan bencana longsor diantaranya di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; (b) Kawasan rawan bencana tsunami/gelombang pasang air laut ditetapkan di seluruh wilayah pesisir kabupaten; (c) Kawasan rawan bencana banjir diantaranya di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur,

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada sisi terluar Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu memiliki nilai strategis dan wajib untuk terus dikembangkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kabupaten Pesisir Barat membagi pola ruang menjadi 5 (lima) bagian, yaitu (1) kawasan hutan lindung; (2) kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan (5) kawasan rawan bencana alam.

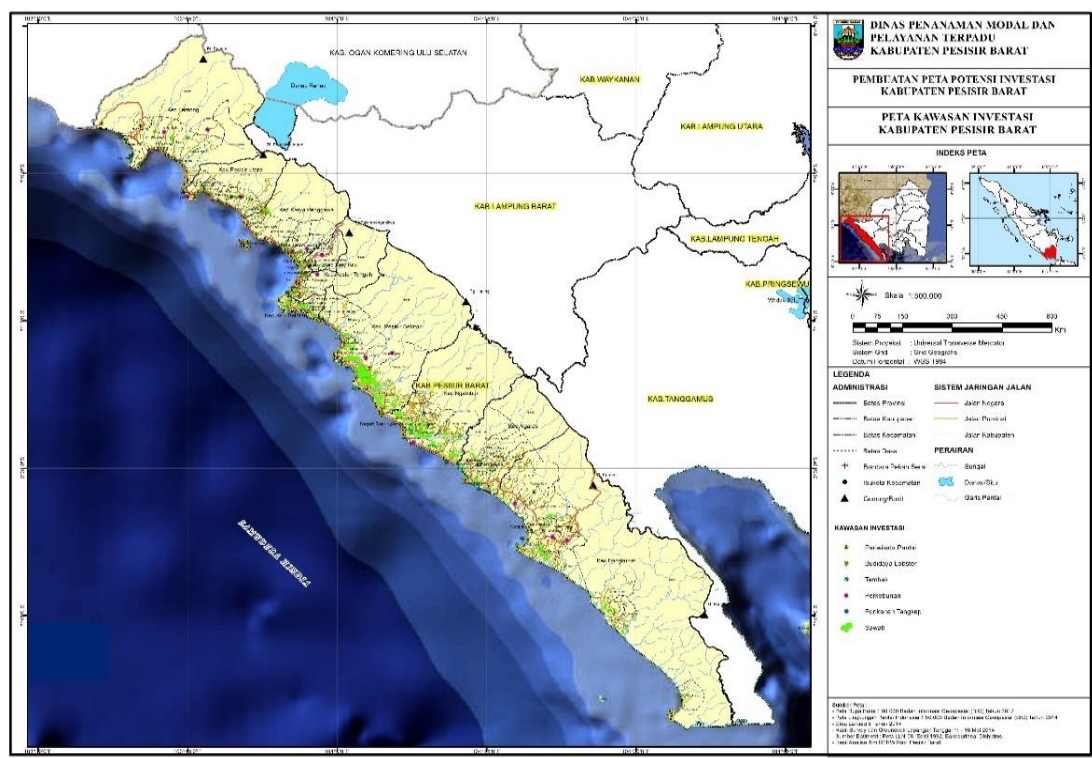
Gambar 2.15. Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Kondisi alam Kabupaten Pesisir Barat secara umum dibatasi oleh kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang membentang dari wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah Utara dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.16. Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.9. Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)	192.575
2	Hutan Lindung Pesisir	9.360
3	Hutan Produksi Terbatas	33.358
Total		235.293

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Selain kawasan lindung berupa hutan terdapat juga kawasan lindung berupa Cagar Alam Laut (CAL) yaitu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Pekon Muara Tambulih (Kecamatan Ngambur), merupakan tempat konservasi penyu langka antara lain Penyu Lekang, Penyu Belimbing, Penyu Sisik dan Penyu Hijau.

Sebagai perwujudan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk tidak merusak kultur dan kontur serta lingkungan yang ada. Pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terarah dan merata di setiap unit wilayah kabupaten pesisir barat sehingga dapat meratakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Rencana pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat direncanakan pada:

1. Arahan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 29.257Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkumat. kawasan dikembangkan

dengan pola kerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil hutan berupa kayu maupun non kayu.

2. Arahan Kawasan Peruntukan Pertanian dengan luasan kurang lebih 57.207Ha, dikembangkan dengan sistem agropolitan dan terpadu serta berkelanjutan, terdiri atas:
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas sawah dan non sawah dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
 - b. Kawasan pertanian hortikultura, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
 - c. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
3. Arahan Kawasan Peruntukan Perikanan, dengan luasan kurang lebih 3.798 Ha dikembangkan dengan pola minapolitan, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi (i) budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) budidaya air laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan (iii) budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Ngaras.
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan meliputi Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
4. Arahan Kawasan Peruntukan Pertambangan, dengan luasan sekitar 20 Ha, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Arahan Kawasan Peruntukan Industri, dengan luasan sekitar 78 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kecamatan Bangkunt dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah di Kabupaten Pesisir Barat.
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, dengan luasan kurang lebih 438 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syekh Aminullah, Kampung Wisata, Makam Tokoh Adat dan Sumur Puteri.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung Bangkumat, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah, Rhino Camp, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung, Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Pantai Lintik, Pantai Walur, Pantai Ilahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai Tembakak, Pantai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyercik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang.
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain: Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas, Kawasan Labuhan Jukung dan Kawasan Tanjung Setia.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman dengan luasan sekitar 5.058 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkumat, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara.
8. Kawasan Peruntukan Lainnya, meliputi :
 - a. Kawasan pertahanan keamanan adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing-masing kecamatan, meliputi (i) Kodim di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) Polres di Kabupaten Pesisir Barat; (iii) Koramil di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat; (iv) Polsek di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana terdiri dari (i) wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan (ii) pulau-pulau kecil meliputi Pulau Pisang dan Pulau Betuah.

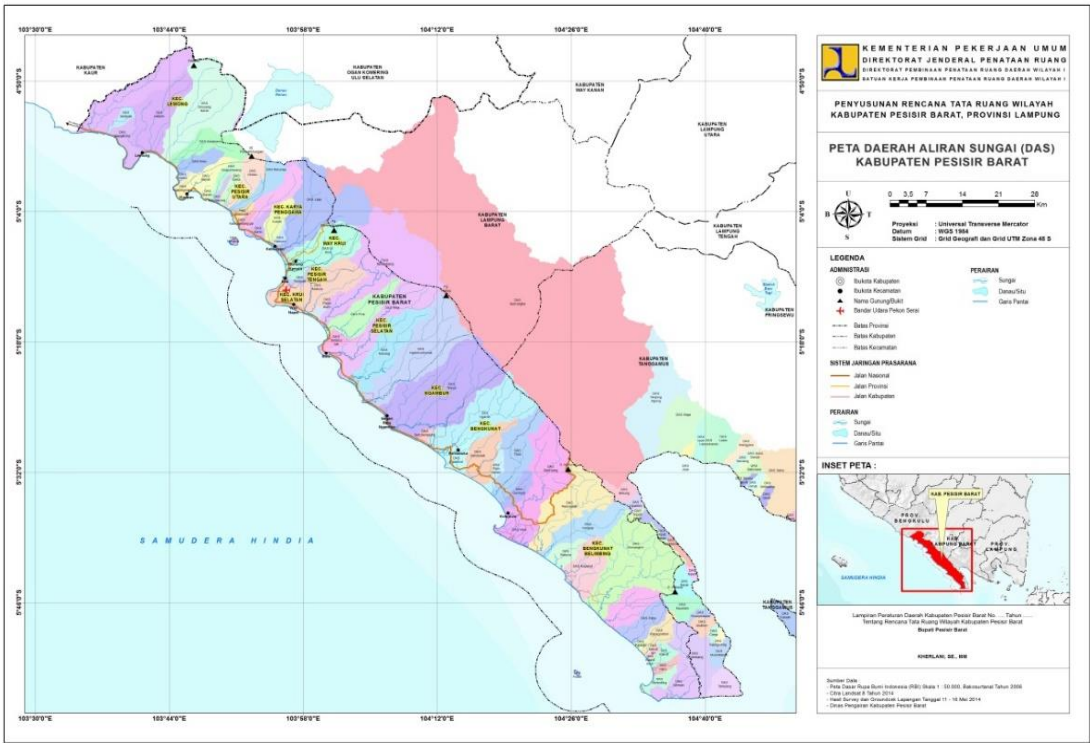
2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana. Kabupaten Pesisir Barat dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana tsunami, banjir, tanah longsor, Gempa dan kebakaran hutan akibat kekeringan. Bila ditelaah lebih jauh, kelima macam bencana di Kabupaten Pesisir Barat ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan, perusakan lingkungan dan perambahan hutan.

Pengembangan kawasan di daerah kawasan rawan bencana perlu ada pengkajian dan penelitian yang akurat agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan alam lebih jauh. Secara umum Kawasan Rawan Bencana diklasifikasikan menjadi:

1. Wilayah Pesisir/Pantai, Untuk Kabupaten Pesisir Barat kawasan yang berpotensi tinggi sebagai kawasan rawan bencana adalah daerah garis pantai yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami, luas kawasan rawan bencana tsunami ± 25.283 Ha meliputi 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level, MSL*), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.
2. Wilayah Dataran Banjir (*Flood Plain Area*), Adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kabupaten Pesisir Barat memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) pendek yang langsung bermuara ke laut Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Daerah Sempadan Sungai seringkali merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

Gambar 2.17. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

3. Wilayah Penggunungan dan Perbukitan, secara topologi Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki kawasan berpotensi mengalami bencana tanah longsor terutama daerah-daerah yang berbukit dan berada di lereng-lereng gunung. Daerah lereng pegunungan dan perbukitan secara umum memiliki struktur tanah yang tidak stabil ini dapat menimbulkan bencana tanah longsor, apalagi pemanfaatan pengembangan budidaya pemukiman, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Pemicu adanya bencana tanah longsor umumnya disebabkan oleh gempa dan curah hujan yang tinggi dan dapat diperparah jika terjadi kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di kawasan pegunungan dan perbukitan.
4. Wilayah Hutan dan Padang Rumput, kawasan ini juga merupakan kawasan rawan bencana terutama pada saat musim kemarau yaitu bencana kebakaran hutan. Luasnya kawasan hutan dan padang rumput dapat menyebabkan kebakaran hutan yang dipicu panas akibat kekeringan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perambah hutan.
5. Wilayah yang dilalui Lajur Patahan dan Penujaman (Palung Samudera Indonesia). Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, secara regional wilayah Kabupaten Pesisir Barat terletak pada zona sumber gempa bumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Pesisir Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempa bumi. Kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang berarah tenggara-barat

laut dan timurlaut-barat daya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempa bumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sisten patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (*unconsolidated*), yang pada umumnya berumur kuartar.

2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Pesisir Barat

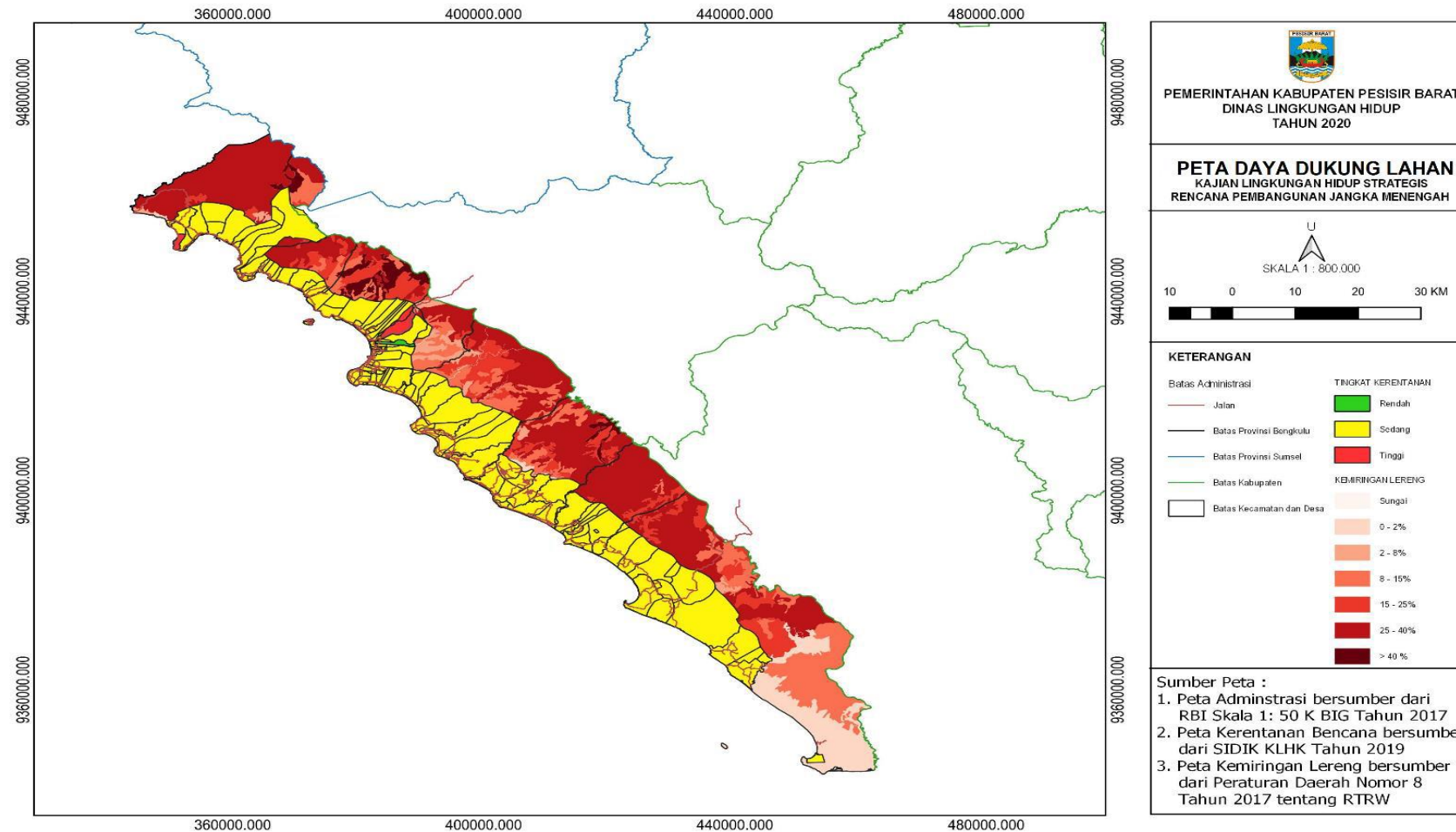
2.1.1.10.1 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan. Lahan Limit adalah lahan yang dibatasi untuk tidak dilakukan kegiatan pembangunan. Klasifikasi lahan limit adalah lahan dengan ketinggian $>2.000\text{mdpl}$ serta memiliki kelerengan $>40\%$. Lahan kendala adalah lahan yang dapat dikembangkan namun lebih baik dipertahankan fungsi utamanya. Klasifikasi Lahan Kendala adalah kelerengan $15-40\%$. Lahan potensial adalah lahan yang dapat dilakukan pembangunan. Klasifikasi lahan potensial adalah lahan yang tidak termasuk lahan limit dan kendala.

Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang dalam RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung;
- b. Lahan kendala hutan produksi dan pertambangan dijadikan sebagai kawasan budidaya, lahan kendala kelerengan $15-40\%$ dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, dan
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Gambar 2.18. Peta Daya Dukung Lahan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan peta di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki 2 (dua) Pekon/Desa di 2 (dua) Kecamatan yang memiliki status limit, yaitu di Pekon/Desa Way Batang Kecamatan Lemong dan Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui. Berikut luas klasifikasi daya dukung lahan Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.10.Luas Daya Dukung Lahan Potensial, Kendala, dan Limit

No.	Kecamatan	Status Lahan			Total
		Potensial	Kendala	Limit	
1	Lemong	800,2	7,55	34,411	842,161
2	Pesisir Utara	2,653	10,78	86,133	99,566
3	Karya Penggawa	11,748	6,561	982,294	1000,603
4	Way Krui	11,748	6,561	982,294	1000,603
5	Pulau Pisang	147,928	0	0	147,928
6	Pesisir Tengah	9,613	595,485	27,648	632,746
7	Krui Selatan	64,591	0	21,282	85,873
8	Pesisir Selatan	14,824	10,171	295,381	320,376
9	Ngambur	684,817	4,805	96,449	786,071
10	Ngaras	1708,438	6,561	43,56	1758,559
11	Bangkunat	5,707	4,926	316,055	326,688
Total		3462,267	653,4	2885,507	7001,174

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.1.10.2 Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut.

Tabel 2.11.Rentang Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat	0,00 –0,20
Rendah	0,20 –0,40
Sedang	0,40 –0,60
Baik	0,60 –0,80
Sangat	0,80 –1,00

Sumber : Pedoman Penentuan DDDTLH, KLH, 2014

Setelah mengetahui rumus dan kriteria daya dukung fungsi lindung, dapat diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2020 berada dalam kategori atau kualitas sangat baik dengan nilai sebesar 0,8.

Penghitungan daya dukung fungsi lindung merujuk kepada koefisien yang terdapat di dalam buku “Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah” (Muta’ali, 2012). Berikut hasil perhitungan luas peruntukkan lahan fungsi lindung Kabupaten Pesisir Barat :

Tabel 2.12.Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat

Peruntukan Lahan	Luas (hektar)	Koefisien	Luas Lahan
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	29.257	0,68	19.894,76
Kawasan Taman Nasional	186.926	1,00	186.926,00
Kawasan Cagar Alam	8.878	1,00	8.878,00
Kawasan Peruntukan Perikanan	3.278	0,98	3.212,44
Kawasan Hutan Lindung	9.580	1,00	9.580,00
Kawasan Resapan Air	6.030	1,00	6.030,00
Kawasan Peruntukan Permukiman	5.058	0,18	910,44
Kawasan Pertambangan dan Energi	30.736,18	0,18	5.532,51
Kawasan Peruntukan Pertanian	20	0,21	4,20
Kawasan Peruntukan Industri	78	0,18	14,04
Total	279.841		240.982

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.1.10.3 Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Dari daya dukung air berdasarkan hitungan dengan menggunakan peruntukan lahan tahun 2016 dan dengan menggunakan koefisien limpasan air, ketersediaan air permukaan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 masih cukup melimpah dengan surplus 137.908.258,5 m³/tahun. Kemudian untuk perhitungan daya dukung air permukaan ini yang menggunakan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan kriteria WHO, oleh karena itu di bawah ini ditampilkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.13.Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	2018	2021	2030	2045
1.	Lemong	10.602	11.132	11.688	24.743
2.	Pesisir Utara	8.244	8.666	9.100	19.265
3.	Pulau Pisang	1.612	1.870	2.190	4.636
4.	Karya Penggawa	15.410	16.180	16.989	35.966
5.	Way Krui	9.256	9.718	10.203	21.600
6.	Pesisir Tengah	19.354	20.321	21.337	45.170
7.	Krui Selatan	9.993	10.492	11.016	23.321
8.	Pesisir Selatan	24.375	25.593	26.872	56.888
9.	Ngambur	20.218	21.228	22.289	47.186
10.	Ngaras	8.494	8.918	9.363	19.821
11.	Bangkunat	27.939	29.335	30.821	65.248
Jumlah		155.497	163.453	171.868	363.845

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.14.Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x koefisien
1	Bandara/Pelabuhan	42	0,18	7,56
2	Hutan Lahan Kering Primer	104.628	0,21	21.971,88
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	49.633	0,21	10.422,93
4	Hutan Mangrove Sekunder	5.987	0,21	1.257,27
5	Lahan Terbuka	48	0,21	10,08
6	Perkebunan	4.356	0,18	784,08
7	Permukiman	2.135	0,18	384,3
8	Permukiman Transmigrasi	270	0,18	48,6
9	Pertanian Lahan Kering	1.986	0,21	417,06
10	Pertanian Lahan Kering Campur	2.334	0,21	490,14
11	Sawah	7.689	0,46	3.536,94
12	Semak Belukar	10.463	0,21	2.197,23
13	Tambak	198	0,98	194,04
14	Tubuh Air	25	1,00	25
Total		189.794	4.630	41.747,11

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.15.Daya Dukung Air Permukaan per-Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No.	Kecamatan	Jumlah	Kebutuhan	Ketersediaan	Rasio	Keterangan
1	Pesisir Tengah	20.348	32.556,80	696.696	21,4	Belum Terlampaui/ Surplus
2	Pesisir Selatan	27.633	44.212,80	2.362.956,75	53,4	Belum Terlampaui/ Surplus
3	Lemong	12.909	20.654,40	2.627.451,75	127,2	Belum Terlampaui/ Surplus
4	Pesisir Utara	8.613	13.780,80	486.659,25	35,3	Belum Terlampaui/ Surplus
5	Karya Penggawa	15.863	25.380,80	1.219.160,25	48	Belum Terlampaui/ Surplus
6	Pulau Pisang	1.659	2.654,40	369.600	139,2	Belum Terlampaui/ Surplus
7	Way Krui	9.151	14.641,60	236.313	16,2	Belum Terlampaui/ Surplus
8	Krui Selatan	11.012	17.619,20	209.343,75	11,8	Belum Terlampaui/ Surplus
9	Ngambur	22.497	35.995,20	1.889.406,75	52,5	Belum Terlampaui/ Surplus
10	Ngaras	9.976	15.961,60	1.241.798,25	77,8	Belum Terlampaui/ Surplus

11	Bangkunat	27.678	44.284,80	5.449.867,50	123	Belum Terlampaui/ Surplus
TOTAL		167.339	267.742,40	16.789.253,25	62,70	Belum Terlampaui/ Surplus

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2023 status daya dukung air di Kabupaten Pesisir Barat secara keseluruhan berada pada kondisi Surplus, artinya masih mampu mendukung kegiatan domestik dan pertanian. Namun untuk kecamatan Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Pesisir Barat.

2.1.1.10.4 Daya Dukung Pangan

Berdasarkan neraca beras daya dukung pangan Kabupaten Pesisir Barat sampai pada tahun 2019 masih berada pada kategori aman atau surplus dengan daya dukung pangan sebesar 5,4 meskipun adanya ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat dari meningkatnya akan kebutuhan untuk lahan terbangun dan alih fungsi lahan. Dari daya dukung pangan berdasarkan hitungan dengan menggunakan pendekatan neraca beras ternyata ketersediaan pangan beras Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 masih cukup melimpah dengan surplus 27.080 ton/tahun.

Tabel 2.16. Daya Dukung Pangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No.	Daya Dukung Pangan	Tahun 2023
1.	Luas lahan panen (Ha)	17.685
2.	Produktivitas lahan (ton/Ha/tahun)	4,7
3.	Produksi padi (ton)	71.292
4.	Produksi beras (konversi GKG ke Beras 64,02%)	40.256
5.	Jumlah penduduk (jiwa)	160.868
6.	Angka konsumsi beras (ton/orang/tahun)	0,1
7.	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	13.175
8.	Daya Dukung Pangan	5,4
9.	Surplus beras (ton)	27.080

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pesisir Barat untuk jumlah beras dikonsumsi sebanyak 13.175 ton, sedangkan produksi beras per tahun di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 40.256 ton/tahun. Menurut besarnya konsumsi beras di Kabupaten Pesisir Barat saat ini masih dalam kondisi surplus yaitu sebesar 27.080 ton.

2.1.1.10.5. Daya Tampung Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Dirjen Cipta Karya, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36m². Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Dirjen Cipta Karya sebesar 9 meter persegi/jiwa. Berdasarkan kriteria di atas maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 139,9 ha. Dengan begitu daya tampung lahan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 masih surplus atau 36,11.

Tabel 2.17. Daya Tampung Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah	Kebutuhan	Rasio Daya	Ketersediaan Lahan
1.	Lemong	10.602	9,542	48,02	467,81
2.	Pesisir Utara	8.244	7,42	56,04	415,88
3.	Pulau Pisang	1.612	1,45	23,05	33,43
4.	Karya Penggawa	15.410	13,87	31,25	433,56
5.	Way Krui	9.256	8,33	24,34	202,82
6.	Pesisir Tengah	19.354	17,42	54,4	947,69
7.	Krui Selatan	9.993	8,99	28,06	252,34
8.	Pesisir Selatan	24.375	21,93	23,46	514,54
9.	Ngambur	20.218	18,2	25,76	468,96
10.	Ngaras	8.494	7,64	28,62	218,69
11.	Bangkunat	27.939	25.2	43,52	1.096,89
Jumlah		155.497	139,9	36,11	5.052,61

Sumber: Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.1.10.6. Analisis Kondisi Lingkungan Hidup dan Skenario TPB

Berdasarkan hasil *cross-cutting* pada Isu Pembangunan Berkelanjutan terhadap 6 muatan Lingkungan Hidup di dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, di dapati 9 Isu Kondisi Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Terbatasnya dan kurang memadai sarana dan prasarana infrastruktur pertanian;
- b. Pengelolaan sampah mandiri dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, laut atau membuang sampah sembarangan;
- c. Pengelolaan sanitasi permukiman kumuh, dan sumber air bersih yang layak;
- d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- e. Optimalisasi penggunaan bahan organik dan pembatasan penggunaan bahan pestisida/kimia dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian;
- f. Optimalisasi pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha khususnya budidaya tambak udang;
- g. Regulasi alih fungsi lahan pertanian atau sawah;
- h. Peningkatan pengembangan jaringan irigasi dan ketersediaan air pada lahan pertanian, dan;
- i. Infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan masih belum optimal dan memadai.

Selanjutnya perlu ditentukan skenario nilai yang sebaiknya dicapai untuk setiap isu strategis. Skenario adalah alternatif proyeksi dengan upaya tambahan yang disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario ini dibutuhkan agar pada tahun 2045 (akhir masa RPJPD) dan tahun 2030 (akhir masa TPB), kondisi ideal yang lainnya. Selanjutnya disusun rekomendasi terkait upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai skenario.

Berdasarkan capaian target indikator pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Barat ditentukan 2 kriteria Skenario Pencapaian TPB antara lain Skenario Pencapaian Tanpa Upaya Tambahan dan Skenario Pencapaian Dengan Upaya Tambahan. Skenario tanpa upaya tambahan dilakukan untuk kriteria indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai atau melebihi target nasional. Sedangkan analisa Skenario dengan upaya tambahan dan BAU dilakukan untuk kriteria indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target serta memperhatikan kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Barat. Berikut skenario terhadap masing-masing TPB Prioritas:

- 1) TPB Prioritas 1 (TPB 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)
- Trend capaian Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif sampai dengan tahun 2022 berada di angka 46,70% dengan GAP terhadap capaian nasional sebesar 3,30% dimana target nasional sendiri berada di angka 50%. Berikut analisa BAU dan skenarionya,

Tabel 2.18.BAU dan Skenario Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	46,7	47,5	50	52,5	55	57,5
Skenario	50	50	50	55	60	65

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

- 2) TPB Prioritas 2 (TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala bentuk Dimanapun)
- Indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 3 indikator yaitu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat, Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. Berikut penentuan BAU dan skenario pada masing-masing indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional.

Tabel 2.19.BAU dan Skenario Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	13,84	12,88	11,28	10,48	9,5	8,52
Skenario	12,88	11,28	10,48	9,5	8,52	7,54

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.20.BAU dan Skenario Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	60,85	61,5	62,5	67,5	72,5	75
Skenario	62,5	62,5	65	70	75	80

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.21.BAU dan Skenario Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	70,07	72,5	75,5	80,5	85,5	90,5
Skenario	71,72	73,63	77,63	83,13	88,63	94,13

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

- 3) TPB Prioritas 4 (TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)
- Indikator-indikator yang memerlukan upaya-upaya tambahan karena belum mencapai target yaitu Laju Pertumbuhan PDB Perkapita; PDRB Perkapita, dan Persentase tenaga kerja formal sesuai dengan ketiga target pada RAD SDGs Kabupaten Pesisir Barat. Analisa BAU dan skenario sebagai berikut:

Tabel 2.22.BAU dan Skenario Laju Pertumbuhan PDB Perkapita

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	2,88	3,5	5	6,5	8	9,5
Skenario	3	6	9	12	15	18

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.23.BAU dan Skenario PDB Perkapita

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	30.06	35	45	55	65	75
Skenario	35	40	50	60	75	90

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Tabel 2.24.BAU dan Skenario Persentase Tenaga Kerja Formal

Tahun	2022	2025	2030	2035	2040	2045
BAU	25,14	27,5	45	55	65	75
Skenario	27,26	35	51	65	79	93

Sumber : Tim Penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.1.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Indeks ini dapat mencakup berbagai indikator atau parameter yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesehatan lingkungan hidup. Setiap indikator biasanya diukur atau dinilai, dan kemudian hasilnya diintegrasikan untuk menghasilkan nilai indeks yang mencerminkan kondisi keseluruhan lingkungan hidup. Struktur IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Ketiga indikator tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda untuk setiap daerah dimana keseimbangan antar indikator tersebut mewakili *green issues* (isu hijau).

Tabel 2.25. Capaian IKLH Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tahun		
	2021	2022	2023
	71,56	71,06	72,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2.1.1.12. Indeks Ketahanan Energi

Daerah Pesisir Barat cukup kaya akan berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air (air terjun, air deras dan gelombang laut, tenaga angin dan sebagainya). Perlu diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap sumber energi tersebut agar dapat digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Tabel di bawah ini menunjukkan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik.

Tabel 2.26. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
PLTMH	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bangkunat
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Ngaras
	2-2.5 MW	Way Tembulih	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2x1.15 MW	Way Melesom 2	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

Sumber : Bappelitbangda, 2022

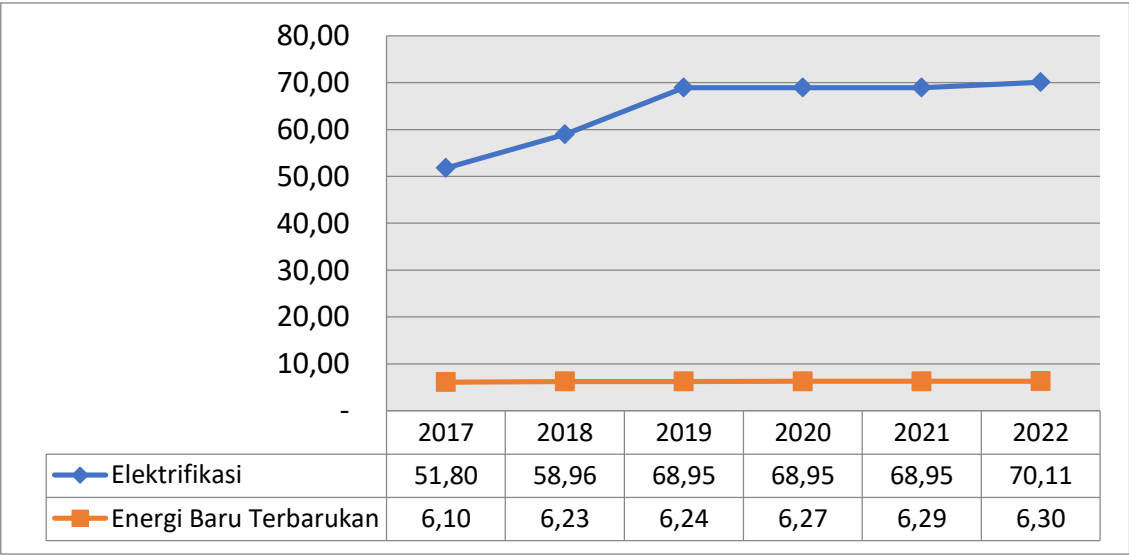
Jaringan listrik di Kabupaten Pesisir Barat dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PT PLN telah melayani hampir seluruh ibukota Kecamatan dan hampir seluruh desa di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu potensi pembangkit listrik di Kabupaten Pesisir Barat adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan/atau Mikro hidro (PLTMH) yang terletak di Kecamatan Bangkunt, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.

Tabel 2.27. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Pekon	Potensi Produksi	Keterangan
1	Bangkunt	Tanjung Rejo	4 MW	Koperasi Bina Karya dan PT. Mara Makmur
2	Bengkunt	Way Ngambur	2.25 MW	-
3	Ngambur	Way Tembulih	2.25 MW	-
		Ulok Mukti	6.9 MW	-
4	Karya Penggawa	Way Simpang Kanan, Laay	4.57 MW	-
		Way Simpang Kiri, Laay	8.20 MW	-
5	Pesisir Utara	Way Simpang Balak	7.21 MW	-
		Way Simpang Lunik	3.81 MW	-
		Way Khua Pampang, Kota Karang	1.25 MW	-
6	Lemong	Way Malaya	6 MW	Tahap Usulan Perizinan
		Way Melesom	4.20 MW	-
		Way Halami	2.31 MW	-

Sumber : PT. PLN Rayon Lampung Barat, 2018

Gambar 2.19. Rasio Elektrifikasi dan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Pada pengembangan sektor energi di Kabupaten Pesisir Barar, baik dari sisi rasio elektrifikasi atau listrik dari PLN serta penggunaan energi baru terbarukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun 2018 (58,96%), tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 stagnan pada capaian (68,95%) dan tahun 2022 telah mencapai (70,11%). Sementara itu, untuk rasio desa berlistrik pada tahun 2021 sebanyak 96,61% dan tahun 2022 sebanyak 98,27%.

Data ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk dapat menikmati layanan dari PLN. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 4 (empat) pekon yang belum mendapatkan fasilitas listrik PLN, yaitu: (1) Pekon Bandar Dalam; (2) Pekon Way Haru; (3) Pekon Way Tiyas; dan (4) Pekon Siring Gading, keempat pekon dimaksud berada di Kecamatan Bangkuntat.

Tabel 2.28. Jumlah Pelanggan Listrik PT PLN Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	1.706	2.331	3.004	2.708	2.936
2	Pesisir Utara	433	570	1.097	773	889
3	Pulau Pisang	131	555	1.025	585	594
4	Karya Penggawa	185	331	890	562	633
5	Way Krui	73	367	879	477	530
6	Pesisir Tengah	14.249	15.233	9.524	16.736	17.620
7	Krui Selatan	409	614	1.360	909	1.073
8	Pesisir Selatan	4.337	4.751	5.489	5.951	6.385
9	Ngambur	269	1.534	5.094	2.731	3.115
10	Ngaras	668	923	1.735	1.202	1.385
11	Bangkuntat	809	1.387	1.585	2.511	2.997
	Jumlah	23.269	28.596	31.682	35.145	38.157

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Sementara itu disisi lainnya, yaitu penggunaan energi baru terbarukan oleh masyarakat juga meningkat. Hal ini menggambarkan kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, khususnya sinar matahari dan tenaga air. Berdasarkan data pada tahun 2016 (4,14%), tahun 2017 (6,10%), tahun 2018 (6,23%), tahun 2019 (6,24%) dan tahun 2020 dengan capaian mencapai 6,27%. Capaian tahun 2021 pada angka 6,29%. Tahun 2022 sebanyak 6,30% masyarakat telah menggunakan energi baru terbarukan.

Ekonomi Indonesia yang terus tumbuh telah meningkatkan permintaan terhadap energi. Di sisi lain, kondisi “Ketahanan Energi” Indonesia memburuk, dilihat dari indikator 4-A (*availability, accessibility, affordability, acceptability*). Usulan strategi untuk hal tersebut yaitu termasuk meningkatkan produksi minyak bumi, mengurangi impor minyak/LPG, membangun infrastruktur gas bumi, memperluas akses ke pulau kecil/terluar/perbatasan, mempercepat pengembangan energi terbarukan, mendirikan pusat konservasi energi, menaikkan harga BBM dan listrik/ mengurangi subsidiya, serta memperkuat kapasitas institusi dan sumberdaya manusia terkait pembangunan energi.

World Economic Forum menempatkan “ketahanan energi” Indonesia dalam urutan ke-63 dari negara-negara lain di dunia. Urutan pertama, kedua, dan ketiga adalah Norwegia, Selandia Baru dan Prancis. Negara-negara di kawasan Asia yang hampir tidak memiliki sumberdaya energi sendiri masih berada dalam posisi yang lebih unggul dari segi ketahanan energi dibandingkan Indonesia, diperlihatkan misalnya dengan Singapura yang berada dalam 62, serta Thailand, Korea Selatan, dan Jepang yang masing-masingnya berada dalam urutan ke 55, 54 dan 38. Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan (skor 6 hingga 7,99). Hal ini dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Energi RI dengan capaian skor 6,64. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10.

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan relatif stabil walaupun dipengaruhi oleh beberapa faktor penambah dan pengurang jumlah penduduk antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Secara umum, dengan perkembangan daerah Kabupaten Pesisir Barat jumlah penduduknya juga semakin semakin berkembang dikarenakan lebih meratanya pembangunan daerah, dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi dari daerah luar.

Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 16,60% Post Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 2013 dst, dengan perkiraan usia 0 sampai dengan 7 tahun), 28,47% Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun), 24,64% milenial (Penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun), 18,36% Generasi X (Penduduk yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia sekarang 40 sampai 55 tahun), 10,51% Baby Boomer (Penduduk yang lahir tahun 1946-1964 dengan perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun), serta 1,42% Generasi *Pre Boomer* (Penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 dengan perkiraan usia sekarang ≥ 75 tahun).

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 (hingga Semester I Tahun 2023) perhitungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 171.247 jiwa yang terdiri dari 88.717 laki-laki dan 82.530 perempuan dan 49.856 kepala keluarga (dengan rasio jenis kelamin sebesar 107). Dengan luas wilayah 2.907,23 km², Pesisir Barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 55-57 orang per kilometer per segi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkunt sementara jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pulau Pisang.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 (Semester I)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	10.510	10.090	20.600	5.933
2	Pesisir Selatan	14.580	13.731	28.311	8.655
3	Lemong	6.938	6.228	13.166	3.800
4	Pesisir Utara	4.578	4.246	8.824	2.580
5	Karya Penggawa	8.365	7.784	16.149	4.527
6	Pulau Pisang	877	834	1.711	560
7	Way Krui	4.849	4.478	9.327	2.669
8	Krui Selatan	5.848	5.534	11.382	3.121
9	Ngambur	11.869	11.276	23.145	6.751
10	Ngaras	5.387	4.916	10.451	2.867
11	Bangkunat	14.916	13.413	28.737	8.393
	Jumlah	88.717	82.530	173.247	49.856

Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tersebar dalam 11 kecamatan dengan kepadatan yang berbeda pada setiap kecamatan. Penduduk di Kecamatan Bangkunat (28.329 jiwa) dan Kecamatan Pesisir Selatan (28.311 jiwa) merupakan penyumbang penduduk terbesar pada Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah penduduk 1.711 Jiwa.

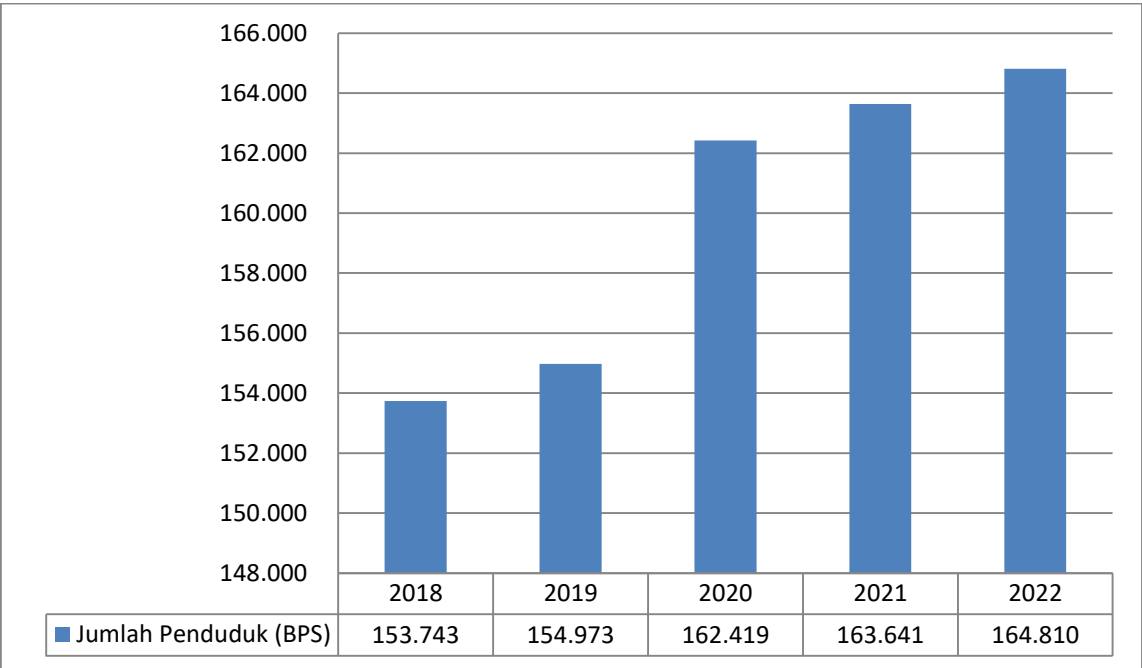
Pada tahun 2023 hingga Semester I jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 171.247 jiwa yang terdiri dari 88.717 laki-laki dan 82.530 perempuan dan 49.856 kepala keluarga (berdasarkan data Disdukcapil). Penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain dan menempati daerah yang nyaman. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang meningkat. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan di Kabupaten Pesisir Barat, semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

Berdasarkan struktur umur penduduk, penduduk Kabupaten Pesisir Barat tergolong penduduk *early intermediate*. Struktur umur penduduk tipe ini menunjukkan tingkat kelahiran bayi sudah mulai dapat dikendalikan dan angka kematian mulai menurun. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 107 menerangkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 107 laki-laki.

Pada tahun 2023 piramida penduduk Kabupaten Pesisir Barat masih mencirikan piramida ekspansif (piramida penduduk muda) dimana angka kelahiran masih tinggi dan kelompok terbesar adalah penduduk usia muda. Bila berdasarkan pada data BPS, jumlah penduduk Pesisir Barat sebanyak 152.529 jiwa

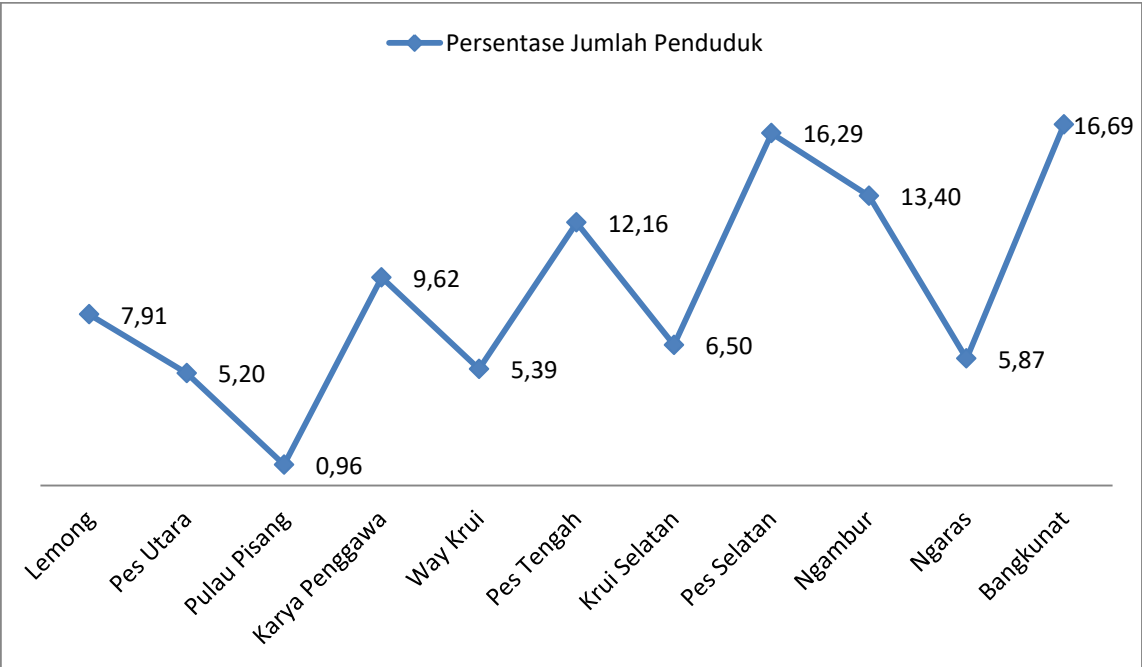
(2017), 153.743 jiwa (2018), 154.973 jiwa (2019), 162.419 (2020), 163.641 jiwa (2021), 164.810 jiwa (2022) angka ini terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 2.20. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambar 2.21. Persentase Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan

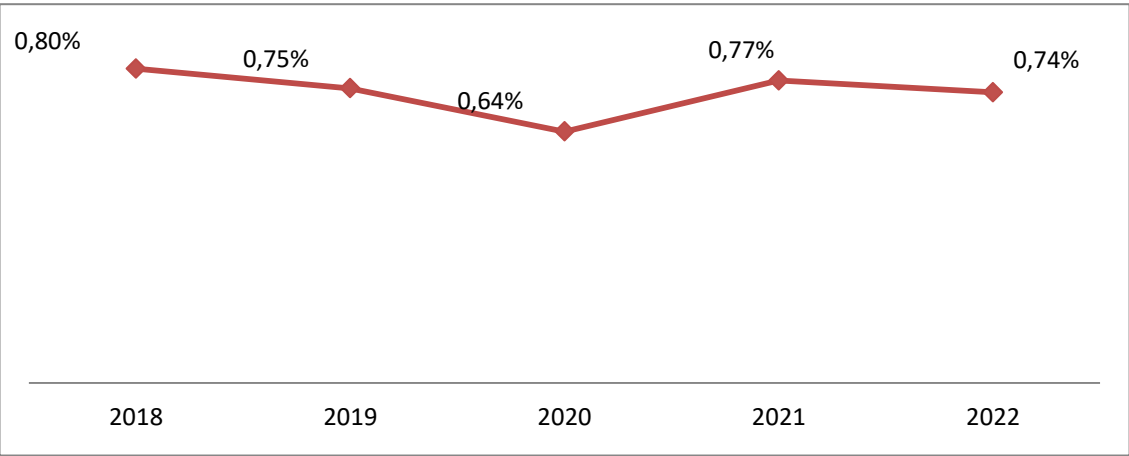


Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan data pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat sejak Tahun 2018-2022, pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat masih relatif sedikit, sejak tahun 2018-2022 pertumbuhan penduduk hanya 11.000an jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0.60-0.80%.

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80%. Selanjutnya tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,75% serta pada tahun 2020 menjadi 0,64%. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tercatat mencapai angka 0,77%. Tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di angka di 0,74%.

Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Berikut data kepadatan penduduk di tahun 2023.

Tabel 2.30. Data Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I			JUMLAH PENDUDUK SEMESTER II			LUAS WILAYAH KM2	KEPADATAN PENDUDUK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
KAB. PESISIR BARAT	88.717	83.716	171.247	89.979	83.716	173.695	2.907	60
PESISIR TENGAH	10.510	10.259	20.600	10.665	10.259	20.924	296,84	70
PESISIR SELATAN	14.580	13.889	28.311	14.789	13.889	28.678	409,19	70
LEMONG	6.938	6.290	13.166	6.981	6.290	13.271	454,99	29
PESISIR UTARA	4.578	4.301	8.824	4.619	4.301	8.920	84,27	106
KARYA PENGGAWA	8.365	7.768	16.149	8.390	7.768	16.158	211,11	77
PULAU PISANG	877	837	1.711	894	837	1.731	64,00	27

WAY KRUI	4.849	4.511	9.327	4.873	4.511	9.384	40,92	229
KRUI SELATAN	5.848	5.614	11.382	5.936	5.614	11.550	36,25	319
NGAMBUR	11.869	11.550	23.145	12.176	11.550	23.726	327,17	73
NGARAS	5.387	4.993	10.303	5.462	4.993	10.455	215,03	49
BANGKUNAT	14.916	13.704	28.329	15.194	13.704	28.898	943,70	31

Sumber: Disdukcabil, 2024

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu misalnya, secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, pertambahan penduduk dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut dapat diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Berikut data penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2023:

Tabel 2.31. Data Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

WILAYAH	00-04 L	05-09 L	10-14 L	15-19 L	20-24 L	25-29 L	30-34 L	35-39 L	40-44 L	45-49 L	50-54 L	55-59 L	60-64 L	65-69 L	70-74 L	>75 L
PESISIR BARAT	7372	8895	8849	7469	7461	7250	6805	7013	6601	5592	4707	3813	3185	2117	1459	1391
PESISIR TENGAH	806	1057	1076	954	875	787	755	856	829	718	559	429	408	252	159	145
PESISIR SELATAN	1331	1474	1476	1161	1171	1215	1174	1169	1088	926	740	593	549	306	216	200
LEMONG	543	604	650	598	626	536	508	548	497	438	376	366	264	179	121	127
PESISIR UTARA	392	429	426	410	344	357	344	321	314	272	257	271	160	139	82	101
KARYA PENGGAWA	638	861	831	657	634	699	592	683	624	554	447	353	333	223	146	115
PULAU PISANG	60	82	81	78	65	65	68	69	71	62	53	42	29	32	24	13
WAY KRUI	377	436	503	420	411	373	364	361	367	295	260	202	198	140	104	62
KRUI SELATAN	488	620	600	520	492	462	445	465	417	384	340	230	192	131	88	62
NGAMBUR	983	1176	1186	1002	1054	1032	977	991	861	710	585	548	374	288	195	214
NGARAS	444	580	549	457	484	426	416	382	395	310	312	218	213	129	76	71
BANGKUNAT	1310	1576	1471	1212	1305	1298	1162	1168	1138	923	778	561	465	298	248	281

Sumber: Disdukcapil, 2024

Tabel 2.32. Data Penduduk Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

WILAYAH	00-04 P	05-09 P	10-14 P	15-19 P	20-24 P	25-29 P	30-34 P	35-39 P	40-44 P	45-49 P	50-54 P	55-59 P	60-64 P	65-69 P	70-74 P	>75 P
PESISIR BARAT	7126	8223	8173	7185	7085	6368	6371	6543	5912	5113	4297	3884	2937	1966	1201	1332
PESISIR TENGAH	838	990	991	906	792	729	829	803	734	671	531	451	391	279	179	145
PESISIR SELATAN	1192	1375	1405	1109	1136	1104	1063	1089	1019	841	707	664	508	302	160	215
LEMONG	517	588	561	500	567	455	444	525	430	407	353	342	232	163	87	119
PESISIR UTARA	342	375	435	394	324	303	322	323	290	267	252	228	169	109	76	92

KARYA PENGGAWA	628	768	780	637	578	529	547	606	572	479	356	419	299	260	143	167
PULAU PISANG	74	80	71	65	57	69	56	62	67	48	42	36	39	34	19	18
WAY KRUI	338	403	415	389	390	293	314	337	308	294	256	262	190	138	75	109
KRUI SELATAN	474	565	582	514	462	454	422	369	405	334	291	249	213	139	78	63
NGAMBUR	1043	1140	1094	1019	1006	929	895	996	759	628	594	530	355	235	143	184
NGARAS	400	488	502	493	480	361	376	396	337	305	267	206	159	97	67	59
BANGKUNAT	1280	1451	1337	1159	1293	1142	1103	1037	991	839	648	497	382	210	174	161

Sumber: Disdukcapil, 2024

Data BPS berdasarkan hasil SUSENAS, sex ratio Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dimulai dari tahun 2018 sebesar 110,26 dan di tahun 2022 sebesar 108,35, yang artinya terdapat 108 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Pesisir Barat.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan isu penting dan strategis dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 disamping penguatan perekonomian dan peningkatan derajat pengetahuan baik secara materil dan spiritual. Terlebih kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari bernegara.

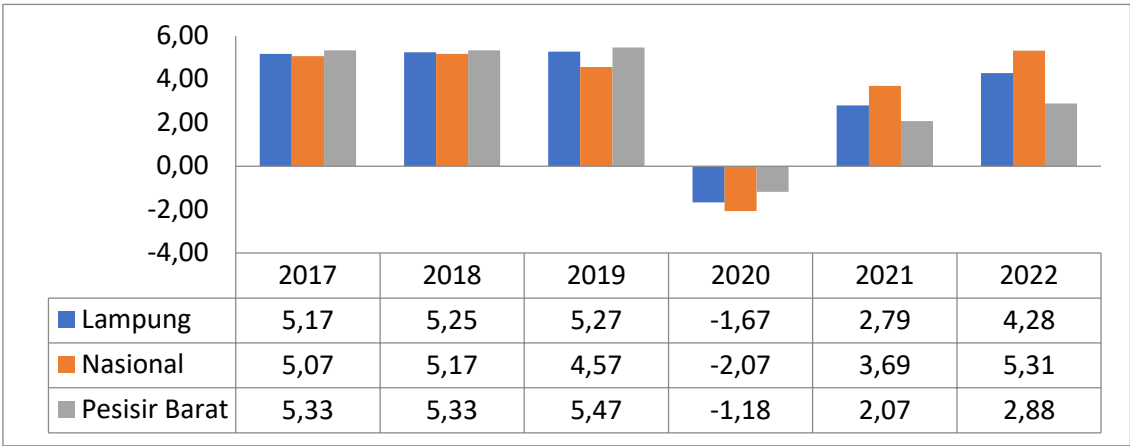
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama dalam kurun periode tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju capaian nilai tambah riil daerah yang menggambarkan kemajuan perkeekonomian yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut, ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 berada pada angka 5,35% atau naik stagnan 0,02 dari tahun 2017. Data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.37% atau naik 0,04. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya, yaitu sebesar (1,17%). Angka ini lebih baik dari pencapaian Provinsi Lampung yang berada pada angka (1,67%). Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengubah pola ekonomi masyarakat global secara menyeluruh. Pencapaian ini merupakan indikator dari masih lemahnya sistem kesehatan daerah dan kemampuan daya beli masyarakat.

Sementara itu, data untuk pencapaian tahun 2021 terjadi perbaikan kinerja menjadi 2.07%. hal ini menandakan pulihnya perekonomian daerah dan nasional. Tahun 2022, capaian pertumbuhan ekonomi menjadi 2.88%, masih berada dibawah Provinsi Lampung yang berada pada angka 4.28% terlebih catatan nasional yang mencapai 5.31%.

Gambar 2.23. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

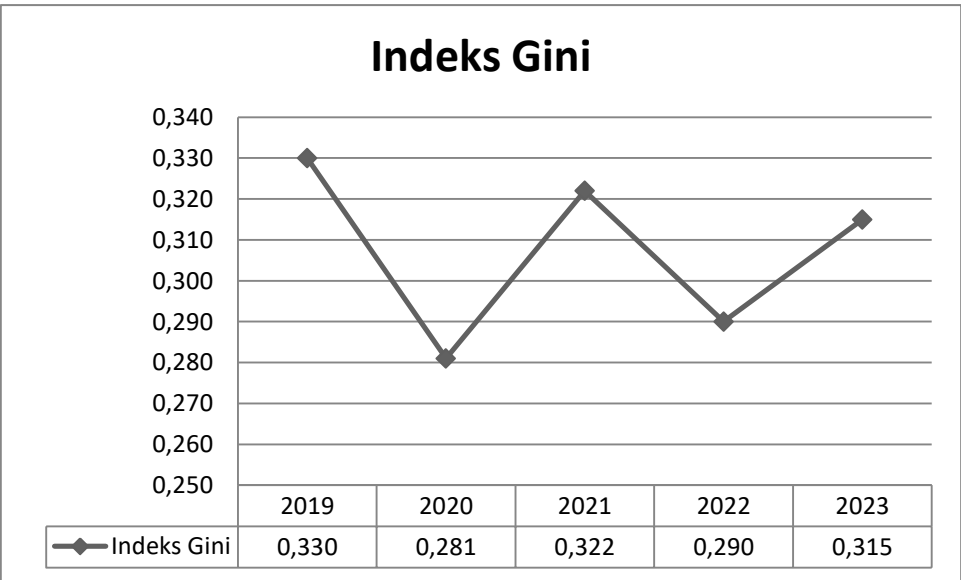


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.2. Indeks Gini

Data ketimpangan pendapatan atau indeks gini untuk Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2019 sebesar 0,33 dan membaik menjadi 0,28 di tahun 2020. Akan tetapi di tahun 2021 terkoreksi menjadi 0,32 dan kembali tumbuh positif menjadi 0,29 pada tahun 2022, akan tetapi menurun di tahun 2023 menjadi 0,315.

Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023

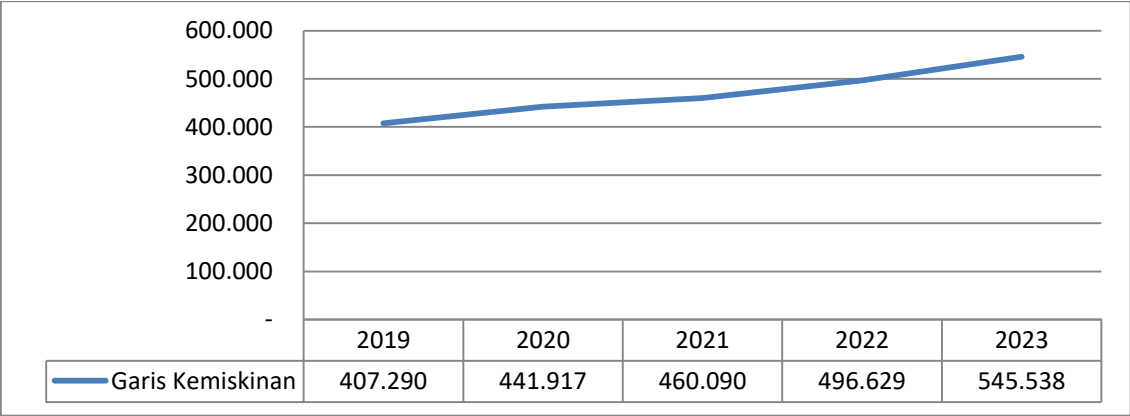


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.1.3 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK).

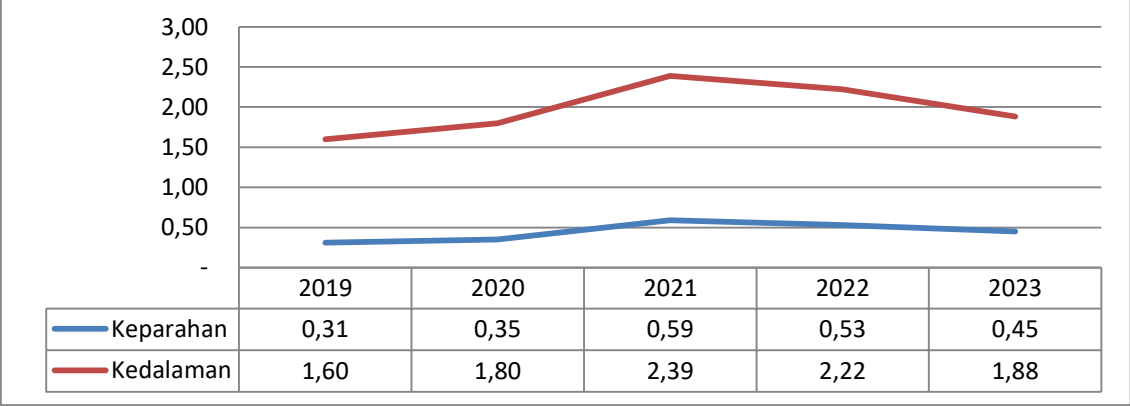
Gambar 2.25. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data pada gambar di atas terdapat peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019-2023, garis kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat 407.290 di tahun 2019. Angka sebesar 441.917 di tahun 2020 atau mengalami peningkatan. Tahun 2021, peningkatan kembali terjadi dengan nilai sebesar 460.090. Untuk tahun 2022, garis kemiskinan kembali naik berada pada angka 496.629. dan pada tahun 2023 kembali membaik di angka 545.538. Data ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

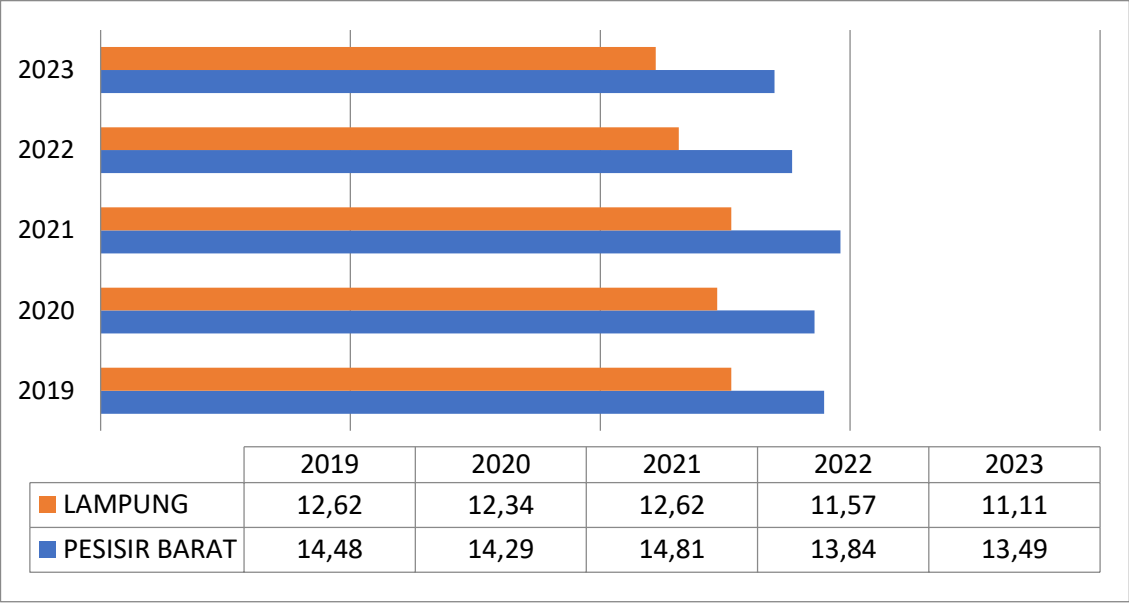
Gambar 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat 2019-2023



Sumber BPS Provinsi Lampung, 2024

Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat di tampilan dalam gambar berikut:

Gambar 2.27. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2019 sebesar 14,48. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14,29 %. Tahun 2021 yang masih berada dalam masa pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin bertambah 0,52% menjadi 14,81%. Tahun 2022, ada perbaikan kinerja sehingga menjadi 13.84% dan di tahun 2023 menjadi 13,49% jumlah penduduk miskin di daerah.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022, kemiskinan ekstrem Kabupaten Pesisir Barat sebesar 2,98%, atau berada pada urutan 12 dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 2.33. Lokasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	No	Pekon
1	Bangkumat	1	Bandar Dalam
		2	Kota Jawa
		3	Pagar Bukit
		4	Suka Marga
		5	Way Haru
2	Lemong	1	Lemong
		2	Malaya

		3	Penengahan
		4	Rata Agung
		5	Suka Mulya
3	Ngambur	1	Bumi Ratu
		2	Gedung Cahya Kuningan
		3	Pekon Mon
		4	Suka Banjar
		5	Ulok Mukti
4	Pesisir Utara	1	Balam
		2	Baturaja
		3	Kuripan
		4	Pemancar
		5	Walur
5	Pesisir Selatan	1	Biha
		2	Marang
		3	Paku Negara
		4	Tanjung Setia
		5	Way Jambu

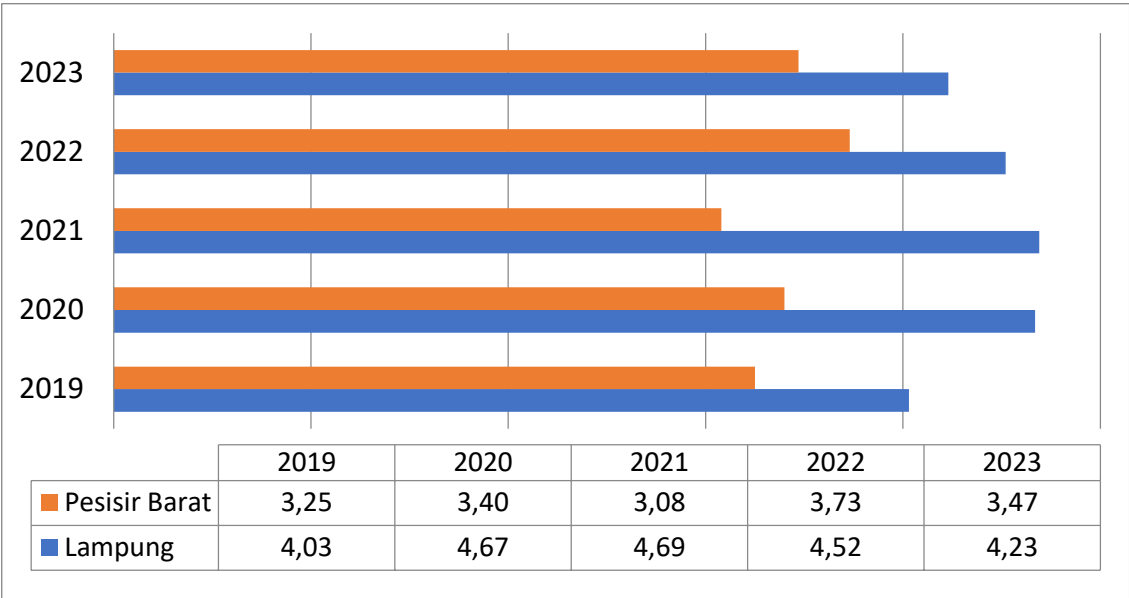
Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat secara umum mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini berkaca dari persentase pada tahun 2018 yang berada pada angka 1.90%. Namun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan walaupun belum melebihi angka pada tahun 2018, yaitu pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,26% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 3.40%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh efek Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah. Tahun 2021, TPT membaik menjadi 3.08%. Kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3.73%. kemunduran ini mengindikasikan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan daerah. Dan membaik di tahun 2023 menjadi 3,47%.

Angka capaian pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,40% dan 3.08% secara umum masih lebih baik dari TPT Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 tercatat pada angka 4,67% dan 4.69% pada tahun 2021. Tahun 2022, Provinsi Lampung mencapai 4.52% dan tahun 2023 mencapai 4,23% pengangguran terbuka. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM yang selama lima tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan juga peningkatan anggaran bagi sektor-sektor yang mendukung dalam peningkatan angka IPM. Hal ini tercermin dari peningkatan tiga komponen utama IPM dengan metode baru yaitu, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita (PRK) secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023

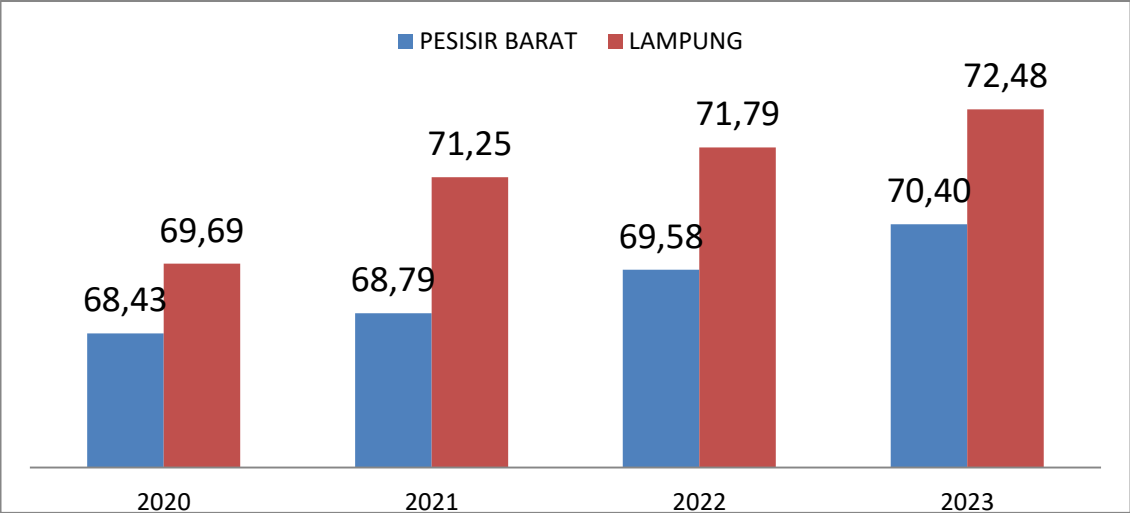
No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	63,27*	73,39	73,46	73,61	73,75
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,82	8,01	8,19	8,53	8,70
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,98	11,99	12,00	12,13	12,14
4	Pengeluaran Riil per Kapita (000 Rp.)	8.652	8.457	8.533	8.663	9.102

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Barat dengan metode penghitungan baru (SP2020) pada tahun 2020 sebesar 68,43 poin. Untuk tahun 2021 meningkat menjadi 68,79 poin atau naik 0,36 poin. Tahun 2022 IPM Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 69,58 poin. Berikutnya pada tahun 2023 capaian IPM kembali meningkat menjadi 70,40 poin. Kenaikan ini disatu sisi memberikan gambaran

keberhasilan, namun disisi lain angka 70,40 poin masih tertinggal dari pencapaian Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 72,48 poin.

Gambar 2.29. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023

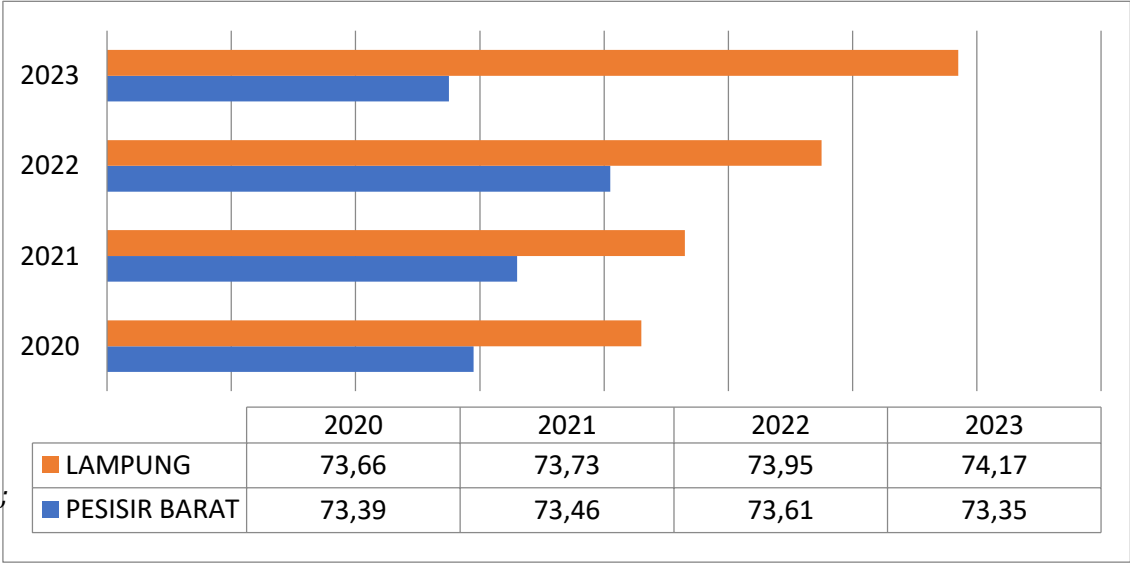


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah maupun negara. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.30. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan pada gambar di atas, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, peningkatan yang terjadi tidak lebih dari 1,00 poin, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan salah indikator dalam penghitungan nilai IPM. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2016-2021 secara umum terus mengalami peningkatan 0,50-0,90 per tahun. Peningkatan masih tergolong stagnan, namun masih dalam koridor meningkat, sehingga harapan untuk terus mengalami peningkatan diharapkan semakin meningkat pada tahun berikutnya.

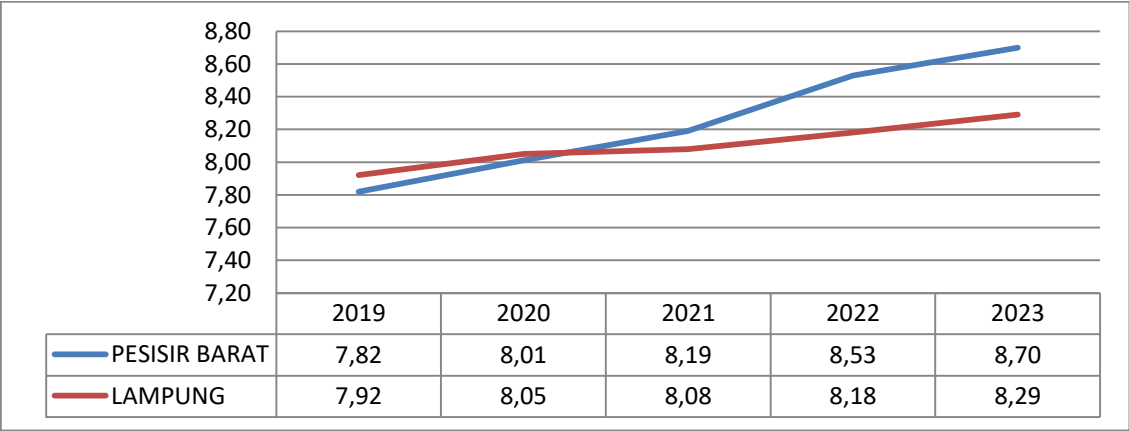
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	7,82	8,01	8,19	8,53	8,70

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Gambar 2.31. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Berdasarkan pada gambar di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2019-2020, namun pada tahun 2021 hingga 2023 mampu berada di atas Provinsi Lampung. Walaupun demikian, angka dibawah 9 tahun masih berada dibawah minimal pendidikan dasar (SD dan SMP). Sehingga indikator ini memberikan gambaran

bahwa masih ada masyarakat usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Tentunya hal ini memberikan gambaran masih jauhnya kualitas pendidikan daerah dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan.

c. Harapan Lama Sekolah

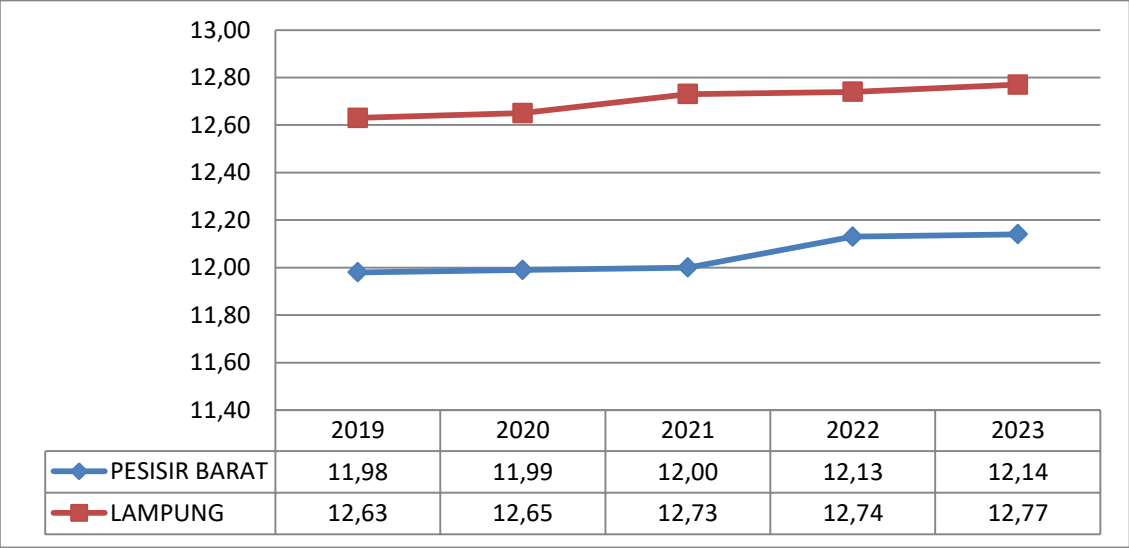
Harapan Lama Sekolah merupakan ukuran bagi seorang individu yang berada pada jenjang pendidikan untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan yang ada disuatu daerah. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ketersediaan guru pengajar adalah beberapa hal mendasar yang membantu dalam pencapaian indikator ini. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2019-2023 secara umum terus mengalami peningkatan 0,01-0,10 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	11,98	11,99	12,00	12,13	12,14

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Gambar 2.32. Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2019-2023 dan tidak pernah melebihi capaian dari Provinsi Lampung, dan berada pada posisi 13 diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa secara umum kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung dapat memberikan jaminan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya dibandingkan di Pesisir Barat. Keterbatasan sarana prasarana, mutu pelayanan dan kemudahan akses masih menjadi kendala utama peningkatan kualitas pendidikan daerah.

d. **Pengeluaran Riil Per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

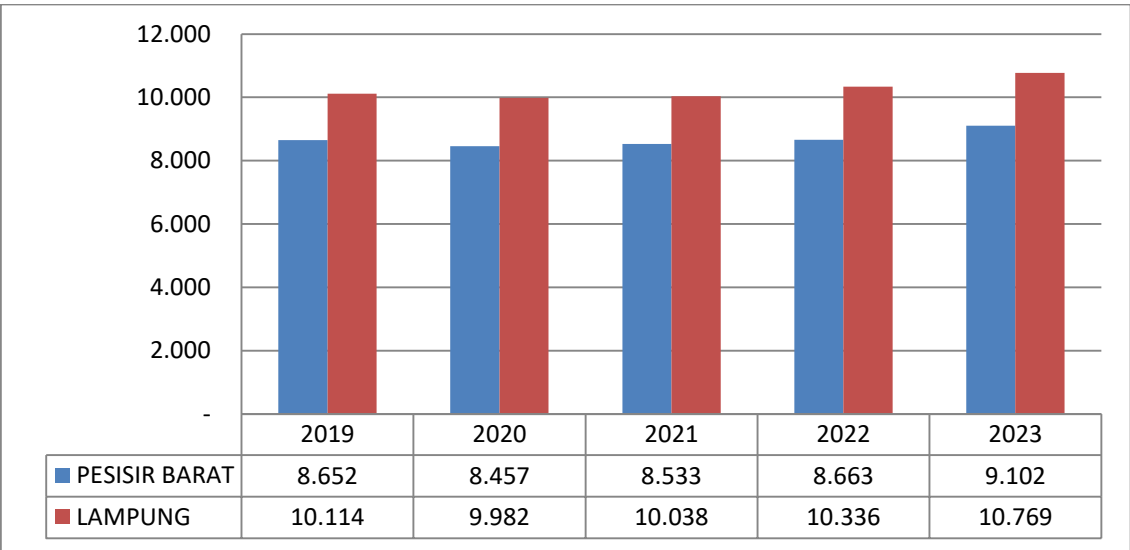
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2019-2023 secara umum terus mengalami peningkatan 1.000-1.500 rupiah. Angka Pengeluaran Riil Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Riil Perkapita	8.652	8.457	8.533	8.663	9.102

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Gambar 2.33. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Berdasarkan pada gambar di atas, Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2019-2023, dan berada pada posisi 13 diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2.2.2. **Kesejahteraan Sosial Budaya**

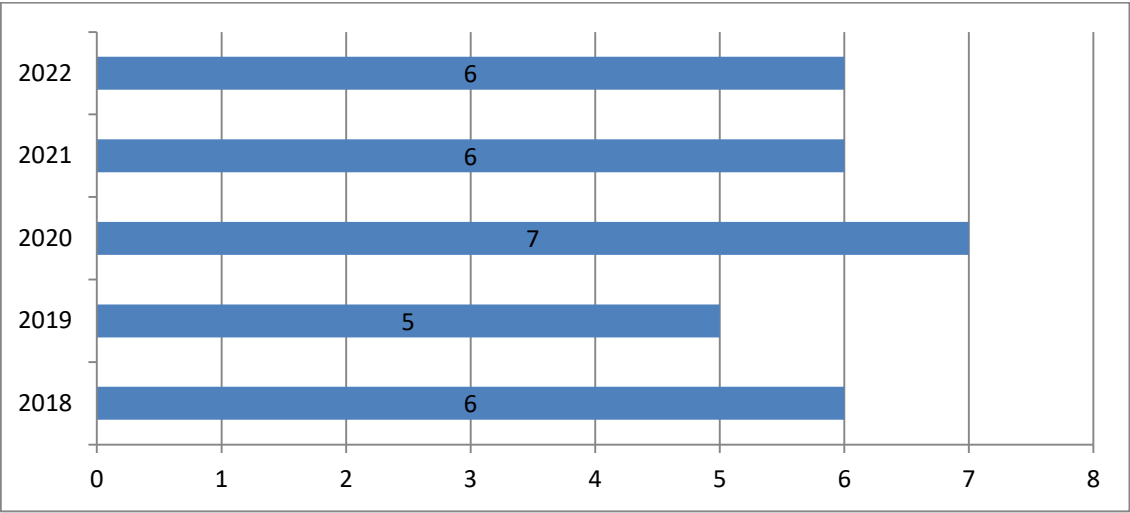
2.2.2.1. **Kesehatan**

Pembangunan kesehatan tetap dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penyakit tidak menular. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana termasuk alat kesehatan yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat melalui Gerakan Hidup Sehat (Germas) dan fungsi pelayanan kesehatan.

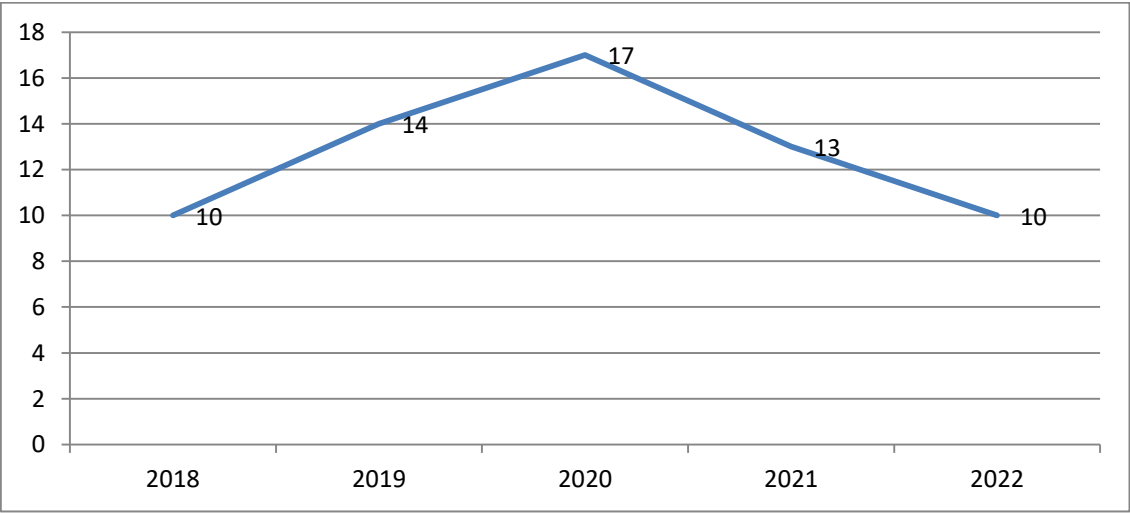
Berikut beberapa indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2018-2022:

Gambar 2.34. Kematian Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Ibu Nifas di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2.35. Kematian Bayi (0-11 bulan) di Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

- a. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus setelah pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus, tahun 2020

sebanyak 7 kasus. tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2018 sebanyak 6 kasus tahun 2017 dengan jumlah 8 kasus.

- b. Angka Kematian Bayi, data pada tahun 2022 sebanyak 10 kematian. Pada tahun 2021 sebanyak 13 kasus atau menurun 4 kasus dibandingkan data tahun 2020. Tahun 2020 sebanyak 17 atau meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14 kasus kematian, angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2018 sebanyak 10 kasus. Angka ini terus membaik bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 26 kasus serta pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Penurunan ini disebabkan sudah membaiknya penatalaksanaan oleh tenaga kesehatan dan semakin tersedianya jumlah tenaga medis dan paramedic di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.38. Analisis Faktor Determinan AKI dan AKB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

Masalah	Faktor Determinan			
	Perilaku	Pelayanan Kesehatan	Lingkungan	Genetik
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) & Angka Kematian Bayi (AKB)	Input: a. Informasi tentang 3T (terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan) yang belum tersosialisasi menyeluruh di Masyarakat b. Cenderung untuk bersalin pada bukan nakes Proses: a. Persalinan oleh bukan nakes	Input: a. Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang belum lengkap Proses: a. Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan; b. MTBM di FKTP tidak maksimal Output: a. Masih adanya kasus kematian ibu hamil/bersalin /nifas b. Masih adanya kematian bayi Outcome: a. Status derajat kesehatan	Lingkungan Fisik: a. Lingkungan kotor Proses: a. Penyediaan makanan bagi ibu hamil/ bersalin/ nifas tidak higienis b. Mengkonsumsi gizi tidak seimbang Output: a. Gangguan kesehatan pada ibu hamil/bersalin/nifas b. Ibu menderita anemia Proses: a. Menunda jadwal pemeriksaan rutin triwulan ibu hamil	Input: a. Pernah menderita penyakit komorbid dan memiliki kelainan bawaan

Masalah	Faktor Determinan			
	Perilaku	Pelayanan Kesehatan	Lingkungan	Genetik
		rendah b. Berdampak lebih luas penyebab krisis kesehatan suatu daerah		

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Status gizi balita sangat pendek dan pendek (stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Pesisir Barat telah mengalami penurunan walaupun belum signifikan. Berdasarkan data SKI prevalensi stunting di tahun 2023 pada angka 16,1%, sedangkan berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia tahun 2023 yaitu 16,7%.

Tabel 2.39. Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting (%)
Lampung Barat	24,6
Tanggamus	17,1
Lampung Selatan	10,3
Lampung Timur	14,2
Lampung Tengah	16,7
Lampung Utara	23,5
Way Kanan	22,7
Tulang Bawang	9,8
Pesawaran	10,0
Pringsewu	15,8
Mesuji	5,0
Tulang Bawang Barat	10,5
Pesisir Barat	16,1
Bandar Lampung	13,4
Metro	7,1
LAMPUNG	14,9

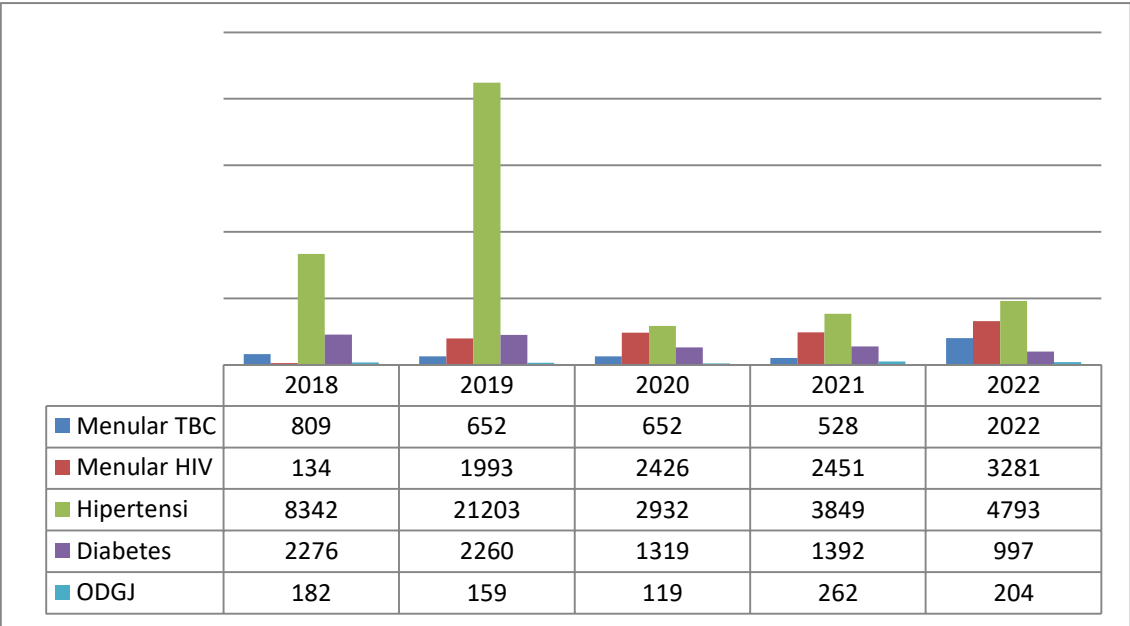
Sumber: SKI 2024

Beberapa intervensi pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan stunting, antara lain:

- a. Pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan Posyandu;

- b. Pembagian vitamin A setiap 6 bulan sekali;
- c. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, calon pengantin perempuan dan ibu hamil;
- d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita Kurang Energi Protein (KEP) dan ibu hamil KEP;
- e. Kesehatan Reproduksi kepada calon pengantin;
- f. Imunisasi balita secara berkesinambungan;
- g. Kesehatan lingkungan (penyediaan air bersih, Open Defecation Free/ODF, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM);
- h. Promosi Kesehatan (Edukasi gizi, Perilaku Hidup Bersih Sehat/PHBS. Gerakan Hidup Sehat/Germas)

Gambar 2.36. Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Pada tahun 2022, kondisi morbiditas penyakit TB dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40. Data Pelayanan TB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun
1	Lemong	140	2
2	Pugung Tampak	115	1
3	Pulau Pisang	27	1
4	Karya Penggawa	180	0

5	Way Krui	122	1
6	Krui	262	3
7	Krui Selatan	159	1
8	Biha	272	1
9	Ngambur	277	3
10	Bengkunat	124	0
11	Bengkunat Belimbing	344	4
	Jumlah	2.022	17

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2022 untuk penderita TB yang terdata sebanyak 2.155 orang. Sementara yang telah mendapatkan layanan sebanyak 2.022 orang atau telah mencapai 93.80%. Sedangkan untuk kasus pada anak 0-14 tahun jumlah persentase penemuan kasus sebanyak 25.3%.

Untuk kasus HIV pada tahun 2022, sebanyak 8 kasus yang ada, dengan catatan 6 kasus pada rentang kelompok umur 25-49 tahun atau 83.3% dan 16.7% pada rentang kelompok umur ≥50 tahun dengan data 2 kasus.

Tabel 2.41. Data Kasus HIV Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Kasus H I V			
		Laki-laki	Perempuan	Total	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0.0
2	5 - 14 Tahun	0	0	0	0.0
3	15 - 19 Tahun	0	0	0	0.0
4	20 - 24 Tahun	0	0	0	0.0
5	25 - 49 Tahun	6	4	10	83.3
6	≥ 50 Tahun	2	0	2	16.7
	Jumlah	8	4	12	100

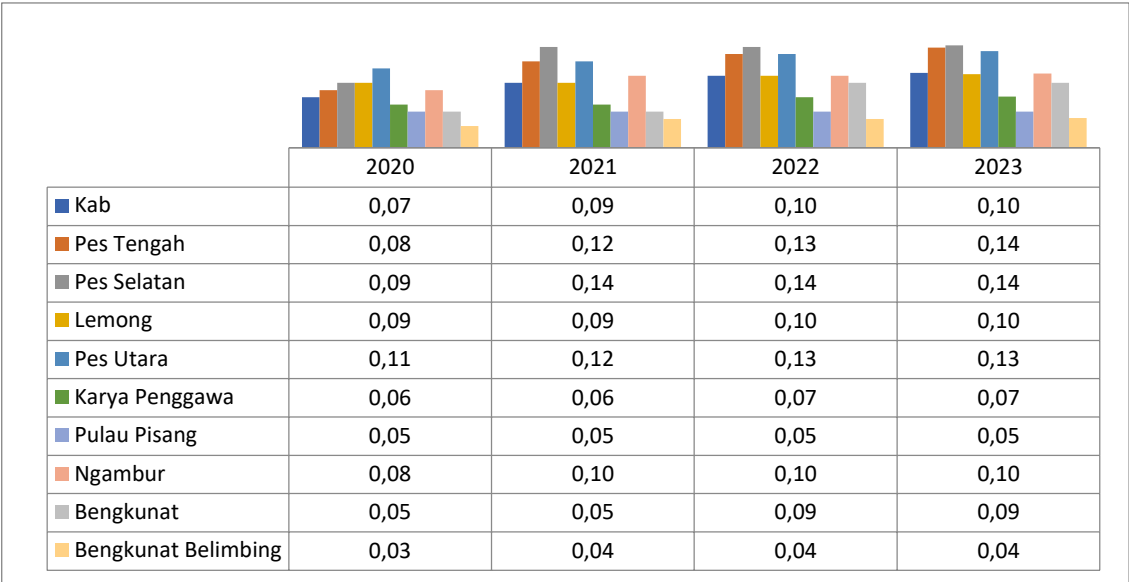
Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat, antara lain kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup.

Pada tahun 2023, cakupan indeks keluarga sehat di Kabupaten Pesisir Barat di angka 0,124.

Berikutnnya untuk penilaian Indeks Keluarga Sehat yang dinilai berdasarkan pada 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat terus meningkat, dimana pada tahun 2020 mendapatkan nilai indeks 0,07 tahun 2021 sebesar 0,09 dan tahun 2022 sebesar 0,10 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.37. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat terwujud. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Indeks kualitas keluarga Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2023 berada pada angka 64,07.

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak menggambarkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA), meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak.

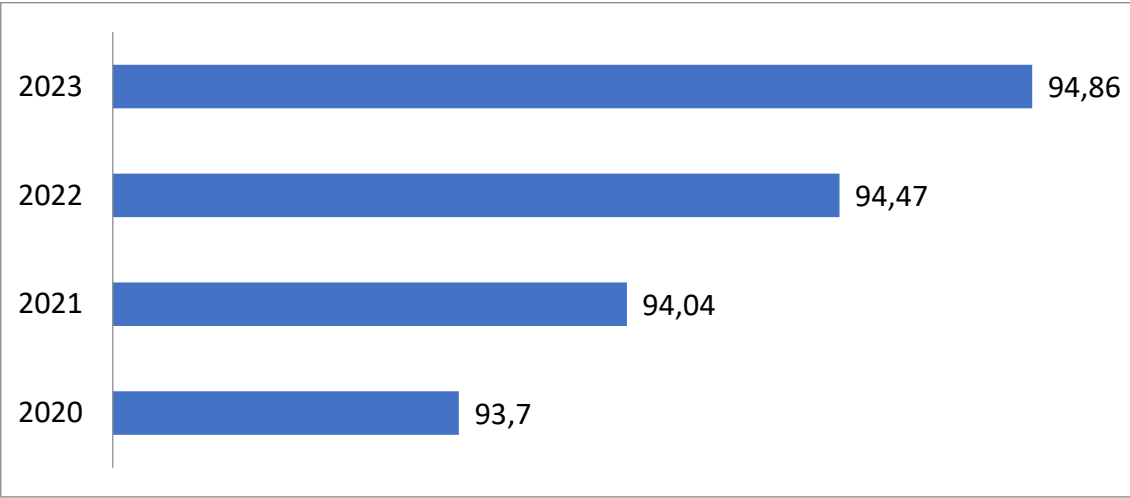
Hasil Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 sebesar 60,27, masih dibawah angka Provinsi Lampung sebesar 64,78.

2.2.2.4. Gender

Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2020 sebesar 93,70, dan pada tahun 2021 naik sebanyak (0,34) menjadi 94,04, dan

pada tahun 2022 capaian berada pada angka 94,47. Tahun 2023 capaian meningkat menjadi 94,86.

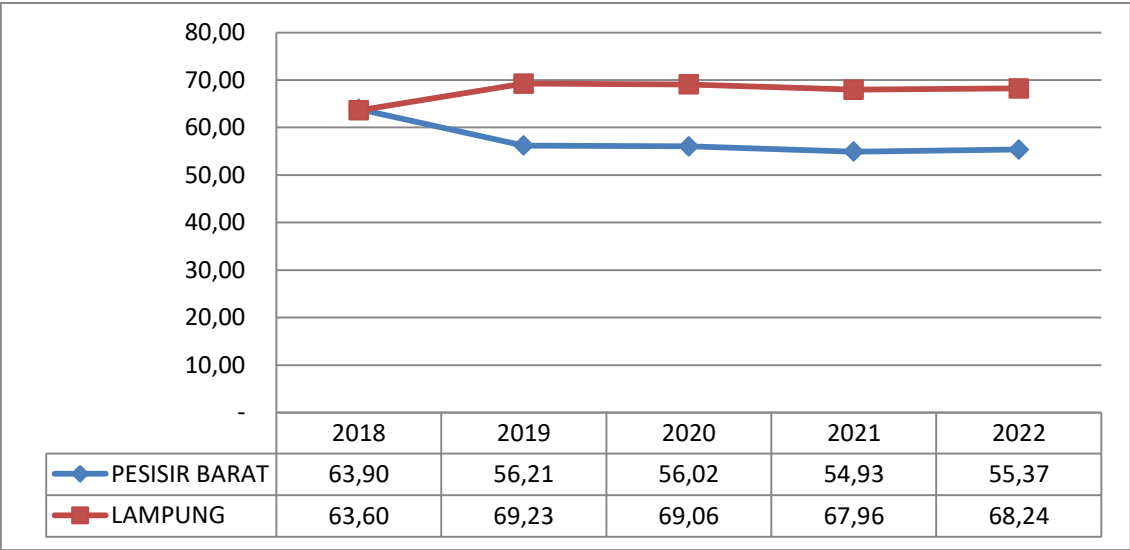
Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Di tahun 2018 IDG Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 63,90 dan turun menjadi 56,21 di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali turun di angka 56,02 dan 2021 menjadi 54,93. Sedangkan di tahun 2022 berhasil naik menjadi 55,37.

Gambar 2.39. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2023

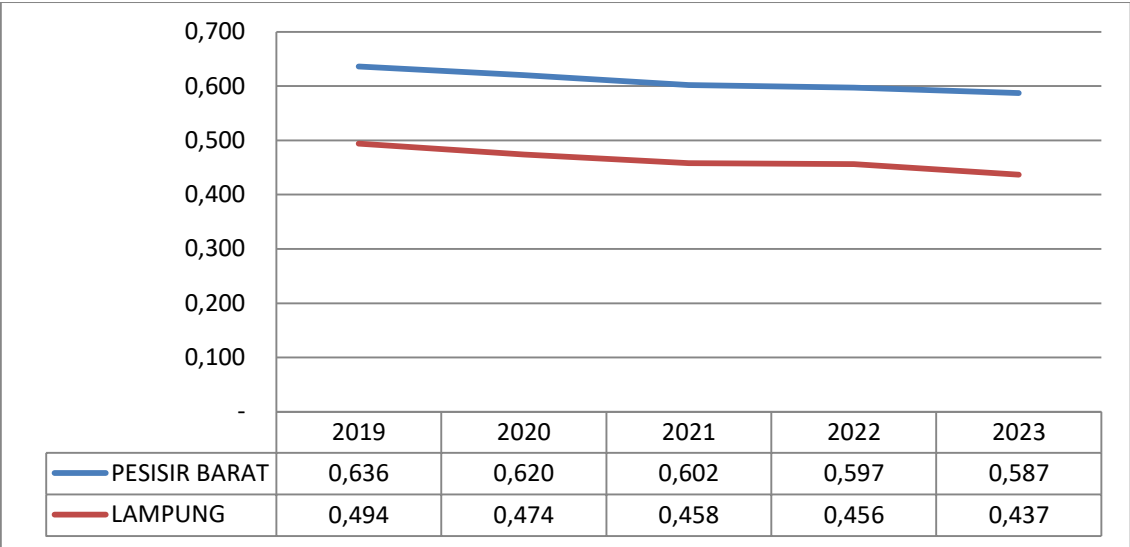


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Ketimpangan Gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adi pada gender tertentu, yang lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan.

Berikut dilampirkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Pesisir Barat dibandingkan dengan IKG Provinsi Lampung:

Gambar 2.40. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan paham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Lampung belum optimal. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 49,53 persen, masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 51 %. Merujuk data Statistik Pemuda Tahun 2022, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 23,39% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut 39,50% pemuda di Lampung telah tamat pendidikan SMP, 37,30% tamat SMA dan 8,23% tamat perguruan tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena tawuran, bullying, balapan liar.

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71. Angka capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 55,3 dan berada di atas capaian nasional, yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Pada capaian dimensi Ekonomi Budaya, capaian Provinsi Lampung hanya mencapai 18,61 sedangkan nasional 26,88. Pada dimensi Budaya Literasi Provinsi Lampung hanya mencapai 53,98 sedangkan nasional 57,40. Dan pada dimensi Gender Provinsi Lampung hanya mencapai 57,61 sedangkan nasional 59,30.

Sebagai bentuk dari upaya untuk mempromosikan kebudayaan daerah, Kabupaten Pesisir Barat selalu berupaya untuk dapat mengikuti dan/atau

melaksanakan kegiatan/event promosi kebudayaan. Kegiatan rutin yang diikuti setidaknya adalah (1) pementasan event nasional; (2) pementasan di Pameran Pembangunan Provinsi; (3) Pementasan di Pameran Pembangunan Kabupaten. Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan bersamaan dengan pengembangan pariwisata daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki banyak atraksi budaya khas yang merupakan salah satu magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah.

Ber macam kegiatan adat istiadat masyarakat asli Lampung Krui masih tetap ada dan lestari, sehingga dapat dijadikan sebagai potensi wisata budaya. Adapun daya tarik yang ditawarkan seperti upacara adat serta berbagai kesenian daerah. Selain itu, tempat-tempat bersejarah juga banyak dijumpai yang berguna untuk apresiasi seni dan budaya, penelitian sejarah serta ziarah. Obyek-obyek wisata budaya/religi tersebut diantaranya:

Tabel 2.42. Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Makam Abang Kunat	Ngaras	Makam Bersejarah
2	Goa Matu	Karya Penggawa	Goa Wisata
3	Makam Gajah Mada	Pesisir Utara	Makam Bersejarah
4	Makam Syekh Aminullah	Lemong	Makam Bersejarah
5	Tenun Tapis	Pulau Pisang	Praktek Tenun Tapis Lampung

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki beberapa kegiatan/event budaya yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, antara lain sebagai berikut:

- *Festival Teluk Stabas*, merupakan salah satu festival ragam budaya yang ada di daerah Pesisir Barat. Pelaksanaannya merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kegiatan Teluk Stabas ini diadakan perlombaan budaya dan olahraga lain: kebut Pesagi, Kebut Jukung (sampan), Pawai Budaya, dan lomba tarian adat tradisional.
- *Ngumbai Lawok*, merupakan pesta rakyat yang bermakna sedekah laut (ruwat laut). Pesta ini dilakukan biasanya setahun sekali di Krui.
- *Krui Fair*, merupakan event pameran pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini dalam pelaksanaannya bersanding dengan kegiatan Festivas Teluk Stabas.
- *Pentas Budaya Pesisir Barat*, merupakan event atraksi seni dan budaya Kabupaten Pesisir Barat dan. Pada acara ini juga menampilkan beberapa atraksi kesenian dari daerah lain, selain itu pada acara ini juga memberikan penghargaan dan/atau tali asih kepada seniman daerah yang berjasa dalam pengembangan kesenian asli.

Berikutnya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 telah ada pencatatan 9 Warisan Budaya Tak benda milik pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.43. Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Pesisir Barat

No	Tahun Penetapan	Nomor Penetapan	Nama Karya Budaya
1	2015	201500211	Gulai Taboh
2	2016	201600335	Kakiceran
3	2017	201700486	Nyambai
4	2018	201800656	Nyuncun Pahakh
5	2019	201900887	Hadra Ugan
6	2019	201900888	Ngunduh Damakh
7	2019	201900889	Ngejalang Kubokh
8	2019	201900890	Tari Dibingi
9	2020	202001155	Gulai Bebat

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Penetapan cagar budaya melalui Peraturan Daerah menjadi salah satu indikator kinerja yang ingin segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan cagar budaya ini akan memudahkan daerah dalam mengembangkan kebudayaan yang terarah dan terukur. Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan. Proses penyusunan Perda tentang Cagar Budaya akan menjadi perhatian daerah.

Tabel 2.44. Warisan Budaya Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Warisan Budaya	Keterangan
1	Goa Matu	Merupakan goa yang terbentuk secara alami yang berada pada Pantai Way Sindi Hanuan, Karya Penggawa
2	Lamban Gedung Penengahan	Merupakan istana bagi Kepaksian Penengahan. Luas lahan 438m ² , luas bangunan 192m ² dan didalamnya terdapat beberapa benda pusaka
3	Makam Syek Aminullah	Merupakan makam ahli agama yang berada pada wilayah TNBBS pada Pekon Pugung Tanjung Jaoh, Pugung
4	Lamban Gedung Marga Bangkumat	Merupakan istana bagi Marga Bangkumat, berdiri sejak 200 tahun yang lalu
5	Makam Syek Raja Makdum	Merupakan makam keramat bagi warga Pekon Kota Jawa, Bangkumat yang diperkirakan telah ada ratusan tahun lalu
6	Makam Bangkumat	Merupakan makam keramat Abang Kunat, pendiri daerah Bangkumat
7	Sumur Tua Kunat	Merupakan salah satu sumber air bersih pertama berusia ratusan tahun di daerah
8	Makam Gajah Mada	Merupakan makam yang dipercaya sebagai petilasan dari Patih Majapahit, Gajah Mada pada Pekon Pugung, Pesisir Utara
9	Goa Buyung	Merupakan goa yang terbentuk secara alami dan terdapat banyak Stalaktis dan Stalagmit berusia ribuan tahun dan berada pada Pekon

		Pahmungan, Krui Selatan
10	Keramat Ngambur Pekon Mon Pedanginan Tempat Muara Tembulih	Merupakan makam tua warga Pekon Mon, Ngambur
11	Keramat Karang Padung Sakti Singanom Jaganiti	Merupakan makam tua warga Ngambur
12	Lamban Gedung	Pekon Negeri Ratu Ngambur, Ngambur dan didalamnya terdapat bebebrapa pusaka
13	Lamban Gedung Marga Ulu Krui	Bangunan Adat Marga Ulu Krui, Way Krui
14	Lamban Dalom Marga Ulu Krui	Bangunan Adat Marga Ulu Krui, Way Krui
15	Keramat Tambak Balak Hirau Biha	Merupakan makam tua warga di Pesisir Selatan
16	Keramat Selalau Pekon Biha Tuha	Merupakan makam tua warga di Pesisir Selatan dan didalamnya terdapat beberapa pusaka
17	Lamban Adat Pekon Marang	Merupakan bangunan adat Marga Pekon Marang dan didalamnya terdapat beberapa pusaka

Sumber : Dinas P dan K, 2023

2.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah suatu produk barang/jasa untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik, regional, nasional dan internasional.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB

2.3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

Pada tahun 2018 PDRB ADHB sebesar 4.282,38 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2019 PDRB ADHB mencapai 4.687,39 (dalam miliar rupiah) dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.677,54 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, capaian PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat meningkat dengan capaian 4.896,56 (dalam miliar rupiah). Tahun 2022, PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi sebesar 5.349,44 (dalam miliar rupiah). Dalam kurun waktu lima tahun, hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB ADHB, Covid-19 merupakan penyebab utama dari penurunan dimaksud.

Penyumbang tertinggi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat adalah disektor pertanian dengan nilai PDRB tahun 2018 sebesar 2.183,97 (dalam miliar rupiah) atau naik 2,99% bila dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 nilai sektor ini pada tahun 2019 menjadi 2.272,17 (dalam miliar rupiah) dengan pertumbuhan 0,71% dan naik kembali menjadi 2.297,92 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2020 dengan perhitungan pertumbuhan 0,02%. Pada tahun 2021, sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan masih memberikan porsi terbesar dari PDRB ADHB dengan nilai 2.386,88 (dalam miliar rupiah) walaupun dari sisi pertumbuhan mengalami deficit -0,03. Tahun 2022, laju sektor ini kembali turun -3,32 dan tercatat dengan nilai 2.482,93 (dalam miliar rupiah). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penurunan nilai pada sektor pertanian deengan mengalami penurunan minor.

Penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor lainnya dan juga kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan sektor dimaksud. Namun demikian, penurunan ini dibarengi dengan peningkatan pada sektor-sektor lainnya. Sehingga nilai PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 secara umum terus meningkat dengan rata-rata nilai laju pertumbuhan sebesar 2,00-3,00% pertahun.

Pada level kedua penyumbang PDRB Tahun 2018 sampai dengan 2022 tetap sama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan tingginya sektor ini sebagai penyumbang PDRB terbesar di pengaruhi oleh meningkatnya pemenuhan kebutuhan sekunder dari masyarakat Pesisir Barat. Laju pertumbuhan pada sektor ini bila diratakan berada pada angka 9-15%. Tahun 2018 PDRB ADHB sektor ini sebesar 483,81 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9,86%. Data pada tahun 2019 nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran kembali meningkat sebesar 9,11% dengan nilai 607,25 (dalam miliar rupiah), namun pada tahun 2020 angka ini terkoreksi menjadi 588,48 (dalam miliar rupiah) atau dengan capaian laju sebesar -4,73%. Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor PDRB ADHB meningkat kembali menjadi sebesar 632,78 (dalam miliar rupiah) atau mengalami laju pertumbuhan dengan nilai 6,97%. Tahun 2022, sektor ini tercatat memiliki laju pertumbuhan sebesar 16,11% dengan nilai PDRB ADHB sebesar 785,43 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.45. PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.183,97	2.272,17	2.297,92	2.386,88	2.482,93
B	Pertambangan dan Penggalian	248,19	264,47	269,26	256,21	279,47
C	Industri Pengolahan	208,79	210,49	186,82	195,00	201,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,75	0,79	0,89	0,94

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,19	2,31	2,47	2,54
F	Konstruksi	252,84	328,72	320,31	370,67	430,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483,81	607,25	588,48	632,77	785,43
H	Transportasi dan Pergudangan	43,35	46,88	45,32	48,01	66,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,95	95,32	91,45	89,18	106,02
J	Informasi dan Komunikasi	95,74	105,02	107,66	117,07	121,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62,19	65,06	64,95	70,58	73,88
L	Real Estate	160,18	172,73	169,55	176,26	193,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,30	6,94	7,01	7,17	7,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	219,47	239,49	245,29	252,11	276,41
P	Jasa Pendidikan	150,63	169,79	177,81	185,92	199,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,69	50,37	55,52	58,47	61,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	44,56	49,71	47,09	46,87	60,60

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	PDRB ADHB	4.282,38	4.687,39	4.677,54	4.896,56	5.349,44

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*angka sementara

**angka sangat sementara

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, hampir disemua sektor. Walaupun PDRB dari tahun ketahun cenderung naik tetapi pada lajunya terlihat stagnan. Hal ini di pengaruhi banyak faktor terutama faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik nasional dan regional. Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun lima tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran. Pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan nesa dam eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan jasa lainnya tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB.

Selanjutnya, bila melihat pada PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sejalan dengan kondisi perekonomian daerah yang terus meningkat. Penyumbang persentase terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan dengan komponen pengeluaran adalah (i) Konsumsi Rumah Tangga; (ii) PMTB; (iii) Net Ekspor Barang dan Jasa (iv) Konsumsi Pemerintahan; (v) Konsumsi LNPRT dan (vi) Perubahan Inventori.

Konsumsi Pemerintah masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Konsumsi rumah tangga, dengan perbandingan $\pm 2.000,00-3.000,00$ (dalam miliar rupiah). Konsumsi pemerintah pada tahun 2018 sebesar 142,73 (dalam miliar rupiah) dan sebesar 147,14 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2019. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan minor dan berada pada angka 146,50 (dalam miiar rupiah), dimana penurunan akibat refocusing anggaran pemerintah daerah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19. Tahun 2021, tercatat nilai Konsumsi Pemerintah meningkat menjadi 149,45 (dalam miliar rupiah). Berikutnya pada tahun 2022, tercatat sebesar 147,23 (dalam miliar rupiah), penurunan nilai ini lebih disebabkan pada kemampuan fiskal daerah yang secara umum juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan kemampuan belanja barang/jasa pengeluaran pemerintah daerah juga menurun.

Secara umum, PDRB ADHB menurut pengeluaran dari tahun 2018-2022 rata-rata berada pada kisaran angka 4.000,00–5.000,00 (dalam miliar rupiah), perhitungan ini berdasarkan pada data tahun 2018 pada angka 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dan di tahun 2019 masih terus meningkat menjadi sebesar 4.687,39 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020 tetap meningkat namun dengan margin yang tidak terlalu besar sehingga berada pada angka 4.692,20 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021 capaian kembali naik menjadi sebesar 4.919,53 (dalam miliar rupiah). Data tahun 2022 tercatat sebesar 5.349,44 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan sebanyak 429,91 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.46. PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	PDRB ADHB Kategori Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.009,36	3.285,05	3.283,83	3.373,76	3.717,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,19	84,65	87,02	90,20	96,19
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,73	147,14	146,50	149.45	147,23
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	933,61	1.068,19	1.017,88	1.110,62	1.205,95
5	Perubahan Inventori	63,79	18,96	11,08	7,17	7,46
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	57,70	83,40	145,88	188,33	175,36
	PDRB	4.282,38	4.687,39	4.692,20	4.919.53	5.349,44

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023
*angka sementara
**angka sangat sementara

2.3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

Secara konstan selama kurun waktu tahun 2018 PDRB ADHK sebesar 2.944,88 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,35%. Pada tahun 2019 pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 5,37% dengan nilai PDRB ADHB mencapai 3.106,00 (dalam miliar rupiah). Baru pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami penurunan menjadi (-1,17%) dengan nilai 3.069,60 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021 kembali naik 2,07% sehingga nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha berada pada angka 3.113,19 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2022, laju PDRB ADHK meningkat sebesar 2.88%, sehingga secara keseluruhan angka PDRB ADHK tercatat sebesar 3.223,12 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.47. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian,	1.486,37	1.496,95	1.497,31	1.496,80	1.446,43

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Kehutanan, dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	161,22	171,48	171,48	161,61	170,83
C	Industri Pengolahan	147,17	147,703	128,66	131,65	130,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0,55	0,58	0,63	0,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41	1,44	1,51	1,60	1,63
F	Konstruksi	176,62	226,95	222,35	243,77	260,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362,01	394,99	379,17	405,61	470,97
H	Transportasi dan Pergudangan	30,38	32,66	31,12	31,91	39,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,53	59,03	56,35	54,48	63,01
J	Informasi dan Komunikasi	68,87	75,12	77,37	85,71	88,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,86	43,10	43,23	44,82	43,37
L	Real Estate	115,06	122,25	117,61	121,66	129,79
M,N	Jasa Perusahaan	3,96	4,29	4,22	4,27	4,45
O	Administrasi Pemerintahan,	136,80	148,97	150,96	155,82	166,03

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	102,62	112,35	116,94	120,94	126,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,33	35,11	38,45	39,95	41,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,25	33,81	32,29	31,94	39,82
	PDRB ADHK	2.944,88	3.106,11	3.069,60	3.133,19	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*angka sementara

**angka sangat sementara

Berikutnya disampaikan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.48. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	PDRB ADHK Kategori Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.112,13	2.237,12	2.195,72	2.206,58	2.310,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46,45	51,49	51,90	52,63	53,55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,50	98,57	96,10	96,69	93,89
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	652,79	727,03	670,11	702,02	732,58
5	Perubahan Inventori	37,13	8,29	14,61	4,29	4,40
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,11	-16,40	41,17	70,98	28,64
	PDRB	2.944.88	3.106.11	3.069.60	3.133,19	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*angka sementara

**angka sangat sementara

2.3.1.2 PDRB Perkapita

Dilihat dari jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pada tahun 2018 sebesar 27.85 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2019 PDRB Perkapita berada pada angka 30,25 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020, PDRB Perkapita turun mengikuti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada minus 1,18% dengan nilai 28.89 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah, PDRB perkapita berhasil naik 1,30% sehingga menjadi sebesar 30.06 (dalam miliar rupiah). Tahun 2022, tercatat nilai PDRB Perkapita daerah kembali mengalami kenaikan 2,40 poin dengan catatan nilai sebesar 32.46 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.49. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2018	4,282.38	153,743	27.85
2019	4,687.39	154,973	30.25
2020	4,677.54	162,419	28.89
2021*	4,896,56	163,641	30.06
2022**	5,349,44	164,810	32,46

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

*angka sementara

**angka sangat sementara

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Hijau

Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan efektifitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Prinsip Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan kesejahteraan sosial serta menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Fokus dari *Green Economy Index* adalah meningkatkan investasi hijau untuk pilar ekonomi; mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau (pilar lingkungan), dan memberdayakan sumber daya manusia (pilar sosial). Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Pilar lingkungan dengan 5 indikator yaitu:
 - 1) Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia

- 2) Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer
- 3) Persentase sampah terkelola
- 4) Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline
- 5) Penurunan tutupan lahan gambut
- b. Pilar ekonomi dengan 6 indikator yaitu:
 - 6) Intensitas emisi
 - 7) Intensitas energi final
 - 8) Pendapatan regional bruto per kapita
 - 9) Produktivitas pertanian
 - 10) Produktivitas tenaga kerja sektor industri
 - 11) Produktivitas tenaga kerja sektor jasa
- c. Pilar sosial dengan 4 indikator yaitu:
 - 12) Rata-rata lama sekolah
 - 13) Angka harapan hidup
 - 14) Tingkat kemiskinan
 - 15) Tingkat pengangguran terbuka

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang bekerja secara garis besar masih didominasi oleh lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, karena tidak mungkin selamanya bergantung pada sektor pertanian, pengembangan daerah harus bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa/service. Data dimaksud dilihat dari sisi distribusi PDRB menurut lapangan pekerjaan.

Tabel 2.50. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2021-2022

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Berusaha Sendiri	12.927	14.432	3.948	5.195	16.875	19.627
2	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	11.031	16.330	3.189	2.884	14.220	19.174
3	Berusaha dibantu	1.285	886	0	150	1.285	1.036

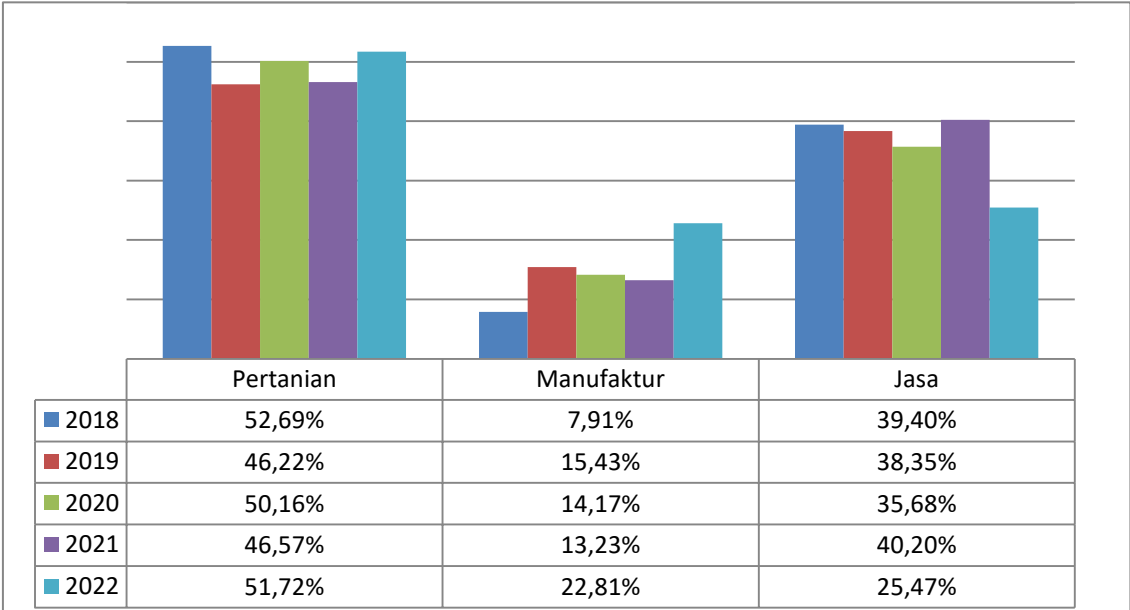
	Buruh Tetap						
4	Buruh/Karyawan/ Pegawai	7.815	5.556	6.872	6.126	14.687	11.682
5	Pekerja Bebas	12.132	8.612	4.263	2.503	16.395	11.115
6	Pekerja Keluarga	5.435	4.362	13.175	11.790	18.610	16.152
	Jumlah	50.625	50.178	31.447	28.608	82.072	78.786

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada data diatas terlihat bahwa kondisi penduduk yang bekerja lebih banyak berusaha sendiri dibandingkan dengan bekerja yang dibantu oleh buruh tetap/karyawan. Hal ini dapat memberikan gambaran singkat tentang kondisi pekerjaan di daerah yang sederhana, konvensional dan mampu dikerjakan secara mandiri/keluarga. Gambaran ini masih terkait dengan pola jenis pekerjaan di daerah yang masih didominasi pada sektor pertanian.

Sektor pertanian tentunya masih menjadi sektor yang memberikan lapangan pekerjaan terluas di daerah, dari tahun 2018-2022 selalu menjadi sektor penopangan perekonomian daerah. Sementara itu sektor jasa kecenderungannya mengalami kenaikan walaupun secara bertahap, hal yang juga dialami oleh sektor manufaktur daerah.

Gambar 2.41. Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



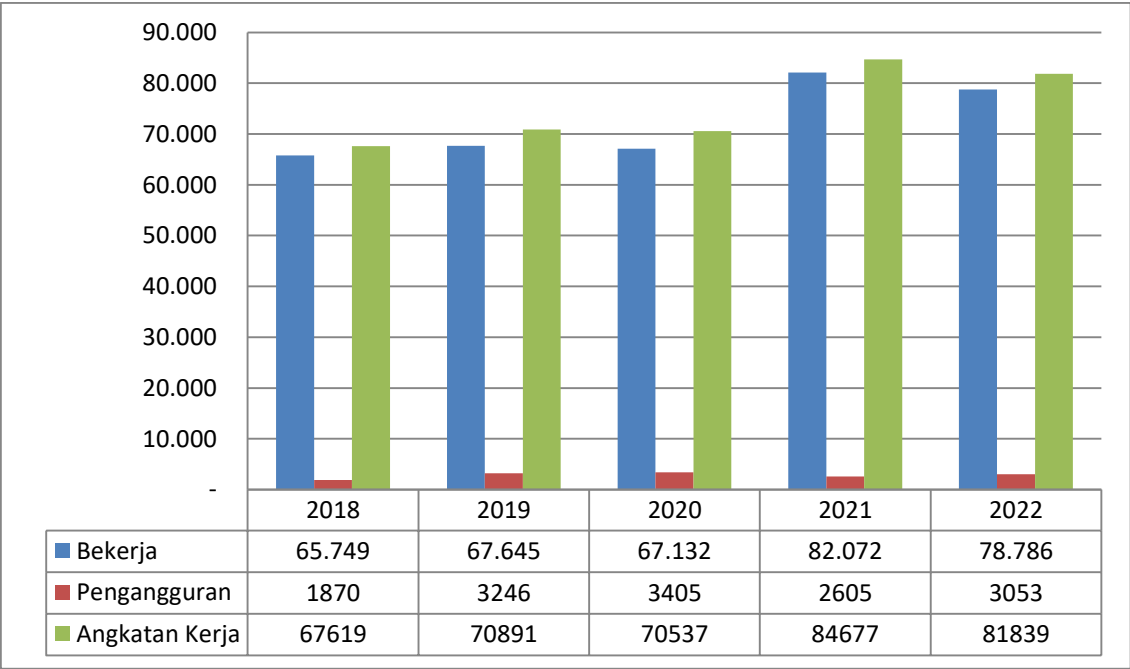
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat – Dinas Dukcapil, 2023 (diolah)

Jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bekerja pada tahun 2021 adalah 96,92% dimana terdapat 82.072 orang penduduk yang bekerja dari total angkatan kerja sebesar 84.677 orang. Pada tahun 2022 terjadi perbaikan persentase menjadi 96,27% yang terdiri dari 78.786 orang

yang bekerja dari jumlah angkatan kerja sebesar 81.839 orang angkatan kerja. Sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebanyak 65,749 orang dan terus naik pada tahun 2019 sebanyak 67,645 orang. Tahun 2019 jumlah yang bekerja kembali naik menjadi 67,132 orang.

Naiknya jumlah orang yang bekerja diiringi dengan meningkatnya jumlah pengangguran di daerah. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran yang tercatat sebanyak 1.870 orang. Naik drastis pada tahun 2019 menjadi 3.246 orang. Tahun 2020 ketika terjadi Bencana Covid-19 kembali naik menjadi sebanyak 3.405 orang. Tahun 2021, jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 2.605 orang. Data terakhir untuk tahun 2022 tercatat sebanyak 3.053 orang pengangguran di daerah.

Gambar 2.42. Perbandingan Penduduk yang Bekerja, Pengangguran dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di suatu daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Barat yang masih dalam taraf awal pembangunan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi dalam pembangunan pendidikan ini, melalui banyak program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat.

Tabel 2.51. Data Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik		Ruang Belajar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	21	21	51	50	617	645	33	33
2	Bangkunat	17	17	38	41	520	514	32	32
3	Pesisir Selatan	14	14	31	33	513	448	25	25
4	Ngambur	13	13	12	12	138	106	11	11
5	Lemong	14	14	19	21	320	299	19	19
6	Ngaras	7	7	26	13	344	191	9	9
7	Karya Penggawa	10	10	13	24	235	317	24	24
8	Pesisir Utara	7	8	12	11	151	25	13	15
9	Krui Selatan	6	7	11	12	222	190	9	11
10	Way Krui	8	7	10	12	165	137	13	11
11	Pulau Pisang	1	1	3	3	26	27	2	2
Jumlah		118	119	226	232	3.251	2.899	190	192

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berdasarkan pada data di atas, beberapa kecamatan masih belum memiliki rasio ideal antara guru dan murid, atau rata-rata 1:14 dari idealnya 1:10. Hampir disemua kecamatan kecuali kecamatan Krui Selatan (1:9) dan Pulau Pisang (1:7) memiliki rasio guru dan murid yang belum ideal. Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Kecamatan Pesisir Utara (1:17), Kecamatan Ngaras (1:17) dan Kecamatan Lemong (1:16).

Tabel 2.52. Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	19	19	186	184	2.729	2.759
2	Bangkunat	17	17	261	262	3.107	3.051
3	Pesisir Selatan	17	17	218	221	2.895	2.116
4	Ngambur	14	15	171	169	2.342	2.131
5	Lemong	12	12	148	151	1.307	865
6	Ngaras	12	12	123	115	1.663	894
7	Karya Penggawa	12	12	111	122	112	884
8	Pesisir Utara	9	9	127	120	112	943
9	Krui Selatan	8	8	84	84	961	687
10	Way Krui	5	5	55	53	523	516
11	Pulau Pisang	2	2	20	21	115	73
Jumlah		127	128	1.504	1.502	15.886	14.919

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Sementara itu, untuk pendidikan dasar, rasio antara guru dan murid secara umum berada pada angka 1:12. Kecamatan yang sudah mencukupi ketersediaan guru dibandingkan dengan murid adalah kecamatan Pesisir Utara (1:8), Kecamatan Lemong (1:8), Kecamatan Ngaras (1:9), Kecamatan Way Krui (1:10) dan Kecamatan

Pulau Pisang (1:6). Sementara itu Kecamatan yang belum ideal rasio guru dan muridnya Pesisir Tengah (1:15) dan Kecamatan Karya Penggawa (1:14).

Tabel 2.53. Data Pendidikan Tingkat SMP Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

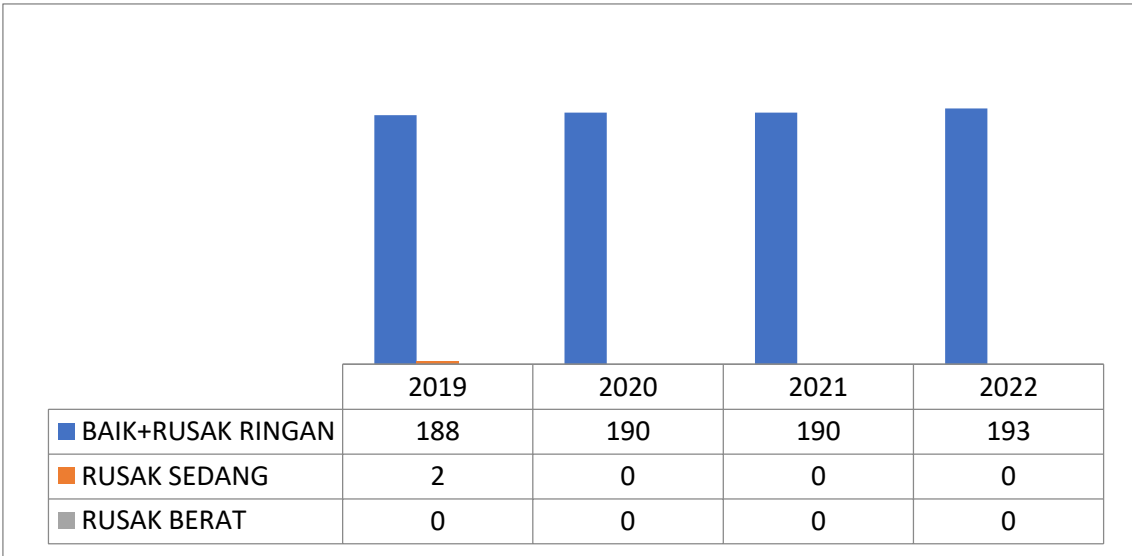
No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	6	6	157	151	1.620	1.710
2	Bangkunat	5	5	115	107	883	849
3	Pesisir Selatan	7	7	132	125	1.077	1.035
4	Ngambur	3	3	96	93	813	780
5	Lemong	1	1	86	82	511	516
6	Ngaras	5	5	37	65	271	267
7	Karya Penggawa	2	2	66	39	378	325
8	Pesisir Utara	4	4	42	41	310	308
9	Krui Selatan	1	1	30	34	358	334
10	Way Krui	1	1	36	36	196	188
11	Pulau Pisang	1	1	11	11	71	66
Jumlah		36	36	808	784	6.448	6.378

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berdasarkan pada data pendidikan tingka SMP di Kabupaten Pesisir Barat, disemua kecamatan rata-rata rasio siswa dan murid berada pada 1:7 dengan Kecamatan Ngaras yang memiliki rasio terbaik 1:4 serta sKecamatan Pesisir Tengah dengan rasio terendah dengan angka 1:10. Sementara itu, kecamatan lain berada pada posisi ideal dengan angka 1:5-1:8.

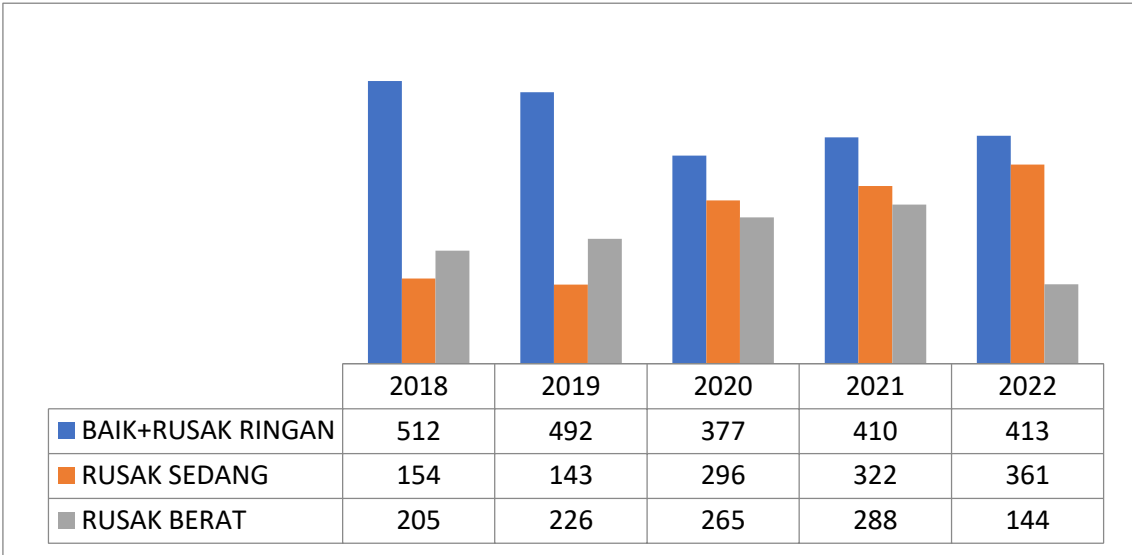
Sektor pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih terkendala dengan masih banyak ruang kelas yang dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Di bawah ini tabel kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP.

Gambar 2.43. Kondisi Bangunan Ruang Kelas PAUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022



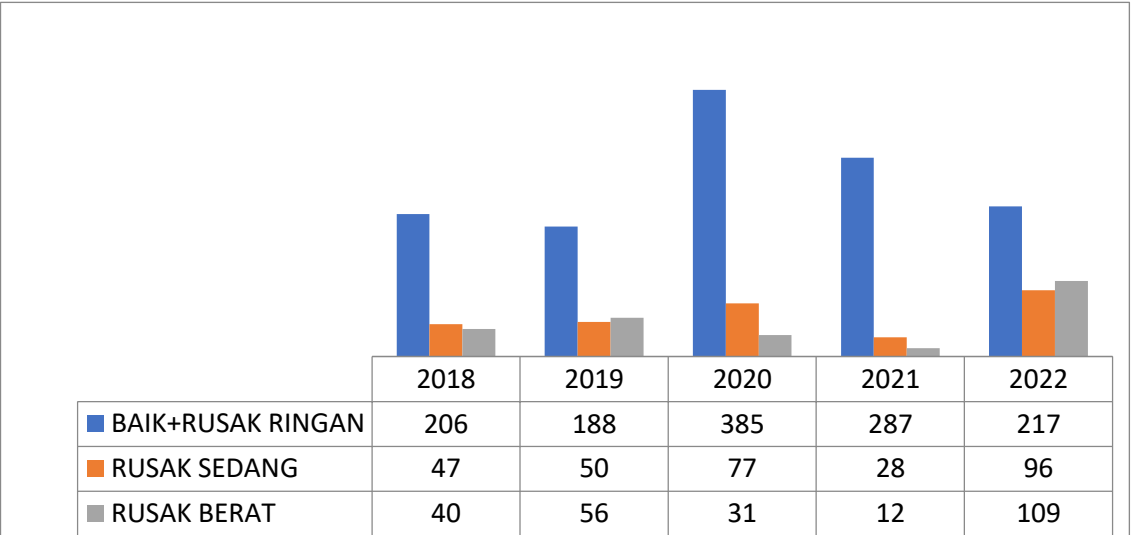
Sumber : Disdikbud, 2023

Gambar 2.44. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Disdikbud, 2023

Gambar 2.45. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Disdikbud, 2023

Angka Melek Huruf

Kesejahteraan sosial dengan beberapa indikator keberhasilan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Barat, terdapat perkembangan angka melek huruf dan penurunan buta aksara setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54. Angka Melek Huruf Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Angka Melek Huruf	98,41	98,79	98,09	98,59

Sumber : BPS Lampung, 2024

Pada tabel di atas, Angka Melek Huruf Kabupaten Pesisir Barat telah tercapai sangat tinggi, sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,7% dan naik kembali di tahun 2023 menjadi 98.59. Capaian terhadap indikator di atas masih belum maksimal, dikarenakan perkembangan dari tahun ke tahun yang cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan belum menyeluruh hingga seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat pingggiran dan marginal yang belum memperoleh akses terhadap pendidikan yang murah, mudah dan terjangkau dari sisi biaya dan akomodasi.

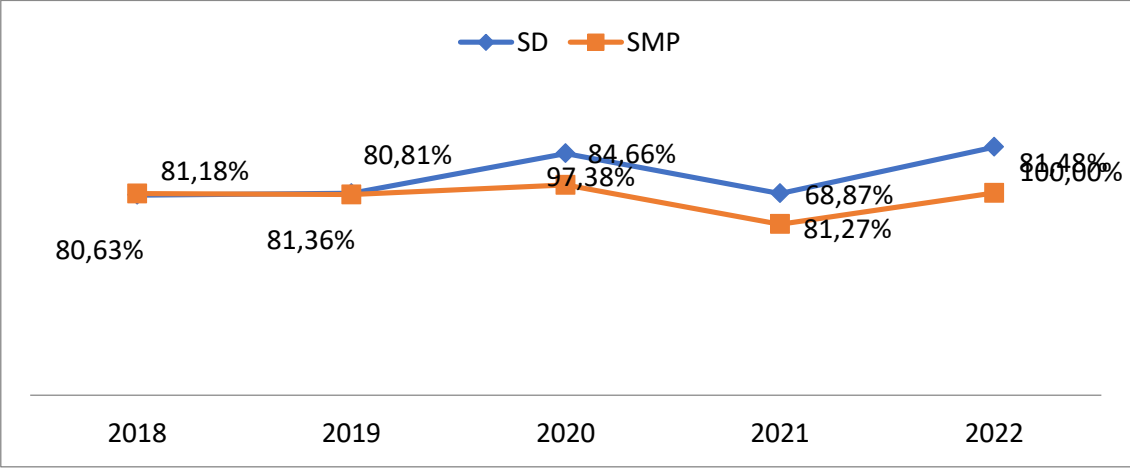
Sementara itu bila melihat pada data Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik tingkat pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah pertama terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan signifikan. Tahun 2022 kembali APS SD naik mencapai 100%. Sementara itu, APS SMP belum bisa mencapai angka 100%.

Tabel 2.55. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah SD	80,63	81,36	97,38	81,27	100
Angka Partisipasi Sekolah SMP	81,18	80,81	84,55	68,87	81,48

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Gambar 2.46. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas P dan K, 2023

Terkait dengan data anak usia sekolah yang putus sekolah (tidak sekolah), pada tahun 2021 didapatkan data bahwa sebanyak 19 orang pada tingkat SD sementara pada tingkatan SMP sebanyak 8 orang. Sementara pada tahun 2022 sebanyak 49 orang pada tingkat SD dan 6 orang pada tingkat SMP. Atau bila dijumlahkan sebanyak 68 orang pada tahun 2021 anak usia sekolah pendidikan dasar SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dan 14 orang pada tahun 2022.

Tabel 2.56. Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	SD		SMP	
		2021	2022	2021	2022
1	Ngaras	1	11	1	0
2	Bangkunat	9	15	0	1
3	Karya Penggawa	0	1	0	0
4	Krui Selatan	2	0	0	0
5	Lemong	0	0	0	0
6	Ngambur	2	1	0	0
7	Pesisir Selatan	0	2	0	0
8	Pesisir Tengah	3	11	1	5
9	Pesisir Utara	2	6	0	0
10	Pulau Pisang	0	0	0	0
11	Way Krui	0	2	6	0
	Jumlah	19	49	8	6

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berikutnya adalah beberapa data indikator pendidikan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 dan Kemendikbud Ristek nomor 311 tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.57. Indikator Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian	
		2021	2022
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	60.70	59.47
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	96.06	95.18
3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)	2.19	1.84
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	40.77	44.30
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	30.23	34.14
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56.90	62.22
7	Rerata kompetensi Numeransi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52.81	53.56
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	58.33	53.57
9	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	58.33	53.57
10	Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akade mik paling rendah D-IV/S1	30.91	32.30
11	Indeks iklim keamanan SD	63.68	78.56
12	Indeks iklim kebhinekaan SD	63.06	78.34
13	Indeks Inklusivitas SD	63.81	71.26
14	Indeks iklim keamanan SMP	69.39	78.40
15	Indeks iklim kebhinekaan SMP	58.97	75.53
16	Indeks Inklusivitas SMP	66.45	73.93

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Untuk mengukur Indeks Pendidikan menggunakan 2 komponen yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan anak berusia 15 tahun keatas yang menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan 2 batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimumnya 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi 100% atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM (BPS,2010).

Tabel 2.58. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

URAIAN	2023
Angka Melek Huruf	97,16
Rata-Rata Lama Sekolah	8,70
Indeks Pendidikan	67,67

Sumber : BPS Lampung, 2023 (data diolah)

2.3.2.2. Indeks Literasi / Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi merupakan Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan dan mengevaluasi beragam jenis teks (Teks Informasional dan Teks Fiksi) sedangkan Kemampuan Numerasi merupakan Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Tabel 2.59. Capaian Kemampuan Literasi/Numerasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

Uraian	Capaian 2023
Literasi	36,12
Numerasi	26,35

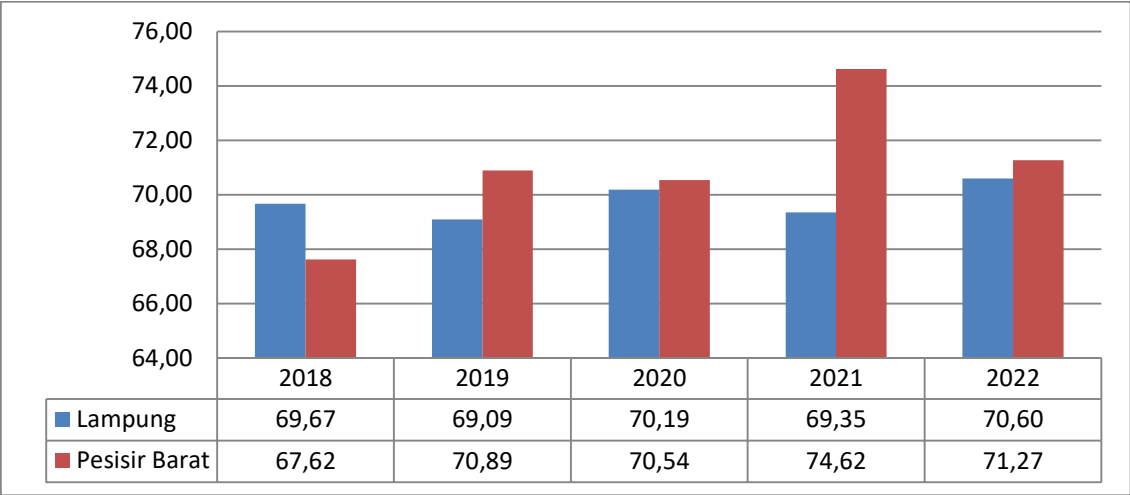
Sumber : Rapor Pendidikan, 2023

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Data ketenagakerjaan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) pada tahun 2018 dengan capaian 67,62% dan tahun 2019 dengan capaian TPAK menjadi 70,89%. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Pesisir Barat menurun menjadi

70,54%. Angka 70,54% ini sedikit diatas Provinsi Lampung dengan nilai TPAK 70,19%. Tahun 2021, nilai TPAK Kabupaten Pesisir Barat mencapai 74.62% atau meningkat 4,1%, capaian ini lebih baik dari Provinsi Lampung dengan nilai 69.35. pada tahun 2022, nilai TPAK daerah mengalami penurunan menjadi 71,27% dengan nilai TAPK Provinsi Lampung yang naik menjadi 70,60%. Penurunan TPAK daerah diiringi dengan kenaikan jumlah pengangguran daerah.

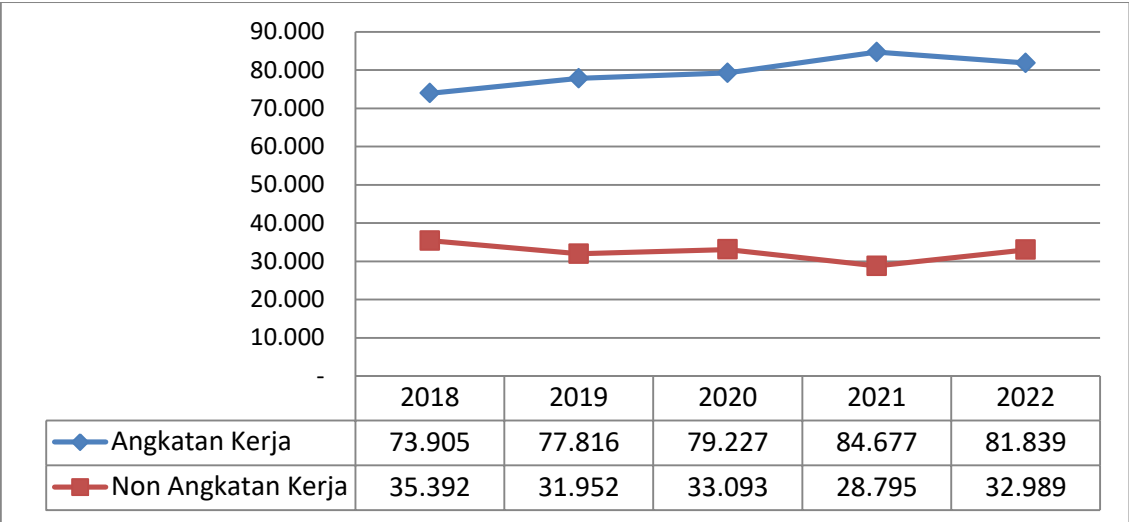
Gambar 2.47. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Naik turunnya data angkatan kerja akan berbanding terbalik dengan nilai bukan angkatan kerja, Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi angkatan kerja yang besar, berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 73.905 orang (67,62%) dan meningkat menjadi 77.861 orang (70,89%) pada tahun 2019. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 79.227 orang (70,54%). Data tahun 2021 menunjukkan perbaikan, dengan capaian 84.677 orang atau (74.62%). Tahun 2022, jumlah Angkatan Kerja di daerah mengalami penurunan sehingga menjadi 81.839 orang (71,63%).

Gambar 2.48. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 84.677 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 51.762 orang dan perempuan sebanyak 32.951 orang. Data tahun 2022 sejumlah 78.786 orang, dengan jumlah laki-laki 50.178 orang dan perempuan 28.608 orang. Bila dibandingkan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan cenderung berimbang atau dengan perhitungan tenaga kerja laki-laki sebanyak 62-63% dan perempuan 37-38%.

Tabel 2.60. Jumlah Tenaga Kerja Persektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

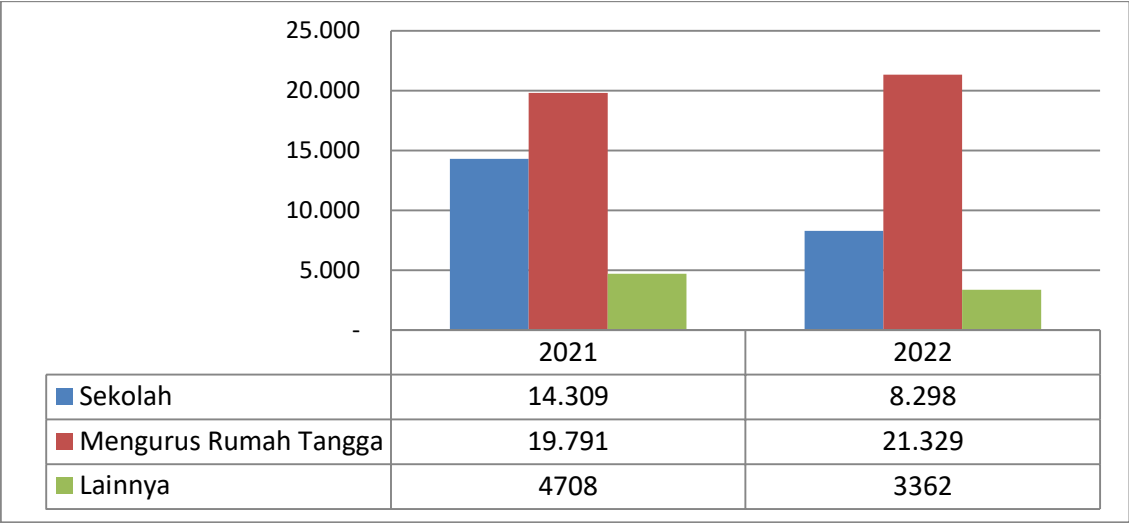
No	Sektor Pekerjaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	38,213	34,801	38,385	38,220	37,284
2	Manufaktur	5,739	11,618	10,842	10,856	10,818
3	Jasa	28,571	28,871	27,302	32,996	30,684
	Jumlah	72,523	75,290	76,529	82.072	78.786

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja pada sektor pertanian masih mendominasi sektor pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018-2022. Secara umum sektor pertanian menyumbang 46-50% jumlah tenaga kerja, berikutnya sektor jasa dengan sumbangan 34-39%. Sementara itu untuk sektor manufaktur memberikan sumbangan 13-14% dari total sektor pekerjaan.

Lebih lanjut, dibawah ini adalah gambaran tentang Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat, dimana jumlah terbesar dari kelompok ini adalah orang tua yang mengurus rumah tangga, siswa/siswi atau mahasiswa/mahasiswi yang ketiga adalah bagian lainnya.

Gambar 2.49. Klasifikasi Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

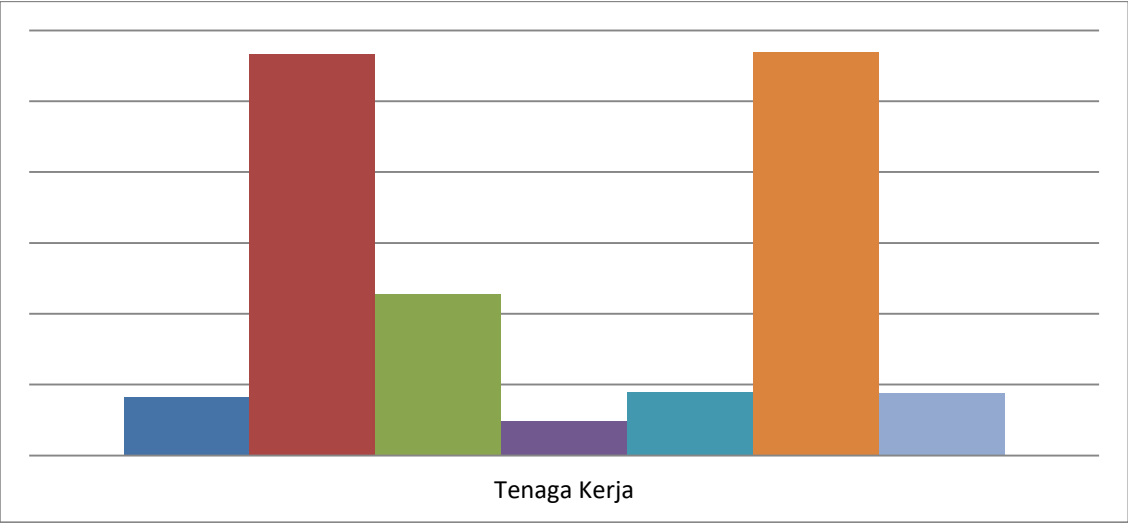
Terkait dengan data pencari kerja yang terdaftar pada pemerintah daerah melalui dinas terkait didapatkan data bahwa sebanyak 803 pencari kerja pada tahun 2022. Dari 803 orang tersebut sebanyak 643 orang telah mendapatkan pekerjaan (ditempatkan tersebar). Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61. Jumlah Pencari Kerja AK-1 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Bulan	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana
1	Januari	22	35	1	1	53	2	0
2	Februari	8	10	0	1	14	2	1
3	Maret	9	12	0	0	19	0	2
4	April	15	30	0	4	35	0	6
5	Mei	79	109	0	6	172	3	7
6	Juni	44	36	0	1	75	0	4
7	Juli	42	69	0	0	101	1	9
8	Agustus	44	51	0	2	87	0	6
9	September	31	32	0	0	62	0	1
10	Oktober	20	41	0	1	58	0	2
11	November	19	19	0	2	30	2	4
12	Desember	13	13	0	0	21	1	4
	Jumlah	346	457	1	18	727	11	46

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Gambar 2.50. Pelaku Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

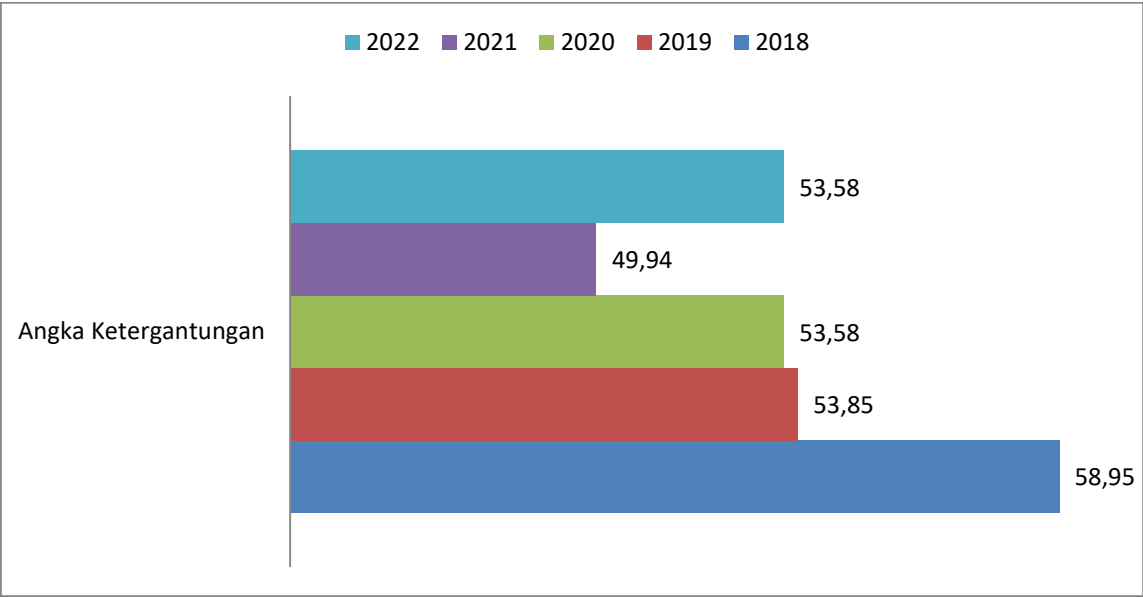


Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

2.3.2.4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Struktur penduduk Lampung di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,60% (862,95ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 15,42% (1,606 juta penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Lampung yang sudah melebihi 10% dari total penduduk Lampung. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang *ageing population* antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang dipersiapkan makan akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

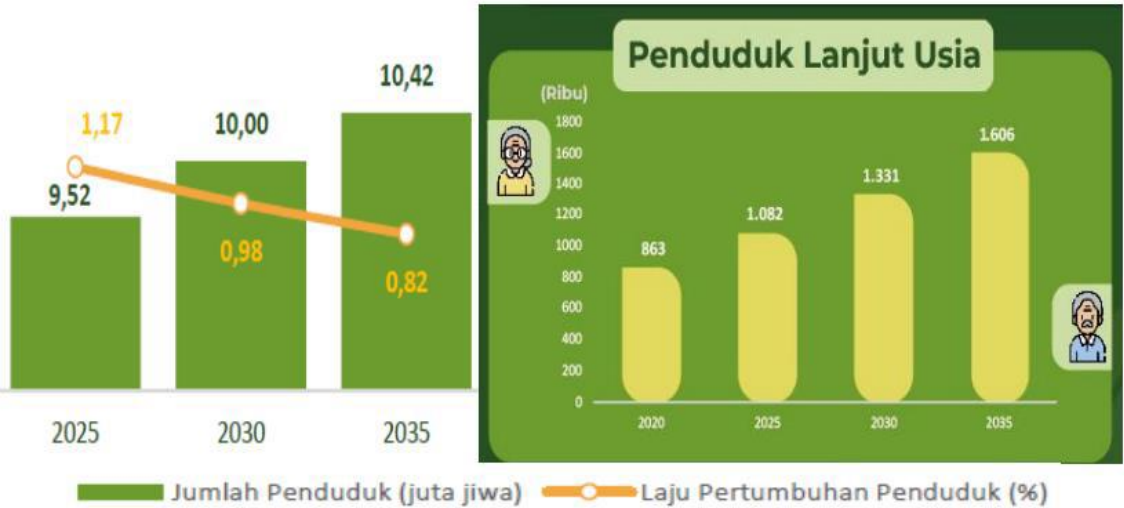
Gambar 2.51. Angka Ketergantungan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 angka ketergantungan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 58,95, atau dibulatkan menjadi 59,0 yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung 59 penduduk tidak produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan suatu daerah, menggambarkan tingginya ketergantungan penduduk usia non produktif, serta mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Gambar 2.52. Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, serta Jumlah Penduduk Lansia Tahun 2025-2035



Dari setiap 100 penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) menanggung sekitar 49 penduduk usia nonproduktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,72 % ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 15,36 %. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.

Gambar 2.53. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Lampung Tahun 2020-2035



2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Perkembangan Konektivitas Wilayah

Indikator utama pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan konektivitas suatu wilayah adalah terwujudnya kelancaran dan keselamatan transportasi baik angkutan penumpang maupun barang. Untuk mencapai sasaran indikator tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan lalu-lintas angkutan penumpang dan barang antara lain adalah meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.

Kemudian, salah satu keunggulan Kabupaten Pesisir Barat adalah memiliki ketersediaan Bandar Udara sebagai salah satu pendukung transportasi udara menuju Kabupaten Pesisir Barat dan wilayah sekitar. Pada Bulan November 2016 telah dilaksanakan serah terima aset Bandar Udara M. Taufik Kiemas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Total luas area Bandara sebesar 75,624Ha dengan Panjang run way saat Ini adalah 1.700 meter dan lebar 23 meter, serta apron yang ada pada Bandara berukuran 91 X 55 meter dengan kapasitas untuk 2 (dua) pesawat. Mulai tahun 2019, Maskapai Wings Air telah membuka jalur penerbangan Krui-Bandar Lampung. Berikutnya tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan penerbangan dikarenakan efek dari Covid-19 yang membatasi pergerakan orang dan barang.

Untuk fasilitas Bandara Muhammad Taufiq Kiemas yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut:

- a. Gedung Terminal Luas 400 M2, Kapasitas 20 Penumpang.
- b. Kantor Bandara
- c. Power House

- d. Rumah Pompa Air
- e. Pos Keamanan
- f. Operasial Housing

Berikut adalah akses lokasi Bandar Udara M. Taufik Kiemas, Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 2.62. Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Menuju Lokasi	Jarak (Km)
1	Tanjung Setia	± 29,5
2	Labuhan Jukung	± 3
3	Pasar Krui	± 3,8
4	Kantor Bupati Pesisir Barat	± 3,6
5	Liwa	±35,8
6	Kota Agung	±156,3
7	Kaur	±126,4
8	Bandar Lampung (Via Liwa)	± 275
9	Bandar Lampung (Via Kota Agung)	± 247,8
10	Bandar Udara Radin Intan Ii (Via Liwa)	± 243

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.63. Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Fasilitas	Keterangan
1	Panjang Landasan	1.700 m X 23 m
2	Apron	91 m X 55 m
3	Jalur Taksi (Taxy Way)	98 m X 18 m
4	Ruang Istirahat (Rest Area)	90 m X 46 m
5	Jalan akses Bandara Seray	1.800 m X 25 m

6	Gedung Administrasi	2 Unit
7	Rumah Dinas	3 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Perhubungan terkait dengan mobilitas manusia maupun barang baik dalam rangka perpindahan, aktivitas maupun distribusi. Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Barat turut berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya simpul-simpul transportasi dan akses masyarakat.

Tabel 2.64. Lintasan Trayek Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Uraian	Trayek Perhubungan	
		No	Keterangan
I	Angkutan Jalan		
	Lintasan Trayek	1	Liwa (Lampung Barat) – Terminal Way Batu (Kec. Pesisir Tengah) – Way Heni (Kec. Bangkumat)
		2	Way Heni (Kec. Bangkumat) – Terminal Way Batu (Kec. Pesisir Tengah) – Liwa (Lampung Barat)
II	Angkutan Penyeberangan		
	Lintasan Trayek	1	Koala Stabas (Kec. Pesisir Tengah) – Pulau Pisang
		2	Tembakak (Kec. Karya Penggawa) – Pulau Pisang
		3	Kota Jawa (Kec. Bangkumat) - Pemekahan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Tabel 2.65. Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

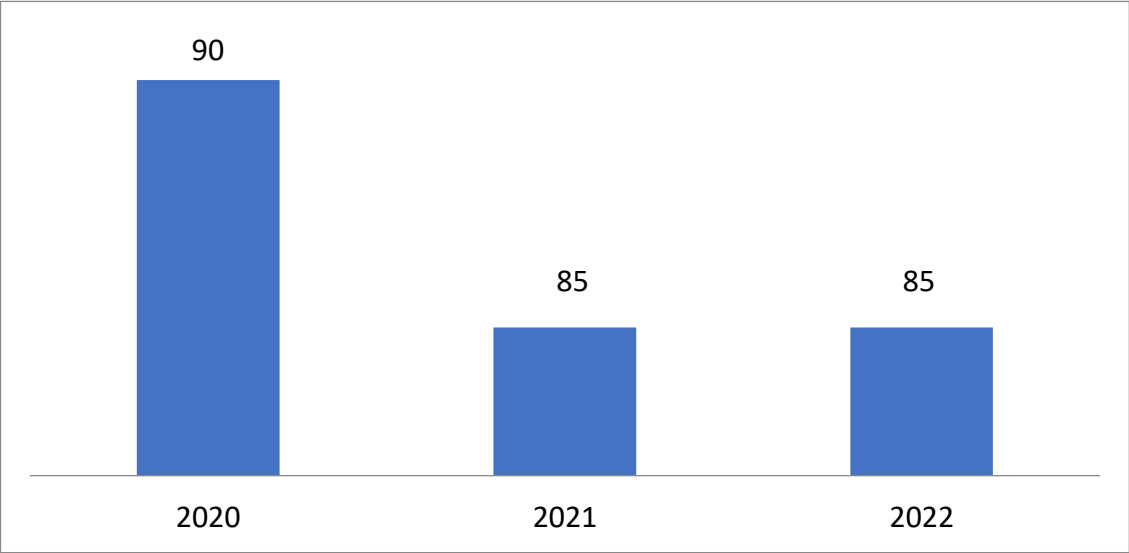
No	Jenis Sarana/ Prasarana	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Terminal	Terminal Way Batu	1 Unit	Jl. Pasar Way Batu Terminal Kota Krui Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Tipe C Milik Kabupaten
2	Bandara	Bandara M. Taufik Kiemas	1 Unit	Pekon Seray, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Bandara Milik Kementerian Perhubungan
3	Pelabuhan	Pelabuhan Perikanan Nusantara	1 Unit	Pekon Kota Jawa, Bangkumat, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Perikanan Milik Provinsi Lampung
4	Dermaga	Dermaga	1 Unit	Pasar Pulau Pisang,	Butuh Perbaikan

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
		Pulau Pisang		Kec. Pesisir Utara, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34878	Milik Kementerian Pulau Pisang
		Dermaga Koala Stabas	1 Unit	Jl. Merdeka (Pasar Krui), Kelurahan Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan Milik Kementerian Perhubungan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Perkembangan rasio konektivitas daerah berdasarkan pada perhitungan trayek moda transportasi yang ada dibandingkan dengan kebutuhan adalah pada tahun 2020 sebesar 90%. Menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 85%.

Gambar 2.54. Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

2.3.3.2. Kondisi Fasilitas/Infrastruktur Daerah

Infrastruktur merupakan unsur utama dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu penggerak ekonomi utama bagi suatu wilayah. Keterkaitan dan kelancaran perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dapat terhubung dengan adanya jalan. Demi mendukung perkembangan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

Ketersediaan jalan nasional yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 205,45 km. Sedangkan ketersediaan jalan provinsi sepanjang 11.996 km, ketersediaan jalan kabupaten sepanjang 644,08 km dan jalan desa/lokal sepanjang

463,34 km. Berikut adalah fasilitas sarana pendukung transportasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.66. Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis Data	Uraian
1	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas:	
	a. Jalan Nasional	205,45 Km – 7 Ruas Jalan (Baik – Sedang – Rusak Ringan)
	b. Jalan Provinsi	11.996 Km – 4 Ruas Jalan (Baik)
	c. Jalan Kabupaten	644,08 Km – 141 Ruas Jalan (Baik – Sedang – Rusak Ringan – Rusak Berat)
	c. Jalan Desa/Lokal	463,34 Km (Sedang)
2	Kondisi Jalan Kabupaten:	
	a. Aspal	297,685 Km
	b. Pengerasan Beton	55,860 Km
	c. Kerikil	124,561 Km
	d. Tanah	165,974 Km
3	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi:	
	a. Jalan Baik	198,63 (30,83%)
	b. Jalan Sedang	55,97 (8,68%)
	c. Jalan Rusak Ringan	44,40 (6,89%)
	d. Jalan Rusak Berat	345,06 (53,57%)
4	Jembatan	105 Buah
	Panjang	7,68 Km
5	Terminal Darat	1 Buah
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi: Kolektor	208,13 Km
7	Irigasi:	
	a. Primer	104,7 Km
	b. Sekunder	3,3 Km
	c. Tersier	9,15 Km

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Panjang jalan baik kabupaten pada tahun 2017 sepanjang 135,83km, tahun 2018 meningkat 60,8km menjadi 196,63km. pada tahun 2019 penurunan jumlah sebanyak 26,86km sehingga menjadi 169,77km. pada tahun 2020 jumlah panjang jalan baik meningkat menjadi 182,66km dengan perhitungan penambahan sebanyak 12,89km. berikutnya pada tahun 2021 tercatat jumlah panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 183,30km, atau naik 0,7km. Pada tahun 2022, panjang jalan baik sepanjang 198,63km atau bertambah 15,33km.

Berikutnya untuk kategori rusak berat tahun 2017 sepanjang 328,19 km dan turun 39,77km menjadi 288,42km pada tahun 2018. Data tahun 2019 meningkat menjadi 315,92km dengan kenaikan sepanjang 27,5km. Selanjutnya pada tahun 2020 tercatat sepanjang 357,38km atau kembali naik 41,46km. Pada tahun 2021,

tercatat jalan rusak sepanjang 318,75km atau turun 38,63km. Data tahun 2022, jalan rusak berat bertambah 26,31km atau menjadi 345,06km.

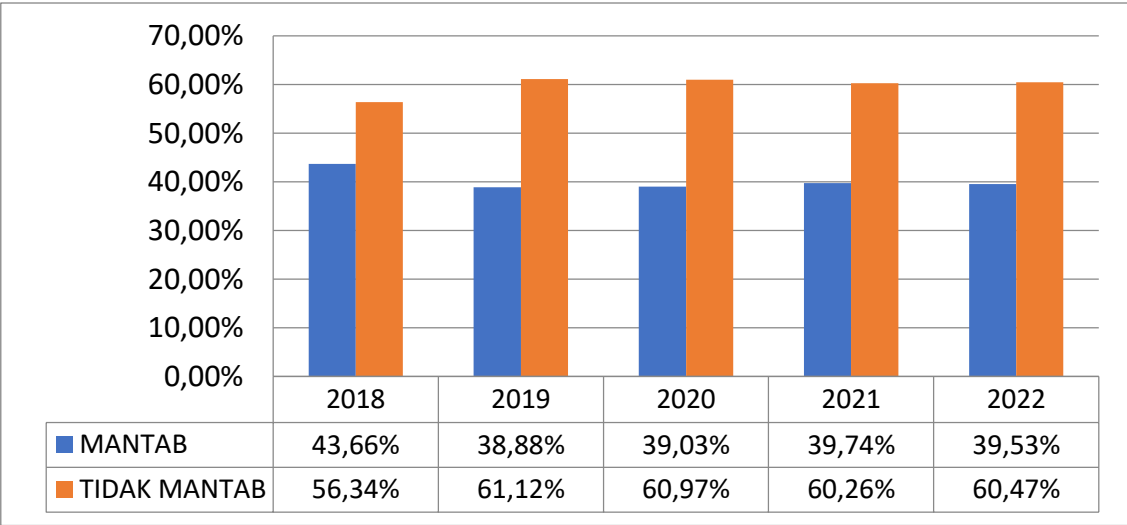
Penurunan yang terjadi terlihat minor, namun hal ini disebabkan oleh konsentrasi penanganan jalan tidak hanya fokus pada peningkatan tapi juga pemeliharannya. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur jalan antara lain kondisi struktur tanah yang labil mengakibatkan sering terjadi longsor ketika terjadi hujan deras, kondisi demografi Kabupaten Pesisir Barat (jarak antar desa yang cukup jauh terpisah), kendaraan yang melintas melebihi tonase yang diizinkan serta terbatasnya dana pemeliharaan jalan. Untuk lebih lengkapnya rincian kondisi jalan Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	196.63	169.77	182.66	183.30	198,63
Sedang	84.59	80.67	68.75	72.68	55,97
Rusak Ringan	74.43	77.70	35.29	69.35	44,40
Rusak Berat	288.42	315.92	357.38	318.75	345,06
Jumlah (Km)	644.08	644.08	644.08	644.08	644.08

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Gambar 2.55. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Tabel 2.68. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022

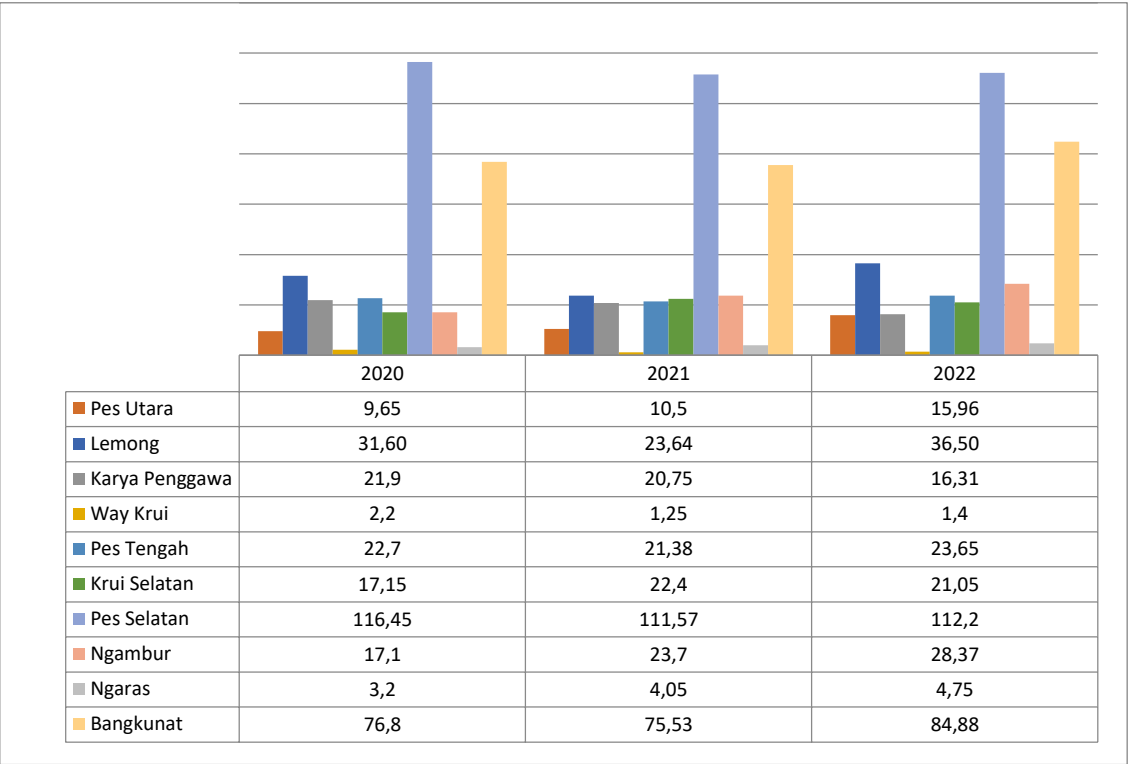
No	Kecamatan	Panjang (Km)	Aspal			Tanah			Rusak Berat		
			20	21	22	20	21	22	20	21	22
1	Lemong	63,30	24,60	23,73	25,71	23,40	14,86	22,04	31,60	23,64	36,50
2	Pesisir Utara	44,25	25,20	22,85	23,98	5,80	6,45	6,87	9,65	10,50	15,96
3	Karya Penggawa	38,30	10,80	11,10	15,87	17,30	16,25	12,51	21,90	20,75	16,31
4	Way Krui	6,40	1,40	0,00	0,00	2,20	1,25	0,96	2,20	1,25	1,40

5	Pesisir Tengah	64,38	42,85	40,16	38,27	10,40	16,70	15,68	22,70	21,38	23,65
6	Krui Selatan	52,20	27,50	30,02	32,25	9,80	13,00	12,10	17,15	22,40	21,05
7	Pesisir Selatan	177,30	47,25	55,46	59,61	60,60	62,85	63,51	116,45	111,57	112,20
8	Ngambur	58,40	34,10	30,65	36,60	10,60	9,12	5,66	17,10	23,7	28,37
9	Ngaras	31,70	24,00	26,05	26,45	0,80	1,05	1,55	3,20	4,05	4,75
10	Bangkunat	107,85	22,70	41,63	38,94	72,70	69,30	25,10	76,80	75,53	84,88

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Bila diperhatikan pada tabel di atas, terlihat bahwa pada Kecamatan Pesisir Selatan dengan Panjang Jalan 177,30 Km² dengan kondisi jalan rusak sepanjang 112,20 Km². Berikutnya adalah Kecamatan Bangkunat dengan Panjang jalan terpanjang 107,85 Km² memiliki kondisi jalan rusak berat terbanyak dengan 84,88 Km². Sementara untuk Kecamatan Way Krui dengan Panjang Jalan 6,40 Km² ruas jalan yang rusak berat sepanjang 1,40 Km².

Gambar 2.56. Kondisi Jalan Rusak Berat Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022

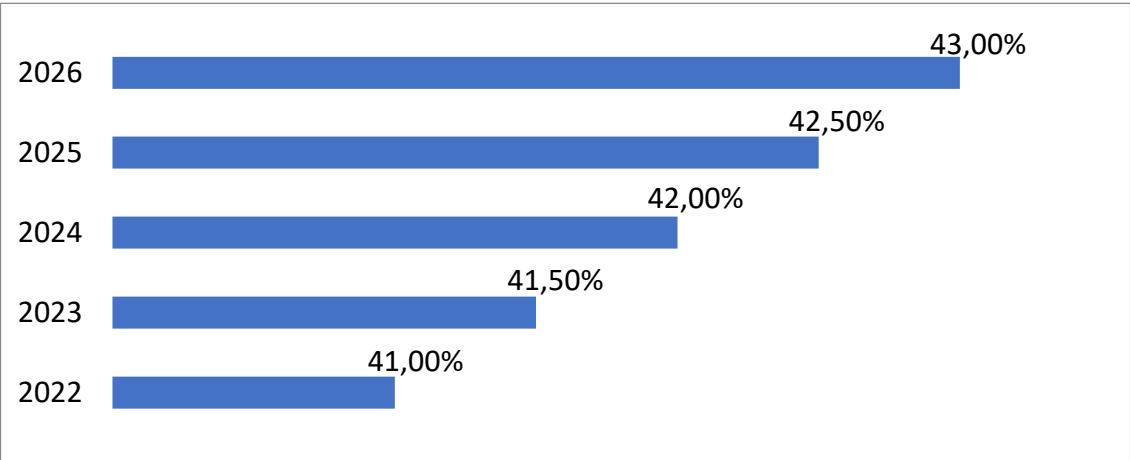


Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Berdasarkan pada data di atas, secara umum kondisi jalan mantab terus meningkat dari tahun 2016-2021. Walaupun bila dilihat dari peningkatan yang tidak signifikan. Kenaikan yang cenderung lambat ini dikarenakan proses peningkatan jalan menuju kondisi jalan mantab tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah jalan rusak. Pada tahun 2020, target jalan mantab yang ditetapkan adalah 63,66% namun baru mampu tercapai 39,93% atau hanya

mampu mencapai 63,61% dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2021, target cukup tinggi pada angka 70% dan baru tercapai 39,74%.

Gambar 2.57. Target Jalan Mantab Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026

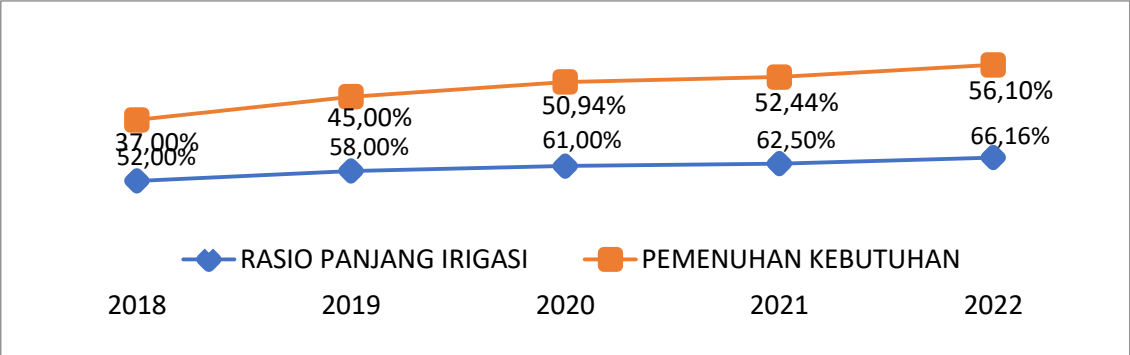


Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada data target jalan mantab di atas, target yang ditetapkan selama kurun waktu 2022-2026 cenderung meningkat landai, dalam artian target tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dengan kemampuan pendanaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana dipahami, sebagai daerah baru dan juga tertinggal, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah sangat kurang di Kabupaten Pesisir Barat. Sementara pendanaan tidak mungkin dialokasikan seluruhnya pada sektor jalan. Sehingga dapat disampaikan, bahwa permasalahan utama rendahnya capaian kondisi jalan mantab adalah pada pendanaan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan panjang jalan yang daerah yang menjadi kewenangan.

Irigasi yang menjadi kewenangan daerah adalah 2.507Ha dan pada tahun 2022, luasan area irigasi yang dipelihara oleh Kabupaten sebesar 2.315Ha.

Gambar 2.58. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Penyediaan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) hingga tahun 2022 terus dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat menjangkau seluruh kecamatan

yang ada. Dimana layanan diberikan melalui SPAM IKK (Ibu kota Kecamatan) dan SPAM Perdesaan.

Tabel 2.69. Penerima Manfaat Layanan SPAM Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Layanan SPAM			
		IKK		Perdesaan	
		Perpipaan (jiwa)	Non Perpipaan (jiwa)	Perpipaan (jiwa)	Non Perpipaan (jiwa)
1	Pesisir Selatan	3.337	6.786	6.898	10.347
2	Pesisir Tengah	750	19.599	-	-
3	Pesisir Utara	2.646	-	1.256	20.183
4	Karya Penggawa	-	12.165	1.250	3.918
5	Lemong	653	1.877	4.290	6.021
6	Ngaras	-	5.268	-	4.670
7	Ngambur	-	9.139	-	13.032
8	Bangkunat	1.100	10.344	600	14.654
9	Krui Selatan	4.347	6.520	-	-
10	WayKrui	-	4.352	1.575	3.254
11	Pulau Pisang	-	1.614	-	-
	Jumlah	12.833	77.664	14.744	76.079

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Di Indonesia ada dua jenis investasi, yang pertama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan yang kedua adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Panjaitan, Penanaman Modal Asing adalah satu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut UU No.6 tahun 1968 adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Iklim investasi dalam pengertian konsepsional dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor

keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Penegakan hukum adalah faktor yang dominan mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kuatnya penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan invenstor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya. Begitupun sebaliknya. Akibat dari lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan yang tidak sehat yang membuat para investor melarikan modalnya ke negara lain.

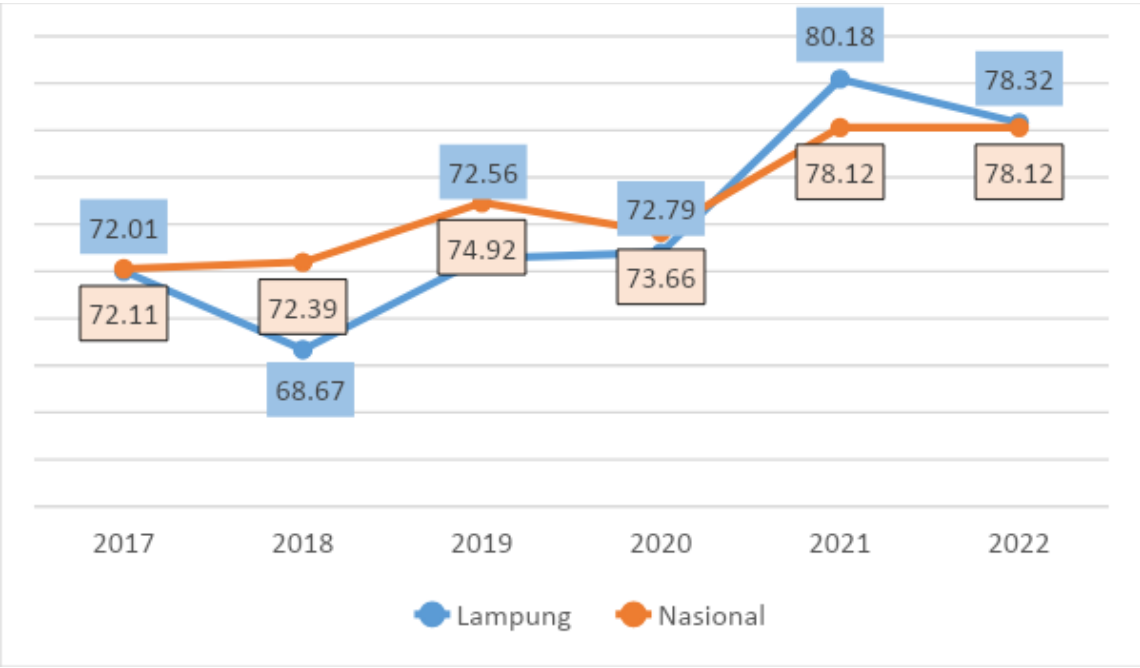
Memperkuat penegakan hukum pada sektor penanaman modal berarti memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada para investor. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan hukum akan menghindari penanam modal dari berbagai risiko politik dan sosial yang dapat membawa kerugian besar bagi penanam modal.

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dilihat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional di tahun 2021. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara nasional. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 78,32.

Gambar 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

2.3.4.2. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparaturnya. Salah satu aparaturnya di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP di Kabupaten Pesisir Barat dalam nomenklatur bergabung dengan Satuan Pemadam Kebakaran dengan tugas utama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi utamanya adalah dengan memastikan penegakan perda dan peraturan kepala daerah termasuk konflik sosial yang terjadi. Berdasarkan data terkait dengan konflik sosial, di Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya konflik sosial yang terjadi masih bersifat lokal dan tidak membawa isu SARA (Suku, Agama dan RAS).

Tabel 2.70. Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
I	Konflik Sosial					
1	Jumlah Kejadian	0	1	0	0	1
2	Penyelesaian Kejadian	0	1	0	0	1
II	Pelanggaran Perda					
1	Jumlah Kejadian	21	33	4	35	6
2	Penyelesaian Kejadian	13	24	3	35	6

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2023

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung mencatat 301 kasus sengketa tanah selama periode tahun 2015 sampai dengan 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik tanah antar-masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Beberapa tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung.

Data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah kabupaten/kota sangat beragam. Menurut data dari Kepolisian Daerah Lampung, jumlah tindak pidana kriminalitas total di Provinsi Lampung selma tahun 2020 sejumlah 8.829 kasus atau rata-rata 735 kasus per bulan.

2.3.4.3. Kehidupan Beragama (Indeks Kerukunan Beragama)

Masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan pengukuran pencapaian dengan melihat perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu :

- 1) Toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai)
- 2) Kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban)
- 3) Kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama)

Tabel 2.71. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 – 2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	70,00	68,6	73,09		72,44
Nasional	72,27	70,90	73,83	67,46	72,39

Sumber : Kementerian Agama, 2022

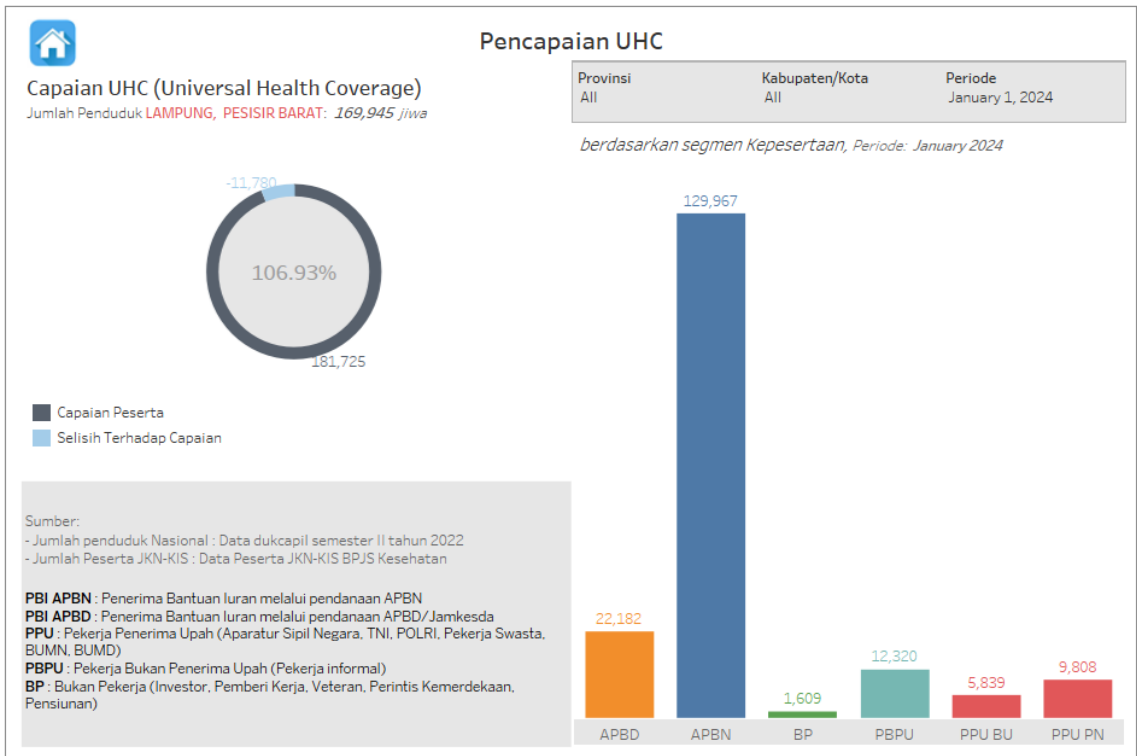
Capaian Indeks KUB pada tahun 2015-2019 cukup berfluktuasi, dimana di tahun 2017 Indeks KUB sebesar 70,00 dengan Indeks KUB Nasional lebih tinggi dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 72,27. Terdapat penurunan indeks KUB di tahun 2018 menjadi sebesar 68,6. Penurunan juga terjadi di nasional menjadi 70,90. Penurunan Indeks KUB Provinsi Lampung di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar 1,4 poin. Indeks KUB kembali meningkat di tahun 2019 dengan peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,49 poin, menjadi 73,09, namun angka tersebut masih di bawah angka nasional yang sebesar 73,83. Berdasarkan skor kerukunan dalam KUB, indeks KUB dari tahun 2017 sampai 2019 termasuk dalam kategori tinggi.

2.3.4.4. Perlindungan Sosial

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan kesehatan sosial secara nasional, capaian Universal Health Coverage (UHC) yang diimplementasikan melalui kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan kepesertaan Program JKN-

KIS di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 telah mencapai 106,93% atau sejumlah 182.500 jiwa dari total penduduk 169.945 jiwa.

Gambar 2.60. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

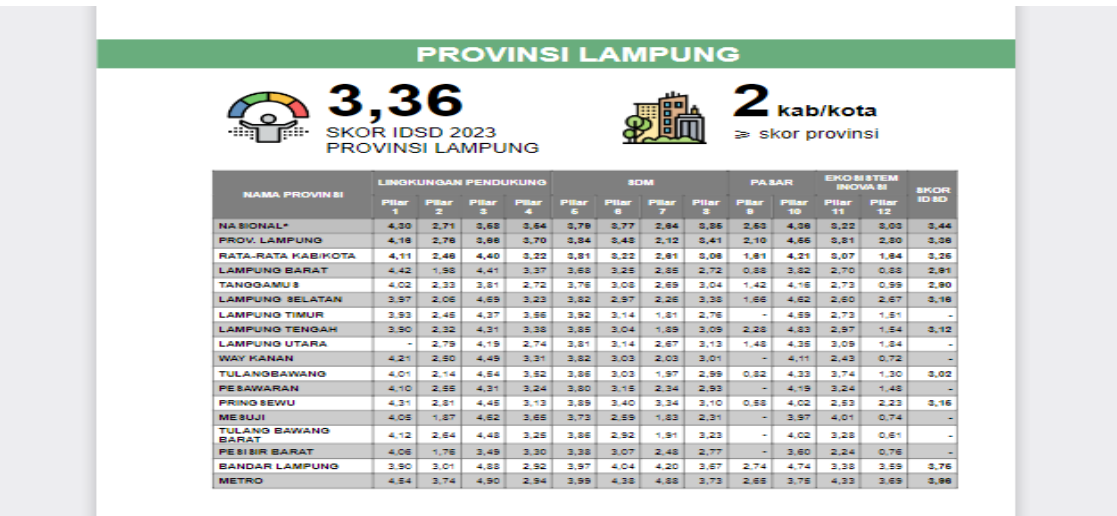


Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, 2024

2.3.4.4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambar 2.61. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023



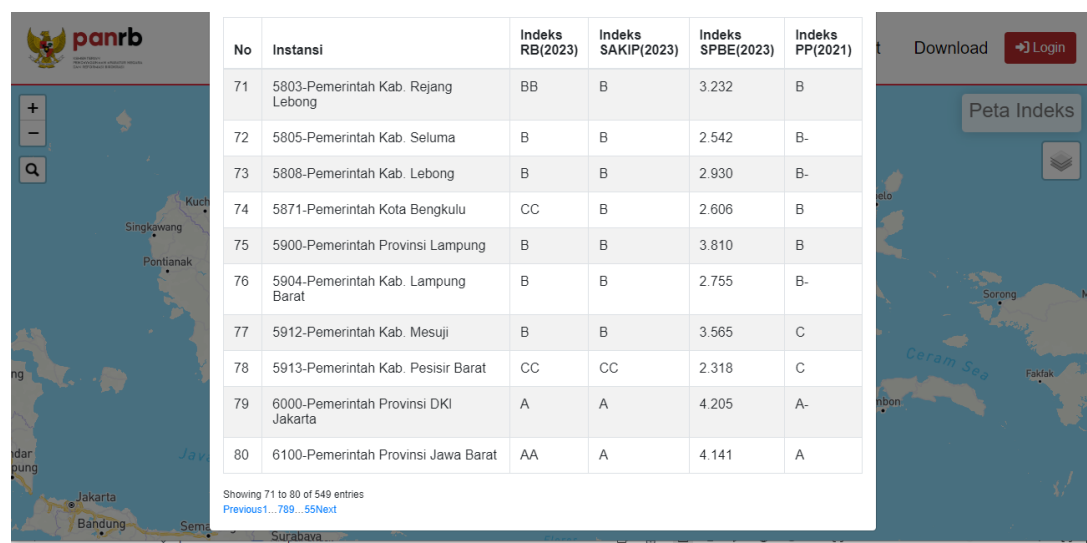
Sumber: BRIN, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Kementerian PAN RB menyebutkan bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah masih lebih rendah daripada IPP Nasional. Melalui Portal Satu Data Kementerian PAN RB, tahun 2021 IPP Kabupaten Pesisir Barat pada angka C.

Gambar 2.62. Capaian UHC Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023



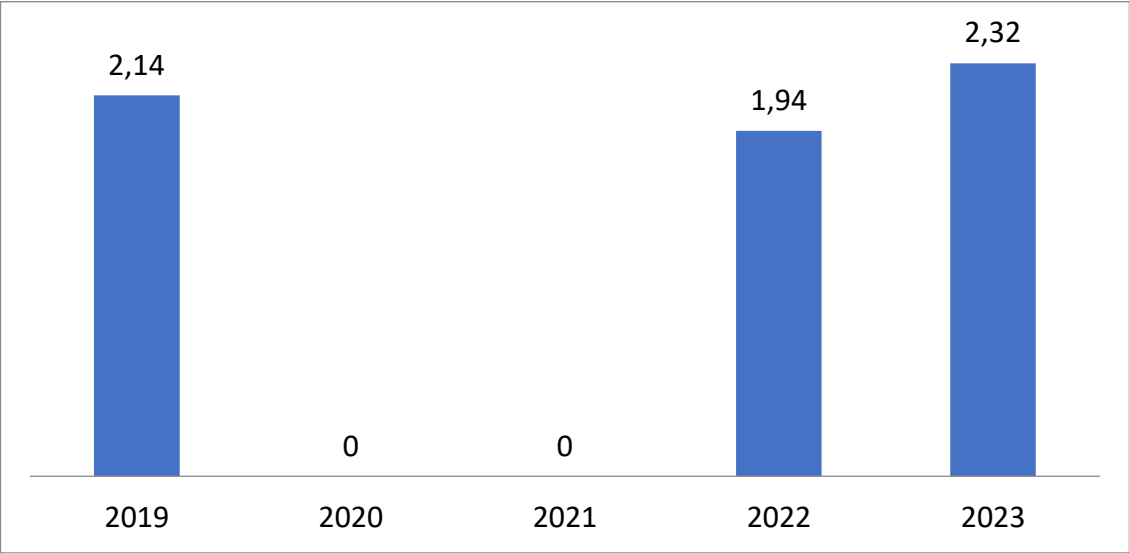
Sumber: 1data.menpan.go.id, 2024

2.4.2. Indeks SPBE

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Nilai **Indeks SPBE** daerah pada tahun 2019 sebesar 2,14. Lalu pada tahun 2020 tidak dilakukan evaluasi dikarenakan terjadinya bencana non alam Covid-19 dan pada tahun 2021 Pemerintah Daerah tidak mengikuti proses penilaian. Berikutnya pada tahun 2022 dengan nilai 1.94. Nilai indeks sebesar 1.94 dipengaruhi oleh perubahan jumlah indikator yang dipergunakan dalam penilaian. Dan terakhir di tahun 2023 indeks SPBE di angka 2,32 dengan predikat Cukup.

Gambar 2.63. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian, 2023

2.4.3. Indeks Reformasi Hukum

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum.

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel di pemerintahan.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 variabel, yaitu:

- 1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- 2) mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
- 3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki data terkait indeks reformasi hukum, maka dari itu untuk capaian tahun 2023 memakai data Provinsi Lampung sebagai baseline, yaitu 34,67.

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

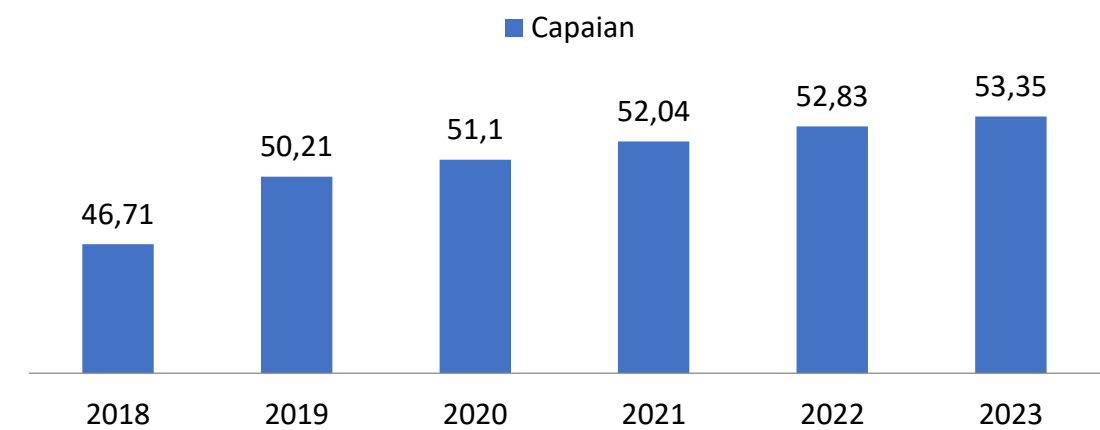
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga melaksanakan inovasi daerah. Inovasi tersebut bermuara pada tujuan pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan secara solutif, inovatif, efektif dan efisien dengan prinsip kerja cerdas, guna meningkatkan pelayanan publik.

Di tahun 2023, terdapat 112 inovasi yang telah dilaporkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Litbang Kemendagri, dimana 12 diantaranya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 35 inovasi pelayanan publik dan 27 inovasi bentuk lainnya. Dimana 19 inovasi atau sebanyak 26% diantaranya merupakan inovasi digital, dan 55 inovasi non digital atau sebanyak 74%. Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2023 meraih predikat Kabupaten Inovatif.

2.4.5. SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

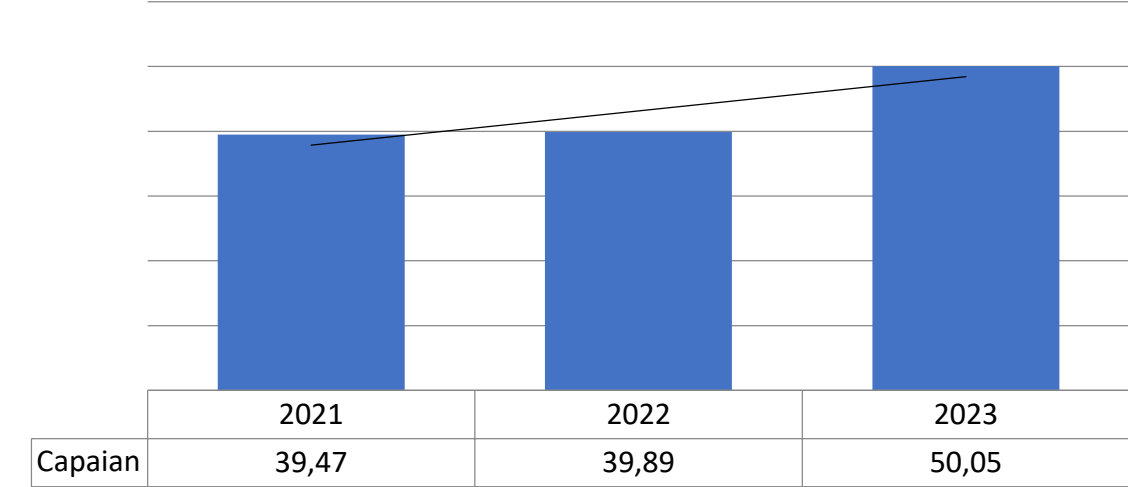
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akintabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023 masih dengan predikat CC (53,35). Sedangkan capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 naik menjadi 50,05 dengan predikat CC dari sebelumnya berpredikat C di tahun 2022.

Gambar 2.64. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat 2018-2023



Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Gambar 2.65. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Barat 2021-2023



Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

2.4.6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.4.6.1. Lingkungan Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh masih merupakan salah satu sub urusan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 14-15% dari keseluruhan luas wilayah. Beberapa upaya dan usaha dari pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kawasan dan rumah kumuh terus digalakkan. Intervensi program lintas sektoral diharapkan mampu menekan angka ini.

Sementara untuk data luasan wilayah kumuh secara total untuk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 110 Ha dengan sebaran titik kawasan permukiman sebanyak 61 titik dan tersebar di 3 kecamatan (lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara dan Bangkunat). Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021:

Tabel 2.72. Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Kawasan Kumuh Kabupaten	
		Kawasan Permukiman (Titik)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)
1	Pesisir Tengah	12	28,26
2	Pesisir Selatan	0	0,00
3	Lemong	0	0,00
4	Pesisir Utara	17	27,65
5	Karya Penggawa	0	0,00
6	Pulau Pisang	0	0,00
7	Way Krui	0	0,00
8	Krui Selatan	0	0,00
9	Ngambur	0	0,00
10	Ngaras	0	0,00
11	Bangkunat	32	54,79
	Jumlah	61	110,7

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Lebih lengkap, data kawasan kumuh sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Barat dengan SK Nomor: B/138/KPTS/V/01/HK-PSB/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.73. Delineasi Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

Luas (Ha)	RT/RW/Dusun	Pekon	Kecamatan	Nilai kekumuhan	Tingkat kekumuhan	
9.75	Sidodadi	Pagar Bukit	Bengkunat	79	Tinggi	
2.43			Bengkunat	79	Tinggi	
2.14			Sukamaju	Bengkunat	88	Tinggi
1.30	Talang Gisting	Tanjung Rejo	Bengkunat	85	Tinggi	
0.32	Tanjung Rejo II		Bengkunat	81	Tinggi	
3.17	Tanjung Rejo I		Bengkunat	73	Tinggi	
0.44			Bengkunat	73	Tinggi	
2.52			Bengkunat	73	Tinggi	
0.67			Bengkunat	73	Tinggi	
1.40	Dusun I		Pagar Bukit Induk	Bengkunat	65	Sedang
3.62	Dusun IV	Bengkunat		79	Tinggi	
0.69	Sukoharjo I	Pemerihan	Bengkunat	83	Tinggi	
0.35	Rejomukti		Bengkunat	89	Tinggi	
1.08	Sukoharjo II		Bengkunat	65	Sedang	
3.05			Bengkunat	63	Sedang	
3.26	Srimulyo I		Bengkunat	63	Sedang	
0.65			Bengkunat	63	Sedang	
1.42			Bengkunat	63	Sedang	
0.95			Bengkunat	63	Sedang	
0.49	Gunung Sari		Bengkunat	84	Tinggi	
2.28	Srimulyo II		Bengkunat	73	Tinggi	
1.32	Way Heni		Penyandingan	Bengkunat	83	Tinggi
1.69	Sumberjo IV			Bengkunat	59	Sedang
1.96	Sumberejo III	Sumberejo	Bengkunat	70	Sedang	
1.45	Sumberejo I	Sumberjo	Bengkunat	75	Tinggi	
2.86	Rejosari	Penyandingan	Bengkunat	79	Tinggi	
0.43	Pemangku 4	Kota Jawa	Bengkunat	69	Sedang	
0.75			Bengkunat	83	Tinggi	
0.87	Pemangku III	Sukanegeri	Bengkunat	69	Sedang	
0.76			Bengkunat	69	Sedang	
0.42			Bengkunat	69	Sedang	
0.30			Bengkunat	69	Sedang	
0.71	Pasar Ulu I	Kel.Pasar Kota Krui	Pesisir Tengah	56	Sedang	
2.29			Pesisir Tengah	56	Sedang	
2.88	Pahmungan	Pahmungan	Pesisir Tengah	51	Sedang	
1.14			Pesisir Tengah	51	Sedang	
5.75	Way Batu	Kel.Pasar Kota Krui	Pesisir Tengah	59	Sedang	
4.23			Pesisir Tengah	59	Sedang	
2.05	Tanah Lapang	Kampung Jawa	Pesisir Tengah	57	Sedang	
2.34	Pemangku III		Pesisir Tengah	59	Sedang	
3.72	Seray	Seray	Pesisir Tengah	47	Sedang	
0.76	Sukatani	Rawas	Pesisir Tengah	75	Tinggi	
1.54	Sukatani		Pesisir Tengah	75	Tinggi	
0.85	Way Redak	Way Redak	Pesisir Tengah	57	Sedang	
0.44	Pemancar	Pemancar	Pesisir Utara	67	Sedang	
0.30			Pesisir Utara	67	Sedang	

0.40	Gedau	Gedau	Pesisir Utara	66	Sedang
0.73			Pesisir Utara	66	Sedang
0.91			Pesisir Utara	66	Sedang
0.47	Batu Raja	Batu Raja	Pesisir Utara	62	Sedang
0.34	Kota Karang	Kota Karang	Pesisir Utara	67	Sedang
2.03			Pesisir Utara	67	Sedang
1.79	Way Narta	Way Narta	Pesisir Utara	59	Sedang
2.98	Kerbang Dalam	Kerbang Dalam	Pesisir Utara	62	Sedang
2.48	Balam	Balam	Pesisir Utara	66	Sedang
3.35	Kerbang Langgar	Kerbang Langgar	Pesisir Utara	67	Sedang
0.79	Negeri Ratu	Negeri Ratu	Pesisir Utara	65	Sedang
1.87			Pesisir Utara	65	Sedang
1.47	Kuripan	Kuripan	Pesisir Utara	63	Sedang
3.51	Padang Rindu	Padang Rindu	Pesisir Utara	61	Sedang
3.79	Walur	Walur	Pesisir Utara	49	Sedang

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

2.4.6.2. Rumah Layak Huni

Hingga pada tahun 2020, Kecamatan Bangkumat merupakan daerah yang paling banyak memiliki jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah rumah 332 unit dan menjadi 1.960 pada tahun 2021, berikutnya Kecamatan Ngambur dengan jumlah sebanyak 112 (2020) dan 1.445 (2021) unit rumah tidak layak huni dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan dengan jumlah 101 (2020) dan 572 (2021) unit.

Tabel 2.74. Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

No	Kec	Jumlah Rumah (Unit)								
		Layak Huni			Tidak Layak Huni			Total Rumah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	5.499	5,499		41	27		5.540	5,526	
2	Pesisir Selatan	6.534	6,534		101	572		6.635	7,106	
3	Lemong	2.925	2,925		105	335		3.030	3,260	
4	Pesisir Utara	2.202	2,202		206	181		2.408	2,383	
5	Karya Penggawa	3.997	3,997		117	204		4.114	4,201	
6	Pulau Pisang	404	404		28	20		432	424	
7	Way Krui	2.375	2,375		74	211		2.449	2,586	
8	Krui Selatan	2.604	2,604		113	127		2.717	2,731	
9	Ngambur	4.695	4,695		112	1,445		4.807	6,140	
10	Ngaras	2.292	2,292		50	175		2.342	2,467	
11	Bangkumat	5.849	5,849		332	1,960		6181	7,809	
	Jumlah	39.376	39,376	37.106	2.530	5,191	8.242	41.906	44.633	45.348

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023 (data diolah)

Jumlah rumah di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 sebanyak 45.348 rumah terdata dari sebelumnya 44.633 rumah. Sayangnya, kenaikan jumlah rumah ini juga diiringi dengan kenaikan

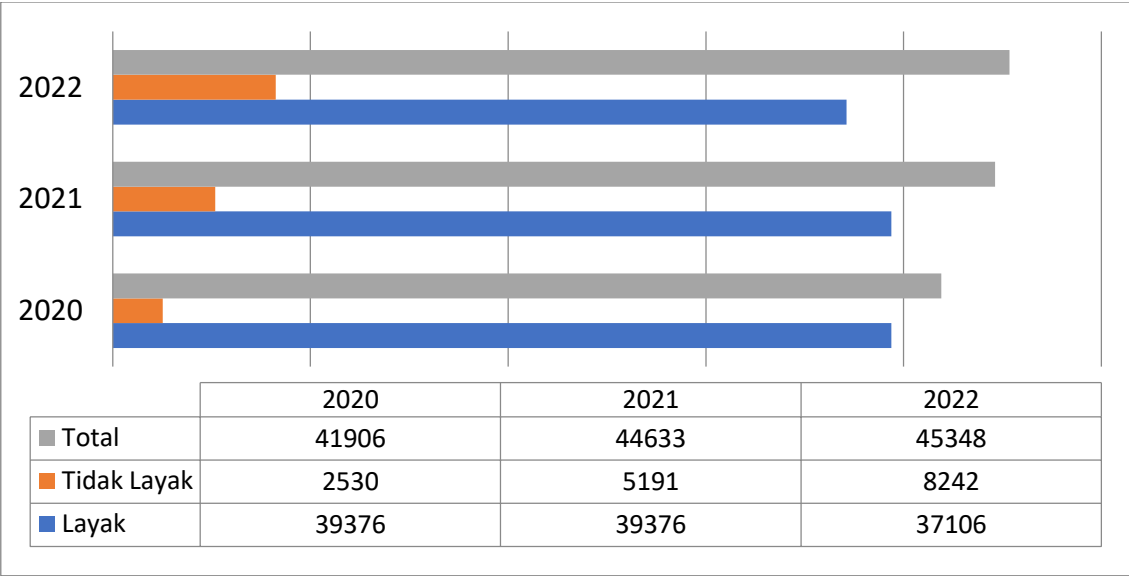
jumlah RTLH dari 5.191 rumah menjadi 8.242 rumah dan menurunnya jumlah rumah layak huni dari 39.376 rumah menjadi 37.106 rumah. Terlebih, pada tahun 2022, pemerintah daerah tidak menganggarkan bantuan untuk penanganan RTLH.

Tabel 2.75. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	0	0	66	218	0	0
2	Pesisir Selatan	0	0	455	0	0	0
3	Lemong	0	281	99	0	0	0
4	Pesisir Utara	0	78	6	0	0	0
5	Karya Penggawa	174	18	9	0	0	0
6	Pulau Pisang	0	46	0	0	0	0
7	Way Krui	0	0	8	0	0	0
8	Krui Selatan	0	164	9	0	0	0
9	Ngambur	214	0	10	47	60	0
10	Ngaras	0	0	0	250	0	0
11	Bangkunat	0	322	6	0	0	0
	Jumlah	987	909	668	515	60	0

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Gambar 2.66. Jumlah Rumah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022



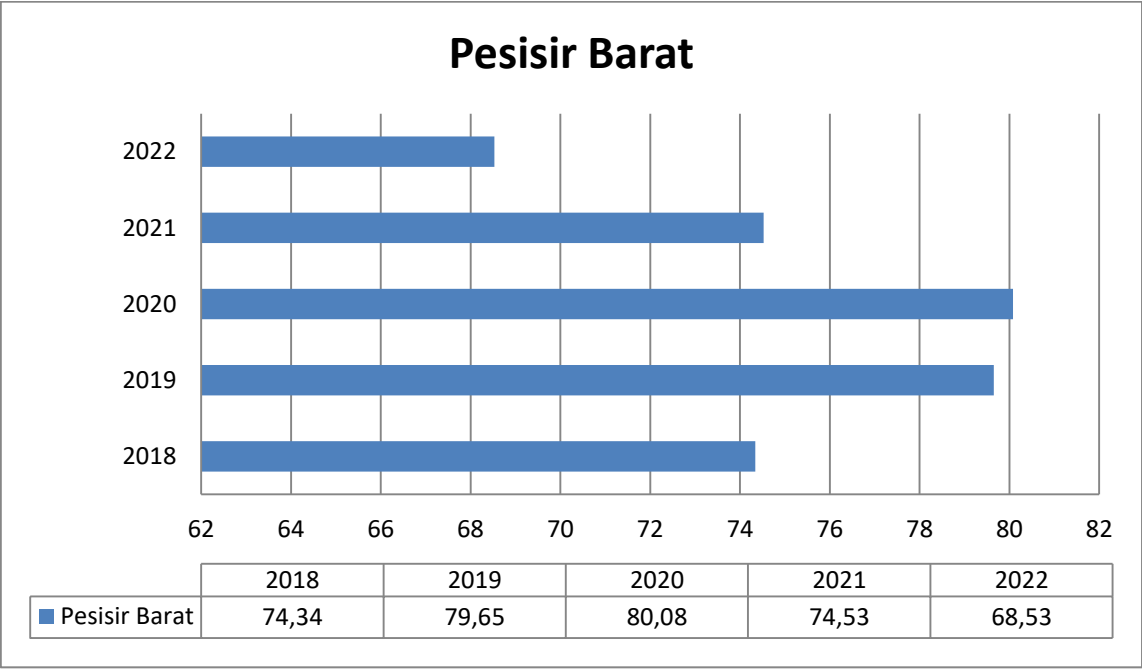
Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

2.4.6.3. Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air minum merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Pesisir Barat belum stabil, tren naik dari tahun 2018 dan mencapai angka tertinggi

pada tahun 2020 sebesar 80,08%, tetapi mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022.

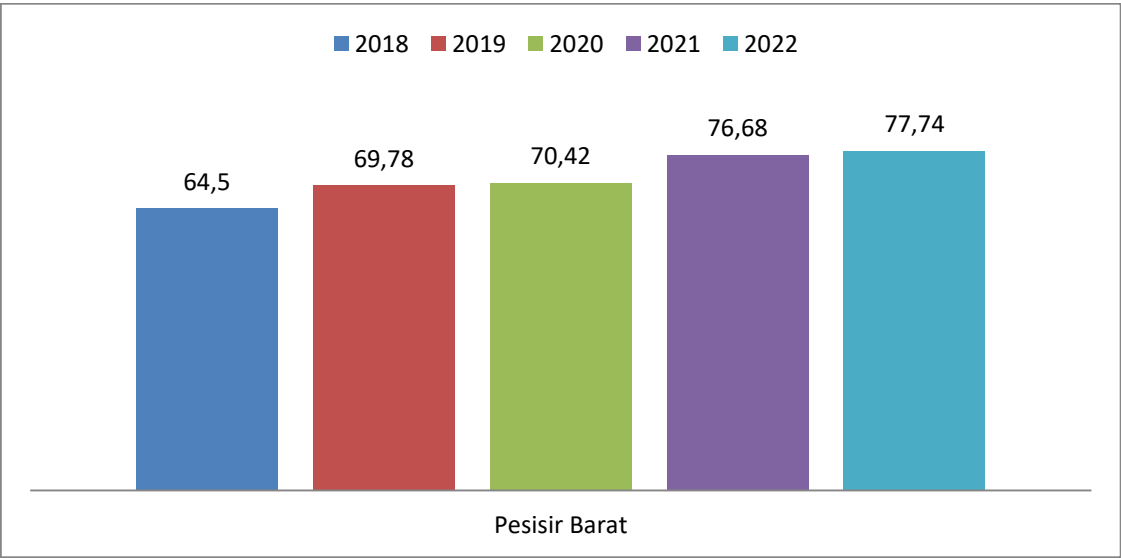
Gambar 2.67. Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang berarti, dimana pada tahun 2018 hanya 64,50% rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak menjadi 77,74% di tahun 2022.

Gambar 2.68. Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Sedangkan berdasarkan perhitungan Dinas Kesehatan, untuk persentase penduduk yang memiliki akses air minum pada tahun 2023 telah mencapai 86%,

dan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi (air limbah) hanya sebesar 51%. Capaian terendah untuk akses air minum ada di Kecamatan Ngaras sebesar 37,96%, dan untuk akses air limbah terendah di Kecamatan Karya Penggawa sebesar 14,51%.

Tabel 2.76. Aksesibilitas Air Minum, Air Limbah, dan Persampahan Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

NO	KECAMATAN	AKSESIBILITAS		
		AIR MINUM	AIR LIMBAH	PERSAMPAHAN
1	Bangkunat	75,74	68,18	73,03
2	Ngaras	37,96	60,57	37,96
3	Ngambur	80,22	64,71	70,95
4	Pesisir Selatan	90,93	78,49	82,26
5	Krui Selatan	79,70	24,38	24,27
6	Pesisir Tengah	99,96	21,01	65,82
7	Way Krui	100	94,37	6,22
8	Karya Penggawa	100	14,51	14,24
9	Pesisir Utara	100	52,04	52,04
10	Lemong	81,66	30,70	40,41
11	Pulau Pisang	100	53,83	61,96
Rata-rata		86,0154545	51,16272727	48,10545455

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

2.4.7. Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

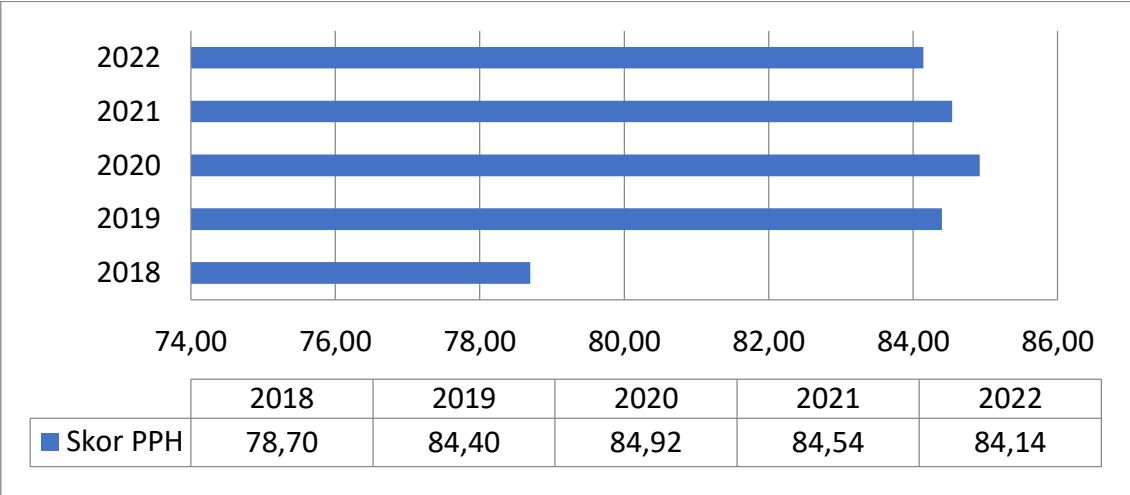
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan disebutkan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Selanjutnya, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Berdasarkan pada data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2018-2022 di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2018 dengan 78.70. Kenaikan 6.0% pada tahun 2018 menjadi 84.7%. berikutnya, pada tahun 2020 Skor PPH naik kembali 0,54 menjadi 84.92%. tahun 2021, skor PPH Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan sebesar (0.38) sehingga menjadi 84.54. pada tahun 2022, nilai Skor PPH mengalami penurunan (0.36) dengan nilai 84.18.

Gambar 2.69. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan upaya dalam pembangunan di Bidang Pangan antara lain:

a. Aspek Ketersediaan

Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, rekomendasi angka kecukupan gizi (AKG) pada tingkat konsumsi adalah 2.150 kal/kap/hr untuk energi dan 57 gr/kap/hr untuk protein. Rekomendasi pada tingkat ketersediaan adalah 2.400 kal/kap/hr untuk energi dan 63 gr/kap/hr untuk protein. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya pemenuhan kecukupan gizi dengan mempertimbangkan keberagaman pangan dalam produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter, salah satunya adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Data Ketersediaan Energi dan Protein didapat dari Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), adapun Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.77. Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2018-2022

Tahun	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Skor PPH Ketersediaan
2018	3.622,14	99,41	78,80
2019	4.821	266,08	80,60
2020	2.107,32	58,23	84,92
2021	2.036,95	55,21	84,54
2022	2.400,00	63,00	84,18

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.78. Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Jumlah Produksi Komoditas Pangan	Jumlah	Satuan
A	Nabati		
1	Beras	94.052,92	Ton
2	Jagung	22.652,20	Ton
3	Kedelai	561,01	Ton
4	Kacang Tanah	186,56	Ton
5	Ubi Kayu	3.961,91	Ton
6	Ubi Jalar	914,66	Ton
7	Sayur	19.378,95	Ton
8	Buah buahan	4.494,79	Ton
B	Hewani		
1	Daging Sapi / Kerbau	11,85	Ton
2	Daging Ayam	6,00	Ton
3	Telur	10,62	Ton
4	Ikan	5.824,97	Ton

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

b. Aspek Konsumsi

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari). Berdasarkan perhitungan kajian pada Buku Pola Konsumsi Pangan tahun 2021, konsumsi pada setiap kelompok bahan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Kelompok Bahan Makanan	Kalori (kkl)	Protein (gram)
1	Padi-padian	885,67	20.78
2	Umbi-umbian	39,16	0.38
3	Ikan/udang/cumi/kerang	53,34	9.03
4	Daging	39,06	2.4
5	Telur dan susu	44,07	2.51
6	Sayur-sayuran	58,68	3.61
7	Kacang-kacangan	49,63	4.74
8	Buah-buahan	55,41	0.51
9	Minyak dan kelapa	328,41	0.7
10	Bahan minuman	113,23	1.95
11	Bumbu-bumbuan	6,27	0.26
12	Konsumsi lainnya	53,50	1.01
13	Makanan dan minuman jadi	300,51	7.34
	Total	2.036,95	55,21

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Pada tahun 2021 angka kecukupan energi sebesar 2.036,95 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein sebesar 55,21 gram/kapita/hari. Angka kecukupan energi belum tercapai dari 2.150 yang diharapkan baru, sama dengan angka Kecukupan Protein juga belum melampaui dari target sebesar 57 gram/kapita/hari.

Tabel 2.80. Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Nilai	Satuan
1	Padi-padian	71,00	Kg
2	Umbi-umbian	17,10	Kg
3	Pangan hewani	96,33	Kg dan liter
4	Minyak dan lemak	31,40	Liter
5	Buah/biji berminyak	15,89	Kg
6	Kacang-kacangan	17,30	Kg
7	Gula	10,69	Kg
8	Sayur dan buah	126,80	Kg
	Jumlah	386,51	

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

c. Aspek Kerawanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah memberikan bantuan pangan berupa beras pada masyarakat yang terdampak *Covid19* di 11 kecamatan di tahun 2020. Selain itu, rekomendasi dari masyarakat dan beberapa OPD Penanganan daerah rawan yang berkaitan dengan akses jalan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah membangun akses jalan menuju menuju Pekon Way Haru dan Pekon Bandar Dalam. Upaya yang berkesinambungan dalam penanganan rawan pangan dan aspek ketersediaan

pangan, Kabupaten Pesisir Barat memiliki gudang cadangan berupa beras, yang sewaktu-waktu apabila ada keadaan darurat yang berkaitan dengan kerawanan pangan dapat disalurkan kepada Masyarakat.

Tabel 2.81. Cadangan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Pengadaan (Kg)	Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)
2018	15.000	12.000	16.000
2019	15.000	0	31.000
2020	25.820	30.820	25.000
2021	9.000	0	35.007
2022	0	758	34.249

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perhitungan CBPK sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan pada 80% (dikali) dengan cadangan beras total provinsi (dikali) dengan jumlah penduduk kabupaten/kota.

Kondisi cadangan pangan di Kabupaten Pesisir Barat berada pada rentang 25.000-30.0000kg, dengan catatan pada tahun 2022 sebanyak 34,249 Kg dimana posisi tersebut merupakan akumulasi dari proses pengadaan dan penyaluran dari tahun 2018-2022. Kondisi ideal cadangan pangan pertahun di Kabupaten Pesisir Barat adalah 35.000kg. Masih perlu dilakukan peningkatan untuk pengadaan dan penyaluran pangan dimaksud sehingga didapatkan selisih yang memenuhi target.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kualitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Hasil perhitungan IKP 2023 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat dari aspek ketersediaan

adalah sebesar 92,94; dari aspek keterjangkauan adalah sebesar 79,75 dan dari aspek pemanfaatan adalah sebesar 61,29. Sehingga secara komposit **Indeks Ketahanan Pangan** Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 76,32.

Prevalensi of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang di ukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dalam rentang tahun 2019-2023 pertumbuhan angka PoU Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar -0,44% dan berdasarkan besaran PoU menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2023, PoU Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 7,23%. Sehingga Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan PoU terkecil kedua di Provinsi Lampung.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang harus ditangani, maka nilai PoU harus dikalikan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Jika dilihat dari besaran PoU Provinsi Lampung diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan jumlah penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebanyak 11.500 jiwa dan menjadi Kabupaten dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi terkecil di Provinsi Lampung.

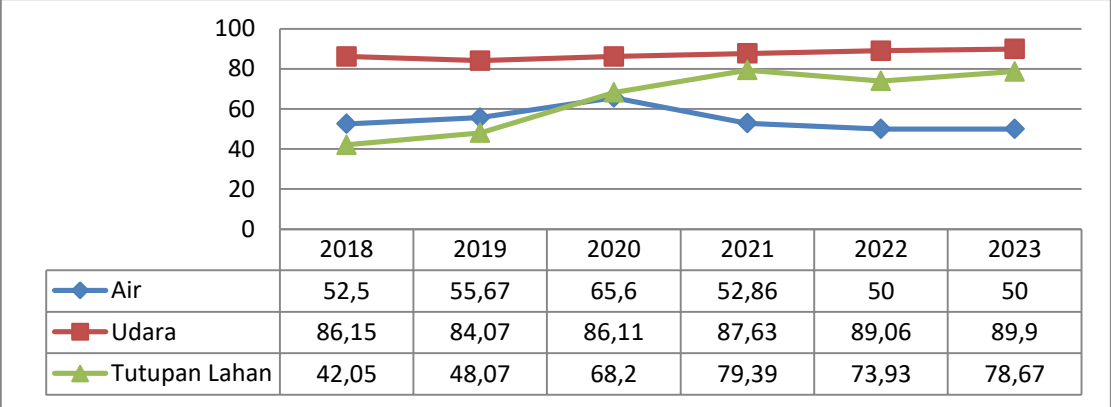
2.4.8. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan arahan agar kondisi dan kualitas lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dan dapat terus mendukung ekosistem lingkungan. Ada beberapa sub bidang yang menjadi urusan pemerintah kabupaten antara lain pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, dll

Berdasarkan pada perhitungan indeks kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 terus mengalami perbaikan kualitas. Bahwa pada tahun 2018 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air berada pada angka 52,50 dan menjadi 52,86 pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023 tercatat kualitas air dengan nilai 50,00. Selanjutnya untuk Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara pada tahun 2018 berada pada angka 84,15 dan meningkat minor pada tahun 2021 menjadi 87,63. Catatan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 89,06 dan kembali membaik di tahun 2023 sebesar 89,9.

Berikutnya untuk Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2018 tercatat 42,05 dan menjadi 79,39 pada tahun 2021. Data pada tahun 2022 adalah sebesar 73,93, dan naik pada tahun 2023 di angka 78,67.

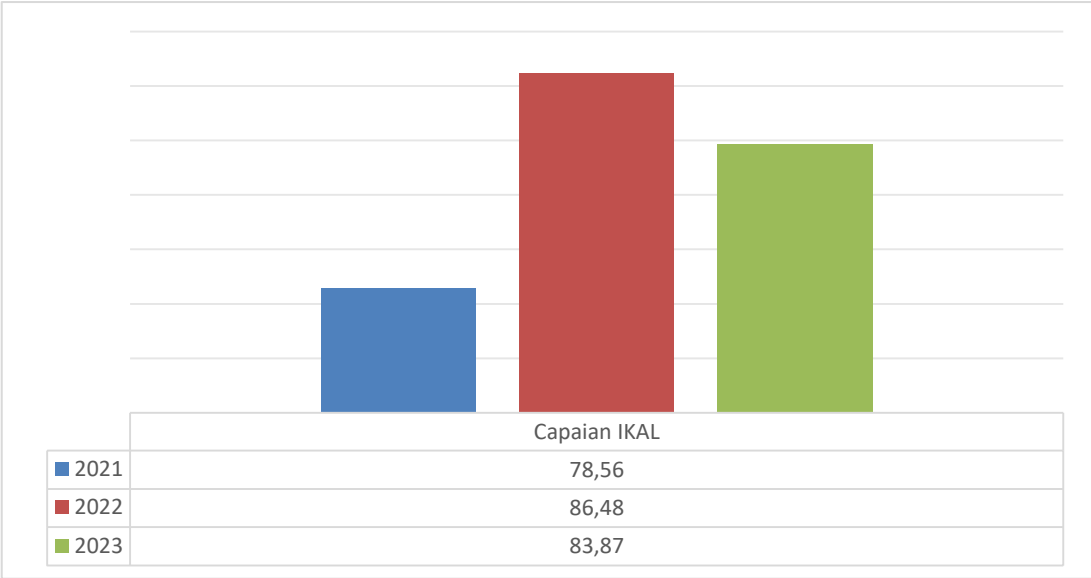
Gambar 2.70. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas LH, 2024

Sedangkan capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Lampung tahun 2021-2023 telah mencapai target (83,87) yang ditetapkan dengan status baik namun mengalami penurunan (2,61) dari tahun 2022. Capaian indeks kualitas air laut di Provinsi Lampung masuk dalam status baik yang mencerminkan bahwa pencemaran dari sumber domestik, industri, pertanian, dan berbagai sumber lainnya masih berada pada batas ambang atau memenuhi baku mutu.

Gambar 2.71. Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung Tahun 2021-2023



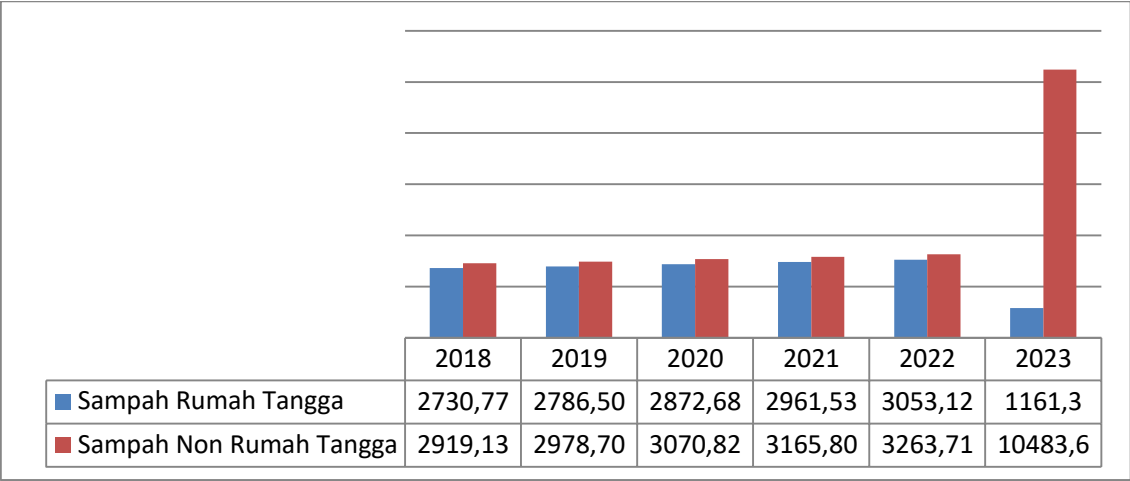
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat masih belum maksimal, dimana pada tahun 2023 tercatat 16,59% area yang mampu dikelola timbunan sampahnya setelah sebelumnya pada 2021 dan 2022 hanya sebesar 15,80%.

Tabel 2.82. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Jumlah / Unit				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tempat Pembuangan Akhir	24.482 M ³	1	1	1	1	1
2	Tempat Pembuangan Sementara (Bak Kontainer)	10 M ³	3	3	4	4	4
3	Tempat Pembuangan Sementara Reduce Reuse Recycle (TPS3R)	1.6 M ³	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas LH, 2024

Gambar 2.72. Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (Meter³)



Sumber : Dinas LH, 2024 (data diolah)

Data tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan, karena diperoleh berdasarkan data pelanggan yang telah di perbaharui pengelompokannya.

Terkait pengelolaan pembuangan air limbah, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan usaha/lainnya. Berikut jumlah badan usaha/instansi yang melakukan pembuangan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.83. Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2023

No	Uraian	Jumlah Badan Usaha/Instansi			
		2020	2021	2022	2023
1	Sudah Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	14	2	7	2
2	Belum Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	12	0	4	0

Sumber : Dinas LH, 2024

Berikutnya terkait dengan kondisi lingkungan hidup, khususnya pada kondusi lahan pada dasarnya masih berada pada taraf yang baik. Berdasarkan data tercatat pada tahun 2020, Kabupaten Pesisir Barat memiliki Kawasan Suaka Alam seluas 192.575,00 Ha dan Kawasan Taman Nasional 186.926,00 Ha. Dari kedua luasan

kawasan tersebut dapat tergambar kondisi geografis dan administratif Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan dengan kawasan TNBBS Bukit Barisan Selatan. Secara lebih lengkap, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023

No	Kawasan	Luasan Lahan (Ha)	Keterangan
1	Luas Kawasan Resapan Air	6.032,00	Kondisi Baik
2	Luas Sempadan Pantai	7.400,00	Kondisi Baik
3	Luas Sempadan Sungai	19.890,00	Kondisi Baik
4	Luas Kawasan Suaka Alam	192.575,00	Kondisi Baik
5	Luas Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan	14.866,87	Kondisi Baik
6	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	7,60	Kondisi Baik
7	Luas Taman Nasional	186.926,00	Kondisi Baik
8	Luas Taman Wisata Alam	1.222,13	Kondisi Baik
9	Luas Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	0,02	Kondisi Baik

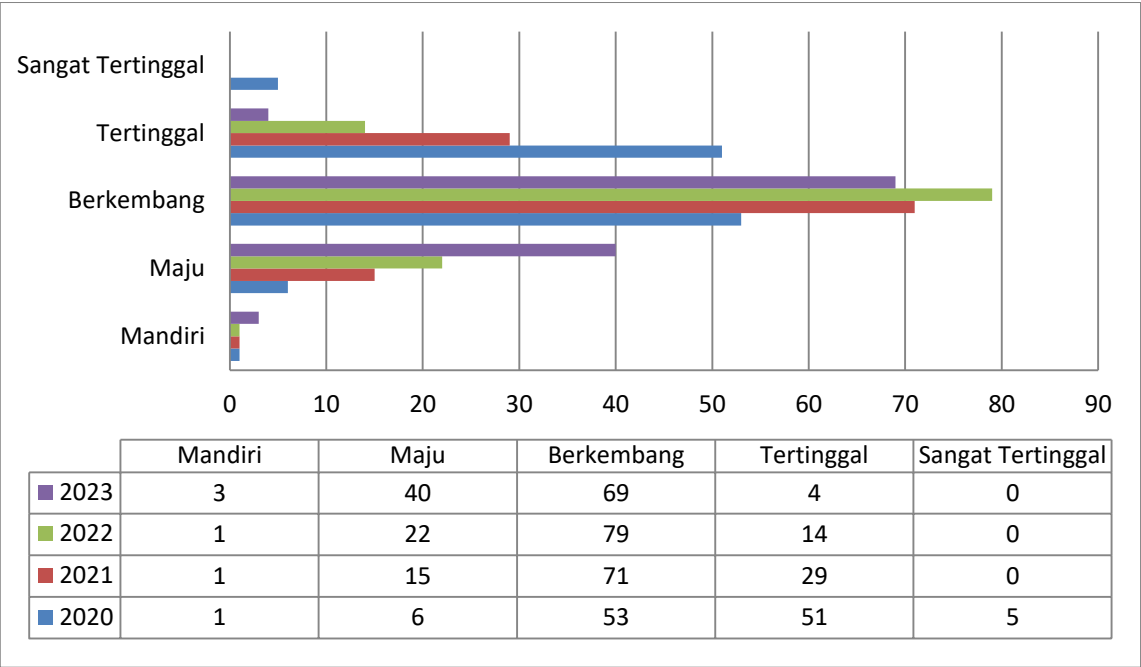
Sumber : Dinas LH, 2024

2.4.8. Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sudah merupakan suatu hal mutlak bagi setiap kabupaten. Masyarakat dan desa harus mampu berkembang dan mampu sejahtera dan swadaya dalam pengembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, baik secara finansial maupun secara kualitas SDM. Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa. Hal utama adalah bagaimana desa bisa mandiri, sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan masih banyak desa (pekon) tertinggal maka untuk jangka pendek dan menengah adalah bagaimana pekon-pekon tersebut dapat keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami penurunan. Keberhasilan dalam pencapaian hal ini dipengaruhi oleh komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga desa/pekon. Khususnya dalam sinergitas pembangunan dan pemanfaatan dana desa/alokasi dana desa sesuai dengan kewenangan yang bermanfaat langsung terhadap masyarakat dan pembangunan. Tahun 2018 (79 pekon); tahun 2019 (56 pekon); tahun 2020 (51 pekon) tahun 2021 (29 pekon), tahun 2022 (14 pekon), serta tahun 2023 (4 pekon). Terlebih mulai pada tahun 2021 sudah tidak ada pekon yang masuk kategori sangat tertinggal.

Gambar 2.73. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2023



Sumber : Dinas PMP, 2024

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan data tahun 2023, jumlah desa mandiri di Kabupaten Pesisir Barat 3, desa maju 40, desa berkembang 69, desa tertinggal 4, dan desa sangat tertinggal 0. 4 desa yang masih dalam kategori tertinggal adalah Bandar Dalam, Siring Gading, Way Haru dan Way Tias, yang berada di Kecamatan Bangkunt.

2.4.9. Perikanan

Potensi Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap berada di sepanjang ± 210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil (±168.941 Ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan Jumlah nelayan mencapai ±15.100 orang.

Potensi ikan tangkap di perairan Kabupaten Pesisir Barat mencapai ±140.000 ton/tahun dengan total hasil tangkapan baru mencapai rata-rata ±14.000 ton/tahun atau rata-rata hanya 10,00% dari potensi yang ada. Potensi ikan bernilai ekonomis diantaranya ikan Tuhuk/Blue Marlin sebesar 1.600-1.800 ton/tahun, ikan tongkol total tangkapan 3.000-3.500 ton/tahun, berikutnya ikan kakap tangkapan 600-700 ton/tahun.

Tabel 2.85. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kec	Jenis Ikan (ton)										
		Tongkol	Layur	Tuhuk	Lobster	Tuna	Tenggiri	Layang	Simba	Kakap	Gurita	Lain-lain
1	Bangkunat	452	300	0	300	0	174	100	134	100	126	200
2	Ngaras	350	75	0	0	0	25	0	0	0	0	250
3	Ngambur	435	0	150	0	0	40	0	0	0	0	50
4	Pesisir Selatan	379	250	275	0	225	0	0	0	50	0	350
5	Krui Selatan	0	175	0	0	0	147	0	0	75	0	215
6	Pesisir Tengah	530	450	650	300	741	300	200	150	239	300	722
7	Way Krui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karya Penggawa	0	175	0	0	0	125	0	0	0	0	225
9	Pesisir Utara	400	0	378	0	0	217	0	0	50	0	250
10	Lemong	428	250	0	0	200	200	350	0	50	50	268
11	Pulau Pisang	378	0	275	0	184	75	61	0	100	50	193
Jumlah		3.034	1.202	1.604	599	1.350	961	801	603	692	531	2.296

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

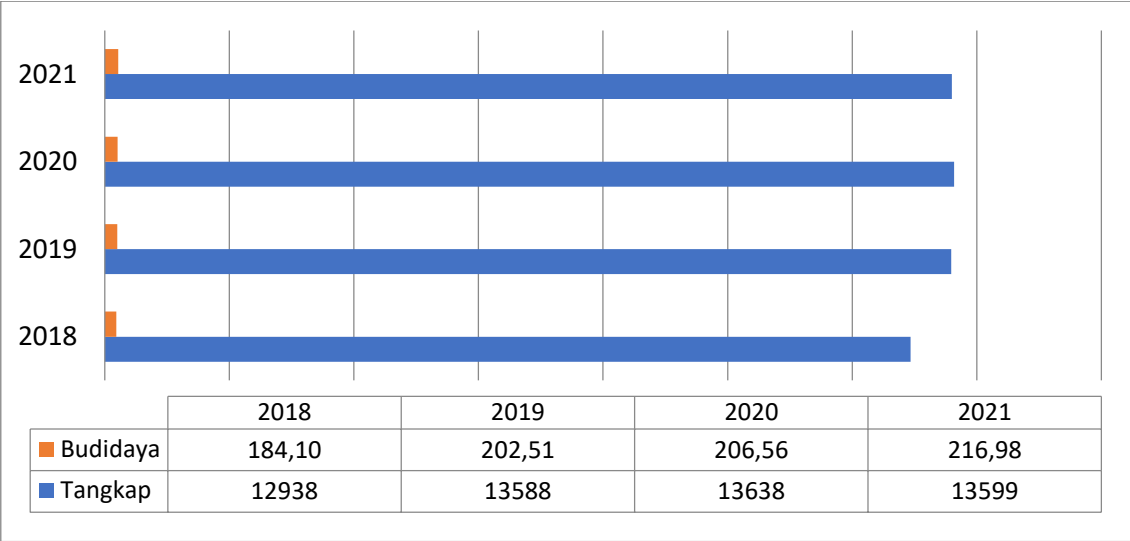
Produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Pesisir Barat yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan nila dengan total produksi 100-110 ton/tahun, ikan lele dengan total produksi mencapai 30-35 ton/tahun. Budidaya perikanan air tawar ini tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali pada Kecamatan Pulau Pisang.

Tabel 2.86. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kec	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Produksi (Ton)			
				Mas	Gurame	Lele	Nila
1	Lemong	2.800	2	2,24	2,24	0,44	1,68
2	Karya Penggawa	1.100	3	4,15	1,45	2,24	16,26
3	Pesisir Utara	2.100	1	3,36	2,69	2,46	15,70
4	Way Krui	800	3	1,68	3,02	5,61	15,03
5	Pesisir Tengah	2.000	3	2,24	4,15	4,48	19,07
6	Krui Selatan	2.100	2	2,24	1,68	4,48	5,61
7	Pesisir Selatan	1.500	4	3,14	3,36	5,61	8,97
8	Ngambur	1.700	3	5,61	2,80	4,48	13,46
9	Ngaras	2.700	1	1,12	3,02	3,36	5,61
10	Bangkunat	3.400	2	1,68	1,68	2,58	15,70
11	Pulau Pisang	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20.200	24	27,49	26,14	35,79	117,14

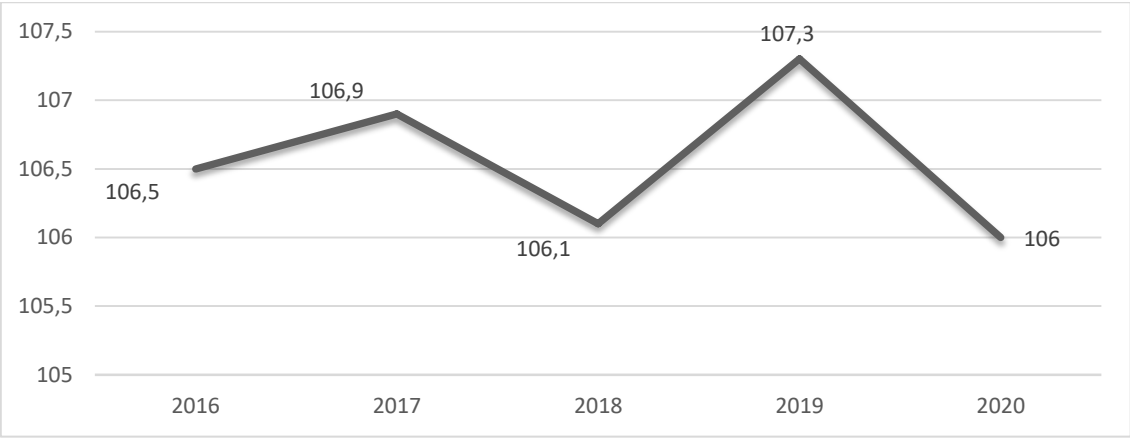
Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Gambar 2.74. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton)



Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Gambar 2.75. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

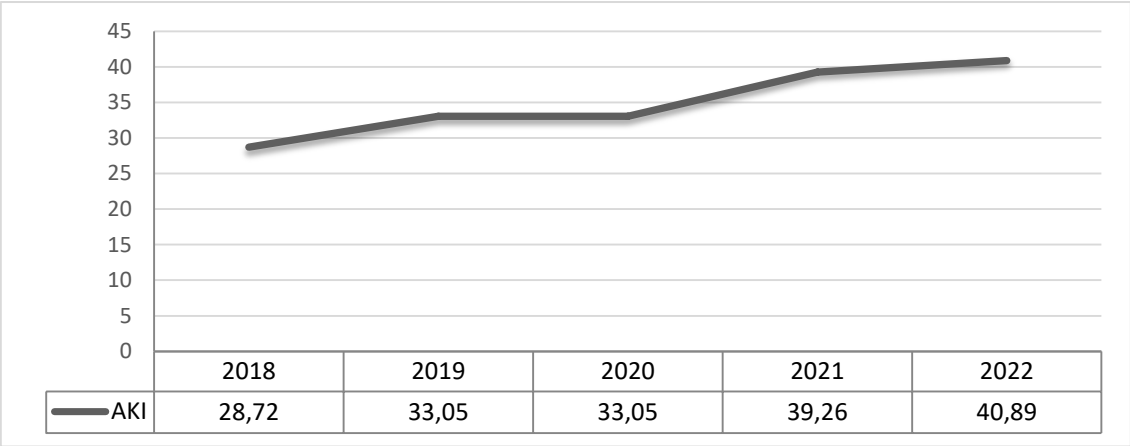
Perkembangan NTN di Kabupaten Pesisir Barat secara umum tidak berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2016 NTN berada pada angka 106.5, tahun 2017 naik sedikit menjadi 106.9 dan pada tahun 2018 turun menjadi 106.1. Pada tahun 2019 sempat naik keangka 107.3. namun kembali turun pada tahun 2020. Covid-19 yang menjangkit Indonesia sejak 2020 memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi berbagai sektor, diantaranya sektor perikanan, Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki banyak nelayan juga merasakan dampak dari hal tersebut, dapat dilihat penurunan NTN Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 menuju tahun 2020.

Beberapa faktor yang menyebabkan NTP pada tahun 2020 mengalami penurunan antara lain :

1. Kemampuan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19;

2. Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya akibat Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia dan barang.

Gambar 2.76. Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada data Angka Konsumsi Ikan (AKI), rata rata peningkatan yang terjadi sebesar 8,59 persen. Pada tahun 2018 tercatat AKI sebesar 28.72. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi 33.05 dan terus bertahan pada angka 33.05 di tahun 2020. Tahun 2021, kembali naik 6,21 sehingga capaian AKI berada pada angka 39.26. Pada tahun 2022, AKI terdata sebesar 40.89 atau naik sebanyak 1.63.

2.4.10. Pariwisata

Kabupaten Pesisir Barat yang dianugerahi garis pantai sepanjang 210 km yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki banyak sekali obyek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan. Dimana pada umumnya, pesona dan aktivitas yang ditawarkan pada obyek wisata pantai adalah snorkeling, surfing, menyelam, berenang, berlayar, berperahu motor, memancing, berjemur matahari, menikmati panorama alam, fotografi, upacara adat pada saat tertentu, berkemah, trekking dan bersepeda. Untuk sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat memiliki 46 Wisata Pantai, dengan lahan seluas 213,5 Ha.

Berikut ini disajikan objek wisata bahari pada Kabupaten Pesisir Barat yang dirinci berdasarkan tiap Kecamatan.

Tabel 2.87. Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Pantai Ujung Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
2	Pantai Teluk Bengkunat	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
3	Tampang Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
4	Way Cangkuk	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
5	Pantai Pelabuhan Nusantara	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
6	Pantai Curup Indah	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
7	Pantai Suka Negara	Ngaras	Panorama Alam Pantai

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
8	Pantai Siging	Ngaras	Panorama Alam Pantai
9	Pantai Harapan	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
10	Pantai Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai, Surfing
11	Pantai Way Jambu	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
12	Pantai Penaga	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
13	Pantai Melasti	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
14	Pantai Karang Nyimbur	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
15	Pantai Biha	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
16	Pantai Marang	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
17	Pantai Negeri Ratu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
18	Pantai Sumber Agung	Ngambur	Panorama Alam Pantai
19	Pantai Way Batang	Ngambur	Panorama Alam Pantai
20	Labuhan Bakhu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
21	Pantai Mandiri	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
22	Pantai Lintik	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
23	Pantai Walur	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
24	Pantai Berandai Mahenai	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
25	Pantai Ilahan	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
26	Pantai Labuhan Jukung	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
27	Pelabuhan Laut Kuala Stabas	Pesisir Tengah	Pelabuhan Nelayan
28	Pantai Way Redak	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
29	Pantai Seray	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
30	Bukit Pantai Selalau	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
31	Muara Way La'ay	Karya Penggawa	Muara Sungai
32	Pantai Harapan Kita	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
33	Pantai Way Sindi	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
34	Pantai Pasir Hitam	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
35	Pantai Tembakak	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
36	Pantai Penengahan	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
37	Batu Lawang	Pesisir Utara	Formasi Batuan Pantai
38	Pantai Walur	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
39	Pantai Pulang Pisang	Pulau Pisang	Panorama Alam Pantai
40	Pantai Parda Haga	Lemong	Panorama Alam Pantai
41	Pantai Bambang	Lemong	Panorama Alam Pantai
42	Pantai Tanjung Jati	Lemong	Panorama Alam Pantai
43	Pantai Batu Mirau	Lemong	Panorama Alam Pantai
44	Pantai Way Utong	Lemong	Panorama Alam Pantai
45	Pantai Tahawang	Lemong	Panorama Alam Pantai
46	Pantai Pugung Penengahan	Lemong	Panorama Alam Pantai

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Sebagai daerah yang mengandalkan wisatawan pantai, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2017 (terkecuali pada tahun 2020-2021 akibat pandemic Covid-19) telah melaksanakan event Krui Surfing Internasional. Dimana selain sebagai bentuk promosi panorama alam pantai, gelaran ini juga diharapkan mampu menjadi ajang pengenalan budaya lokal daerah yang otentik dan merupakan kebanggaan dari Provinsi Lampung dan juga Nusantara kepada wisatawan internasional dan juga nasional.

Tabel 2.88. Pelaksanaan Krui Surfing International Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022

No	Tahun	Event	Peserta	Lokasi
1	2017	Krui Pro QS 1000	86 Atlet	Pantai Tanjung Setia,

			(8 Negara)	Kecamatan Pesisir Selatan
2	2018	Krui Pro QS 1500	96 Atlet (17 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan
3	2019	Krui Pro QS 3000	133 Atlet (24 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan
4	2022	Krui Pro QS 5000	218 Atlet (17 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Selain mengandalkan objek wisata bahari, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi ekowisata dan suaka alam – cagar budaya yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan hadir berkunjung. Selain itu, terdapat juga atraksi seni dan budaya yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain.

Tabel 2.89. Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Ekowisata Pemerihan	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
2	Rhino Camp	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
3	Penangkaran Penyu Muara Tembulih	Ngambur	Penangkaran Penyu
4	Repong Damar	Way Krui	Panen Getah Damar Tradisional

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Tabel 2.90. Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kawasan	Luas (km ²)
1	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)	1.846,08
2	Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan	93,44
	Jumlah	1.940,52

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Kemampuan ekonomi daerah kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan ekonomi daerah. Kemampuan daerah dalam menyediakan akomodasi wisata erat kaitannya dengan peluang daerah mendapatkan kunjungan wisatawan, dengan efek lama tinggal yang lebih lama dan *spending money* yang lebih besar.

Tabel 2.91. Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Makan	Hotel/Penginapan
1	Pesisir Tengah	21	30
2	Pesisir Selatan	13	23
3	Lemong	0	0
4	Pesisir Utara	2	2
5	Karya Penggawa	1	1
6	Pulau Pisang	0	13
7	Way krui	0	0
8	Krui Selatan	4	15
9	Ngambur	1	1
10	Ngaras	2	0
11	Bangkunat	8	0
	Jumlah	52	83

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Dari data akomodasi pariwisata di atas, secara umum akomodasi belum menyebar secara merata. Khusus untuk daerah Lemong dan Way Krui hingga saat ini belum ada hotel/losmen yang dikelola oleh swasta ataupun Pemerintah Pusat. Khusus untuk Kecamatan Ngaras dan Bangkunat diarahkan untuk kawasan pengembangan budidaya perikanan. Selanjutnya dari total 135 akomodasi pariwisata (52 rumah makan dan 83 hotel/penginapan) hingga saat ini belum ada Sumber Daya Pariwisata Profesional yang bersertifikat. Untuk paket pariwisata yang dikelola juga langsung oleh pihak pemilik akomodasi wisata.

Tabel 2.92. Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	SDM Pariwisata		Pokdarwis
		Profesional	Non Profesional	
1	Pesisir Tengah	30	125	5
2	Pesisir Selatan	16	150	6
3	Lemong	0	75	3
4	Pesisir Utara	0	125	5
5	Karya Penggawa	0	125	5
6	Pulau Pisang	0	100	4
7	Way krui	0	50	2
8	Krui Selatan	15	75	3
9	Ngambur	0	50	2
10	Ngaras	0	50	2
11	Bangkunat	3	75	3
	Jumlah	64	1.000	40

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

Jumlah wisatawan yang hadir di Kabupaten Pesisir Barat secara umum masih didominasi oleh wisatawan lokal dengan perbandingan dengan wisatawan luar negeri 3:1 (2017-2019). Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan sebesar 166.283 orang. Pada tahun 2019 merupakan kunjungan tertinggi dengan jumlah wisatawan yang hadir sebanyak 203.173 orang. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah tercatat hanya sebanyak 50.730 orang. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab penurunan drastis jumlah ini. Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan minor menjadi sebanyak 78.064 orang. Data 2021 lebih

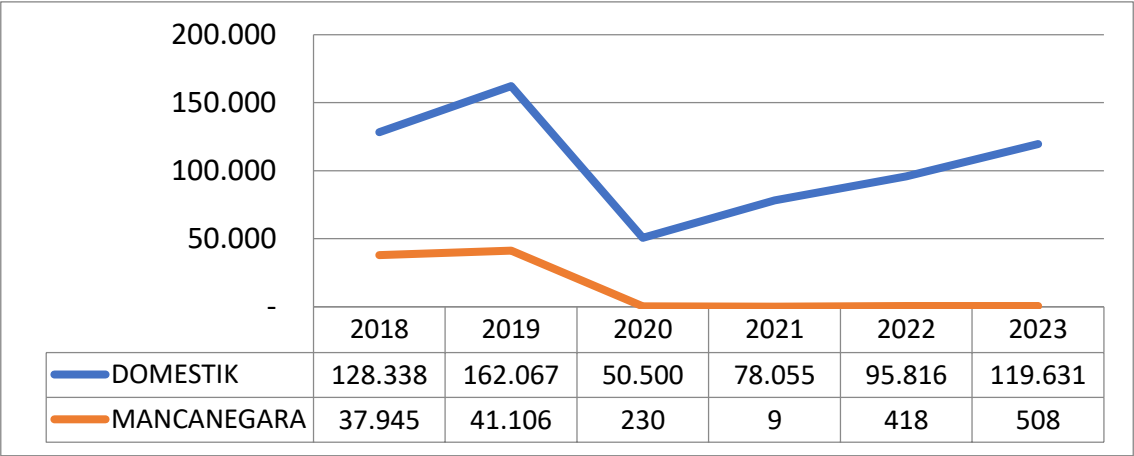
baik dari capaian 2020 namun belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah kunjungan hingga 30%, dimana total ada sekitar 96.234 orang yang hadir ke Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.93. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022

Kec	2018		2019		2020		2021		2022	
	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal
Lemong	3.414	1.342	145	3.678	0	0	0	37	0	30
Pesisir Utara	4.527	1.222	1.103	6.003	0	0	0	163	0	160
Karya Penggawa	3.181	1.994	555	12.780	0	0	0	185	0	175
Way Krui	1.736	893	170	1.301	0	0	0	159	0	154
Pesisir Tengah	5.439	43.404	11.788	103.400	173	50.500	0	75,717	0	91.641
Pesisir Selatan	5.556	41.869	2.067	2.543	57	0	3	1,100	394	2.500
Krui Selatan	3.437	2.333	22.589	11.349	0	0	6	453	24	513
Ngambur	3.622	1.225	123	3.077	0	0	0	95	0	93
Ngaras	1.681	858	87	354	0	0	0	21	0	17
Bangkunat	1.740	809	178	1.780	0	0	0	28	0	13
Pulau Pisang	3.612	32.439	2.301	15.802	0	0	0	97	0	102
Total	37.945	128.338	41.106	162.067	230	50.500	9	78.055	418	95.398

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Gambar 2.77. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Pariwisata, 2024

Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 hingga 2021 lalu murni disebabkan oleh bencana non alam Covid-19 yang membatasi pergerakan orang dan membatasi jumlah orang untuk berkumpul. Hal ini tentu saja sangat memukul sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang baru akan berkembang. Namun demikian, harapannya dengan kebijakan yang tepat pada tahun-tahun mendatang dapat kembali mengundang wisatawan untuk dapat hadir di Kabupaten Pesisir Barat.

2.4.11. Pertanian

Kabupaten Pesisir Barat terdapat sektor pertanian yang masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Dukungan sektor pertanian terhadap PDRB dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, Luas lahan pertanian pangan mencapai mencapai ±38.050,2 Ha. Dari luas lahan tersebut tanaman padi sawah, jagung dan padi ladang didaulat menjadi komoditas unggulan dari sektor pertanian, disamping ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 2.94. Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Kering (Ha)	
		Irigasi	Tadah Hujan	Kebun	Ladang
1	Lemong	414,00	74,00	40,00	25,00
2	Pesisir Utara	160,00	224,40	237,00	56,80
3	Pulau Pisang	-	-	3,00	2,00
4	Karya Penggawa	286,00	381,50	-	2.876,00
5	Way Krui	211,00	13,40	1.143,00	-
6	Pesisir Tengah	64,00	161,70	1.498,00	-
7	Krui Selatan	278,00	248,00	729,00	-
8	Pesisir Selatan	1.445,00	987,10	2.016,00	762,00
9	Ngambur	1.216,00	546,20	3.752,00	-
10	Ngaras	329,00	300,00	1.441,0000	1.149,00
11	Bangkunat	525,00	723,40	5.145,00	-
	Jumlah	4.928,00	3.659,70	16.004,00	4.870,80

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.95. Prasarana Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Prasarana Pertanian	
		Jalan Pertanian (ruas)	Irigasi (km)
1	Lemong	0	16
2	Pesisir Utara	1	15
3	Pulau Pisang	0	0
4	Karya Penggawa	0	9
5	Way Krui	1	7
6	Pesisir Tengah	2	12
7	Krui Selatan	1	6
8	Pesisir Selatan	8	30
9	Ngambur	4	17
10	Ngaras	4	20
11	Bangkunat	5	8
	Jumlah	26	140

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Dari data lahan pertanian yang ada, ditopang dengan panjang irigasi 140 km dan 26 ruas jalan pertanian, dirasa belum cukup memadai mengoptimalkan hasil produksi pertanian. Diakui dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah belum maksimal dalam upaya mendongkrak hasil pertanian.

Hasil produksi tanaman padi sawah Kabupaten Pesisir Barat tiap tahunnya rata-rata mencapai 80.000-90.000 ton/tahun, dimana pada tahun 2021 sebanyak 26,01% (23.760 ton/tahun) produksinya terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan, disusul Kecamatan Ngambur dengan hasil mencapai 15.415 ton/tahun atau

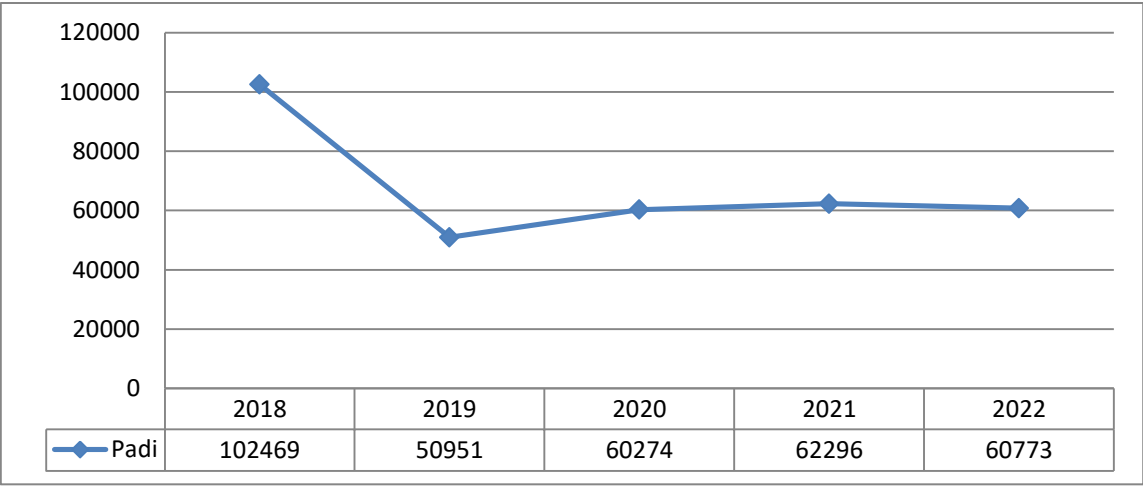
18,20% dari total produksi Kabupaten. Jika produksi tersebut dikonversi ke beras maka akan menjadi ±53.976 ton/tahun dengan asumsi rendemen saat giling sebesar 62.74%.

Tabel 2.96. Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kec	Produksi (Ton/Tahun)						
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau
1	Lemong	4,902.52	-	16.80	-	106.36	-	-
2	Pesisir Utara	4,063.56	-	-	1.47	79.77	15.77	-
3	Pulau Pisang	-	-	-	5.88	186.13	16.77	3.82
4	Karya Penggawa	6,916.94	21.20	-	-	53.18	-	1.43
5	Way Krui	2,182.68	-	-	-	-	-	-
6	Pesisir Tengah	2,350.11	26.50	5.60	8.81	159.54	-	-
7	Krui Selatan	5,433.00	360.40	22.40	20.57	372.26	-	1.91
8	Pesisir Selatan	25,219.85	31.80	23.52	33.79	398.85	256.32	7.63
9	Ngambur	16,418.96	5,191.35	39.20	32.32	319.08	142.93	6.20
10	Ngaras	7,847.47	3,074.00	-	2.94	-	-	-
11	Bangkunat	10,169.11	6,519.00	35.95	48.48	1,861.30	528.41	16.22
	Jumlah	85,504.19	15,224.25	143.47	154.25	3,536.47	960.20	37.21

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Gambar 2.78. Produksi Padi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Menurunnya jumlah produksi padi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang masih sering terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Gangguan OPT yang menyerang khususnya komoditi padi berdampak pada turunnya jumlah luas panen padi dan menurunkan jumlah produksi. Selain itu keterlambatan distribusi pupuk juga masih menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah produksi padi di Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah produksi padi biasanya disokong oleh padi ladang. Namun pada

tahun 2022 jumlah tanam padi ladang beralih ke komoditi pepaya California, jagung dan lain sebagainya. Penurunan luas tanam juga dikarenakan petani masih bergantung pada bantuan benih, namun bantuan benih yang diterima petani mengalami penurunan.

Meskipun Kabupaten Pesisir Barat bukan merupakan sentra dari produksi tanaman padi di Provinsi Lampung, tetapi mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung program pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ketahanan pangan dan kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Pada subsektor hortikultura, Kabupaten Pesisir Barat juga penghasil tanaman sayuran dan buah-buahan, dengan komoditas utama adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan tomat. Sementara tanaman sayuran lainnya kurang menjadi primadona bagi petani.

Sentra produksi sayuran daerah adalah Kecamatan Bangkunt dengan produksi 2.880 kuintal pada tahun 2021 dan 2.515 kuintal pada tahun 2022. Berikuntnya adalah Kecamatan Ngambur dengan capaian produksi tahun 2021 sebesar 2.070 kuintal dan 2.052 kuintal pada tahun 2022. Sementara itu pada Kecamatan Way Krui tidak ada petani sayuran (produksi nihil untuk komoditas cabai dan tomat).

Tabel 2.97. Jumlah Produksi Sayuran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kuintal)

No	Kecamatan	Cabai Besar		Cabai Keriting		Cabai Rawit		Tomat	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	0	0	421	187	267	235	0	0
2	Pesisir Utara	13	35	233	170	119	122	77	60
3	Pulau Pisang	0	0	0	0	0	0	34	17
4	Karya Penggawa	5	0	22	15	25	20	14	10
5	Way Krui	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pesisir Tengah	145	393	0	0	74	632	0	0
7	Krui Selatan	0	0	759	319	1.067	447	189	131
8	Pesisir Selatan	0	0	268	448.8	99	343,4	302	366
9	Ngambur	677	525	367	513	618	484	408	530
10	Ngaras	0	0	102	92	13,6	7,4	44	0
11	Bangkunt	0	0	1.070	1.010	820	775	990	730
Jumlah		840	953	3.242	2.754,8	3.102,8	3.065,8	2.058	1.844

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.98. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kg)

No	Kecamatan	Jahe		Laos/Lengkuas		Kencur		Kunyit	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	30.400	22.000	0	0	0	0	0	0
2	Pesisir Utara	8.693	6.341	2.132	2,515	125	248	1.098	1.177
3	Pulau Pisang	2.794	780	1.700	60	1.540	310	2.045	700
4	Karya Penggawa	705	815	1.946	1.895	270	259	730	705
5	Way Krui	0	71	0	6	0	22	0	47
6	Pesisir	1.475	153.466	1.781	4.941	95	476	520	1.023

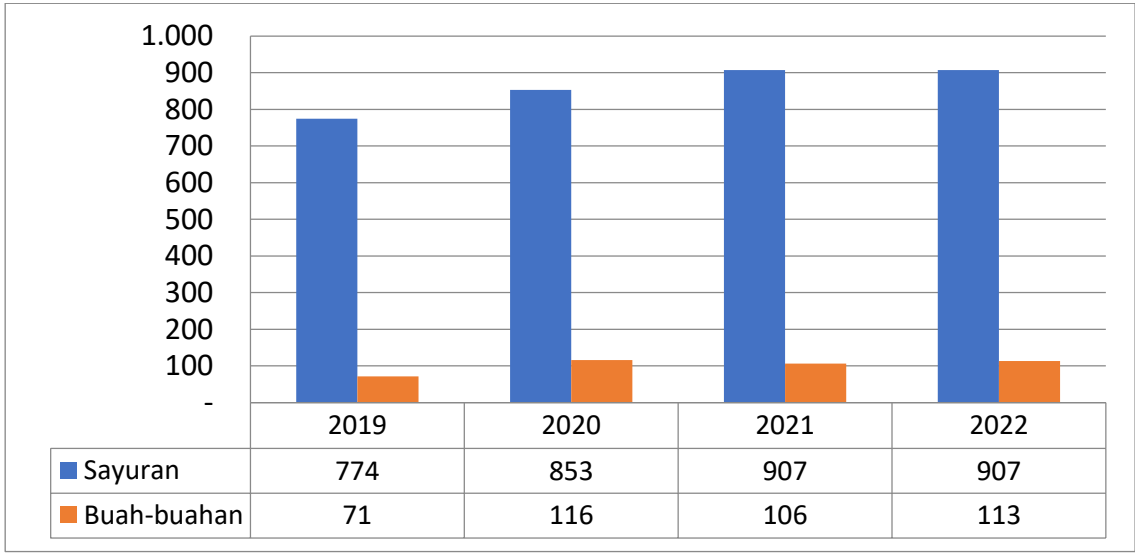
	Tengah								
7	Krui Selatan	2.500	3.750	3.625	3.125	186	1.290	175	740
8	Pesisir Selatan	8.298	21.791	6.283	11.721	3.125	2.571	6.756	8.548
9	Ngambur	24.780	25.321	40.258	109.278	18.153	20.290	24.064	26.826
10	Ngaras	850	2.000	1.750	750	1.200	500	1.100	320
11	Bangkunat	460.000	345.000	60.500	51.500	65.000	48.000	75.000	47.000
Jumlah		540.495	581.335	119.975	185.791	89.694	73.966	111.488	87.086

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Untuk tanaman biofarmaka yang terdiri dari jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit produksinya secara total pada tahun 2021 sebanyak 861.652 Kg dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 928.178 Kg. komoditas terbanyak adalah Jahe dengan catatan 540.495 Kg pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 581.335 Kg pada tahun 2022. Kecamatan yang menjadi pusat produksi adalah Kecamatan Bangkunat dengan data tahun 2021 sebesar 660.500 Kg dan tahun 2022 sebesar 491.500 Kg. Kecamatan Way Krui adalah kecamatan dengan produksi paling minim dengan data tahun 2021 0 Kg dan tahun 2022 adalah 146 Kg.

Bila dibandingkan dengan luasan panen untuk tanaman sayuran dan jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman buah-buahan serta luasannya pun terus meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 774 Ha, 2020 sebesar 853 Ha, pada tahun 2021 dan tahun 2020 meningkat menjadi 907 Ha. Sementara itu, pada komoditas buah-buahan data pada tahun 2019 seluas 71 Ha dan meningkat tajam pada tahun 2020 dengan capaian 116 Ha. Pada tahun 2021, luasan panen buah-buahan menurun menjadi 106 Ha namun pada tahun 2022 dapat kembali naik menjadi 113 Ha.

Gambar 2.79. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 (Ha)



Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Berdasarkan data, luas lahan perkebunan kabupaten pesisir barat mencapai 24.487 Ha dengan total hasil produksi tanaman perkebunan rata-rata sebesar 25.000-30.000 ton/tahun. Dimana berdasarkan luas dan jumlah hasil produksi yang menjadi komoditas unggulan sektor perkebunan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 antara lain:

1. Kelapa sawit memiliki lahan produksi 8.235,00 Ha dengan produksi 19.899,68 ton, Kecamatan Ngambur sebagai daerah tertinggi produksi dengan capaian sebesar 8.850,00 ton;
2. Kelapa dengan luasan lahan sebesar 6.430 Ha dan capaian produksi sebesar 6.666,07 ton. Kecamatan Ngambur adalah kecamatan dengan produksi tertinggi sebanyak 2.203 ton;
3. Karet luasan lahan total adalah 630 Ha dengan total produksi sebesar 301,15 ton serta Kecamatan Pesisir Selatan dengan produksi tertinggi sebesar 142,50 ton
4. Kopi memiliki luasan lahan sebesar 5.470 Ha dengan capaian produksi 3.031,08 ton dan Kecamatan Lemong sebagai sentra produksi sebesar 1.045,00 ton;
5. Kakao dengan luasan lahan adalah 802,00 Ha dan capaian produksinya adalah 493,10 ton, dengan Kecamatan Bangkuntat sebagai penghasil tertinggi dengan nilai 190 ton;
6. Jambu Mete dengan luasan lahan 6 Ha dan capaian produksi pertahun 1,40 ton;
7. Pala memiliki luas lahan sebesar 112 Ha dengan produksi sebanyak 19,84 ton/tahun;
8. Lada dengan besaran lahan 2.829 Ha dengan capaian produksi adalah 1.059,70 ton/tahun;
9. Tembakau memiliki luasan lahan sebesar 12 Ha dan capaian produksi adalah 4,44 ton/tahun.
10. Damar dengan produksi 5,272 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Way Krui dengan produksi 2,072 ton/tahun.

Tabel 2.99. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (ton) (i)

No	Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	18,00	23,00	675,00	615,00	10,00	6,00
2	Pesisir Utara	6,50	5,50	695,60	692,00	1,70	1,75
3	Pulau Pisang	0,00	0,00	216,00	48,00	0,00	0,00
4	Karya Penggawa	4,00	4,00	487,00	46,00	1,60	1,60
5	Way Krui	0,00	0,00	262,00	263,00	0,00	0,00
6	Pesisir Tengah	85,00	85,10	414,00	362,00	0,00	0,00
7	Krui Selatan	52,00	52,96	401,00	398,07	0,00	0,00

8	Pesisir Selatan	1.277,20	5.779,12	2.105,60	2.203,00	135,10	142,50
9	Ngambur	8.688,00	8.850,00	1.241,00	811,00	53,30	14,30
10	Ngaras	2.260,00	2.051,00	540,00	552,00	82,00	116,00
11	Bangkunat	3.060,00	3.049,00	831,00	656,00	19,00	19,00
Jumlah		15.450,70	19.899,66	7.868,20	8.666,07	302,70	301,15

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.100. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2021-2022 (ii)

No	Kecamatan	Kopi		Kakao		Damar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	1.038,00	1.045,00	82,00	71,00	109	100.98
2	Pesisir Utara	690,00	620,00	23,00	24,00	115	114.99
3	Pulau Pisang	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-
4	Karya Penggawa	150,00	101,00	41,20	0,00	422	370.44
5	Way Krui	10,30	7,20	32,00	25,00	2,072	2,169.00
6	Pesisir Tengah	7,00	7,00	32,00	16,00	1,622	1,559.06
7	Krui Selatan	6,80	13,78	17,50	15,80	8	8.25
8	Pesisir Selatan	305,00	61,10	39,10	47,50	473	402.50
9	Ngambur	250,00	250,00	66,30	39,80	95	87.12
10	Ngaras	247,00	258,00	64,00	64,00	333	314.40
11	Bangkunat	668,00	668,00	209.00	190,00	23	-
Jumlah		3.372,10	3.031,08	607,10	493,10	5,272	5,126,74

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Populasi ternak besar di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak sapi pada tahun 2022 mencapai 10.126 ekor, kerbau 558 ekor, kambing 7.259 ekor dan domba 1.214 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak ayam ras dengan jumlah 1.836 ekor, ayam buras dengan capaian populasi 76.658 ekor, ternak itik sebanyak 16.258 ekor dan bebek sebanyak 4.212 ekor.

Sentra populasi ternak sapi ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah populasi mencapai 3.027 ekor, berikutnya pada Kecamatan Ngambur dengan jumlah populasi sebesar 1.805 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan jumlah 1.373 ekor. Sementara populasi kerbau terbesar ada di Kecamatan Lemong yang mencapai 102 ekor dan Pesisir Selatan 78 ekor. Untuk ternak kambing populasi terbesar ada di Kecamatan Ngambur 1.474 ekor dan Kecamatan Lemong dengan populasi 1.383 ekor. Untuk ternak domba populasi tertinggi ada di Kecamatan Bangkunat dengan populasi 393 ekor dan Kecamatan Karya Penggawa 259 ekor.

Berikutnya untuk sentra populasi ternak Ayam Buras ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah 28.468 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan jumlah populasi 14.949 ekor. Selanjutnya untuk ternak bebek ada di Kecamatan Bangkunat dengan populasi 3.220 ekor dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan populasi 2.064 ekor. Sedangkan ternak itik ada di Kecamatan Pesisir Selatan 1.078 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan populasi 972 ekor.

Untuk lebih detail populasi hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.101. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Ras	Ayam Buras	Bebek	Itik
1	Lemong	389	102	1,383	-	374	10,013	231	290
2	Pesisir Utara	439	63	191	35	-	1,222	544	232
3	Pulau Pisang	143	-	78	-	-	984	155	-
4	Karya Penggawa	452	77	532	259	-	8,403	5,317	401
5	Way Krui	351	75	158	71	-	1,802	494	191
6	Pesisir Tengah	591	49	275	131	-	3,029	1,332	256
7	Krui Selatan	1,085	24	567	43	510	3,561	1,054	292
8	Pesisir Selatan	3,027	78	1,059	204	-	28,468	2,064	1,078
9	Ngambur	1,805	-	1,494	38	-	3,148	1,678	387
10	Ngaras	471	54	228	40	452	1,079	169	113
11	Bangkunat	1,373	36	1,294	393	500	14,949	3,220	972
Jumlah		10.126	558	7.259	1,214	1,836	76,658	16,258	4,212

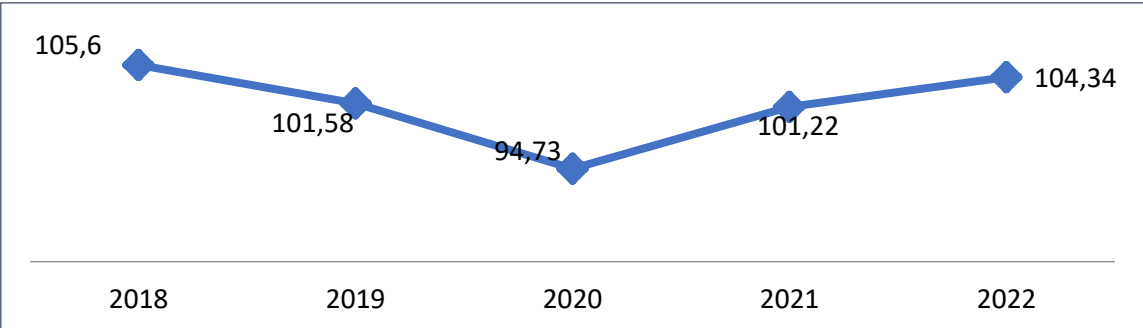
Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Tabel 2.102. Kasus Penyakit Hewan Ternak Menular Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	2021	2022
1	Lemong	3	0
2	Pesisir Utara	7	124
3	Pulau Pisang	0	0
4	Karya Penggawa	8	0
5	Way Krui	8	0
6	Pesisir Tengah	23	0
7	Krui Selatan	36	0
8	Pesisir Selatan	123	0
9	Ngambur	89	0
10	Ngaras	19	0
11	Bangkunat	25	0
Jumlah		341	124

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Gambar 2.80. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Sehingga semakin tinggi NTP maka diasumsikan semakin sejahtera nelayan. Bila melihat dari data NTP di Kabupaten Pesisir Barat, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Angka NTP pada tahun 2018 ke angka 105,6. Namun demikian kembali turun menjadi 101,58 pada tahun 2019. Tidak stabilnya nilai NTP ini dikarenakan masih belum stabilnya harga produk pertanian, sementara itu biaya produksi untuk menghasilkan produk memiliki kecenderungan naik dari tahun ke tahun.

Petani di Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usaha tani berskala kecil, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani mengalami penurunan bahkan dibawah 100 yaitu berkisar diangka 94,73 hal ini menandakan bahwa biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan hasil panen petani. Namun demikian, data capaian tahun 2021, NTP kembali meningkat di angka 101,22. Tahun 2022, NTP naik kembali menjadi sebesar 104,34.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan NTP mengalami fluktuasi penurunan antara lain :

1. Harga Jual Produk Pertanian turun (biasanya di musim panen raya);
2. Produktivitas pertanian yang masih sangat rendah (belum optimal);
3. Meningkatnya daya beli/daya konsumsi petani namun pendapatan tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan pada periode tertentu.

Terkait hal diatas maka Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan NTP adalah :

1. mengendalikan pasokan dan harga pangan pokok, khususnya pada saat hari raya keagamaan
2. Memberikan bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, maupun alat dan mesin pertanian
3. Bekerja sama dengan BULOG agar mereka mau membeli gabah/beras milik petani pada saat harga dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
4. Memberikan bantuan sosial kepada petani untuk mengurangi biaya pengeluaran petani.

2.4.12. Perdagangan

Selama tahun 2018–2022 perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian. Sedangkan perdagangan selama tahun 2018–2022 merupakan penyumbang kedua PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat yaitu rata-rata sebesar 11–14%. Kawasan perdagangan di Kabupaten Pesisir Barat terpusat berada di pasar-pasar yang ada di setiap kecamatan dan merupakan pasar besar (pasar kota). Kondisi saat ini sebagian besar pemerintah desa kurang berdaya dalam mengelola aset desa, hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan juga kemampuan manajerial yang dimiliki sehingga pada akhirnya pemerintah desa dan masyarakat belum dapat memanfaatkan secara optimal semua aset yang ada untuk membangun perekonomian desa.

Oleh karenanya, dengan adanya kemauan dan keinginan yang kuat masyarakat di perdesaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya serta adanya komitmen dan dukungan keberpihakan semua pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemberdayaan desa, merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa sekaligus membangun sistem ekonomi perdesaan melalui pengembangan aset desa secara efektif Perlu adanya perhatian khusus dan penataan pasar-pasar yang merupakan aset desa dan aset Pemerintah Daerah yang bisa menjadi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menambah sumber Pendapatan Asli Desa/Daerah. Pada Tabel di bawah adalah daftar Pasar Desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.103. Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Nama Pasar
1	Pesisir Selatan	Pasar Biha, Pasar Sumur Jaya, Pasar Senen
2	Bangkunat	Pasar pintau, Pasar Way Heni
3	Ngambur	Pasar Way Batang, Pasar Lansak, Pasar Cahaya Kuningan, Pasar Sumber Agung, Pasar Ulok Mukti
4	Pesisir Utara	Pasar Kerbang Langgar, Pasar Gedau, Pasar Rata Agung
5	Lemong	Pasar Lemong, Pasar Melesom
6	Karya Penggawa	Pasar Ulok Pandan, Pasar Menyancang, Pasar Penengahan, Pasar Kebuayan, Pasar Laay
7	Krui Selatan	Pasar Mandiri, Pasar Way Napal,
8	Ngaras	Pasar Bandar Agung,
9	Pesisir Tengah	Pasar Way Batu, Pasar Pagi, Pasar Klewer

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

Tabel 2.104. Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Jumlah			
			Los	Kios	Hamparan	Pedagang
1	Karya Penggawa	Pekon Kebuayaan :				
		Pasar Kebuayaan	4		50	54
2	Pesisir Tengah	Kelurahan Pasar Krui				
		Pasar Lama	65			120

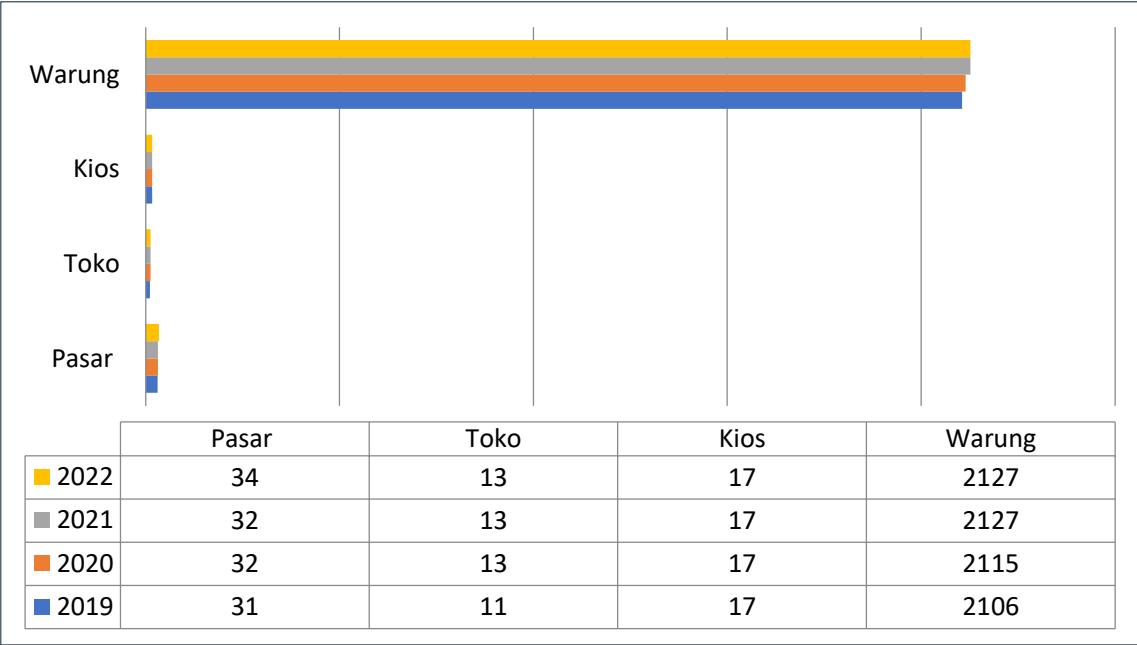
No	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Jumlah			
			Los	Kios	Hamparan	Pedagang
		Pasar Way Batu 1	34		197	
		Pasar Way Batu 2	35		165	
		Pekon Biha:				
3	Pesisir Selatan	Pasar Biha 1	12		48	60
		Pasar Biha 2	10			10
		Pekon Gedung Cahya Kuningan				
4	Ngambur	Pasar Gedung Cahya Kuningan 1	16		64	80
		Pasar Gedung Cahya Kuningan 2	28			28
		Pasar Minggu	10			10
		Pekon Ulok Mukti	50			50
		Pekon Tanjung Rejo				
5	Bangkumat	Pasar Pintau	24	14	73	80

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

Hingga tahun 2022, Kabupaten Pesisir Barat memiliki 10 Pasar yang berada di 5 kecamatan. Kondisi pasar-pasar tersebut dalam kondisi baik dan mampu menjadi wadah bagi roda perekonomian pada tataran kecamatan hingga kabupaten. Revitalisasi beberapa pasar dan juga pembangunan pasar-pasar baru yang lebih modern diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan pada data, jumlah sarana perdagangan terbanyak dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah warung yang ada di masyarakat sebanyak 2.127 warung yang tersebar di 11 Kecamatan. Sementara itu, jumlah kios dari tahun 2019-2022 tidak berubah sebanyak 17 kios. Jumlah toko pada tahun 2019 sebanyak 11 buah dan menjadi 13 buah toko pada tahun 2022. Jumlah pasar pada tahun 2019 sebanyak 31 pasar, pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 32 pasar dan pada tahun 2022 sebanyak 34 pasar.

Gambar 2.81. Jenis Sarana Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 2023

Urusan perdagangan juga memiliki kewajiban dalam hal terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang berhak. Dimana, pemerintah daerah berkewajiban menjaga pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Data pada tahun 2022, pupuk bersubsidi 8.225 ton yang terbagi dalam 5 jenis pupuk, yaitu pupuk Urea, SP36, ZA, NPK dan organik telah mencapai 100% dan dibagikan kepada seluruh kelompok petani terdata di 10 Kecamatan (Kecamatan Pulau Pisang tidak memiliki lahan pertanian).

Tabel 2.105. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 (ton)

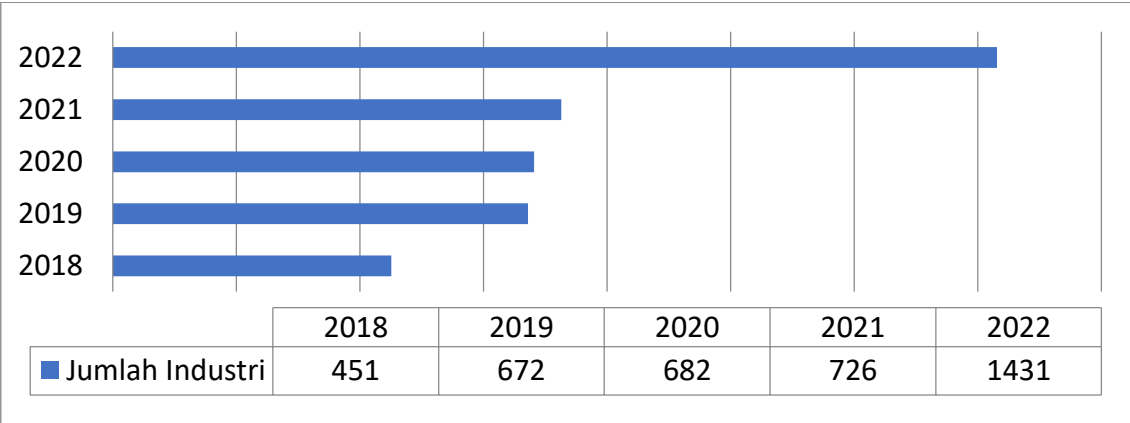
No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP36	ZA	NPK	Organik
1	Bangkunat	786	32	5	786	0
2	Ngaras	371	0	0	368	0
3	Ngambur	904	0	0	1.299	0
4	Pesisir Selatan	764	0	0	946	18
5	Krui Selatan	72	2	0	126	0
6	Pesisir Tengah	45	6	0	70	0
7	Way Krui	76	0	0	90	0
8	Karya Penggawa	230	8	0	378	0
9	Pesisir Utara	111	0	4	180	0
10	Lemong	141	0	0	407	0
11	Pulau Pisang	0	0	0	0	0
	Jumlah	3.500	48	9	4.650	18

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 2023

2.4.13. Perindustrian

Dari sektor perindustrian, Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong dalam daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilihat dari jenis industri di Kabupaten Pesisir Barat yang masih fokus pada pengembangan industri kecil, yaitu sektor industri pengolahan pangan, industri pengolahan kayu dan industri pariwisata. Untuk sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang relatif tetap. Besaran kontribusi tersebut terutama ditentukan oleh besarnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung pengembangan perekonomian, walaupun kinerja belum mencapai optimal.

Gambar 2.82. Jumlah Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Permasalahan permodalan dan/atau fasilitasi serta pemasaran untuk IKM di daerah masih tergolong minim. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penghambat dari upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor ini. Diperlukan kreatifitas dari pemilik IKM untuk dapat memanfaatkan peluang, khususnya pada pemasaran melalui *e-commerce* yang saat ini sedang berada pada masa *booming*.

Tabel 2.106. Data Pemasaran Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Pemasaran Tradisional	Pemasaran e-commerce
1	Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	1	1	0
2	Barang dari Kapur	3	3	0
3	Furnitur dari Kayu	63	63	20
4	Kerajinan YDTL	1	1	0
5	Penggaraman/Pengeringan Ikan	6	6	0
6	Pengasapan/Pemanggangan Ikan	8	8	0
7	Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	11	11	0
8	Tempe Kedelai	44	44	0
9	Tahu Kedelai	26	26	0
10	Penggilingan Padi dan Penyosongan Beras	69	69	0
11	Produk Roti dan Kue	17	17	11
12	Gula Merah	20	20	5
13	Makanan dan Masakan Olahan	17	17	17
14	Pengolahan Kopi	30	30	27
15	Pengolahan The	1	1	1
16	Kue Basah	5	5	2
17	Kerupuk, Keripik dan Sejenisnya	40	40	23
18	Produk Makanan Lainnya	2	2	2
19	Minuman Ringan	1	1	1
20	Air Minum dan Air Mineral	13	13	7
21	Kain Tenun Ikat	3	3	2
22	Kain Sulaman	600	600	200
23	Barang dari Tali	44	44	22
24	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	5	5	0
25	Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	1	1	0
26	Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	1	1	1
27	Barang Bangunan dari Kayu	8	8	2
28	Barang Lainnya dari Kayu	5	5	2
29	Barang Anyaman dari Rotan/Bambu	66	66	45
30	Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan/Bambu	28	28	28
31	Kerajinan Ukiran dari Rotan/Bambu	60	60	50
32	Percetakan Umum	1	1	1
33	Batu Bata dari Tanah	57	57	0

	Liat/Keramik			
34	Genteng dari Tanah Liat/Keramik	1	1	0
35	Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	2	2	0
36	Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	4	4	0
37	Barang Logam lainnya YTDL	7	7	0
38	Furnitur dari Rotan/Bambu	4	4	4
39	Permata	5	5	5
40	Kerajinan YTDL	31	31	0
41	Pengolahan Lainnya YTDL	1	1	0
42	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	120	120	0
	Jumlah	1.432	1.432	478

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023 (data diolah)

Tabel 2.107. Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

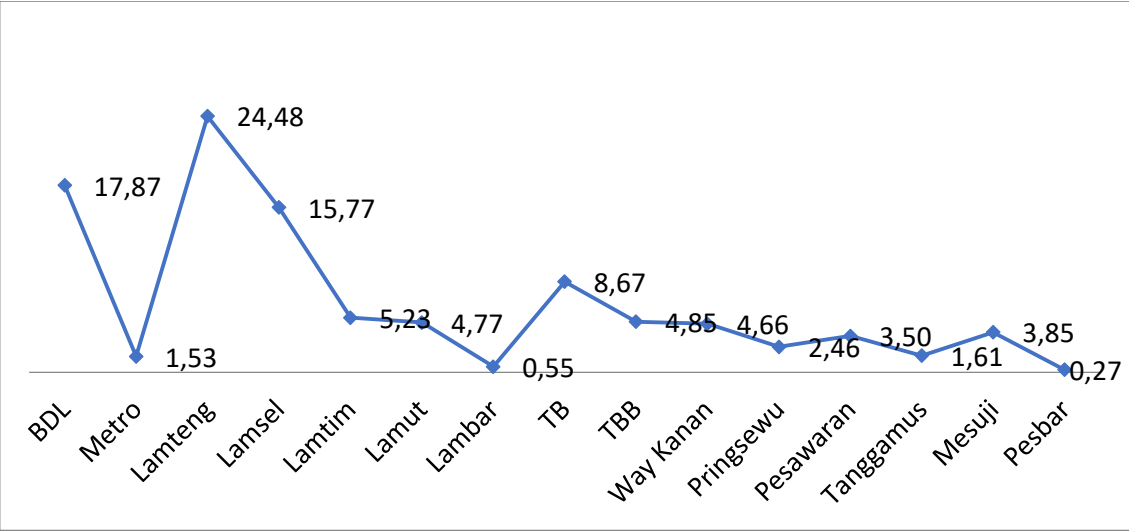
Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	4.88	4.49	3.98	4.11	3.76
Kontribusi Sektor Jasa Lainnya	Persen	1.04	1.06	1.00	0.95	1.13

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada target kinerja urusan perindustrian, didapatkan gambaran bahwa untuk perkembangan sektor ini terhadap PDRB terus menurun. Hal ini memang disebabkan belum berkembang sektor industri menengah dan besar di Kabupaten Pesisir Barat. Industri masih terfokus pada IKM atau industri skala rumah. Fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pengolahan juga belum optimal dikarenakan kondisi geografis daerah yang belum representatif untuk jalur produksi dan distribusi. Pada tahun 2018 industri pengolahan menyumbang persentase sebesar 4,88% pada tahun 2019 turun menjadi 4,49%. Tahun 2020 kembali turun menjadi 3,98%. Kenaikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 4,11% namun demikian pada tahun 2022 kembali turun menjadi 3,76%.

Bila dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir barat menjadi daerah dengan nilai *share* terkecil dalam kurun waktu 5 tahun pada periode 2018-2022. Sementara Kabupaten Lampung Tengah (24,48%), Kota Bandar Lampung (17,87%) dan Kabupaten Lampung Selatan (15,77%) adalah daerah dengan *share* terbesar. Rendahnya nilai 0,27% nilai *share* dari Kabupaten Pesisir Barat sejalan dengan narasi tidak adanya industri skala menengah dan besar di daerah.

Gambar 2.83. Kontribusi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022

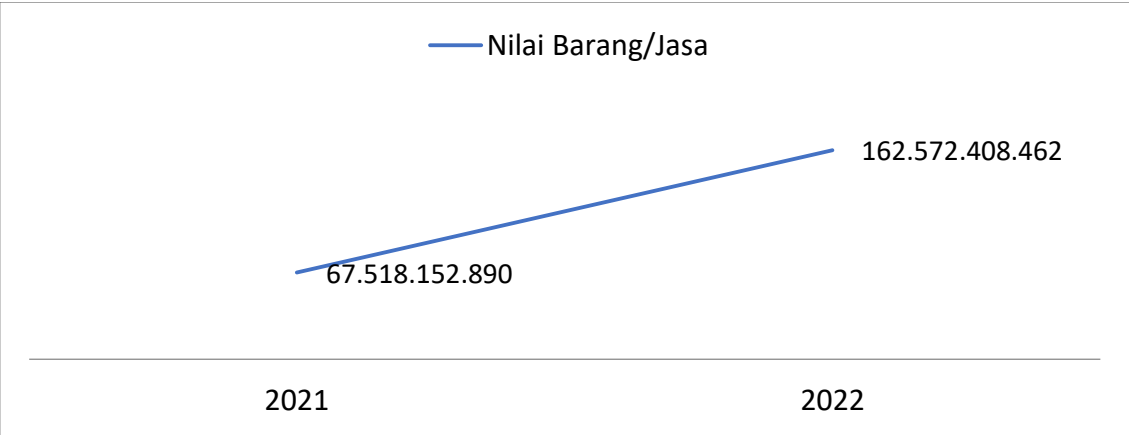


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Pada sisi jasa lainnya (industri IKM dikategorikan pada sektor ini) tidak banyak mengalami perubahan, dimana data pada tahun 2018 sebesar 1,04%, tahun 2019 naik menjadi 1,06%, tahun 2020 turun menjadi 1,00%, tahun 2021 kembali turun menjadi 0,95% dan tahun 2022 naik menjadi 1,13%.

Terkait dengan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah, pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.162.572.408.462,00. Dimana dari nilai tersebut naik bila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp.67.518.152.890,00.

Gambar 2.84. Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang Menggunakan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022



Sumber : Sekretariat Daerah Kab, 2023

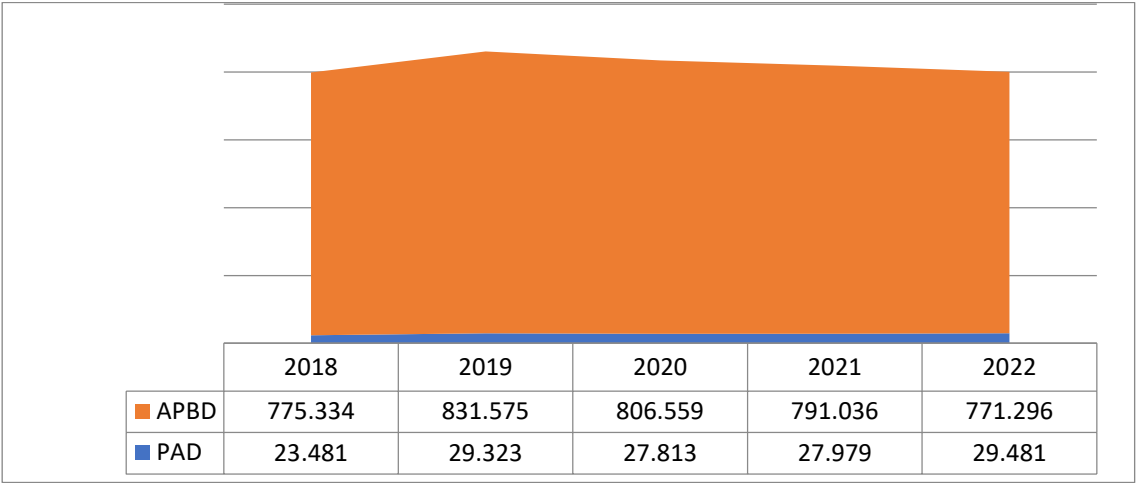
2.4.14. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup kewenangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah atau kemampuan fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Gambar 2.85. Perbandingan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



Sumber : Bapenda, 2023

Kemampuan keuangan daerah erat kaitannya dengan bagaimana daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana daerah bisa terus meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada data tahun 2018-2022 nilai persentase PAD terhadap APBD cenderung terus mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan terhadap keseluruhan dari pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat masih masuk dalam daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan lebih banyak mengandalkan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Data PAD pada tahun 2018 (3,03%), tahun 2019 (3,53%) dan tahun 2020 (3,45%). Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi sebesar (3,54%). Capaian pada tahun 2022 telah menjadi 3.82% nilai PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Secara persentase atau rasio nilai PAD terlihat terus mengalami peningkatan, namun demikian bila melihat dari sisi nominal angka PAD masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah. Diperlukan usaha lebih giat dalam optimalisasi peningkatan nilai PAD pada tahun mendatang.

Tabel 2.108. Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK atas LKPD	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Persen	3,03	3,53	3.45	3.54	3.82

Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2023

Opini BPK atas LKPD sebagai indikator yang menunjukkan nilai akuntabilitas daerah dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah berhasil mencapai WTP, yang mana sebelumnya pada tahun 2014 dan 2015 dengan predikat disclaimer. Pada tahun 2016, tahun 2017 dan 2018 nilai predikat LKPD dapat naik dengan predikat WDP.

Tahun 2021 kembali Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan predikat WTP untuk ketiga kalinya. Sementara untuk data capaian tahun 2022 belum dirilis. Pencapaian nilai WTP ini wajib dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dimana, secara periodisasi, RPJPD Kabupaten Pesisir Barat memiliki 2 pentahapan RPJMD, yaitu untuk: (i) RPJMD Tahun 2016-2021 dan (ii) RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD tersebut diperlukan suatu proses pengendalian dan evaluasi.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi dalam siklus perencanaan pembangunan merupakan komponen yang sangat penting karena hasil pengendalian dan evaluasi akan digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas dengan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil untuk perbaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas pada periode perencanaan berikutnya.

Landasan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Berdasarkan pada pasal 180 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa salah satu tujuan dari pengendalian dan evaluasi adalah untuk mengukur kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengetahui dan menganalisis keberhasilan dan hambatan pada ketercapaian target, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJPD. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD, yang mana penilaiannya, digunakan untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan setiap penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD. Hasil evaluasi RPJPD nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terangkum pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 tanggal 15 Maret 2023, daerah menyusun evaluasi dokumen RPJPD selambat-lambatnya Triwulan I/II Tahun 2023, mengingat di tahun 2023 juga akan dilaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJPD periode Tahun 2025-2045.

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Sehingga periodisasi RPJPDnya tidak mencakup pelaksanaan 4 periode RPJMD. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 diukur melalui pencapaian sasaran pokok pada pelaksanaan RPJMD untuk 2 Periode RPJMD Kabupaten Pesisir Barat yaitu untuk RPJMD periode Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tahun 2016 berdasarkan hasil pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2015; dan RPJMD Periode Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada tahun 2021 berdasarkan pada pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020.

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung serta berpedoman pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat. Mengingat Kabupaten Pesisir Barat baru terbentuk pada tahun 2012, maka periode efektif RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 adalah tahun 2016-2025. Pelaksanaan RPJPD idealnya terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD Tahap I, RPJMD Tahap II, RPJMD Tahap III dan RPJMD Tahap IV.

Visi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 adalah “PESISIR BARAT MADANI DAN SEJAHTERA 2025”. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Barat yang madani dan sejahtera tahun 2025, misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Membangun prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah dalam skala mantap, tanggap bencana, dan berwawasan lingkungan;
2. Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal;
3. Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
5. Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum;
6. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045

Dalam rangka persiapan penyusunan evaluasi RPJPD, telah dihimpun beberapa dokumen terkait, yaitu Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2016-2021, Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016-2022, Publikasi dan Statistik dari BPS Kabupaten Pesisir Barat Serta telah dihimpun data capaian sektoral dari perangkat daerah melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/0599/V.01/2023.

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat yang disusun pada tahun 2016 yang dalam proses penyusunannya masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuannya, sedangkan proses evaluasinya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Akan tetapi, menurut penilaian internal Bappelitbangda tidak ditemukan kendala berarti dalam pengukuran capaian indikator sasaran pokok, dikarenakan indikator sasaran telah bersifat kuantitatif atau dapat dihitung.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan beberapa indikator yang sulit dilakukan pengukuran dan indikator yang tidak memenuhi unsur SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bounds) juga ditemukan target-target kinerja yang ditetapkan perlu dirasionalisasi kembali, termasuk bukan kewenangan daerah sesuai dengan pembagian kewenangan daerah serta beberapa target kinerja yang ditetapkan terlalu optimisi (terlampau tinggi).

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 terdapat 67 indikator sasaran pokok, yang terdiri dari:

1. Misi 1 terdapat 14 indikator kinerja sasaran pokok;
2. Misi 2 terdapat 16 indikator kinerja sasaran pokok;
3. Misi 3 terdapat 3 indikator kinerja sasaran pokok;
4. Misi 4 terdapat 14 indikator kinerja sasaran pokok;

- 5. Misi 5 terdapat 8 indikator kinerja sasaran pokok;
- 6. Misi 6 terdapat 12 indikator kinerja sasaran pokok;

Dari 67 indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang belum rilis hingga laporan ini dicetak, yaitu:

- 1) Opini BPK terhadap LKPD, data tahun berjalan yang dipakai pada tabel adalah data 2021 dikarenakan belum selesainya audit BPK terhadap LKPD untuk Tahun Anggaran 2022;
- 2) Tingkat Efektivitas Organisasi, karena diukur 5 tahun sekali, jadi data yang dipakai untuk capaian tahun berjalan adalah data 2020.

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (tahun efektif 2016-2025) dilaksanakan dengan 2 periode RPJMD, yaitu RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan begitu, untuk RPJMD Tahun 2016-2021 menggunakan data tahun 2020/2021 dan untuk RPJMD Tahun 2021-2026 menggunakan data tahun 2022.

Tabel 2.109. Skala Penilaian Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

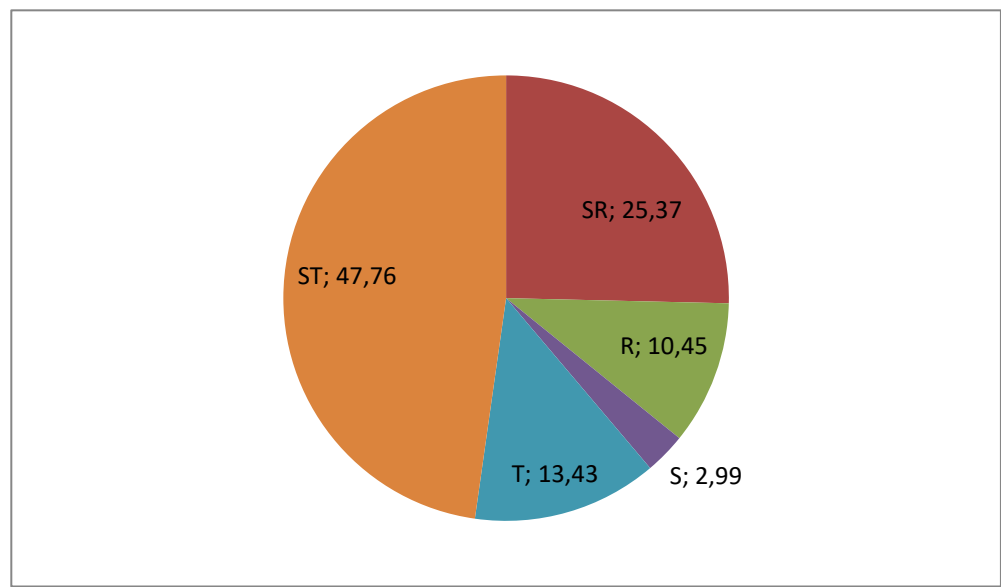
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 diperoleh rata-rata capaian kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD di tahap ke III adalah sebesar 75,14% dengan predikat Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD di tahap ke IV adalah sebesar 68,83% dan dengan predikat Sedang. Rata-rata capaian kinerja tertinggi dicapai oleh Misi 3 “Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari” dengan predikat Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja terendah diperoleh Misi 1 “Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala mantap, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan” dengan predikat kinerja Rendah.

Dari 67 indikator sasaran pokok RPJPD, pada realisasi tahap ke III terdapat 32 indikator dengan kriteria Sangat Tinggi, 22 diantaranya telah berhasil mencapai target 100%. Ini berarti terdapat 47,76% dari total keseluruhan indikator. Sedangkan untuk realisasi dengan predikat kinerja Tinggi diperoleh 9 indikator sasaran (13,43%). Untuk predikat Sedang dicapai 2 indikator sasaran (2,99%). Dan

7 indikator dengan predikat Rendah (10,45%). Serta 17 indikator dengan kriteria Sangat Rendah (25,37%).

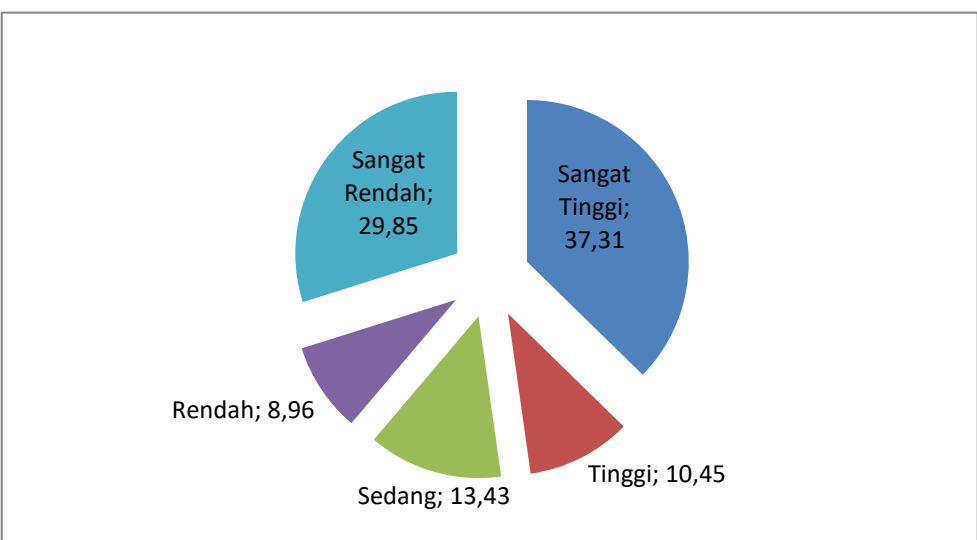
Gambar 2.86. Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Tahap III



RPJPD Kabupaten Pesisir Barat disusun tahun 2016, dan pada tahun tersebut target kinerja yang ditetapkan masuk kategori optimis. Sedangkan pada perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021, efek pandemi covid-19, serta dikarenakan kapasitas fiskal yang masih dipengaruhi dana transfer (PAD tidak berkembang) menyebabkan penyusunan target di RPJMD Tahun 2021-2026 (tahap IV RPJPD) lebih moderat, tidak merujuk pada target RPJPD yang tinggi (optimis).

Untuk capaian indikator sasaran pokok RPJPD di tahap ke IV terdapat 25 indikator dengan predikat Sangat Tinggi (37,31%) bahkan ada 17 indikator diantaranya berhasil mencapai target kinerja 100%. Untuk realisasi dengan predikat Tinggi dicapai oleh 7 indikator (10,45%). Dan 9 indikator dengan kriteria penilaian Sedang (13,43%). Serta 6 indikator dengan predikat Rendah (8,96%). Sedangkan sisanya, 20 indikator dengan predikat Sangat Rendah (29,85%).

Gambar 2.87. Capaian Indikator Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV



Belum optimalnya capaian target di tahap akhir RPJPD sebenarnya juga dipengaruhi dengan data capaian yang memakai data tahun 2022, sedangkan tahun akhir perencanaan adalah tahun 2025. Namun sebagaimana Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Calon Kepala Daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD. Serta Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang harus disusun di tahun 2023.

Secara lebih lengkap capaian indikator kinerja sasaran Tahap III (RPJMD Tahun 2016-2021) dan Tahap IV (RPJMD Tahun 2021-2026) disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110. Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota(%)	
			2016-2021	2021-2026	2016-2021	2021-2026	2016-2021	2021-2026
Misi 1 : Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala mantap, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan	Sasaran 1: Tersedianya prasarana (infrastruktur) dan sarana transportasi yang handal, mengkoneksikan seluruh pelosok daerah, terintegrasi dengan upaya pembangunan bidang lainnya, serta sesuai	Tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten dalam skala mantap	70%	100%	41.39%	30.84%	59.13% Rendah	30.84% Sangat Rendah
		Prasarana dan sarana perhubungan laut sesuai kebutuhan dan standar kualitas	2 pelabuhan regional dan 6 pelabuhan lokal	2 pelabuhan regional dan 6 pelabuhan lokal	1 pelabuhan regional dan 1 pelabuhan lokal	2 pelabuhan lokal	28.57% Sangat Rendah	25% Sangat Rendah
		Prasarana dan sarana perhubungan udara sesuai kebutuhan dan	1 Bandara 2 Maskapai	1 Bandara 3 Maskapai	1 Bandara 1 Maskapai	1 Bandara 1 Maskapai	66.67% Sedang	50% Sangat Rendah

	dengan RTRW	standar kualitas						
		Tersedianya angkutan umum yang menjangkau pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	70%	100%	70%	70%	100% Sangat Tinggi	70% Sedang
		Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi (darat, laut, udara)	10% per tahun	10% per tahun	10%	30%	100% Sangat Tinggi	33.33% Sangat Rendah
	Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi yang berkualitas, layak, sehat, aman, mencukupi kebutuhan, serta berkelanjutan	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman	100%	100%	33.00%	18.06%	33.00% Sangat Rendah	18.06% Sangat Rendah
		Cakupan pelayanan sanitasi masyarakat (air limbah, jamban, sampah, drainase lingkungan)	100%	100%	47%	18.06%	47.00% Sangat Rendah	18.06% Sangat Rendah

	Sasaran 3: Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (manusia, tumbuhan, dan hewan), baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	100%	62%	43.38%	88.57% Tinggi	43.38% Sangat Rendah
		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	100%	33.99%	18.06%	33.99% Sangat Rendah	18.06% Sangat Rendah
	Sasaran 4: Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal, efisien sesuai kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	Rasio elektrifikasi	70%	100%	68.95%	70.11%	98.5% Sangat Tinggi	70.11% Sedang

	Sasaran 5: Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	Cakupan pelayanan telekomunikasi dan internet pada pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	90%	100%	100%	100%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 6: Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, serta bencana lainnya)	Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas pengurangan resiko dan penanggulangan bencana dalam skala mantab	70%	100%	35%	53.19%	50% Sangat Rendah	53.19% Rendah
	Sasaran 7:	Persentase pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah	Perda Penataan Ruang yang ditangani/ ditindaklanjuti					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Sasaran 8: Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten dalam skala mantap	Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah (pemerintah dan DPRD) Kabupaten dalam skala mantap	100%	100%	52%	69%	52% Rendah	69% Sedang
Misi 2: Membangun Struktur Perekonomian Yang Kuat dan	Sasaran 1: Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan	Laju pertumbuhan ekonomi daerah	6	6.8	-1.18	2.88	-19.67% Sangat Rendah	42.35% Sangat Rendah
		Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	52.5	52	49.29	46.41	93.89% Sangat	89.25% Tinggi

Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal	pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	terhadap perkonomian daerah (PDRB)						Tinggi	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	115	125	94.73	104.34	82.37%	Tinggi	83.47%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110	115	106	105.88	96%	Sangat Tinggi	92% Sangat Tinggi
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	5	8	2.29	2.27	46%	Sangat Rendah	28% Sangat Rendah
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	8	10	3.98	3.76	49.75%	Sangat Rendah	37.60% Sangat Rendah
	Sasaran 2: Pendapatan perkapita masy. tinggi disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan	Pendapatan perkapita (diproksi dengan pengeluaran per kapita/ribu rupiah/tahun)	9,000	12,000	8,533	8,663	94.81%	Sangat Tinggi	72.19% Sedang
		Persentase penduduk miskin	4%	2%	14.29%	13.84%	27.99%	Sangat Rendah	14.45% Sangat

	kesenjangan pendapatan masy.							Rendah
		Ketimpangan pendapatan (Gini rasio)	< 0,3	< 0,3	0.281	0.29	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	10	10	0.96	1.13	9.60% Sangat Rendah	11.30% Sangat Rendah
	Sasaran 3: Peningkatan peran investasi/penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah	Kontribusi investasi/penanaman modal terhadap PDRB Kabupaten	15	25	23.52	15.52	100% Sangat Tinggi	62.08% Rendah
		Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Berkisar antara 3 sd 4	Berkisar antara 3 sd 4	10.57	7.79	37.84% Sangat Rendah	51.35% Rendah
	Sasaran 4: Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	8.5%	10%	12.92%	14.68%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Kontribusi sektor Jasa lainnya terhadap PDRB	1.5%	2%	0.96%	1.13%	64.0% Rendah	56.50% Rendah

		Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu per tahun	< 9,0 persen per tahun	< 9,0 persen per tahun	9	9	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah per tahun	< 13,6 persen per tahun	< 13,6 persen per tahun	12	8.2	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
Misi 3 : Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari	Sasaran 1: Terwujudnya lingkungan yang indah berseri	Rasio luas taman dan ruang publik terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah	30%	30%	43%	45%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 2: Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Persentase penurunan beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut/tahun	50%	50%	70%	80%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 3: Meningkatnya perilaku peduli	Indeks Prilaku Lingkungan Masyarakat	70%	80%	75%	80%	100% Sangat	100% Sangat

	lingkungan dan kehutanan						Tinggi	Tinggi
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing	Sasaran 1: Peningkatan kualitas hidup manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65.24	74.00	63.91	65.14	97.96%	88.03%
		Angka rata-rata lama sekolah	9.00	12.00	8.01	8.53	Sangat Tinggi	Tinggi
		Angka harapan lama sekolah	12.00	15.00	11.99	12.13	89.00%	71.08%
		Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	65.00	70.00	63.50	63.99	Tinggi	Sedang
	Sasaran 2: Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang						99.92%	80.87%
							Sangat Tinggi	Tinggi
	Sasaran 2: Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Laju pertumbuhan penduduk terkendali (rata-rata laju pertumbuhan penduduk)	1.00	1.00	0.64	1.03	97.69%	91.41%
	Sasaran 3: Penurunan	Tingkat pengangguran	1.5	1	3.41	3.73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
							100%	97.09%
							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
							43.99%	26.81%
							Sangat	Sangat

	tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	terbuka (TPT)					Rendah	Rendah
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.00	80.00	70.54	71.27	94.05% Sangat Tinggi	89.09% Tinggi
	Sasaran 4: Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindung Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94	95	93.21	93.95	99.16% Sangat Tinggi	98.89% Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70	75	56.21	54.93	80.30% Tinggi	73.24% Sedang
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, perlindungan, dan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 5: Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase PMKS yg memperoleh perlindungan sosial	100%	117%	80.69%	102.485%	80.69% Tinggi	87.49% Tinggi

	dan pelayanan social							
	Sasaran 6: Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan (terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama)	30%	50%	8%	9%	27% Sangat Rendah	18% Sangat Rendah
	Sasaran 7: Peningkatan Pembinaan Olahraga	Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	25%	35%	90%	95%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Persentase tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi (persen)	80%	100%	60%	65%	75% Sedang	65% Rendah
Misi 5 : Membangun	Sasaran 1 : Terwujudnya	Tersedianya tempat ibadah bagi setiap	100%	100%	65%	75%	65%	75%

Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Tentram, dan Demokratis dengan Mengedepankan Supremasi Hukum	kehidupan masyarakat yang religius	pemeluk agamanya dengan kualitas baik					Rendah	Sedang
		Persentase penurunan konflik inter dan antar umat beragama/tahun	100%	100%	100%	100%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 2 : Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur	Meningkatnya peran pelaku budaya dan kesenian daerah dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah	80%	80%	80%	20%	100% Sangat Tinggi	25.00% Sangat Rendah
	Sasaran 3 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan nyaman	Persentase penurunan konflik inter dan antar kelompok masyarakat yang terjadi	100%	100%	80%	100%	80% Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 4 : Terwujudnya kehidupan	Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilpres, dan	90%	90%	84.08%	82%	93.42% Sangat Tinggi	91.11% Sangat Tinggi

	masyarakat yang demokratis	Pileg						
		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan (jaring aspirasi masyarakat)	90%	90%	90%	90%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
	Sasaran 5 : Terwujudnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum	Persentase permasalahan hukum rakyat kecil yang mendapat fasilitasi advokasi	80%	90%	90%	95%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara cepat, tepat, dan adil	70%	80%	85%	90%	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
Misi 6 : Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good And Clean	Sasaran 1 : Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas Aparatur	70	80	57.12	33.39	81.60% Tinggi	41.74% Sangat Rendah

Governance)	Sasaran 2 : Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Rata-rata indeks Reformasi Birokrasi (RB)	baik (kategori B ke atas)	baik (kategori B ke atas)	C	C	50% Sangat Rendah	50% Sangat Rendah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	C	CC	50% Sangat Rendah	75% Sedang
		Tingkat Efektivitas organisasi	kategori III (80)	kategori III (80)	64.04	64.04	80.05% Tinggi	80.05% Tinggi
	Sasaran 3 : Kapasitas keuangan pemerintah daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100% Sangat Tinggi	100% Sangat Tinggi
		Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	30	30	3.45	3.85	11.50% Sangat Rendah	12.83% Sangat Rendah
		Rasio dana transfer terhadap total penerimaan daerah	50	50	96.52	96.23	51.80% Rendah	51.96% Rendah
		Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	30	30	32.88	28.43	91.24% Sangat Tinggi	94.77% Sangat Tinggi

		Rasio belanja modal terhadap total belanja	40	40	22.09	28.26	55.23% Rendah	70.64% Sedang
	Sasaran 4 : Pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	75	79.95	93.75% Sangat Tinggi	94.06% Sangat Tinggi
	Sasaran 5 : Kapasitas lembaga legislatif daerah	Persentase Prolegda yang terealisasi	100%	100%	55%	92.11%	55.00% Rendah	92.11% Sangat Tinggi
		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	50%	30%	50.00% Sangat Rendah	30% Sangat Rendah

2.5.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sebagai sebuah dokumen perencanaan dengan periodisasi 20 (dua puluh) tahun, kebijakan yang tertuang dalam RPJPD memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis membutuhkan komitmen kuat untuk pelaksanaan penjabaran sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen RPJPD pada tataran daerah.

Sebagaimana Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Calon Kepala Daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD (dalam hal ini sasaran pokok pada Rancangan Awal RPJPD). Serta Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan kewajiban daerah untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang harus mulai disusun di tahun 2023 (dengan tetap memperhatikan hasil dari KLHS RPJPD dan RTRW).

Merujuk pada hal tersebut, maka data capaian target di tahap akhir atau Tahap IV RPJPD menggunakan data tahun 2022 sedangkan tahun akhir perencanaan RPJPD adalah tahun 2025. Hal ini jelas berpengaruh pada belum optimalnya capaian target RPJPD.

Pada evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 diperoleh rata-rata capaian kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD di Tahap ke III adalah sebesar 75,12% dengan predikat Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD di Tahap ke IV adalah sebesar 68,83% dan dengan predikat Sedang.

Secara umum pencapaian indikator-indikator sasaran pokok menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang positif dan ditinjau berdasarkan capaian hingga tahun 2022 secara umum dapat dinilai telah mengarah dan mendekati capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan RPJPD dalam upaya mencapai Visi : Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025.

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai faktor pendorong capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan daerah dan seluruh perangkat daerah;
- b. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian target kinerja;
- c. Dukungan *stakeholders* pembangunan dan stabilitas pemerintahan;
- d. Kapasitas aparaturnya pelaksana;

- e. Konsistensi dan taat peraturan perundang-undangan;
- f. Potensi daerah.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian masyarakat yang rendah;
- b. SDM masyarakat yang rendah sehingga menciptakan angka pengangguran dan berimbas pada angka kemiskinan;
- c. Sarana dan prasarana yang belum layak dan merata, baik infrastruktur daerah dan fasilitas umum;
- d. Kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada dana transfer dan PAD tidak berkembang;
- e. Aksesibilitas wilayah, dimana masih terdapat 4 pekon yang terbatas akses secara transportasi dan akomodasi (way haru, bandar dalam, way tiyas, siring gading) di Kecamatan Bangkumat;
- f. Karakteristik daerah, dimana daerah berada di antara Samudera Hindia dan TNBBS sehingga sulit dalam pengembangan wilayah, sekaligus sebagai daerah yang rawan bencana;
- g. Minimnya data sektoral perangkat daerah serta penetapan indikator yang tidak SMART;
- h. Pandemi covid-19 berakibat pada terhambatnya pencapaian kinerja pembangunan.

Berdasarkan pada faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah sebagai bahan dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya, antara lain:

- a. Sisi Dokumen, dalam rangka perbaikan kualitas dokumen RPJPD periode berikutnya, beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan antara lain:
 - (i) Penetapan indikator kinerja yang SMART, termasuk didalamnya yaitu (a) penetapan target kinerja yang merupakan kewenangan daerah; (b) penetapan target kinerja yang datanya tersedia; (c) penetapan target kinerja yang dapat dicapai berdasarkan kondisi fiskal daerah; (d) penetapan target kinerja yang selaras dengan sasaran pokok; dan (e) penetapan target kinerja yang umum dipakai/diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - (ii) Penggunaan nomenklatur dan diksi yang mudah dipahami dan sederhana sehingga mudah diimplementasikan, dimulai dari penyusunan Visi, Misi dan Sasaran Pokok yang dapat diturunkan menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pada setiap tahapan periodisasi RPJMD;

- (iii) Penyusunan dokumen dengan memperhatikan keselarasan dan keterkaitan dengan dokumen terkait lainnya, termasuk KLHS RPJPD, RTRW, SDGs, RPJPN, RPJPD Provinsi serta dokumen/laporan yang relevan;
- b. Sisi Kebijakan, dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:
 - (i) Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selalu mengarah pada pencapaian kinerja;
 - (ii) Penyusunan prioritas pencapaian target daerah, dimulai dengan pemenuhan terhadap *mandatory spending*, pencapaian SPM hingga pencapaian visi dan misi daerah serta dukungan terhadap pencapaian target kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - (iii) Pencapaian target-target kinerja daerah yang terstruktur dan berkesinambungan antar program seluruh perangkat daerah terkait yang saling melengkapi dan terkoneksi;
 - (iv) Penjaringan dan pemenuhan secara bertahap aspirasi dari *stakeholders* pembangunan dengan mengedepankan aspek pemerataan pembangunan;

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 yang menjadi dokumen perencanaan jangka panjang daerah idealnya mampu memberikan gambaran perkembangan daerah selama kurun waktu perodesasi selama 20 (dua puluh) tahun. Penetapan visi, misi dan sasaran pokok serta target indikatornya disusun dengan proyeksi kebutuhan daerah hingga tahun 2045. Salah satu faktor dalam penetapan proyeksi tersebut adalah perkembangan demografi daerah. Sebagaimana dipahami, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap perkembangan akan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya, pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan 4 periode RPJMD Kabupaten Pesisir Barat mencoba memberikan gambaran perkembangan dinamika kependudukan daerah yang akan berbanding lurus dengan perkembangan dinamika sarana dan prasarana pelayanan publik. Lebih lanjut, pertumbuhan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan disuatu daerah.

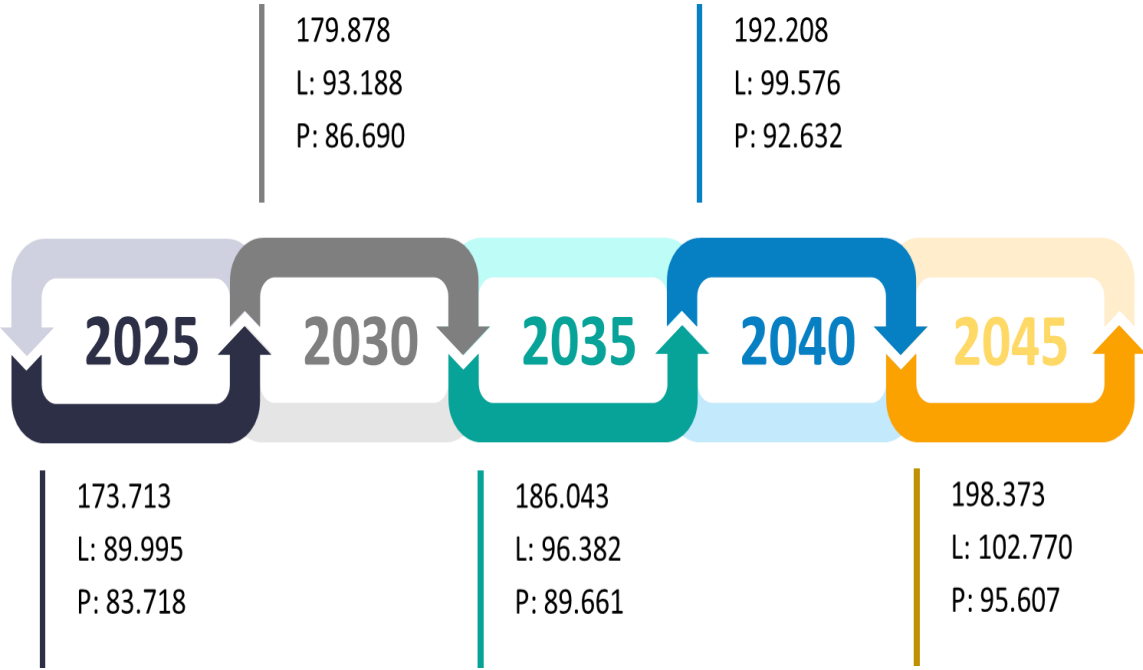
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan menjadi 4 (empat) tahapan sebagaimana pentahapan RPJMD dalam RPJPD, yaitu untuk perhitungan (i) RPJMD Tahun 2025-2029; (ii) RPJMD Tahun 2030-2034; (iii) RPJMD Tahun 2035-

2039; dan (iv) RPJMD Tahun 2040-2045. Proyeksi kependudukan tersebut setidaknya mampu memberikan gambaran akan perkembangan jumlah penduduk termasuk persebaran distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk berdasarkan usia.

Berdasarkan pada perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat didapatkan gambaran bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 198.373 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.770 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 95.603 jiwa. Data tersebut didapatkan dari perhitungan untuk tahun 2025 sebanyak 173.713 jiwa, pada tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 179.878 jiwa. Berikutnya untuk proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2035 sebanyak 186.043 jiwa dan tahun 2040 sebanyak 192.208 jiwa. Rata-rata kenaikan perlima tahun di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1.4%. perhitungan tersebut didapatkan dari asumsi kondisi eksisting pada tahun 2023 dan juga berdasarkan pada data series sebelumnya.

Gambar 2.88. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



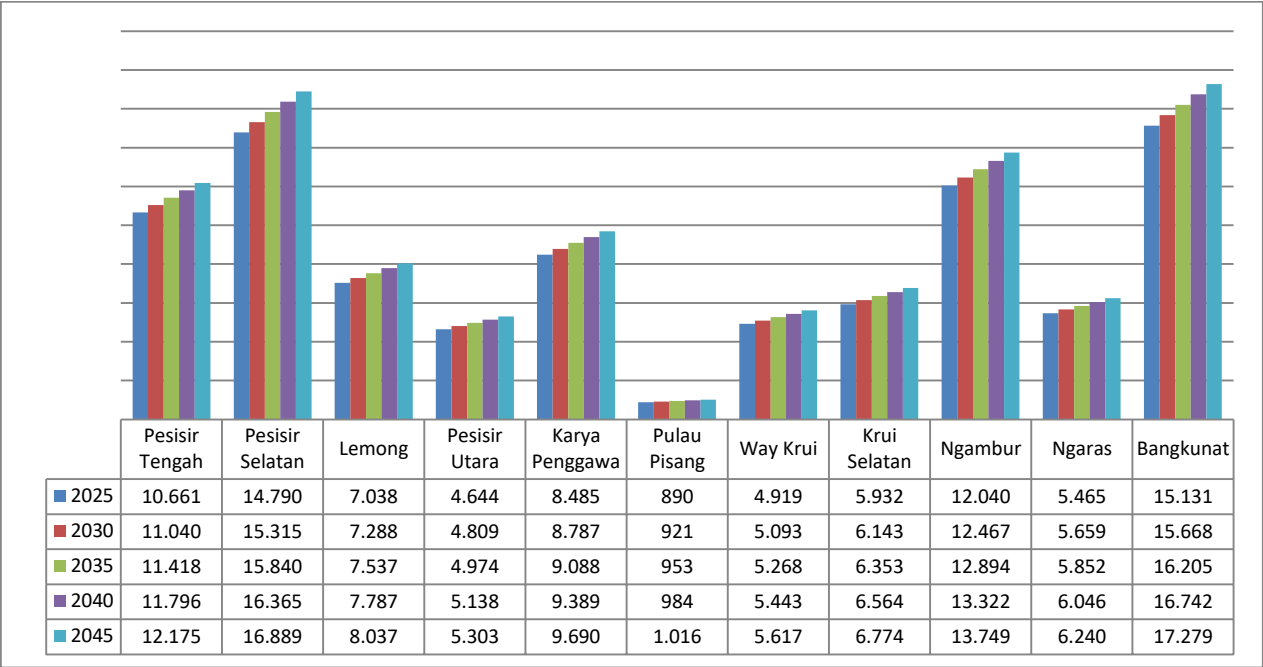
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2025-2045 disusun berdasarkan perkecamatan. Dimana secara umum, perhitungan persebaran kenaikan jumlah penduduk pada setiap kecamatan tidak banyak mengalami pergeseran. Hal ini diasumsikan dari perkembangan daerah di setiap kecamatan yang merata. Bahwa hingga tahun 2045, Kecamatan Bangkunt masih menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 32.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil ada pada Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah 1.982 jiwa. Bila dilihat dari pembagian perkecamatan berdasarkan pada jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Bangkunt

merupakan yang terbesar dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.770 jiwa dan perempuan sebanyak 95.603 jiwa. Kecamatan Pulau Pisang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terkecil, yaitu 1.016 jiwa laki-laki dan 966 jiwa untuk penduduk perempuan.

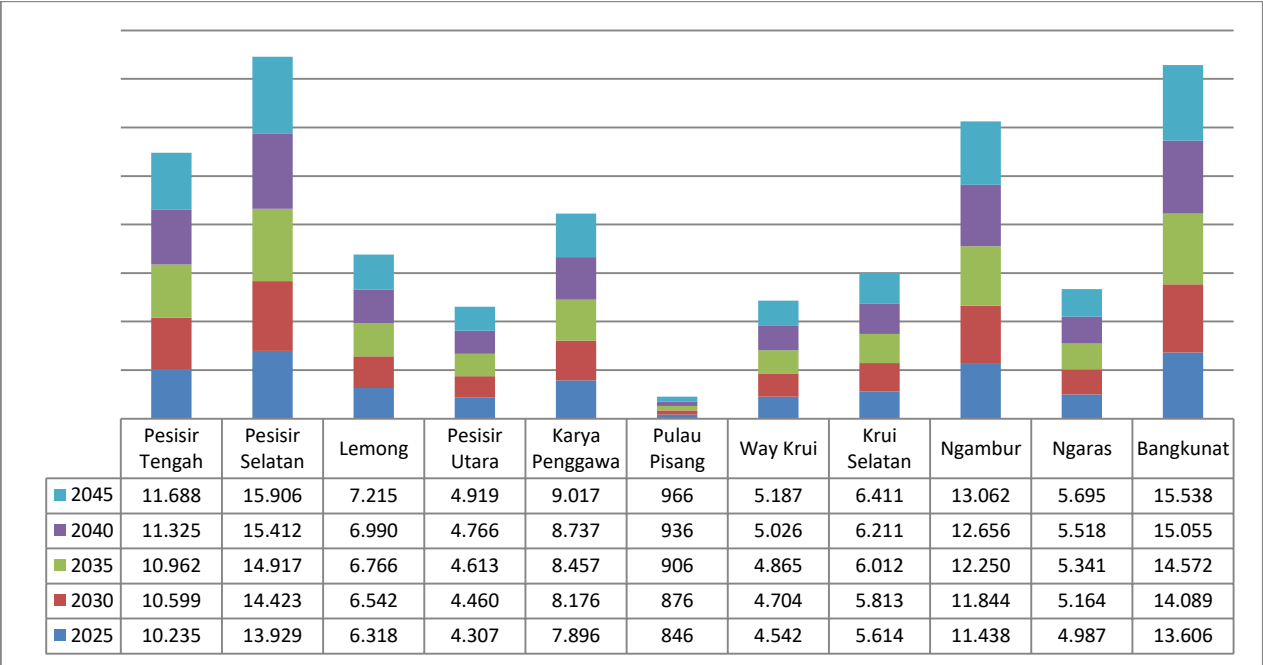
Perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang menetapkan Kecamatan Bangkunt sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar didasarkan pada kondisi daerah yang diarahkan sebagai daerah penyangga kabupaten pada sisi selatan (berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus) dan merupakan kecamatan dengan jarak terpendek menuju ibukota provinsi Lampung. Lebih lanjut, luas Kecamatan Bangkunt sebesar 943 km² atau 32,46% dari luas Kabupaten Pesisir Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Barat. Sebaliknya, Kecamatan Pulau Pisang adalah kecamatan yang berada pada sebuah pulau di sisi barat kabupaten dan merupakan kecamatan terkecil dengan luas 64 km² atau 2,2% dari keseluruhan luas daerah sehingga diasumsikan pertumbuhan penduduknya juga akan stagnan.

Gambar 2.89. Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-laki Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Gambar 2.90. Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Lebih lanjut, secara detil proyeksi perkembangan demografi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.111. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)		Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Pesisir Tengah	20,600	20,897	21,638	22,380	23,121	23,863
2	Pesisir Selatan	28,311	28,719	29,738	30,757	31,776	32,795
3	Lemong	13,166	13,356	13,830	14,304	14,778	15,251
4	Pesisir Utara	8,824	8,951	9,269	9,586	9,904	10,222
5	Karya Penggawa	16,149	16,382	16,963	17,544	18,126	18,707
6	Pulau Pisang	1,711	1,736	1,797	1,859	1,920	1,982
7	Way Krui	9,327	9,461	9,797	10,133	10,469	10,804
8	Krui Selatan	11,382	11,546	11,956	12,365	12,775	13,185
9	Ngambur	23,145	23,478	24,312	25,145	25,978	26,811
10	Ngaras	10,303	10,451	10,822	11,193	11,564	11,935
11	Bangkunat	28,329	28,737	29,757	30,777	31,796	32,816
	Total	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Tabel 2.112. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)		Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-laki	88,717	89,995	93,188	96,382	99,576	102,770
2	Perempuan	82,350	83,718	86,690	89,661	92,350	95,603
3	Total	171,247	173,713	179,878	186,043	192,208	198,373
4	Rasio	107	107	107	107	107	107

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Tabel 2.113. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	0-14 Tahun	46,750	47,423	49,106	50,789	52,473	54,155
2	15-64 Tahun	114,584	116,223	120,360	121,261	128,610	132,735
3	> 65 Tahun	9,913	10,056	10,413	10,770	11,126	11,483
4	Total	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
5	Angka Ketergantungan	49,45%	49,45%	49,45%	50,77%	49,45%	49,45%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Sebagaimana telah disajikan pada tabel-tabel di atas, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada RPJPD Tahun 2025-2045 ini diproyeksikan akan meningkat tumbuh rata-rata 1.4% perlima tahun. Gambaran dari pertumbuhan penduduk tersebut akan memberikan pergeseran pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kepadatan Penduduk, peningkatan kepadatan penduduk, dimana pada tahun 2025 diasumsikan kepadatan adalah sebesar 55 orang/km² (173.713 jiwa) dan meningkat menjadi 55.05 orang/km² (179.878 jiwa) pada tahun 2030. Pada tahun 2035 dengan (186.043 jiwa) kepadatan diasumsikan sebesar 58.18 orang/km². Asumsi untuk tahun 2040 kepadatan penduduk adalah 59.70 orang/km² (192.208 jiwa) dan tahun 2045 adalah 61.25 orang/km² (198.373 jiwa).
2. Penduduk Usia Produktif, berdasarkan pada proyeksi jumlah penduduk, maka pada tahun 2025 jumlah penduduk usia produktif adalah sebesar 116.000 jiwa (173.712 jiwa). Sementara pada tahun 2030 jumlah penduduk usia produktif adalah sebesar 120.360 jiwa (179.879 jiwa). Asumsi pada tahun 2035 jumlah penduduk usia produktif meningkat menjadi 121.261 jiwa (182.820 jiwa) dan pada tahun 2040 sebanyak 128.610 jiwa (192.209 jiwa). Pada akhir periode RPJPD jumlah usia produktif kabupaten diproyeksikan sebanyak 132.735 jiwa (198.373 jiwa).

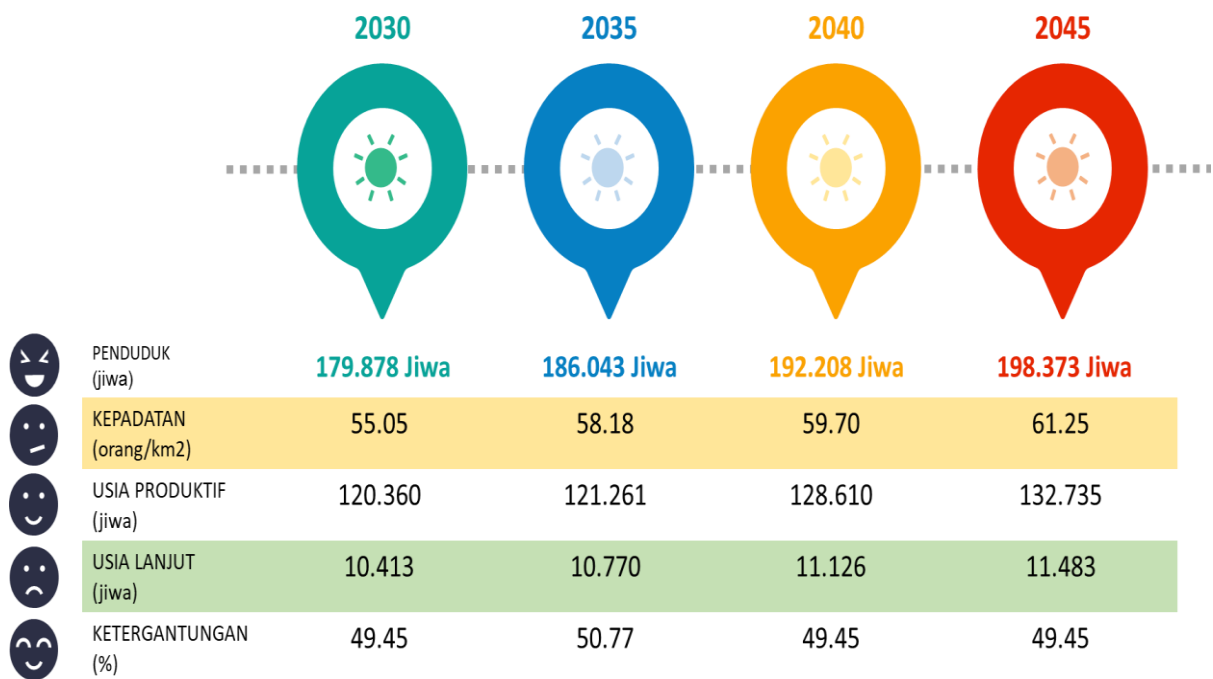
Rata-rata perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan total keseluruhan penduduk diasumsikan sebesar 66.33-66.91%.

3. Penduduk Usia Lanjut, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 jumlah penduduk usia lanjut atau >65 tahun adalah sebesar 10.056 jiwa (173.712 jiwa). Sementara pada tahun 2030 jumlah usia lanjut adalah sebesar 10.413 jiwa (179.879 jiwa). Asumsi perhitungan pada tahun 2035 jumlah penduduk usia lanjut menjadi 10.770 jiwa (182.820 jiwa). Proyeksi untuk tahun 2040 sebanyak 11.126 jiwa (192.209 jiwa). Pada akhir periode RPJPD jumlah usia lanjut diproyeksikan sebanyak 11.483 jiwa (198.373 jiwa).

Rata-rata perbandingan antara jumlah penduduk usia lanjut dengan total keseluruhan penduduk diasumsikan sebesar 5.79-5.89%.

4. Angka Ketergantungan, berupa perhitungan antara jumlah penduduk usia produktif yang menanggung jumlah penduduk tidak produktif pada suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu. Berdasarkan pada asumsi yang telah dihitung, maka pada tahun 2025 dan tahun 2030 besaran angka ketergantungan sebesar 49.45%. Sementara untuk 2035 angka ketergantungan adalah sebesar 50.77%. Pada tahun 2040 dan 2045, angka ketergantungan kembali diproyeksikan sebesar 49.45%.
5. Berdasarkan pada asumsi jumlah usia produktif, usia lanjut dan juga angka ketimpangan maka di asumsikan pada RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Pesisir Barat selalu mendapatkan bonus demografi pada keempat tahapan RPJMD.

Gambar 2.91. Gambaran Demografi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Sumber : Hasil Olahan, 2023

2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat utamanya didapatkan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk pada sub bab di atas. Namun demikian, perkembangan wilayah perkotaan, termasuk perubahan jumlah kecamatan, kelurahan/pekon juga menjadi salah satu perhitungan yang perlu diperhatikan. Idealnya, proyeksi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat ini disusun berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan disesuaikan pada kondisi daerah.

Kebutuhan sarana dan prasarana daerah untuk pelayanan dasar daerah, setidaknya mencakup pada proyeksi kebutuhan akan (i) rumah/tempat tinggal, (ii) air minum dan air bersih, (iii) energi listrik, (iv) persampahan, (v) sarana kesehatan dan (vi) sarana pendidikan.

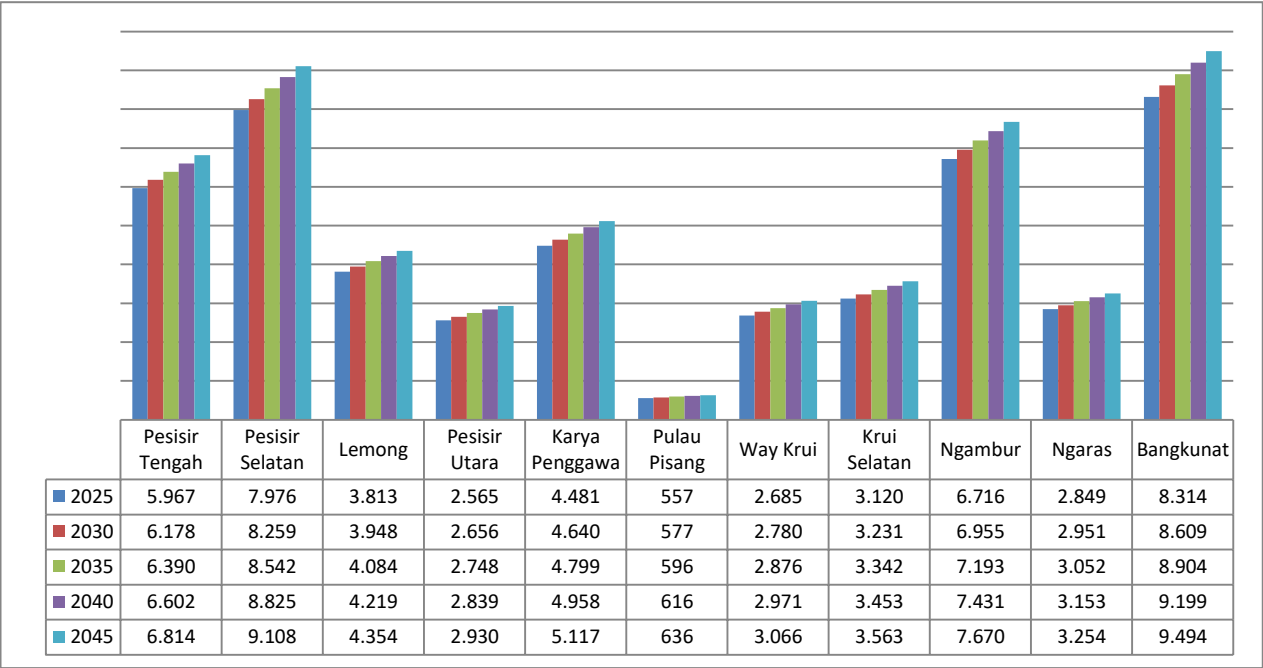
a. Rumah/tempat tinggal

Berdasarkan pada kondisi daerah pada tahun 2023, jumlah penduduk sebesar 171.247 jiwa memerlukan rumah tempat tinggal sebanyak 48.348 unit dan baru terpenuhi sebanyak 46.413 unit atau 95.99%. Selisih dari pemenuhan sebanyak 4.01% tersebut merupakan target yang wajib menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Asumsi pada tahun 2025, kebutuhan rumah sebanyak 49.044 unit. Asumsi kebutuhan kembali meningkat pada tahun 2030 menjadi 50.785 unit dan tahun 2035 sebanyak 52.525 unit. Pada tahun 2040, jumlah kebutuhan rumah meningkat menjadi 54.266 unit dan pada tahun 2045 sebanyak 56.006 unit.

Perkembangan kebutuhan jumlah unit tempat tinggal berbanding lurus dengan perkembangan jumlah penduduk dan juga dipengaruhi oleh pengembangan wilayah. Bahwa Kecamatan Bangkumat pada akhir tahun 2045 diproyeksikan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan kebutuhan rumah tempat tinggal sebanyak 9.494 unit. Sementara itu, Kecamatan Pulau Pisang pada tahun 2045 diasumsikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,982 jiwa dengan kebutuhan rumah tempat tinggal sebanyak 636 unit. Kecamatan Pulau Pisang sebagai daerah yang berbentuk pulau dengan luasan 64 Km² diproyeksikan tetap stagnan perkembangan rumah tinggalnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan dari masyarakatnya yang lebih memilih untuk keluar dari Pulau Pisang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan serta pekerjaan di luar pulau.

Lebih detil, proyeksi kebutuhan tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kecamatan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 2.92. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (unit)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Tabel 2.114. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah	48.348	49.043	50.785	52.525	54.266	56.006

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Adapun rencana Kawasan Peruntukan Permukiman menurut RTRW Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara.

b. Air Bersih dan Air Minum

Berdasarkan pada kondisi daerah pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 171.247 jiwa memerlukan air bersih sebanyak 3.698.935.200 liter/orang/tahun dan kebutuhan air minum sebanyak 154.122.300 liter/orang/tahun. Berdasarkan pada data kebutuhan, kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih telah mencapai 53.03%, namun untuk pemenuhan air minum baru mencapai 37.50%. Selisih dari kebutuhan dengan ketersediaan tentunya merupakan masalah utama bagi pemerintah daerah, dimana kebutuhan akan air minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Proyeksi kebutuhan pada akhir tahun 2045 untuk air bersih sebanyak 4.284.813.600 liter/orang/tahun dan kebutuhan untuk air minum sebesar 178.533.900 liter/orang/tahun dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 198.371 jiwa. Perhitungan untuk kebutuhan akan air bersih dengan asumsi setiap jiwa memerlukan 60 liter air bersih perhari dan kebutuhan air minum sebanyak 2.5 liter perhari.

Tabel 2.115. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

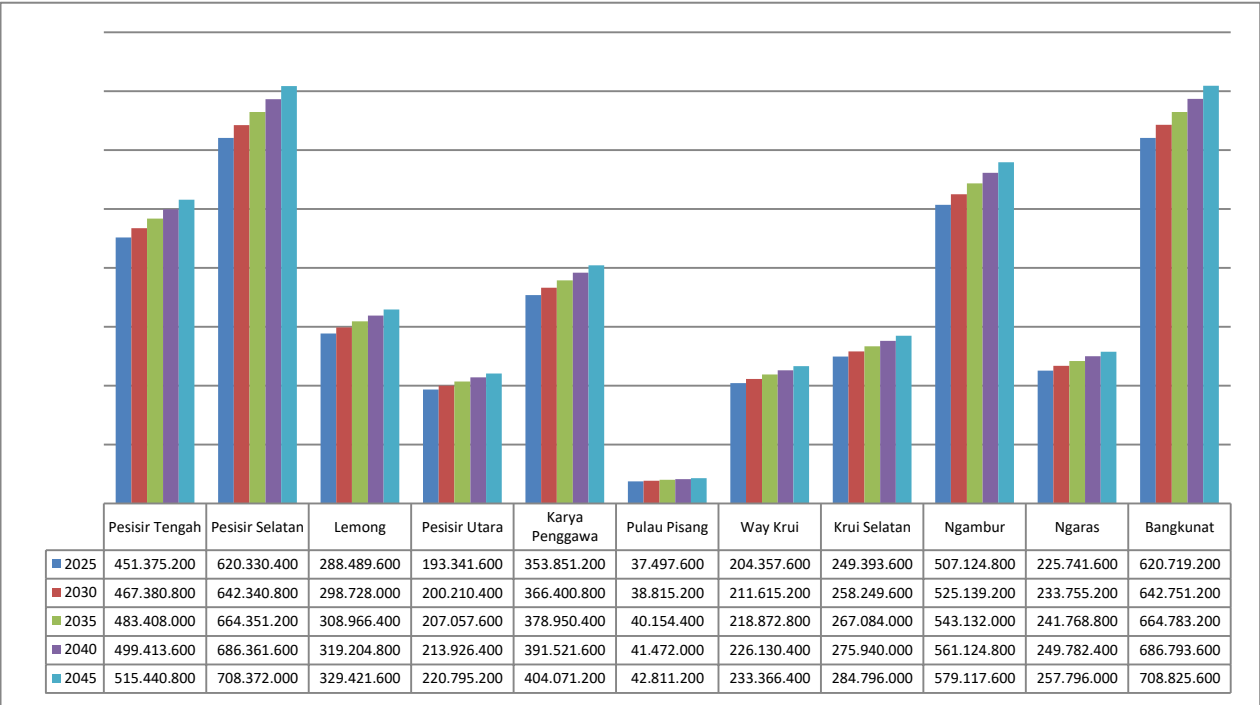
No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/orang/tahun)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	3,698.935.200	3.752.222.400	3.885.386.400	4.018.528.800	4.151.671.200	4.284.813.600
3	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	154.122.300	156.342.600	161.891.100	167.438.700	172.986.300	178.533.900

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Bila dilihat dari kebutuhan perkecamatan, Kecamatan Bangkunt pada tahun 2045 memerlukan jumlah air bersih sebanyak 708.825.600 liter/orang/tahun dan sebanyak 29.534.400 liter/orang/tahun, perhitungan didapatkan dengan asumsi

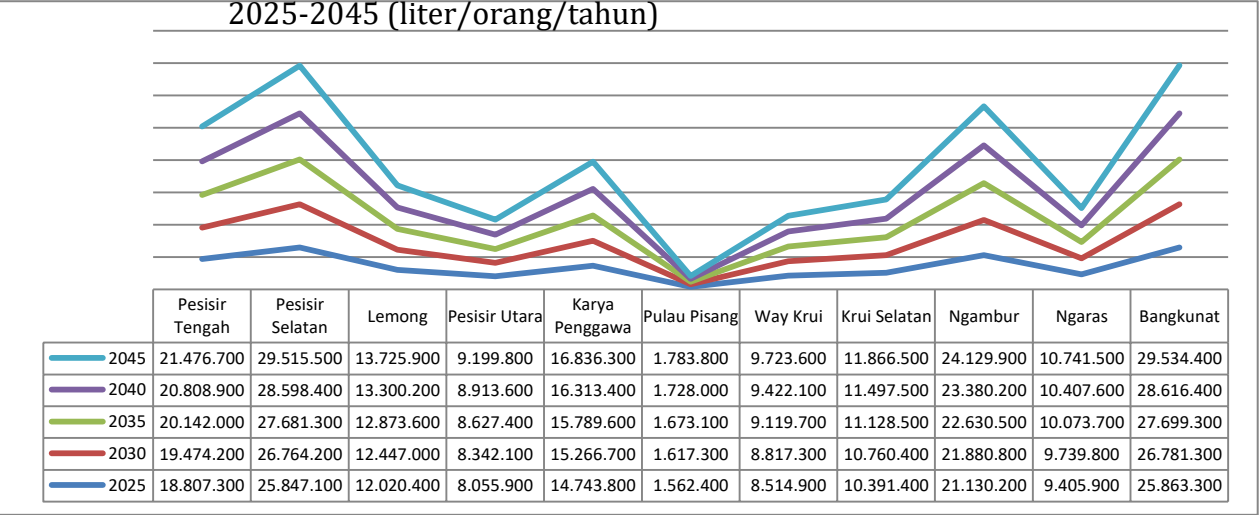
jumlah penduduk sebanyak 32.816 jiwa. Kecamatan Pulau Pisang menjadi kecamatan dengan kebutuhan terkecil dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 1.982 jiwa membutuhkan jumlah air bersih sebanyak 42.811.200 liter/orang/tahun dan air minum sebanyak 1.783.800 liter/orang/tahun. Sementara untuk Kecamatan Pesisir Tengah sebagai ibukota kecamatan, diasumsikan pada tahun 2045 akan membutuhkan jumlah air bersih sebanyak 515.440.800 liter/orang/tahun dan air minum sebanyak 21.476.700 liter/orang/tahun. Target untuk tahun 2045, seluruh kebutuhan akan air bersih dan air minum mampu mencapai target pemenuhan 100%.

Gambar 2.93. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (liter/orang/tahun)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Gambar 2.94. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (liter/orang/tahun)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Adapun rencana sistem jaringan penyediaan air minum menurut Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW meliputi :

- a. pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air permukaan tersebar di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air tanah dalam tersebar di Kabupaten Pesisir Barat.

c. Energi Listrik

Berdasarkan pada data untuk tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 171.247 jiwa dengan jumlah rumah sebanyak 48.348 unit. Untuk itu, perhitungan kebutuhan listrik yang dibutuhkan sebesar 698.688 kwh. Pemenuhan energi listrik di Kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2023, untuk data rasio elektrifikasi dari PLN, tercatat sebesar 70.11%. dari data tersebut ada 4 pekon di Kecamatan Bangkuntat yaitu Pekon Way Haru, Way Tias, Bandar Dalam, dan Siring Gading yang belum teraliri listrik dari PLN. Sementara untuk kecamatan dan pekon/kelurahan lainnya telah mendapatkan jalur listrik dari PLN. Adanya gap atau selisih dari kebutuhan dengan pemenuhan merupakan masalah dari daerah, terlepas urusan listrik bukan merupakan kewenangan kabupaten. Daerah perlu menyikapi hal ini dengan fasilitasi penggunaan energi baru terbarukan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi penduduk mendapatkan suplai energi untuk rumah tangga.

Adapun rencana sistem jaringan energi menurut Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW meliputi :

- 1) Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas :
 - a. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, dikembangkan di Kecamatan Bangkuntat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong;
 - b. pembangunan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Jaringan prasarana energi, terdiri atas :
 - a. pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Pesisir Barat, terdiri dari :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah;
 2. Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah.

- c. jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Kecamatan Pulau Pisang.

Perhitungan untuk tahun 2045, jumlah rumah yang memerlukan energi listrik sebanyak 56.006 unit dengan kebutuhan sebesar 852.78 kwh. Angka ini masih dibawah dari rata-rata konsumsi listrik perkapita nasional dan Provinsi Lampung. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang diasumsikan sebanyak 198.371 jiwa pada tahun 2045. Ketergantungan daerah dan masyarakat dengan energi dari PLN belum diiringi dengan kemampuan pengelolaan dan penyediaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan serta murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat.

Tabel 2.116. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

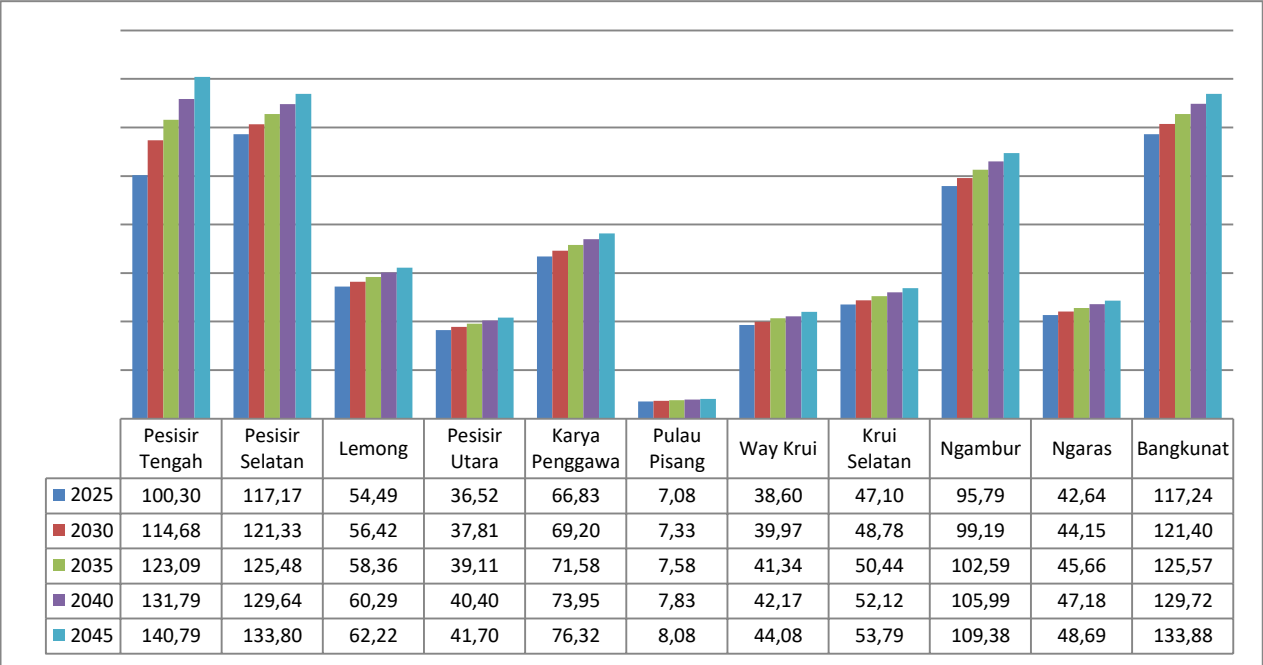
No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KWH/kilowatt hour)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Jumlah Rumah	48.348	49.043	50.785	52.525	54.266	56.006
3	Proyeksi Kebutuhan Listrik	698.68	723.79	760.30	790.83	821.66	852.78

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Pesisir Barat menggunakan asumsi perhitungan 1 orang penduduk memerlukan 4.08 kwh setiap harinya perkapita. Pada tahun 2045, kebutuhan untuk seluruh kecamatan diperhitungan naik secara stabil mengacu pada pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah rumah. Namun demikian, khusus untuk Kecamatan Pesisir Tengah perhitungan sedikit berbeda, hal ini diasumsikan dengan ibukota kabupaten yang berada di Kecamatan Pesisir Tengah. Bahwa pusat perekonomian dan pertumbuhan sarana dan prasarana fasilitas umum akan didahulukan pembangunannya pada lokasi dimaksud.

Tahun 2025, proyeksi kebutuhan listrik untuk Kecamatan Pesisir Tengah sebesar 84.04 kwh masih berada di bawah Kecamatan Bangkumat dengan kebutuhan 115.58 kwh. Namun demikian, pada tahun 2045, kebutuhan di Kecamatan Pesisir Tengah diproyeksikan sebesar 140.79 kwh dan Kecamatan Bangkumat sebesar 133.88 kwh.

Gambar 2.95. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (kwh)



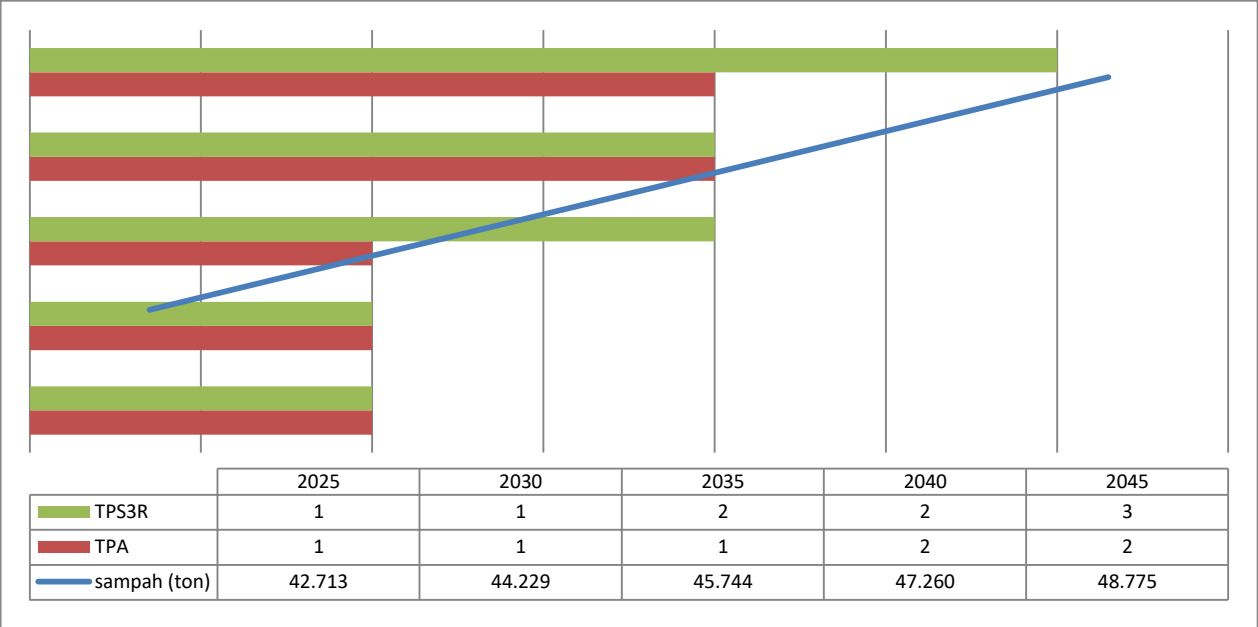
Sumber : Hasil Olahan, 2024

d. Persampahan

Data untuk tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 171.247 jiwa dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 42.106 ton/tahun. Dari jumlah 42.110 ton/tahun tersebut, hanya 10.000-11.000 ton/tahun yang mampu diolah oleh pemerintah daerah atau hanya 26.82%. Selisih margin yang cukup besar tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana persampahan daerah yang hingga tahun 2023 hanya memiliki 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 1 Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Asumsi pada tahun 2045, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 48.775 ton/tahun dengan proyeksi kemampuan daerah untuk mengolahnya sebesar 51.25% atau 25.000 ton/tahun.

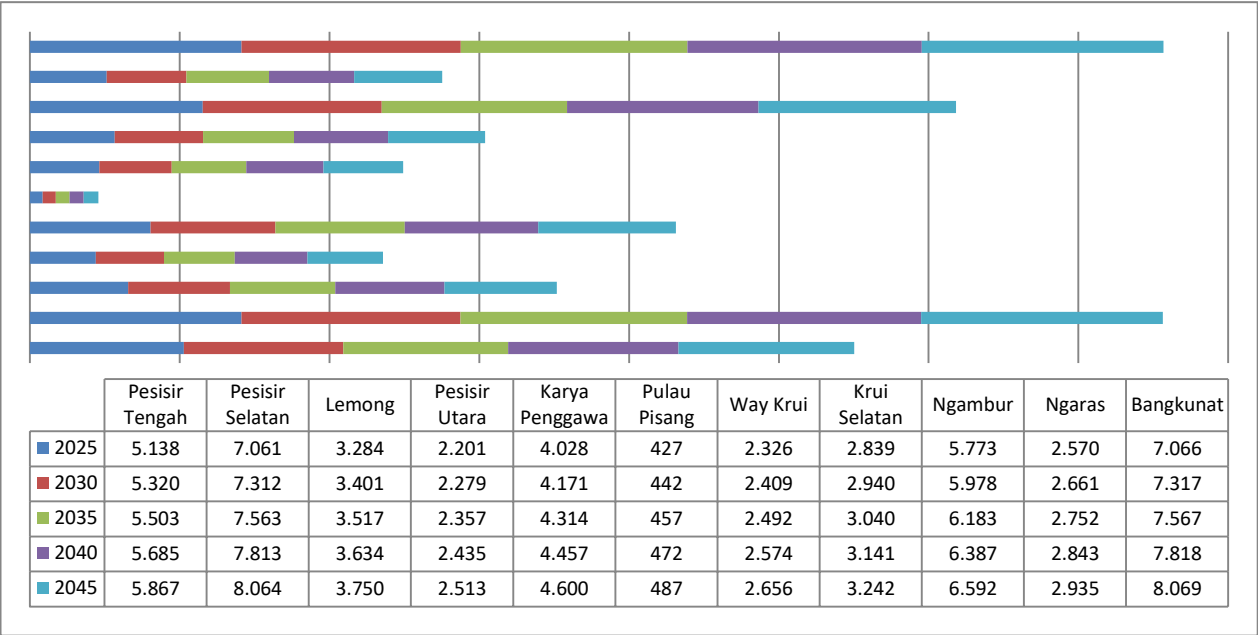
Jumlah timbunan sampah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, demikian juga dengan pertumbuhan industri dan sebagainya. Idealnya, daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan termasuk meningkatkan kesadaran dari penduduk untuk mampu mengurangi penggunaan produk-produk yang tidak ramah lingkungan dan menghasilkan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Hingga saat ini, di Kabupaten Pesisir Barat pengelolaan sampah masih dilakukan secara tradisional belum mempergunakan teknologi modern yang mampu mengelola dan mendaur ulang sampah.

Gambar 2.96. Proyeksi Penyediaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (unit)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Gambar 2.97. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (ton/tahun)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Tabel 2.117. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah (ton/tahun)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Proyeksi Timbunan	42.106	42.713	44.229	45.744	47.260	48.775

	Sampah						
--	--------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan, 2024

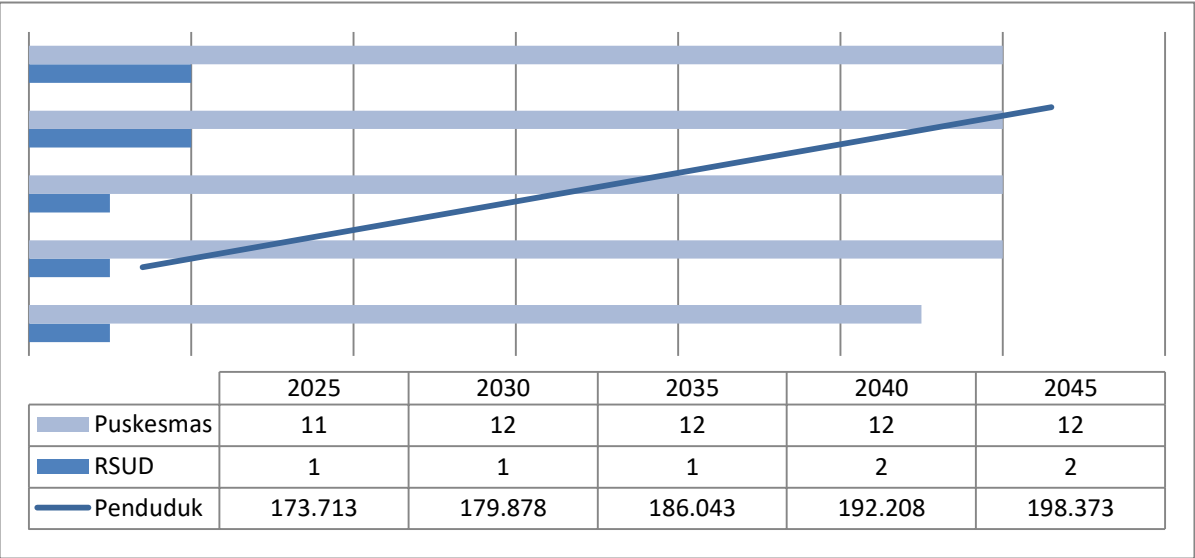
Adapun rencana sistem jaringan persampahan menurut Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW , meliputi :

- a. rencana pembangunan dan peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Krui Selatan, dan Kecamatan Pesisir Utara;
- b. rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan permukiman dan pusat pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Pesisir Barat.

e. Kesehatan

Hingga tahun 2023, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat telah terpenuhi dimana telah tersedia 1 RSUD dan juga 11 Puskesmas yang berada pada 11 kecamatan. Sehingga secara rasio telah ideal. Namun demikian, yang perlu mendapatkan perhatian tentu saja peningkatan pelayanan pada masing-masing fasilitas kesehatan dimaksud. Perkembangan atau penambahan jumlah RSUD diperkirakan pada tahun 2040 menjadi 2 RSUD, dengan asumsi RSUD baru tersebut mampu melengkapi dan/atau memperkuat keberadaan RSUD yang telah ada. Berikutnya, untuk perkembangan jumlah puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat tidak menggunakan perhitungan jumlah penduduk, namun pada rencana pengembangan daerah (pemekaran kecamatan) yang diasumsikan pada tahun 2040. Sehingga pada tahun 2045 mendatang, jumlah Puskesmas yang ada sebanyak 12 Unit di 12 Kecamatan dan jumlah RSUD sebanyak 2 Unit.

Gambar 2.98. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (unit)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Tabel 2.118. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Kesehatan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
	▪ Rumah Sakit	1	1	1	1	2	2
	▪ Puskesmas	11	11	12	12	12	12

Sumber : Hasil Olahan, 2024

f. Pendidikan

Hingga tahun 2023, sarana dan prasarana pendidikan secara jumlah telah mendekati kondisi ideal, walaupun masih terdapat kondisi ruang belajar yang belum dalam kondisi baik. Selain kondisi ruang belajar, fasilitas pendidikan yang modern masih diperlukan pada semua jenjang pendidikan daerah. Pemenuhan kebutuhan untuk sarana dan prasarana pendidikan sangat bergantung pada perkembangan jumlah peserta didik. Dimana berdasarkan pada rasio idealnya, jumlah ruang belajar ideal untuk peserta didik sebagai berikut:

- 1) PAUD/TK rasio ideal 10-16 siswa;
- 2) SD/MI rasio ideal 24 - 28 siswa;
- 3) SMP/MTs rasio ideal 24 - 32 siswa;

Tabel 2.119. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

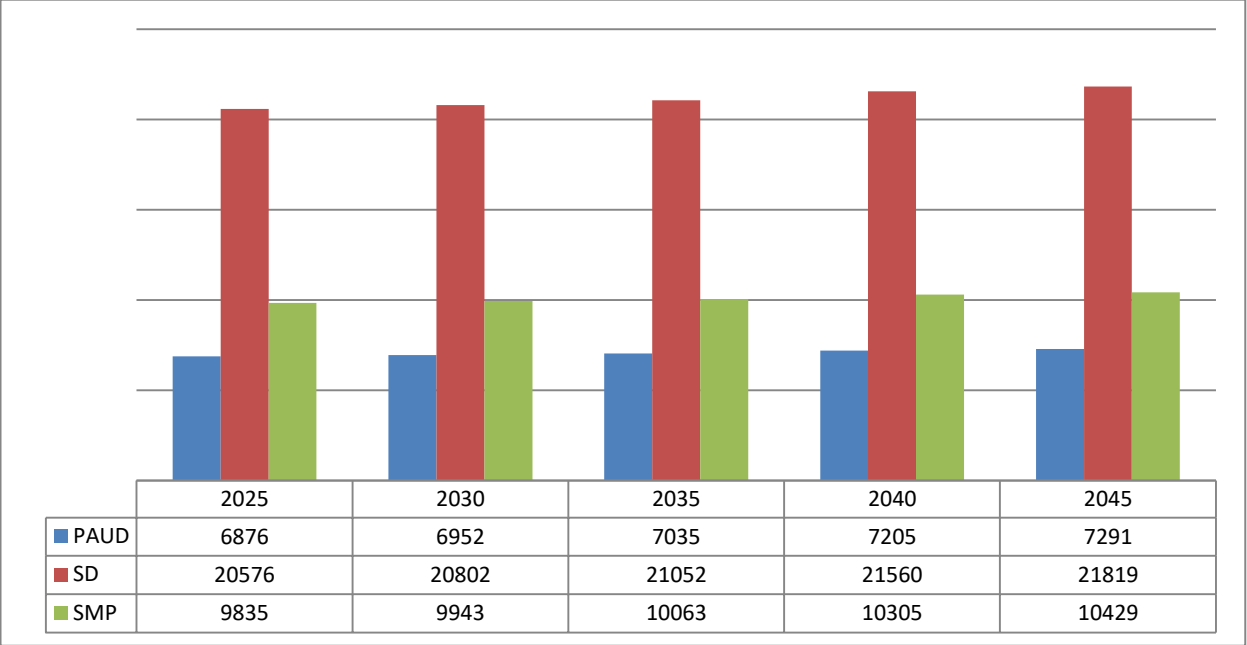
No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (ruang belajar)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	171,247	173,714	179,879	186,043	192,207	198,371
2	Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
	▪ PAUD/TK	193	155	92	5	6	7
	▪ SD	949	19	12	11	12	12
	▪ SMP	251	59	5	25	16	4

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Perkembangan peserta didik untuk tingkat PAUD/TK pada tahun 2045 mendatang diproyeksikan sebanyak 7.291 murid, dengan jumlah tersebut kebutuhan akan ruang belajar diperkirakan sebesar 458 ruang belajar. Sementara untuk tingkatan SD perhitungan pada tahun 2045 jumlah siswa adalah 21.819 murid dengan kebutuhan ruang belajar sebanyak 1.015 ruang belajar. Untuk

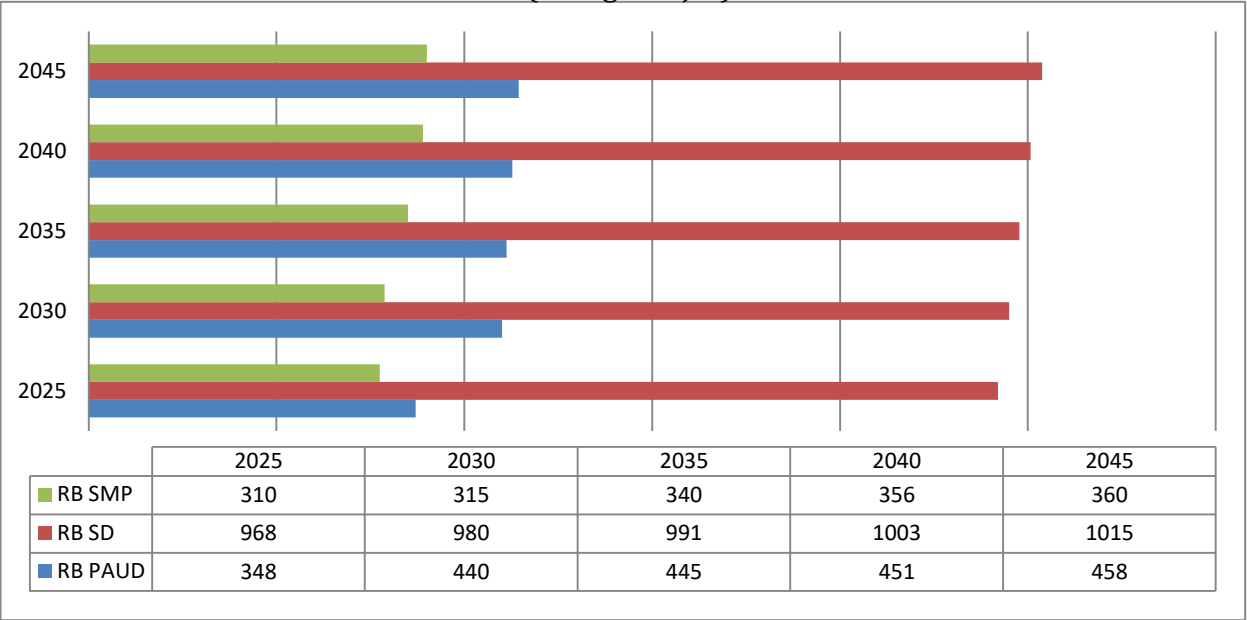
tingkat pendidikan menengah pertama pada akhir tahun 2045 jumlah ruang belajar yang dibutuhkan adalah sebanyak 360 ruangan dengan asumsi jumlah murid sebanyak 10.429 siswa.

Gambar 2.99. Jumlah Peserta Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (murid)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

Gambar 2.100. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (ruang belajar)



Sumber : Hasil Olahan, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Barat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun hingga jangka waktu 2045 tentunya harus selaras dengan

pencapaian visi dan misi daerah serta dengan tetap mengedepankan sinergitas dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengembangan wilayah yang utamanya diatur dalam RTRW Kabupaten Pesisir Barat harus mampu mendukung pula pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dimana secara kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045 menampilkan tentang rencana pembangunan wilayah dan sarana dan prasarana dengan arahan, sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan fokus:
 - a. Memastikan pelaksanaan transformasi sosial;
 - b. Mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi;
 - c. Pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar;
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa berbasis keunggulan wilayah.
3. Pembangunan kewilayahan berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan fokus:
 - a. Menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut;
 - b. Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitasnya;
 - c. Meningkatkan implementasi climate smart agriculture yang tahan terhadap perubahan iklim;
4. Pembangunan sarana prasarana kewilayahan dengan fokus:
 - a. Pemanfaatan infrastruktur terbangun untuk pengembangan kawasan di sekitarnya;
 - b. Konektivitas maritim melalui jaringan pelabuhan dan bandara didukung konektivitas darat;
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi;
 - d. Implementasi transformasi digital;
 - e. Peningkatan ketahanan air nasional;
 - f. Perumahan dan infrastruktur dasar;
5. Pengelolaan urbanisasi dan pembangunan perkotaan dengan fokus:
 - a. Menjadikan pembangunan IKN yang dirancang sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (superhub ekonomi) dan jendela budaya nasional Indonesia;
 - b. Pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standard pelayanan perkotaan merujuk pada konsep masterplan IKN;
 - c. Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar kawasan perkotaan, konektivitas antara kota desa serta penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi;

- d. Impelementasi regulasi perkotaan dan pembentukan kelembagaan perkotaan yang memungkinkan penanganan perkotaan secara terpadu dan terintegritas;
- 6. Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi (3TP: Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan).
- 7. Pemantapan otonomi daerah dan desentralisasi dengan fokus:
 - a. Tata kelola pemerintah daerah, termasuk restrukturisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Kapasitas fiskal daerah;
- 8. Penuntasan reforma agrarian dan penyelesaian RDTR untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

2.7.1 Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Wilayah Sumatera dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang bersinggungan dan memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Pesisir Barat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri pengolah terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, Perikanan tangkap dan budidaya) dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera, pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan pembangunan sarana prasarana lainnya.
- b. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai engine of growth seperti Sei Mangke, Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Tanggamus dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip eco-industrial park.
- c. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
- d. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (smart grid) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (island grind).
- e. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat dan Pulau Enggano.
- f. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan.

- g. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera.

2.7.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 mengarahkan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat masuk pada Koridor Ekonomi Wilayah III yang berada pada bagian barat wilayah Provinsi Lampung, dimana sebagai kawasan pariwisata dengan isu strategis pariwisata dan konservasi.

1. Kabupaten Pringsewu sebagai Mandatory Pangan Nasional;
2. Kabupaten Tanggamus dengan kawasan konservasi utama yaitu Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi;
3. Kabupaten Pesisir Barat sebagai kawasan pariwisata dan menjadi simpul strategis yaitu Bandar Udara M. Taufik Kiemas;
4. Kabupaten Lampung Barat dengan kawasan konservasi utama yaitu Kawasan Geopark Suoh dan KSPN Danau Ranau.

Pembangunan wilayah pariwisata untuk Kabupaten Pesisir Barat oleh Provinsi Lampung diarahkan pada:

- a. Pengentasan Kemiskinan ekstrem pada daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar);
- b. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera;
- c. Perwujudan Taman Wisata Alam Laut Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Perwujudan Kawasan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- e. Perwujudan kawasan pariwisata KSPN Danau Ranau, DPD Teluk Lampung bagian Tanggamus, DPD Pesisir Pantai Barat Lampung;
- f. Perwujudan sistem transportasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- g. Perwujudan sistem jaringan air bersih di Kabupaten Pesisir Barat.

2.7.3. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat menurut RTRW Provinsi Lampung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043. Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Pesisir Barat, meliputi :

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Krui
- Jalan Arteri Primer, yaitu Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak, Pugung Tampak – Simpang Gunung Kemala, Simpang Gunung Kemala – Krui, Krui – Biha, Biha – Bangkumat, Bangkumat – Sanggi
- Jalan Kolektor Satu, yaitu Kota Liwa – Simpang Gunung Kemala
- Jalan Tol Bangkumat – Batas Provinsi Bengkulu
- Terminal Tipe B di Lemong dan Krui
- Pelabuhan Penyebrangan Pulau Pisang
- Alur pelayaran Krui – Pulau Pisang, Tembakak - Pulau Pisang, Tanjung Setia – Siging – Bangkumat dan Way Haru – Pulau Betuah.
- Pelabuhan Pengumpan Lokal Bangkumat dan Krui
- Pelabuhan Perikana Nusantara Krui
- Bandar Udara Pengumpan M. Taufiq Kiemas
- Pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Pisang
- Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Melesom
- Saluran udara tegangan tinggi Liwa – Bangkumat
- Jaringan pipa/kabel bawah laut Kabupaten Lampung Barat – Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat
- Gardu Induk Krui
- Daerah irigasi Way Biha

Pengembangan rencana pola ruang Provinsi Lampung di Kabupaten Pesisir Barat, meliputi :

- Kawasan lindung
Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut dan kawasan ekosistem mangrove. kawasan lindung yaitu pada kawasan penetapan garis pantai yang berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (holding zone).
- Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian yang mendukung ketahanan pangan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman.

Selain rencana struktur ruang dan pola ruang, terdapat juga kawasan strategis provinsi yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan pariwisata pantai barat yang meliputi Pantai Labuhan Jukung dan Pantai Tanjung Setia.

2.7.4. Arah Kebijakan Kewilayahan menurut RTRW Kabupaten Pesisir Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037, berdasarkan RTRW, arah kebijakan pengembangan

wilayah di Kabupaten Pesisir Barat digambarkan dalam struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten.

Berdasarkan rencana struktur ruang, yaitu pusat – pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat – pusat kegiatan, meliputi :

- PKL Perkotaan Krui di Kecamatan Pesisir Tengah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan bandar udara, pusat pengembangan rumah sakit umum daerah, pusat pengembangan pelabuhan, pusat pengembangan air bersih dan/atau air minum, dan pusat pengembangan permukiman perkotaan.
- PKLp Pekon Kota Jawa di Kecamatan Bangkunt yang berfungsi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan kawasan industri, pusat pengembangan energi, pusat pengembangan pelabuhan, pusat pengembangan terminal tipe C
- PKLp Pekon Biha di Kecamatan Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan kawasan industri dan pusat pengembangan irigasi teknis
- PPK Pekon Negeri Ratu Ngambur di Kecamatan Ngambur yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan energi dan pusat pengembangan pariwisata;
- PPK Pekon Way Napal di Kecamatan Krui Selatan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan rumah sakit, pusat pengembangan terminal tipe B, pusat pengembangan persampahan dan air limbah;
- PPK Pekon Gunung Kemala di Kecamatan Way Krui yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan energi, pusat pengembangan air bersih dan/atau air minum dan pusat pengembangan pariwisata; dan
- PPK Pekon Kebuayan di Kecamatan Karya Penggawa yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan energi dan pusat pengembangan air bersih dan/atau air minum.
- Pekon Parda Suka di Kecamatan Ngaras yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan persampahan dan air limbah, pusat pengembangan pariwisata;
- PPL Pekon Kuripan di Kecamatan Pesisir Utara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan pertanian, pusat pengembangan energi, pusat pengembangan air bersih dan/atau air minum dan pusat pengembangan persampahan dan air limbah; dan
- PPL Pekon Pasar Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pariwisata, pusat pengembangan industri kecil, pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan pelabuhan dan pusat pengembangan pertanian.

Sistem jaringan prasarana utama meliputi system jaringan transportasi darat, laut dan udara dengan gambaran sebagai berikut :

- Sistem jaringan transportasi darat, antara lain jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten serta jaringan jalan lingkungan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat. Jaringan prasarana lalu lintas meliputi pengembangan terminal tipe C di kecamatan Lemong dan Kecamatan Bangkunt selain itu juga terdapat rencana pembangunan terminal tipe B. jaringan pelayanan lalu lintas meliputi trayek angkutan barang dan penumpang.
- Sistem jaringan transportasi laut, antara lain tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhan meliputi pengembangan pelabuhan tembakak, krui dan pulau pisang serta pengembangan pelabuhan atau dermaga yang mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata. Alur pelayaran meliputi pelabuhan krui – pulau pisang dan pelabuhan tembakak – pulau pisang serta pelabuhan pendukung kegiatan perikanan dan pariwisata.
- Sistem jaringan transportasi udara, antara lain pengembangan Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas yang berlokasi di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah sedangkan untuk ruang udara ditetapkan berdasarkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Gambaran pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai berikut :

- Sistem jaringan energi, antara lain pembangkit tenaga listrik dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya. Jaringan prasarana energi meliputi pembangunan gardu induk, jaringan transmisi listrik saluran udara dan kabel bawah laut. Selain itu dikembangkan juga energi baru terbarukan.
- Sistem jaringan telekomunikasi, antara lain sistem jaringan kabel, nirkabel dan satelit.
- Sistem jaringan sumber daya air, antara lain pengembangan wilayah sungai semangka, daerah irigasi Way Biha dan daerah irigasi yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, jaringan air baku dikembangkan dengan sumber air baku permukaan dan air tanah dalam dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Sistem Pengelolaan Prasarana Lingkungan, antara lain sistem jaringan penyediaan air minum, pengembangan sistem jaringan persampahan dan sistem jaringan air limbah.

Berdasarkan Rencana Pola Ruang, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan pengembangan sebagai berikut :

- Kawasan lindung
Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya berupa kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk dan ruang terbuka hijau; kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kawasan

Cagar Alam Laut dan cagar Budaya; dan kawasan rawan bencana alam yang meliputi tanah longsor, tsunami, banjir dan gempa bumi.

- Kawasan budidaya

Kawasan budaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi yaitu hutan produksi terbatas; kawasan peruntukan pertanian yaitu kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan; kawasan peruntukan perikanan, yaitu kawasan kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri, yaitu industri besar, menengah dan kecil/industri rumah tangga; kawasan peruntukan pariwisata, yaitu budaya alam, buatan dan buatan; kawasan peruntukan permukiman, yaitu permukiman perkotaan dan perdesaan; dan kawasan peruntukan lainnya, yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.

Selain rencana struktur ruang dan pola ruang, direncanakan juga Kawasan strategis kabupaten, yaitu :

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang meliputi kawasan Eko Wisata Pulau Pisang, kawasan Labuhan Jukung, dan kawasan Tanjung Setia serta kawasan perkotaan krui.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu kawasan hutan tanam rakyat (HTR) yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat.

2.7.5. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan pada rencana pembangunan pengembangan kewilayahan yang bersinggungan dengan Kabupaten Pesisir Barat pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Kabupaten Pesisir Barat menyelaraskan kajian dimaksud dengan penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik daerah serta kewenangan daerah. Bahwa arah kebijakan pembangunan kewilayahan merupakan serangkaian rencana pengembangan daerah yang dengan memperhatikan konsep pembangunan hijau dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Bahwa pembangunan kewilayahan diarahkan untuk membuka keterisolan dan akses pada daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Perbatasan dalam kaitannya untuk menurunkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Pesisir Barat. Konsep pembangunan kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dalam upaya-upaya pelaksanaan transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola, sebagai berikut:

1. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan karakteristik daerah, diarahkan untuk:
 - a. Melaksanakan transformasi sosial;

Pembangunan kewilayahan pada daerah-daerah marginal, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat dan dilakukan secara simultan dan berkesinambungan baik dengan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

- b. Memastikan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar termasuk sumber daya air dan energi;

Membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi daerah, termasuk sarana dan prasara pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilakukan dengan konsep pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memperhatikan perkembangan demografi daerah.

Pembangunan sumber daya air diarahkan untuk mengembalikan ekosistem sumber-sumber air daerah, termasuk pembangunan jaringan air baku dan air bersih bagi masyarakat (jaringan perpipaan).

Pembangunan energi akan terfokus pada penggunaan energi baru terbarukan, selain untuk memastikan terlebih dahulu seluruh rumah tangga telah mendapatkan akses energi listrik yang disediakan oleh PLN.

2. Pembangunan kewilayahan untuk mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, diarahkan untuk:

- a. Melaksanakan pembangunan perdesaan khususnya pada daerah terluar dan minim akses;

Mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah. Pembangunan perdesaan dengan konsep kemandirian desa/pekon diarahkan sesuai dengan karakteristik masing-masing desa/pekon. Utamanya daerah wajib menyediakan jalur transportasi untuk seluruh desa/pekon.

- b. Membangun konektivitas antar daerah dengan menyediakan trayek dan akses transportasi yang mudah dan murah akses;

Pembangunan untuk memudahkan dan memperpendek proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan simpul-simpul transportasi daerah yang menjadi kewenangan dari daerah, khususnya pada ibukota-ibukota kecamatan.

- c. Mengurangi kawasan kumuh daerah dengan menyediakan perumahan dan permukiman yang baik;

Pembangunan pada daerah-daerah kumuh yang tercipta dari pengembangan kota, khususnya pada kawasan-kawasan padat penduduk dan kawasan permukiman nelayan. Pembangunan perumahan dan permukiman termasuk kebijakan penyediaan lahan

yang murah bagi masyarakat serta pengendalian pembangunan oleh masyarakat.

Pengurangan kawasan kumuh juga memperhatikan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat, baik dari awal proses pembuangan, pengangkutan hingga pengolahan sampah.

- d. Memajukan potensi dan komoditas unggulan daerah, seperti pariwisata dan pertanian;

Pembangunan pariwisata daerah, khususnya untuk penyediaan sarana dan prasarana akomodasi daerah tujuan wisata. Pembangunan diarahkan pula untuk kesiapan dari daerah/daerah tujuan wisata untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan (pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat) termasuk didalamnya meningkatkan promosi pariwisata. Pembangunan pariwisata juga dilakukan dengan meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;

Pembangunan pertanian termasuk juga perikanan berbasis wilayah lahan diarahkan dengan hilirisasi hasil-hasil pertanian dan perikanan, termasuk didalamnya peningkatan nilai tambah produk serta menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya. Pengelompokkan kawasan sesuai dengan potensi untuk pengembangan pertanian dan perikanan. Pembangunan diarahkan dengan memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan termasuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;

3. Pembangunan kewilayahan dengan pelaksanaan tata kelola yang berkualitas, diarahkan untuk:

- a. Melaksanakan transformasi tata kelola termasuk penggunaan digitalisasi pelayanan publik;

Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah. Pembangunan sistem penataan ruang yang diarahkan untuk pembangunan yang terpadu, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan dan acuan kebijakan spasial (peta analog dan peta digital).

- b. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang termasuk penyelesaian penyusunan RDTR setiap wilayah;

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif terkait dengan aturan pengelolaan tata ruang daerah dengan konsep memastikan pembangunan kewilayahan daerah tidak akan merusak lingkungan hidup.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan daerah;

Pengembangan wilayah pada daerah-daerah yang merupakan kawasan rawan bencana daerah, khususnya pada penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana. Penanggulangan bencana daerah termasuk penyiapan masyarakat dalam tanggap bencana daerah.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;

- d. Memastikan pembangunan dengan konsep pembangunan hijau berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian pembangunan yang tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan dengan konsep pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan regenerasinya (pengelolaan secara seimbang). Mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan serta melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;

2.7.6. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Pesisir Barat

Pengembangan kewilayahan daerah di Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka sinergitas dengan rencana proyek strategis nasional dan pemerintah provinsi disusun dengan tetap memperhatikan rencana pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW.

1. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan karakteristik daerah
 - a. Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase kewenangan kabupaten di seluruh kecamatan;
 - b. Pembangunan dan Pengembangan RSUD di Kecamatan Pesisir Tengah dan pembangunan pengembangan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan dan pekon;
 - c. Pembangunan SPAM berbasis masyarakat dan berbasis perpipaan di seluruh kecamatan;
 - d. Pembangunan jaringan irigasi teknis, khususnya pada Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Utara, Karya Penggawa dan Bangkunt;
 - e. Peningkatan dan Pemeliharaan sumber daya air berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai yang berhulu di TNBBS

2. Pembangunan kewilayahan untuk mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem
 - a. Pembangunan kawasan permukiman terpadu, khususnya pada Kecamatan Pesisir Tengah dan kecamatan yang padat penduduk;
 - b. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaaan pada seluruh kecamatan;
 - c. Pengembangan Terminal Way Batu, Kecamatan Pesisir Tengah;
 - d. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan darat dan laut yang menjadi kewenangan kabupaten di seluruh kecamatan;
 - e. Pembangunan dan pengembangan dermaga Koala Stabas, Pulau Pisang dan Bangkunt;
 - f. Pembangunan dan peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) sampah di Kecamatan Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara serta pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah dan limbah di seluruh kecamatan;
 - g. Pembangunan sistem pengelolaan limbah atau IPLT pada seluruh fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan;
 - h. Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Bangkunt sebagai kecamatan terdekat dengan ibukota Provinsi Lampung dan Kecamatan Pesisir Selatan yang dekat dengan ibukota kabupaten;
 - i. Pembangunan kawasan industri kecil tenun tapis di Karya Penggawa dan Pulau Pisang;
 - j. Pembangunan kawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pada seluruh kecamatan;
 - k. Pembangunan pusat-pusat perdagangan barang dan jasa di ibukota kabupaten dan juga ibukota kecamatan untuk mempermudah distribusi dan konsumsi masyarakat;
 - l. Pengembangan kawasan pariwisata pada desa/pekon yang memiliki potensi wisata, khususnya pada kawasan Pantai Labuhan Jukung, Pantai Tanjung Setia dan Pantai Mandiri, Pulau Pisang Pantai Lemong dan Pesisir Utara;
 - m. Pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan serta pengembangan industri perikanan tangkap di Pesisir Tengah, Lemong dan Bangkunt;
 - n. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di seluruh kecamatan;
 - o. Pengembangan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal-areal potensial serta pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada seluruh kecamatan;

- p. Pengembangan budidaya peternakan dan perkebunan pada seluruh kecamatan;
 - q. Pembangunan jalan usaha tani dan perkebunan serta jaringan pengairan pada seluruh kecamatan;
3. Pembangunan kewilayahan dengan pelaksanaan tata kelola yang berkualitas
- a. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah di pusat ibukota Kabupaten dan Kecamatan untuk mempermudah pelayanan publik dengan berbasis pada transformasi digital;
 - b. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi informasi di seluruh kecamatan;
 - c. Pembangunan jaringan hotspot pada kawasan destinasi wisata di seluruh kecamatan;
 - d. Pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengaman abrasi pantai di seluruh wilayah kecamatan;
 - e. Penyusunan RDTR untuk seluruh kawasan strategis daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan pada data-data tersebut akan disusun kebijakan untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja di masa yang akan datang, baik melalui perumusan visi, sasaran dan kebijakan. Sementara itu, tujuan dari perumusan isu strategis adalah sebagai gambaran sesuatu yang mungkin akan dihadapi di masa depan, sebuah tantangan pembangunan yang perlu direncanakan penyelesaiannya. Sehingga pada akhirnya tujuan dari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang telah memberikan perbaikan kondisi daerah dan cukup memberikan harapan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada masa mendatang. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah otonomi termuda di Provinsi Lampung dengan segala keterbatasannya hingga saat ini masih ada permasalahan pembangunan yang perlu ditangani dengan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.1.1. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Sosial

- 1) **Indeks Pembangunan Manusia** Kabupaten Pesisir Barat di angka 69,58 masih dibawah angka Provinsi Lampung yang mencapai 71,79. Hal tersebut menjelaskan belum bersaingnya kualitas SDM di tingkat regional. Kualitas SDM dapat tercermin melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada indeks tersebut menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup.
- 2) **Kesehatan**, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pesisir Barat sebesar 73,61 tahun, masih dibawah AHH Provinsi Lampung 73,95 tahun.

Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebanyak 6 kasus, sedangkan Angka Kematian Bayi sebanyak 10 kematian.

Prevalensi stunting juga masih lebih tinggi dari Provinsi Lampung, berdasarkan data SSGI prevalensi stunting Kabupaten Pesisir Barat di angka 16,7%.

Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang belum merata, ditandai dengan sebaran tenaga kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat, serta masih ada daerah yang aksesibilitas kesehatannya terbatas dan belum optimal.

Belum memadainya ketersediaan dokter spesialis, serta rasio dokter umum terhadap penduduk.

- 3) **Pendidikan**, Capaian Rata-rata lama sekolah 8,53 tahun, lebih baik dari angka Provinsi Lampung yang hanya 8,18 tahun. Sedangkan Harapan lama sekolah di angka 12,13 tahun masih di bawah capaian Provinsi Lampung sebesar 12,74 tahun.

Kualitas sarana pendidikan belum merata, serta belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

- 4) **Kemiskinan**, tingkat kemiskinan daerah yang masih tinggi, dengan persentase penduduk miskin di angka 13,84% dan indeks kedalaman kemiskinan 2,22 serta indeks keparahan kemiskinan 0,53.

- 5) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, Indeks Pembangunan Gender 94,47 telah melebihi angka capaian IPG Provinsi Lampung, namun Indeks Perlindungan Anak yang mencapai 60,27, masih dibawah angka Provinsi Lampung 64,78. Upaya pemerintah diharapkan agar lebih baik lagi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- 6) **Tingkat Pengangguran Terbuka**, angka TPT sebesar 3,73 sebenarnya masih lebih baik dibandingkan angka TPT Provinsi Lampung (4,52), diharapkan di tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

- 7) **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, terdapat 3 desa/pekon dengan status Mandiri, 40 desa Maju, 69 desa Berkembang, dan 4 desa Tertinggal.

- 8) **Pemerintahan**, saat ini kapasitas kelembagaan pemerintah masih belum optimal melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Indeks Reformasi Birokrasi 50,05 (CC) telah jauh membaik dibandingkan capaian sebelumnya. Begitu juga dengan nilai SAKIP yang naik 0,52 poin menjadi 53,35 (CC). Meskipun capaian tersebut membaik, akan tetapi dirasa masih belum optimal, pemerintah harus meningkatkan upaya dan kinerjanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel.

- 9) **Pangan**, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2018 dengan 78,70, hingga di tahun 2022 menjadi 84,18. Sedangkan untuk Indeks Ketahanan Pangan sebesar 71,71 jauh dibawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 78,25. Dan untuk prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) sebesar 9,03%.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Ekonomi

- 1) **Pertumbuhan Ekonomi**, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah. capaian pertumbuhan ekonomi 2.88%, masih berada dibawah Provinsi Lampung yang berada pada angka 4.28% terlebih catatan nasional yang mencapai 5.31%.
- 2) **PDRB Perkapita**, tingkat kemakmuran masyarakat Pesisir Barat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp. 30,06 juta menjadi Rp. 32,46 juta. Namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung.
- 3) **Ketimpangan**, melihat data ketimpangan pendapatan atau indeks gini Kabupten Pesisir Barat dari tahun ke tahun mengalami kondisi fluktuatif, dimulai dari tahun 2015 sebesar 0,299 dan di tahun 2022 mencapai 0,290, menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang terjadi di Pesisir Barat.
- 5) **Nilai Tukar Petani (NTP)**, angka NTP masih fluktuatif dikarenakan masih belum stabilnya harga produk pertanian, sementara itu biaya produksi untuk menghasilkan produk cenderung naik dari tahun ke tahun. Tahun 2022 NTP sebesar 104,34.

3.1.3. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Kewilayahan dan Infrastruktur

- 1) Ketersediaan jalan nasional di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 205,45 km. Sedangkan ketersediaan jalan provinsi sepanjang 11.996 km. Ketersediaan jalan kabupaten sepanjang 644,08 km, namun di tahun 2023 terdapat perubahan SK Jalan, sehingga panjang jalan kabupaten menjadi 460,1 km dan 134 ruas jalan. Dengan kondisi baik sepanjang 187,78 (40,81%), kondisi sedang 21,74 km (4,73%), kondisi rusak ringan sepanjang 5,70 km (1,24%), dan rusak berat sepanjang 244,88 km (53,22%). Sehingga kondisi mantap jalan tahun 2022 sebesar 39,49% dan naik menjadi 45,54% di tahun 2023. Sebagaimana dipahami, sebagai daerah baru dan juga tertinggal, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah sangat kurang di Kabupaten Pesisir Barat. Sementara pendanaan tidak mungkin dialokasikan seluruhnya pada sektor jalan. Sehingga dapat disampaikan, bahwa permasalahan utama rendahnya capaian kondisi jalan mantap adalah pada pendanaan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan panjang jalan yang daerah yang menjadi kewenangan.
- 2) Salah satu keunggulan Pesisir Barat adalah memiliki Bandar Udara sebagai pendukung transportasi udara. Total luas area Bandara 75,624 ha dengan panjang runway saat ini 1.700 meter dan lebar 23 meter, serta apron yang ada pada Bandara berukuran 91 X 55 meter dengan kapasitas untuk 2 (dua) pesawat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang unggul

dalam hal pariwisata dipandang perlu upaya untuk peningkatan sarana transportasi dan aksesibilitas di Pesisir Barat.

- 3) Jaringan irigasi sebagai infrastruktur pendukung pertanian di Pesisir Barat , untuk jaringan irigasi primer sepanjang 104,7 km, sekunder sepanjang 3,3 km dan tersier sepanjang 9,15 km. Irigasi yang menjadi kewenangan daerah adalah seluas 2.507 ha dan di tahun 2022 luas area irigasi yang dipelihara sebesar 2.315 ha.
- 4) Permasalahan kawasan permukiman kumuh perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 14-15% dari keseluruhan luas wilayah. Beberapa upaya dan usaha dari pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kawasan dan rumah kumuh terus digalakkan. Intervensi program lintas sektoral diharapkan mampu menekan angka ini.

Untuk data luasan wilayah kumuh secara total untuk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 110 Ha dengan sebaran titik kawasan permukiman sebanyak 61 titik dan tersebar di 3 kecamatan, lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara dan Bangkunt, sesuai Keputusan Bupati Pesisir Barat dengan SK Nomor: B/138/KPTS/V/01/HK-PSB/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat.

3.1.4. Permasalahan Pembangunan pada Aspek Lingkungan

- 1) **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, IKLH merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di tahun 2023 IKLH Kabupaten Pesisir Barat sebesar 72,44 dengan kategori baik. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air sebesar 50, Kualitas Udara sebesar 89,9, dan Kualitas Tutupan Lahan sebesar 78,67.
- 2) **Persampahan**, pengelolaan persampahan di Pesisir Barat masih belum maksimal, dimana pada tahun 2023 tercatat 16,59% area yang mampu dikelola timbunan sampahnya setelah sebelumnya pada 2021 dan 2022 hanya sebesar 15,80%. Dengan jumlah Tempat Pembuangan Akhir hanya 1 lokasi dengan kapasitas 24.482 m³. Untuk Tempat Pembuangan Sementara berupa bak kontainer sejumlah 8 unit dengan kapasitas 10 m³, dan Tempat Pembuangan Sementara Reduce Reuse Recycle (TPS3R) 1 buah dengan kapasitas 1,6 m³.
- 3) **Risiko Bencana**, Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan indeks risiko bencana tertinggi di Provinsi Lampung dengan data pada tahun 2023 sebesar 189,70 dengan kelas risiko “tinggi”. Ketahanan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar 0,30. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana,

serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

3.1.5. Permasalahan Hasil KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

Permasalahan yang disajikan dalam dokumen KLHS RPJPD merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dimana dalam proses pencapaian TPB hingga tahun 2022, Kabupaten Pesisir Barat masih memiliki banyak catatan dalam pencapaiannya. Lebih lanjut, beberapa hal yang direkomendasikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Barat, antara lain:

- a. Perubahan tujuan atau target;
- b. Perubahan strategi pencapaian target;
- c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
- e. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- f. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g. Pemberi arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup

Secara lebih lengkap, rangkuman permasalahan pembangunan yang dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Permasalahan Daerah Hasil Analisis KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
							Periode 5 Tahunan			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	1	2	3	4
TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	• Penopang ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengembangan potensi-potensi unggulan yang lain seperti pariwisata dan industri. Berikutnya, nilai investasi yang masuk di daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja; • Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termiskin ke 4 di Provinsi Lampung. Salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bangkuntan memiliki status sosial yang paling tinggi sekitar 4.739 rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah dan Kecamatan Pulau Pisang memiliki status paling rendah yaitu 374 rumah tangga; • Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat	Visi Ekonomi Daerah Maju dan Masyarakat Sejahtera	1.Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan 2.Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan kewilayahan yang berkelanjutan.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Produktif	1. Menciptakan produk unggulan daerah baik pariwisata maupun komoditi unggulan daerah lainnya				
						2. Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan				
					Pemaksimalan Potensi Unggulan Komparatif Daerah	3. Peningkatan potensi unggulan dalam meningkatkan ekonomi.				
					Resiliansi dan Mitigasi Bencana	4. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas				
						5. Perbaikan Lingkungan Hidup dan daya dukungnya				
						6. Menjaga Kelestarian dan daya dukung Lingkungan				

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	Periode 5 Tahunan			
							1	2	3	4
		merupakan salah satu Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia dengan nilai capaian tahun 2022 sebesar 189.70.								
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	• Penopang ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengembangan potensi-potensi unggulan yang lain seperti pariwisata dan industri. Berikutnya, nilai investasi yang masuk di daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja; • Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termiskin ke 4 di Provinsi Lampung. Salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bangkuntan memiliki status sosial yang paling tinggi sekitar 4.739 rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah dan Kecamatan Pulau Pisang memiliki status paling rendah yaitu 374 rumah tangga; • Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman sebesar 18.06% menunjukkan kondisi kualitas permukiman daerah yang berada di bawah standar;	Visi Ekonomi Daerah Maju dan Masyarakat Sejahtera	1. Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan 2. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan kewilayahan yang berkelanjutan. 3. Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan.	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Produktif	1. Menciptakan produk unggulan daerah baik pariwisata maupun komoditi unggulan daerah lainnya				
						2. Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan				
					Pemaksimalan Potensi Unggulan Komparatif Daerah	3. Peningkatan potensi unggulan dalam meningkatkan ekonomi. 4. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas				
TPB 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		Visi Infrastruktur Yang Baik dan Berkualitas	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan Yang Berkelanjutan	Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kehidupan Berkualitas	1. Pembangunan fasilitas umum serta aksesibilitas dan konektivitas				
						2. Fasilitas Umum yang tersebar merata				

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
							Periode 5 Tahunan			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	1	2	3	4
		- Banyaknya rumah tidak layak huni penduduk dan masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan; - Belum adanya rencana pengembangan perumahan secara terstruktur dan terintegrasi			Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	3. Pembangunan simpul-simpul transportasi baru				
						4. Pembangunan kota-kota baru				
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak	- Penopang ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengembangan potensi-potensi unggulan yang lain seperti pariwisata dan industri. Berikutnya, nilai investasi yang masuk di daerah belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja; - Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termiskin ke 4 di Provinsi Lampung. Salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bangkunat memiliki status sosial yang paling tinggi sekitar 4.739 rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah dan Kecamatan Pulau Pisang memilki status paling rendah yaitu 374 rumah tangga; - Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang	Visi Ekonomi Daerah Maju dan Masyarakat Sejahtera	1. Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan; 2. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan kewilayahan yang berkelanjutan. 3. Pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan. 4. Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. 5. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Produktif	1. Menciptakan produk unggulan daerah baik pariwisata maupun komoditi unggulan daerah lainnya				
						2. Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan				
			Visi Penggunaan Teknologi Maju dan Masyarakat Yang Berbudaya		Pemaksimalan Potensi Unggulan Komparatif Daerah	3. Peningkatan potensi unggulan dalam meningkatkan ekonomi.				
						6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas				
					Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dengan Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	7. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. 8. Percepatan Pembangunan SDM Masyarakat yang berdaya saing				

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	1	2	3	4
		berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia dengan nilai capaian tahun 2022 sebesar 189.70. • Daerah juga belum mampu memanfaatkan bonus demografi, sehingga jumlah angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya terserap di dunia kerja. Efek akhirnya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi.;Kondisi internal pemerintah daerah yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah berasal dari sisi Perangkat Daerah, yaitu masih belum optimalnya penyediaan data sektoral masing-masing urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan tidak valid. Seperti diketahui bersama, bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas			Perwujudan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Kolaboratif dengan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	9. Pelayanan Publik berdasarkan SPBE. 10.Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas ASN. 11.Transformasi Tata Kelola Birokrasi. 12.Peningkatan Kesejahteraan ASN				

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	1	2	3	4
		pemerintahan dan pembangunan diperlukan data sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dan berakhir dengan data sebagai output.								
TPB 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	• Tingkat kemantapan jalan daerah yang baru mencapai 39.53% tentu saja merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur daerah secara umum masih perlu penanganan dan peningkatan; • Belum tersedianya sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Pesisir Barat; • Panjang jaringan irigasi sebesar 56.10% belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah persawahan. Hal ini disebabkan kondisi jaringan irigasi yang tidak seluruhnya dalam kondisi baik	Visi Infrastruktur Yang Baik dan Berkualitas	Perwujudan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Kolaboratif dengan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kehidupan Berkualitas	1. Pembangunan fasilitas umum serta aksesibilitas dan konektivitas				
						2. Fasilitas Umum yang tersebar merata				
					Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	3. Pembangunan simpul-simpul transportasi baru				
						4. Menjaga Kelestarian dan Daya Dukung Lingkungan				
						5. Menjaga Kelestarian dan Daya Dukung Lingkungan				
TPB 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	• Masih banyaknya degradasi lahan akibat alih fungsi lahan khususnya sawah; • Perlunya pengendalian dan rendahnya kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup; • Kabupaten Pesisir Barat merupakan	Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kewilayahan Yang Berkelanjutan	Keseimbangan dan Kelestarian Ekosistem	1. Perbaikan Lingkungan Hidup dan Daya Dukungnya				
						2. Menjaga Kelestarian dan Daya Dukung Lingkungan;				
						3. Pulihnya ekosistem lingkungan hidup dan daya				

NO TPB	TPB PRIORITAS	PERMASALAHAN	REKOMENDASI				WAKTU PELAKSANAAN			
			VISI	MISI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	1	2	3	4
		daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia dengan nilai capaian tahun 2022 sebesar 189.70.				dukung lingkungan				
			Visi Ekonomi Daerah Maju dan Masyarakat Sejahtera		Resiliansi dan Mitigasi Bencana	4. Pembangunan fasilitas umum serta aksesibilitas dan konektivitas				

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diperhatikan dan/atau diprioritaskan dalam proses perencanaan daerah karena dampaknya signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan yang direncanakan.

Penetapan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Bermodalkan potensi dan peluang yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan secara bertahap, khususnya untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Bahwa modal utama pembangunan dan pengembangan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia, bahwa manusia merupakan subjek dan juga objek pembangunan. Diperlukan subjek pembangunan yang kompetitif yang mampu menciptakan kebijakan adaptif dan mengarahkan pada pengembangan manusia yang menjadi objek pembangunan semakin kompetitif. Sehingga pada akhirnya, seluruh sumber daya manusia daerah menjadi kompetitif dan siap mengisi pembangunan daerah.
- b. Sumber Daya Alam, bahwa seluruh kekayaan alam harus dipergunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan YME yang mungkin tidak semua daerah memilikinya. Dengan segala keunggulan komperatifnya, selayaknya daerah harus mampu mempergunakannya dengan bijak untuk pembangunan dalam prinsip berkelanjutan sehingga sumber daya alam yang ada pada generasi saat ini dapat terus dimanfaatkan hingga generasi yang akan datang.
- c. Sosial Budaya, bahwa kerukunan, kedamaian, kehidupan yang aman dan damai di masyarakat akan menciptakan suatu keteraturan. Budaya adalah cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Masyarakat yang rukun dan berbudaya akan menciptakan suatu pemerintahan yang kondusif dan stabil penuh keteraturan. Masyarakat yang secara sosial budaya terus berkembang akan memudahkan sebuah kebijakan dilaksanakan dan/atau diimplementasikan dalam pembangunan.
- d. Letak Geografis dan administratif, letak geografis dan administratif suatu daerah tentunya berbeda-beda satu dengan daerah lainnya. Daerah yang memiliki bibir pantai harus mampu mengembangkan perairannya, baik untuk transportasi atau perikanan. Begitu juga dengan daerah yang memiliki lahan luas yang subur selayaknya mampu menjadikan daerahnya lumbung pangan. Berikutnya, daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah lain (provinsi lain) seharusnya dapat cepat berkembang karena merupakan daerah penyangga dan penopang sumber ekonomi barang/jasa.

3.2.1. Isu Strategis Berdasarkan Perkembangan Daerah

Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan permasalahan yang ada dan memanfaatkannya menjadi tantangan. Perkembangan daerah secara fisik ditandai dengan meluasnya wilayah perkotaan, bertambahnya daerah permukiman baru di sekitarnya serta berkurangnya wilayah perdesaan. Di sisi lain, perkembangan daerah juga ditandai dengan perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya baru serta kebutuhan untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih cepat, murah dan mudah.

3.2.1.1. Pergeseran Demografi

Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, wilayah perkotaan krui akan semakin meluas dan berkembang baik karena direncanakan dalam tata ruang maupun tidak (karena semakin padat dan penuhnya permukiman yang dekat dengan pusat fasilitas). Dengan kemungkinan terciptanya juga kota-kota baru di ibukota kecamatan lainnya. Hal ini tentunya akan menyebabkan perpindahan penduduk dari daerah lain di luar kabupaten dan/atau perpindahan penduduk dari pekon-pekon menuju ibu kota kecamatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik (urbanisasi) ataupun untuk mendapatkan layanan pendidikan/kesehatan yang lebih baik. Pergeseran demografi ini tentunya dapat membawa efek domino bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mampu menyikapi hal ini dengan menyiapkan kebijakan yang mengatur pertumbuhan/pergeseran penduduk serta kebijakan pola ruang dan tata ruang yang lebih adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Bonus demografi merupakan salah satu isu kependudukan yang paling strategis pada saat ini. Bonus Demografi adalah kesempatan atau jendela peluang keuntungan ekonomis akibat meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan menurunnya penduduk usia non produktif sehingga angka beban ketergantungan penduduk akan menjadi rendah, atau periode ketika rasio ketergantungan mengalami penurunan. Bonus demografi dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Negatifnya, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin berpotensi menimbulkan berlebihan jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang mampu disediakan oleh daerah. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan pengangguran yang dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan.

Hingga tahun 2022, sebanyak 3.053 orang angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan skenario yang lebih adaptif dan solutif dalam penanganan masalah kependudukan.

b. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan

i) Pendidikan

Isu pendidikan daerah adalah belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajarnya, hal ini dapat dilihat untuk data pada tahun 2022, jumlah sekolah, guru dan peserta didik terkumpul pada 3 kecamatan besar, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Bangkuntan dan Kecamatan Pesisir Selatan.

Angka Rata-rata lama sekolah tahun 2022 adalah 8,53 tahun atau belum mencapai program 9 tahun belajar. Harapan lama sekolah sebesar 12,13 tahun menunjukkan harapan rata-rata anak usia 7 tahun hanya mampu mengenyam pendidikan hingga Diploma I. kedua indikator tersebut dapat menjadi penanda bagaimana kondisi SDM Kabupaten Pesisir Barat yang belum maju dan kompetitif.

Pertumbuhan ataupun persegeran penduduk menuju perkotaan akan menyebabkan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan semakin meningkat, minimal pada sisi kebutuhan akan ruang belajar atau ruang kelas pada setiap satuan pendidikan. Kecenderungan pengembangan pendidikan yang lebih maju di perkotaan dibandingkan di perdesaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran penduduk usia sekolah ke kota. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Bagaimana dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang jumlah sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan juga pendidikan kesetaraan yang berkualitas tidak hanya berada pada kota/ibukota kecamatan saja, namun sudah ada pada pekon-pekon.

Khusus bagi penduduk miskin, rendahnya aksesibilitas pendidikan adalah isu yang cukup strategis. Kekhawatiran mendasar bagi penduduk miskin yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan adalah dengan menjadi pekerja pada lapangan kerja sektor informal. Kondisi tersebut harus segera ditangani dan diselesaikan, karena dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik secara materil dan immaterial. Pada akhirnya, target untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan menjadi terbatas.

ii) Kesehatan

Isu strategis dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat secara umum adalah rendahnya usia harapan hidup, yaitu sebesar 73,61 tahun. Kondisi tersebut dapat mencerminkan banyak hal, antara lain: tingginya angka kematian ibu dan bayi, angka kesakitan yang tinggi, asupan makanan bergizi yang rendah, pelayanan kesehatan yang belum memadai, dan berbagai hal lainnya. Jika kondisi tubuh penduduk tidak sehat, maka akan sulit untuk menjadi produktif dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

Kurun 20 (dua puluh) tahun yang akan mendatang, dengan asumsi banyaknya penduduk yang berpindah ke perkotaan maka sarana dan prasarana fasilitas kesehatan harus terus meningkat. Asumsinya untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka pelayanan kesehatan diprediksi sudah semakin maju. Pelayanan rekam medic yang sudah elektronik, konsultasi kesehatan menggunakan *Telemedicine* antar fasilitas kesehatan daerah, kabupaten, regional, provinsi hingga pusat. Serta BPJS sudah berada pada status kemandirian pembiayaan oleh setiap penduduk.

Kondisi saat ini, fasilitas kesehatan milik Pemerintah RSUD KH M. Thohir saat ini adalah rumah sakit bertipe D dengan terakreditasi dasar, yang menunjukkan belum lengkapnya sarana prasana dan tenaga kesehatan yang dimiliki. Setiap ibukota kecamatan telah memiliki puskesmas, namun jumlah rasio tenaga kesehatannya masih kurang dari kebutuhan, belum terpenuhinya hal-hal mendasar tersebut tentunya akan meningkatkan beban ekonomi penduduk untuk mendapatkan akses kesehatan yang mudah dan murah di daerah.

Pengembangan atau pembangunan fasilitas kesehatan baru diharapkan akan terus dinamis berkembang menyesuaikan dengan perkembangan/pemekaran wilayah. Sementara itu, penyediaan fasilitas pendukung layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang telah ada harus terus dikembangkan mengikuti pada perkembangan teknologi dan informasi dan tuntutan perubahan demografi.

c. Kemiskinan

Pada akhir periode RPJPD tahun 2045, kekhawatiran masih adanya penduduk miskin di daerah merupakan momok dalam proses daerah untuk menjadi sejahtera dan maju. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan daerah pada tahun 2022 sebesar 13,84% atau sebanyak 21.850 orang penduduk miskin. Jumlah tersebut sangat besar bila melihat pada indikator penduduk miskin yang terkadang tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

Pergeseran penduduk ke kota dari pekon, khususnya oleh penduduk yang tidak dibekali dengan keterampilan dan keahlian akan selalu menimbulkan masalah baru di perkotaan. Harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik di perkotaan merupakan magnet bagi para pencari kerja di perdesaan. Namun demikian, bagi mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal akan terjebak pada pekerjaan sektor informal yang tidak lebih baik dengan pekerjaan di perdesaan. Hal ini bila tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menjadi salah satu sumber meningkatnya angka kemiskinan daerah.

Pemerintah daerah perlu membangun sarana dan prasarana dari pinggiran dan perdesaan, sehingga dengan berkembangnya pekon akan menciptakan lapangan pekerjaan dan struktur perekonomian di pekon. Penanggulangan Kemiskinan selayaknya dilakukan dengan kebijakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan secepat, seefektif dan sekomprehensif mungkin. Selain itu, penguatan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sangat diperlukan mengingat data kemiskinan yang kredibel merupakan kunci dari sukses penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang termutakhirkan dan telah tervalidasi, maka penanggulangan kemiskinan akan tepat sasaran. Penguatan pengelolaan data harus dilakukan melalui penguatan SDM pengelola, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi dan sistem informasi, keterlibatan berbagai pihak terkait seperti aparat desa/pekon/kelurahan, serta berbagai faktor pendukung lainnya.

d. Perumahan dan Permukiman

Perkembangan suatu daerah tentunya akan dibarengi dengan perkembangan demografi. Penduduk yang bertambah tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan akan perumahan dan juga pengembangan permukimannya. Sarana dan prasaran perumahan dan permukiman pada akhir tahun 2045 diperkirakan akan tetap menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Dimana, sering kali perkembangan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi daerah untuk mengantisipasinya.

Isu strategis dalam bidang perumahan di Kabupaten Pesisir Barat adalah masih adanya gap ketimpangan sebesar 4.01% antara jumlah penduduk dan/atau jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah atau sebanyak 1,935 kepala keluarga. Hal ini juga ditambah dengan kondisi rumah tidak layak huni sebesar 18,17% dari total rumah sebanyak 45.348 unit.

Lebih lanjut, isu perumahan juga berkaitan langsung dengan ketersediaan fasilitas air bersih dan air minum untuk penduduk dan juga persampahan. Bahwa fasilitasi pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih telah mencapai 53.03%, namun untuk pemenuhan air minum baru mencapai 37.50%. Penyediaan air bersih untuk warga adalah keharusan bagi pemerintah daerah, dimana air bersih yang mudah diakses dan murah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur pelayanan dasar sekaligus mampu meningkatkan kualitas hidup warganya, minimal dari sisi kesehatan.

Sampah hasil dari rumah tangga akan terus meningkat seiring pertumbuhan demografi suatu daerah. Bahwa disatu sisi peningkatan jumlah sampah erat kaitannya dengan peningkatan konsumsi, namun di sisi lain hal ini menunjukkan gagalnya proses pengurangan sampah oleh rumah tangga. Isu terkait persampahan merupakan isu yang terus ada pada setiap daerah. Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekhawatiran akan terus bertambahnya jumlah sampah dengan lambatnya pengelolaan sampah dimaksud. Sementara itu, pemenuhan energi listrik di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada data rasio elektrifikasi dari PLN, tercatat sebesar 70.11%. dari data tersebut ada 4 pekon di Kecamatan Bangkunt yaitu Pekon Way Haru, Way Tias, Bandar Dalam, dan Siring Gading yang belum teraliri listrik dari PLN.

3.2.1.2. Perkembangan Teknologi dan Regulasi

Perkembangan dunia teknologi pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang merupakan suatu keniscayaan. Transformasi dunia digital sebagai bagian dari teknologi informasi global akan semakin pesat dan mungkin sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan pada saat ini. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara suatu organisasi beroperasi. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan roda pemerintahan, pemerintah daerah harus adaptif dan responsif dalam penggunaan teknologi informasi terbaru dalam proses memberikan layanan kepada masyarakat, atau digitalisasi pelayanan. Secara prinsip, setiap organisasi akan semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi agar lebih efektif, efisien, mudah dan murah serta memberikan nilai lebih kepada pengguna layanan.

Transformasi digital memungkinkan waktu dan tempat pelayanan yang lebih fleksibel. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Lebih daripada itu, transformasi digital juga tentang mengubah proses bisnis organisasi pemerintahan bekerja, cara kerja dan pola pikir aparatur hingga masyarakatnya dengan harapan mampu memberikan dan mendapatkan pelayanan yang lebih luas dan dinamis. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Perkembangan teknologi sebagai isu daerah dapat disikapi sebagai upaya dari pemerintah daerah untuk terus adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan global, nasional dan regional. Dimana organisasi pemerintahan harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan regulasi yang dalam penilaiannya berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh instansi pemerintah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

a. Komunikasi dan Informasi

Perkembangan dunia digital erat kaitannya dengan dunia komunikasi dan informasi. Dimana, pada tahun 2045 mendatang, teknologi komunikasi dan informasi akan semakin berkembang dan *advance*. Masyarakat sebagai sasaran penggunaanya lambat laun juga akan dipaksa bertransformasi dalam cara berkomunikasi dan menerima/menyampaikan informasi. Akses terhadap komunikasi dan informasi masyarakat erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem. Baik dari sisi *hardware* dan *software* hingga jaringan komunikasi (internet) dan lingkungan.

Masyarakat diasumsikan akan lebih mengharapkan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari pemberitaan media serta informasi layanan dari pemerintah. Pada sisi ini, pemerintah dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, dimana pemerintah harus mampu menyediakan seluruh infrastruktur pendukung komunikasi dan informasi dalam kaitannya memberikan pelayanan kepada seluruh aparatur pemerintah juga kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, kenyamanan, atau kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu.

Aksesibilitas masyarakat terhadap komunikasi dan informasi yang luas semestinya menjadi hak yang harus dilindungi dan diperjuangkan. Dimana, pada tahun 2022 nilai SPBE Kabupaten Pesisir Barat tercatat hanya 1,94. Angka yang rendah bila melihat kewajiban daerah untuk bertransformasi digital dalam pelayanan pembangunan. Berikutnya, dari 118 kelurahan/pekon telah seluruhnya mendapatkan akses internet dengan jumlah BTS sebanyak 51 unit. Namun demikian, masih terdapat setidaknya 71 pekon yang kualitas layanan komunikasi yang belum optimal bahkan belum bisa mengakses internet dengan lancar. Ini juga merupakan salah satu tantangan, bahwa pemerintah harus berpikir lebih praktis dan strategis, bagaimana agar daerah itu pertumbuhan penggunaan internet yang tinggi ini digunakan oleh masyarakat untuk hal-hal yang lebih produktif bukan untuk yang hanya entertain semata. Regulasi yang seimbang diperlukan dalam upaya menciptakan masyarakat yang produktif.

b. Data dan Informasi

Data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Agar kebijakan pembangunan daerah dapat direncanakan dengan baik maka ketersediaan data yang berkualitas sangatlah penting. Data dan informasi yang berkualitas adalah data yang memiliki relevansi dan akurasi tinggi terhadap kondisi apa yang ada di lapangan (kondisi sebenarnya). Selain itu, data dan informasi yang berkualitas juga haruslah selalu termutakhir pada setiap periode waktu tertentu. Data dan informasi pembangunan juga harus terintegrasi dan tekoneksi, baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar level pemerintahan, serta dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang membutuhkan.

Isu daerah untuk pengembangan data dan informasi dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah data statistik daerah per tahun, dimana pada tahun 2022 hanya tersedia 14 publikasi statistik untuk Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini juga dapat dilihat dari persentase penggunaan data untuk perencanaan 76,92% dan untuk monitoring dan evaluasi 43,59%. Kedua hal ini menunjukkan, masih belum optimalnya respon dari pemerintah daerah untuk menyediakan dan menggunakan data dan informasi dalam proses pembangunan. Hal ini tentunya harus ditangani dengan cepat dan tuntas.

Penguatan pengelolaan data dan informasi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan baik yang berupa data spasial maupun non spasial harus dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah agar kebijakan pembangunan daerah dapat dirumuskan dengan baik dan tepat sasaran. Koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan antar level pemerintahan harus dilakukan dengan baik untuk mewujudkan satu data terpadu (*one data* dan kebijakan satu peta) dan berkualitas dalam upaya penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah secara komprehensif, terukur dan terstruktur.

c. Penerapan Inovasi

Inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat) baik oleh seseorang atau kelompok untuk diaplikasikan dan diadopsi, atau unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Sebagaimana perkembangan dunia digital, maka pada masa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang seluruh elemen pembangunan harus dapat beradaptasi dan berinovasi dalam kaitannya dengan meningkatkan kualitas hidup.

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan maju berbasis *innovation-driven development*, pemerintah daerah harus terus berinovasi berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. aktivitas ekonomi masyarakat, dan dunia usaha. Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi

budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten.

Pada tahun 2022, Kabupaten Pesisir Barat masuk kategori daerah inovatif. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas (a) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (b) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi masyarakat.

d. Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintah merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya. Lebih lanjut, organisasi pemerintah horizontal adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki garis tanggungjawab hanya dalam lingkup suatu Daerah saja. Contoh dari organisasi pemerintah horizontal adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Semua organisasi pemerintah non militer tersebut digerakkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dari pengertian di atas dapat ditarik korelasi bahwa organisasi pemerintahan dijalankan oleh ASN. Sehingga baik dan buruknya pemerintahan dipengaruhi oleh kinerja dari ASN, walaupun pada sisi lainnya, perlu dilihat faktor dari pimpinan daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi yang merupakan jabatan politik hasil dari pelaksanaan pemilu. Pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam tataran birokrasi pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan diharapkan mampu terus direformasi, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang murni untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Isu strategis Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hingga tahun 2022, penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat antara lain (i) nilai Reformasi Birokrasi (RB) adalah C, (ii) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah CC, (iii) Indeks Profesionalisme ASN adalah 42, (iv) indeks SPIP adalah Level 2 atau berkembang dan (v) Opini BPK atas LKPD adalah WTP.

Berdasarkan dari analisis, salah satu faktor dari lemahnya nilai capaian

indikator-indikator tersebut adalah perlunya dilakukan penataan dan penguatan organisasi pemerintahan. Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi profesional dan proposional. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *smart institution*.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi menuju daerah yang maju dan modern pada tahun 2045, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

3.2.1.3. Perkembangan Geoekonomi

Geoekonomi yang berasal dari kata geografi dan ekonomi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi lingkungan alam sekitar yang berdampak pada aktivitas manusia terutama dalam hal ekonomi. Geoekonomi sebagai studi tentang aspek keruangan, budaya, dan strategis sumber daya dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dimana pada kurun perkembangan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang, Kabupaten Pesisir Barat perlu mempersiapkan diri untuk menyikapi perubahan cara masyarakat bekerja, dan juga cara pengelolaan sumber daya alam. Daerah harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif suatu produk daerah sehingga memiliki keunggulan dari daerah sekitar dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya alam.

a. Pengangguran dan Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dimana penduduk dengan kriteria (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada tahun 2022, jumlah TPT Kabupaten Pesisir Barat adalah 3.73%, atau

sebanyak 3.053 orang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 81.839 orang. Dengan jumlah pekerja sebesar 78.786 orang, sebagian besar 47,43% bekerja di sektor pertanian. Jumlah TPT tersebut berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan menengah ke atas yang idealnya berada pada usia produktif.

Dari kondisi diatas, dapat dinilai isu ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Barat adalah masih minimnya jumlah lapangan pekerjaan di daerah dengan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor tradisional pertanian. Sebagaimana dipahami, pekerja pada sektor pertanian didominasi oleh petani/nelayan/peternak yang masuk dalam sektor pekerjaan informal yang tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus. Isu rendahnya tenaga kerja terampil dan profesional di Kabupaten Pesisir Barat harus segera disikapi. Bagaimana tidak, dengan dibukanya jalur arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil antar negara akan sangat memungkinkan masuknya tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja lokal.

Belum lagi dengan hadirnya inovasi teknologi dan transformasi digital yang dapat menggantikan kerja manusia. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah daerah perlu melihat tantangan ini dengan mempersiapkan keterampilan khusus bagi angkatan kerja daerah. Oleh karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja lokal sangat penting khususnya untuk penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah keatas. Perlu kebijakan daerah untuk memfasilitasi pembukaan lapangan pekerjaan baru dengan fasilitasi pembangunan industri skala menengah dan besar.

Pada tahun 2045, sektor industri teknologi informasi dipastikan akan berkembang dan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Untuk sektor produk unggulan, pemerintah dapat memaksimalkan pengembangan tenaga kerja di sektor pariwisata yang. Bahwa hingga saat ini belum banyak tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi. Kerja keras Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata akan menjadi sia-sia jika pada akhirnya tenaga kerja lokal daerah hanya menjadi penonton, karena tidak dapat memenuhi standar kompetensi kerja bidang pariwisata yang dibutuhkan.

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara/daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor-faktor yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Isu kesejahteraan penduduk erat kaitannya dengan indikator pertumbuhan

ekonomi dan angka kemiskinan. Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 2.88% dan berada jauh dibawah Provinsi Lampung dan nasional. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kemampuan belanja daerah untuk pemenuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik masyarakat. Sehingga proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang/jasa oleh masyarakat menjadi lebih mudah murah. Semakin minimnya pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya diterima dari pemerintah (SPM) akan menyebabkan masyarakat mengalihkan pengeluaran konsumsi pada sektor sekunder dan tersier. Perkembangan sektor sekunder dan tersier ini yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian daerah.

Sektor pertanian dan perikanan merupakan penopang utama struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Sektor ini harus terus diperkuat, mengingat sektor ini memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi krisis dan Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang tinggi terhadap sektor ini. Penguatan struktur ekonomi pada sektor lainnya juga penting dilakukan secara terpadu, khususnya sektor industri dan sektor sektor penyediaan akomodasi dan makan minum agar dapat menjadi penopang dan penggerak perekonomian daerah.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Pesisir Barat sangat kaya dan potensial untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Potensi wisata pantai dengan ombak tinggi yang sangat disukai oleh penggemar surfing dari mancanegara serta tidak banyak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Namun demikian, upaya pengembangan sektor tersebut belum optimal. Hal tersebut dicerminkan oleh lama tinggal dan besarnya pengeluaran pengunjung wisata di Kabupaten Pesisir Barat yang masih rendah. Pemerintah Daerah dan stakeholder harus bersama-sama mengembangkan destinasi dan obyek wisata lainnya agar lebih beragam baik dari sisi akomodasi dan amenitas. Dengan demikian akan meningkatkan daya tarik yang lebih tinggi bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara.

Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus fokus mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata tersebut. Arah kebijakan, strategi, dan alokasi anggaran pembangunan harus diformulasikan dengan baik untuk menunjang pembangunan sektor pariwisata tersebut. Pemerintah daerah sebagai regulator harus membuat kebijakan dan program yang dapat memberikan insentif bagi para investor dan pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata.

c. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan kapasitas fiskal daerah yang tinggi, tentunya sumber daya keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar yang telah ditentukan juga tinggi. begitu juga sebaliknya.

Tahun 2022, rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 2,158 dengan kategori tinggi. namun demikian, bila dilihat dari rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah, hanya didapat angka 3,84%. Keterbatasan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pengembangan potensi daerah merupakan salah satu isu yang cukup strategis di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus terus berupaya menggali sumber-sumber pendanaan dari sektor lainnya untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Salah satunya adalah melalui investasi swasta.

Pemerintah Daerah harus segera membangun infrastruktur pendukung investasi selain menerbitkan kebijakan yang mampu menggandeng investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pengembangan potensi daerah melalui investasi riil di lapangan dalam bentuk pembentukan usaha. Investasi yang riil di lapangan diharapkan mampu secara nyata menyerap jumlah tenaga kerja. Paket investasi yang disertai dengan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor swasta harus segera dirumuskan dan direalisasikan. Tidak hanya itu, perbaikan iklim investasi dan promosi investasi juga tidak kalah penting untuk segera dilakukan. Dengan demikian, daya saing investasi daerah yang baik akan menarik perhatian para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

d. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur

Pengertian infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat guna mendukung berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.

Ketersediaan infrastruktur wilayah merupakan syarat dasar terlaksananya program pembangunan diberbagai bidang. Infrastruktur wilayah yang terbatas akan menjadi penghambat dalam pemanfaatan potensi daerah dan proses pembangunan secara keseluruhan. Kualitas infrastruktur wilayah yang rendah juga akan menghambat masuknya investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Infrastruktur dasar dan infrastruktur pelayanan publik akan selalu dibutuhkan pada setiap periode pembangunan daerah. Perbedaan mungkin ada pada jenis infrastruktur pendukung per sektor pembangunan (contoh infrastruktur teknologi informasi tahun 2022 dan 2045 akan berbeda, namun infrastruktur jalan pada tahun 2022 dan 2045 tetap akan sama) maupun cara pembangunan infrastruktur (teknologi/material/struktur bangunan).

Berdasarkan data tahun 2022 yang lalu, Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Pesisir Barat sebesar 59,08%. Keterbatasan jumlah jalan mantap, terbatasnya akses air minum layak bagi penduduk, rendahnya akses sanitasi sehat, dan rendahnya rasio elektrifikasi adalah sebagian masalah yang harus segera menjadi prioritas untuk diselesaikan.

e. Aksesibilitas dan Konektivitas Daerah

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya (sistem transportasi). Sementara itu, konektivitas adalah suatu kondisi yang menyebabkan/memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Terhubungnya wilayah pekon-pekon dalam suatu kabupaten disebut dengan konektivitas antarwilayah. Konektivitas antarwilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan aksesibilitas suatu daerah. Aksesibilitas dan konektivitas diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah, meratakan pembangunan, dan memangkas kemiskinan suatu negara.

Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kawasan dekat ibukota kabupaten berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten. Sehingga dibutuhkan konektivitas antarwilayah untuk pemeratakan pembangunan tersebut. Hingga saat ini masih terdapat Pekon yang sulit diakses, namun setidaknya hanya terdapat empat Pekon yang berada dalam kategori sangat sulit diakses yaitu kecamatan Bangkumat, Pekon Bandar Dalam, Pekon Way Haru, Pekon Way Tiyas, dan Pekon Siring Gading. Hingga tahun 2022, rasio konektivitas daerah sebesar 85%. Namun demikian, untuk transportasi darat hanya melewati jalan nasional saja dari pada sisi selatan hingga sisi tengah Pesisir Barat dengan 2 trayek. Sedangkan untuk transportasi laut hanya memiliki 3 trayek.

Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dapat ditingkatkan dengan cara pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. Dampak konektivitas tersebut memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Manfaat dari pembangunan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas Wilayah, kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Membuat suatu wilayah yang awalnya terjamah menjadi lebih mudah didatangi. Dengan peningkatan aksesibilitas suatu wilayah, pengembangan dari wilayah tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. Kemudahan Akses Sumber Daya, konektivitas daerah memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang/jasa maupun sumber daya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain.
3. Peningkatan Pelayanan Umum, konektivitas daerah dapat

meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang sehat sekaligus terdidik.

4. Peningkatan Investasi, dengan adanya konektivitas antarwilayah, peluang pembukaan bisnis menjadi lebih tinggi. Perkembangan bisnis yang bagus dalam suatu wilayah menarik para investor untuk memberikan modal, hal ini jelas dapat memajukan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan berkembangnya bisnis dan ketersediaan investor, lapangan kerja baru akan tersedia. Peningkatan kesempatan kerja bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antarwilayah juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal tersebut jelas menjadi peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana, bahwa dalam kerangka kewilayahan, kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana akan lebih mudah terpenuhi daripada perwilayah. Dengan adanya konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasaran akan lebih cepat karena mudahnya transportasi dan juga dana yang tersedia lebih besar.
7. Peningkatan Pariwisata, konektivitas daerah mempermudah berlangsungnya kegiatan pariwisata yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar tempat wisata. Mudahnya akses ke suatu wilayah, membuat turis dalam negeri walaupun luar negeri bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke berbagai tempat wisata.
8. Penurunan Konflik Antarwilayah, konektivitas antarwilayah dapat menurunkan konflik antar wilayah, baik konflik antar warga maupun konflik pembangunan antar pemerintah suatu wilayah. Hal tersebut karena konektivitas antarwilayah membuat wilayah-wilayah saling bekerja sama untuk memajukan daerah bukannya saling berselisih.

3.2.1.4. Perkembangan Geososial

Geografi sosial atau geososial merupakan sebuah gambaran tentang spasialisasi masyarakat di suatu tempat atau wilayah tertentu. antara manusia dengan lingkungan sosialnya yaitu manusia lain maupun kelompok manusia yang ada disekelilingnya. Maksudnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder pasti akan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Maka dapat diartikan bahwa geografi sosial adalah sebuah ilmu geografi manusia yang paling erat kaitannya dengan teori sosial yang berkaitan dengan hubungan fenomena sosial. Adapun unsur-unsur geografi sosial, yaitu: (i) Manusia, baik dalam wujud masyarakat atau komunitas, (ii) Lingkungan Alam, meliputi topografi, iklim, tanah dan lain sebagainya, dan (iii) Relasi, Interelasi, dan Interaksi antara manusia dan alam.

Sementara itu, geososial setidaknya dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) pembangunan lingkungan hidup, (ii) demokrasi dan politik, (iii) sejarah budaya, dan (iv) interaksi sosial. Isu strategis dari geospasial menjadi penting pada kurun perkembangan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dimana tantangan pembangunan daerah erat kaitannya dengan kemungkinan perubahan cara masyarakat dalam mengelola lingkungan sosialnya.

a. Kualitas Lingkungan Hidup dan Daya Dukung Lingkungan

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan beribadah. Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya. Adapun yang dimaksud dengan faktor-faktor geografi dan sosial yaitu (i) Faktor geografi, seperti iklim, kesuburan tanah, dan erosi dan (ii) Faktor sosial-budaya, seperti ilmu, pengetahuan, dan teknologi.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 sebesar 71,06. Berdasarkan pada data tersebut, dapat dilihat bahwa isu lingkungan hidup merupakan sesuatu yang krusial. Terlebih pada tahun 2045 mendatang tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih berat dan beragam. Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi.

Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358 Ha, hal ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai Daerah Tangkapan Air (*catchment area*). Kondisi tersebut mengindikasikan Kabupaten Pesisir Barat perlu menjaga dan melestarikannya untuk mendukung kehidupan di masa mendatang.

Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan.

b. Mitigasi dan Edukasi Bencana

Kabupaten Pesisir Barat memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak dari sisi geologis dan geografis. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan risiko bencana yang berada pada zona merah dengan nilai 189,70. Hampir seluruh skor indeks risiko perancaman berada pada kelas risiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrem Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten dengan skor indeks risiko tinggi di Indonesia.

Dengan demikian, mitigasi dan edukasi terkait bencana harus diperkuat sejak dini. Masyarakat harus sudah mulai membudayakan perilaku sadar bencana. Tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana sekaligus implementasi pembangunan berkelanjutan. Konsep resiliensi berkelanjutan yaitu: pertama penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif; kedua berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi; ketiga pembangunan infrastruktur yang tangguh untuk bencana dan perubahan iklim; lalu ke empat, mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan global di tingkat nasional sampai lokal.

Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah dengan memperkuat kebijakan pada komponen kapasitas (*capacity*), seperti penguatan kebijakan dan kelembagaan, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, pengelolaan tanggap darurat, kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat dan partisipasi

masyarakat.

c. Kualitas Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut: (i) Prinsip Kerakyatan, Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi; (ii) Prinsip Hikmat Kebijaksanaan, Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia, (iii) Prinsip Permusyawaratan, Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam, dan (iv) Prinsip Perwakilan, Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khoirul Muslimin.

Demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang efektif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Disatu sisi sulit mempunyai sistem demokrasi sekaligus pemerintahan yang efektif, tapi ini tergantung pada kepemimpinan di daerah dalam mengelola hasil pelaksanaan demokrasi ke dalam pemerintahan yang proposional dan profesional.

Beberapa hal yang dapat menurunkan kualitas demokrasi (1) korupsi dalam arti luas, bukan sekadar mengambil uang. Ini adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk tujuan privat dan kelompoknya yang campur aduk; (2) politik uang atau *money politics*. Seharusnya, penyampaian aspirasi rakyat berupa proses penjangkaran agar suara rakyat itu tercermin dalam kebijakan publik. Jika ada *money politics*, unsur ini akan hilang, dan (3) politisasi birokrasi, bahwa Pusat proses kebijakan negara dan pelaksanaannya adalah birokrasi. Jika birokrat turut bermain politik, seluruh bangsa akan berada dalam kesulitan. Jika ada tarik menarik antara kepentingan politik dan birokrasi, Ini sebabnya reformasi birokrasi adalah pekerjaan besar yang sangat penting dan harus berhasil.

Isu demokrasi menjadi penting, dikarenakan kepala daerah merupakan pejabat publik hasil pelaksanaan demokrasi (pemilukada) yang akan memimpin

pemerintahan, dimana pemerintahan tersebut idealnya menjadi regulator untuk menyediakan akses pelayanan kepada masyarakat. Apabila kepala daerah hasil dari pelaksanaan hasil demokrasi melaksanakan (i) korupsi, (ii) *money politics*, dan (iii) politisasi birokrasi maka kebijakan yang diambil sudah hampir pasti tidak mengarah kepada rakyat namun pada kepentingan pribadi dan/atau golongan. Akhirnya, demokrasi hanya sebatas ceremonial pergantian kekuasaan semata, bukan sebagai perwujudan keterwakilan kepentingan rakyat.

d. Pelestarian Budaya

Kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*). Kebudayaan mampu memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan sesuai kehendak kemanusiaannya. Kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa dinamis dalam kehidupannya. Keberadaan sistem budaya yang melingkupi masyarakat, mengandung makna kolektifitas yang saling memberi pengaruh terhadap tatanan sosial keberagaman secara totalitas, namun tidak dapat dipandang sebagai sistem yang berlaku secara abadi di masyarakat.

Keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya.

Isu strategis budaya sebagai tantangan pembangunan dalam kurun 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah bagaimana masyarakat mampu turut serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan asli daerah. Sedangkan, tugas pemerintah daerah adalah dengan melindungi dan membina kelestarian budaya lokal dimaksud. Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbantuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Budaya lokal (*local wisdom*) krui merupakan kekayaan budaya nasional yang perlu terus dijaga eksistensinya, Budaya krui berisi berbagai macam kearifan lokal (pengetahuan lokal) yang digunakan oleh masyarakat krui dalam menyelenggarakan kehidupannya.

Hingga tahun, 2022 belum ada perda tentang cagar budaya, dan baru terdapat 9 karya budaya yang didaftarkan sebagai cagar budaya non benda. Melihat pada data tersebut, tantangan bidang kebudayaan di Pesisir Barat cukup berat. Dimana dengan semakin pesatnya arus informasi dari luar semakin menyulitkan pelestarian budaya krui, terlebih pada generasi muda yang cenderung bersifat apatis pada budaya lokal (setidaknya dalam perilaku bermasyarakat).

Pelestarian budaya dalam hal ini adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan

kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan cara yang paling sederhana adalah dengan kembali membiasakan diri pada kearifan lokal krui dalam berinteraksi sosial.

e. Sosial Kemasyarakatan

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau lembaga masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau bersifat menghambat. Dalam masyarakat terdapat berbagai unsur kebudayaan mulai dari aspek moral, politik, pendidikan, agama, kebiasaan, ekonomi, juga rumah tangga. Idealnya unsur-unsur tersebut mampu berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Namun demikian, di kehidupan yang terdiri dari banyak kepentingan sehingga peluang terjadinya ketidakharmonisan antar unsur-unsur tersebut.

Permasalahan sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Beberapa contoh permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, kriminalitas, korupsi, konflik antar kelompok, narkoba, prostitusi, dan sebagainya.

Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada tahun tahun mendatang tentunya akan semakin beragam dan berkembang. Perubahan struktur masyarakat (ekonomi dan sosial), struktur ruang, hingga perubahan struktur politik di daerah diperkirakan akan menjadi penyebab utama permasalahan sosial kemasyarakatan. Isu sosial kemasyarakatan dapat diatasi melalui berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu-isu masalah sosial di masyarakat:

- i) Upaya preventif adalah usaha yang bersifat mencegah dan antisipatif agar permasalahan sosial tidak timbul dalam masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma sosial yang sesuai dengan kebudayaan dan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, bimbingan, penyuluhan, dan motivasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial.
- ii) Upaya koersif adalah penyelesaian permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman yang terkadang disertai dengan tindak kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Upaya koersif bertujuan untuk membentuk ketertiban dan keteraturan sosial. Upaya koersif biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku permasalahan sosial.
- iii) Upaya represif adalah suatu cara untuk menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, nilai, norma, dan adat istiadat. Sanksi yang diberikan antara lain seperti denda, hukuman penjara,

dan sanksi sosial langsung dari masyarakat. Upaya represif bersifat memulihkan kondisi masyarakat akibat permasalahan sosial yang sudah terjadi dalam masyarakat.

- iv) Upaya persuasif adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial tanpa kekerasan dan paksaan. Upaya persuasif bisa dilakukan melalui ajakan, saran, bimbingan, atau motivasi kepada individu atau kelompok untuk mematuhi dan menaati nilai dan norma yang berlaku. Upaya persuasif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
- v) Upaya rehabilitasi adalah suatu cara untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi individu atau kelompok yang terlibat dalam permasalahan sosial. Upaya rehabilitasi bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu atau kelompok. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan peran individu atau kelompok dalam masyarakat.
- vi) Upaya pengendalian permasalahan sosial gabungan adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan menggunakan kombinasi dari beberapa upaya di atas. Upaya pengendalian permasalahan sosial gabungan bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam permasalahan sosial, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, media massa, dan sebagainya. Upaya pengendalian permasalahan sosial gabungan bertujuan untuk mencapai solusi yang optimal dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

3.2.2. Isu Strategis Hasil KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dan/atau kebijakan, rencana, dan program dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berikut disajikan rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 untuk RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 berupa kebijakan, strategi dan rekomendasi. Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar merupakan wilayah konservasi dan bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat sulit dan memerlukan perlakuan khusus.

Isu Strategis berdasarkan Karakteristik Wilayah merupakan isu yang di analisa atas kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan aspek kondisi geografis seperti kerentanan bencana, kualitas lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan indikator lain sesuai konteks daerah serta aspek demografi baik kondisi kepadatan penduduk atau laju pertumbuhan penduduk. Berikut

adalah 6 (enam) Isu Strategis berdasarkan Karakteristik Wilayah Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Terdapat 4 (empat) desa yang belum memiliki akses infrastruktur layak di Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan daerah tertinggal;
- b. Tingginya resiko bencana longsor, banjir, dan gempa bumi;
- c. Degradasi lahan akibat alih fungsi lahan pertanian;
- d. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat;
- e. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan maupun industri.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Jasa Ekosistem/Lingkungan disusun pada tahun 2018, berdasarkan kinerja layanan jasa ekosistem pada dokumen tersebut didapatkan beberapa isu strategis Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana berikut:

- a. Rendahnya tingkat Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Rendahnya Jasa Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam;
- c. Kinerja layanan Jasa Pengaturan Pengolahan Dan Pemurnian Air Limbah masih sangat rentan dan didominasi pada kategori sedang;
- d. Layanan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup didominasi dengan kategori tinggi;
- e. Rendahnya kinerja Jasa Pengaturan Tata Aliran Air.

Adapun rekomendasi Isu Strategis Daerah berdasarkan pada KLHS RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Isu Strategis Hasil Analisis KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

TPB		Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			• Menciptakan produk unggulan daerah baik pariwisata maupun komoditi unggulan daerah lainnya;
TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			• Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; • Percepatan Pembangunan SDM

TPB		Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				Masyarakat yang berdaya saing;
TPB 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			• Perbaikan Lingkungan Hidup dan daya dukungnya; • Menjaga Kelestarian dan daya dukung Lingkungan;
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			• Fasilitas Umum yang tersebar merata; • Pembangunan simpul-simpul transportasi baru; • Pembangunan kota-kota baru; • Menciptakan produk unggulan daerah baik pariwisata maupun komoditi unggulan daerah lainnya; • Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan; • Peningkatan potensi unggulan dalam meningkatkan ekonomi;
TPB 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			• Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas;
TPB 13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			• Pelayanan Publik berdasarkan SPBE; • Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas ASN; • Transformasi Tata Kelola Birokrasi; • Peningkatan Kesejahteraan ASN.

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

3.2.3. Isu Strategis Pokok Pembangunan Daerah

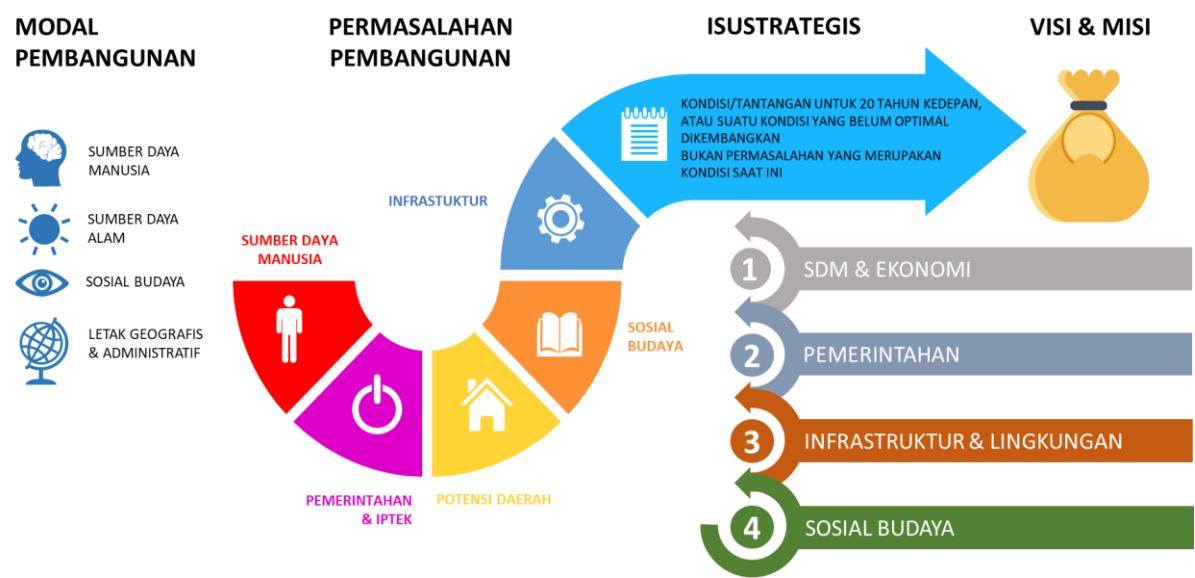
Berdasarkan pada penjabaran isu strategis di atas, didapatkan klasifikasi isu strategis daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah		Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	a	Komunikasi dan Informasi	▪ Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat dalam Alih Teknologi Komunikasi Informasi ▪ Kesiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana
2	Nasional	a	Data dan Informasi	▪ Kesiapan SDM Aparatur Pengelola ▪ Kebijakan Penerapan
		b	Organisasi Pemerintahan	▪ Kebijakan dan Regulasi yang Efektif dan Efisien
		c	Kapasitas Fiskal Daerah	▪ Pengelolaan Pendapatan Transfer ▪ Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
		d	Aksesibilitas dan Konektivitas Daerah	▪ Kesiapan Sarana dan Prasarana ▪ Kebijakan Konektivitas antar Kabupaten dan Provinsi ▪ Kesiapan Lahan Pembangunan
		e	Kualitas Demokrasi	▪ Kebijakan Pemilu dan Pemilukada ▪ Kualitas SDM Penyelenggara dan Peserta Pemilu dan Pemilukada
		f	Kualitas Lingkungan Hidup dan Daya Dukung Lingkungan	▪ Kebijakan penerapan pembangunan berkelanjutan secara konsisten
3	Daerah	a	Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk	▪ Kebijakan Pengendalian Penduduk ▪ Kesiapan Kapasitas SDM
		b	Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan	▪ Kualitas dan Kuantitas SDM ▪ Kesiapan Sarana dan Prasarana ▪ Kesiapan Lahan Pembangunan
		c	Kemiskinan	▪ Kebijakan Perlindungan Sosial ▪ Kesiapan Masyarakat untuk Berkembang dan

				Mandiri
		d	Penerapan Inovasi	▪ Kesiapan SDM Aparatur ▪ Kebijakan Penerapan Inovasi ▪ Kesiapan Sarana dan Prasarana
		e	Pengangguran dan Angkatan Kerja	▪ Kebijakan Penguatan Kapasitas SDM ▪ Kebijakan Pembangunan dengan Padat Karya
		f	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	▪ Kesiapan Sarana dan Prasarana Produksi, Distribusi dan Konsumsi ▪ Kebijakan Ramah Investasi ▪ Kebijakan Hilirisasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ▪ Kesiapan Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas Pariwisata ▪ Kebijakan Pembangunan Industri Menengah dan Besar ▪ Kebijakan Permodalan Industri Kecil dan Koperasi
		g	Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur	▪ Kesiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana ▪ Kesiapan Penyediaan Lahan Pembangunan
		h	Mitigasi dan Edukasi Bencana	▪ Kebijakan penerapan pembangunan berkelanjutan secara konsisten
		i	Pelestarian Budaya	▪ Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya ▪ Kesiapan Regenerasi Pelaku Budaya
		j	Sosial Kemasyarakatan	▪ Kebijakan Perda dan Perkada yang Berkualitas dan Mampu Menyelesaikan Masalah ▪ Kebijakan Penegakan Perda dan Perkada

Gambar 3.1. *Logframe* Modal Pembangunan, Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Berikutnya, setelah melakukan telaah dan analisis terhadap beberapa pengelompokan isu strategis daerah sebagaimana disajikan di atas, berikutnya adalah Isu strategis daerah untuk pembangunan jangka panjang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Pemetaan Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

TPB	Isu Kondisi LH	Isu Capaian TPB	Isu Karakteristik Wilayah	Isu DDDTLH	Total	Ranking Akhir	Faktor Penentu Keberhasilan
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	1	2	1	1	5	1	▪ Komitmen dan Kesiapan Pemerintah Daerah ▪ Kesiapan masyarakat untuk bekerja dan berdaya ▪ Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang hidup dan ekonomi ▪ Penyediaan sumber pendanaan untuk pembangunan
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1	2	2	1	6	2	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	2	1	3	2	8	3	

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	0	3	3	3	7	4	▪ Komitmen dan Kesiapan Pemerintah Daerah ▪ Kesiapan masyarakat untuk bekerja dan berdaya ▪ Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang hidup dan ekonomi ▪ Penyediaan sumber pendanaan untuk pembangunan
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	2	1	4	1	8	5	
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	3	2	2	9	6	

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung setelah berpisah dengan Kabupaten Lampung Barat. Dimana dalam konsep idealnya, pembentukannya tersebut bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun 20 (dua puluh) tahun kedepan dapat tercapai sebagai upaya untuk mencapai tujuan abadi bernegara dan berbangsa. Penyusunan visi dan misi tidak sebatas membayangkan sesuatu yang akan diraih semata, namun disusun setelah sebelumnya dilakukan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis daerah. Visi dan misi yang disajikan merupakan kesepakatan bersama antara pemangku dan pelaku pembangunan daerah, sehingga visi dan misi yang ditetapkan merupakan tanggung jawab

bersama seluruh pihak dalam proses pencapaiannya sesuai dengan perannya dalam pembangunan.

4.1. Visi

Visi merupakan cerminan dari kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang berisikan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat merupakan cerminan dari kondisi Kabupaten Pesisir Barat yang ingin dicapai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang disusun berdasarkan pada kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun pembangunan sampai tahun 2045 serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki daerah dan/atau memperhatikan potensi pengembangan daerah yang masih belum optimal. Yang dimaksud dengan potensi adalah ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi yang disusun juga harus mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037, maka visi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 adalah: **PESISIR BARAT MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN.**

Visi tersebut telah dirumuskan dengan memperhatikan, setidaknya: (i) menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan pada tahun 2045; (ii) menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis daerah yang perlu diselesaikan untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang; (iii) menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunggulan kompetitif daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang; dan (iv) menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan hingga tahun 2045.

Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat di atas, memiliki makna, sebagai berikut:

4.1.1. Pesisir Barat yang Maju

Pesisir Barat yang maju mengandung makna bahwa setelah Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, secara langsung dan tidak langsung akan menjadikan masyarakat Pesisir Barat menjadi sumber daya manusia yang kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Maju mengandung makna masyarakat yang telah sejahtera akan dapat terus bersaing dan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan transformasi kehidupan global, nasional dan regional. Masyarakat maju adalah masyarakat yang mandiri, masyarakat yang terus belajar, bersaing dan berkompetisi dalam seluruh aspek kehidupan.

Sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas. Dengan demikian, maka akan dapat memenangkan persaingan,

sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan rantai nilai (*value chain*) dari produk daerah dan sumber daya alam.

Maju juga ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi terkini sehingga dapat memastikan seluruh pelayanan dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan mudah, murah dan cepat. Pemerintahan yang maju dan adaptif juga perlu ditandai dengan kebijakan-kebijakan dan peran pemerintah sebagai kolaborator dalam pengembangan inovasi di masyarakat.

4.1.2. Pesisir Barat yang Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari tujuan kemerdekaan. Oleh karenanya, seluruh potensi wilayah yang berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pesisir Barat merupakan modal dasar pembangunan yang akan dikerahkan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemandirian juga tercermin, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, pembiayaan pembangunan yang semakin kokoh yang berasal dari kemampuan masyarakatnya, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Dengan semangat mandiri, masyarakat Pesisir Barat mampu mengubah potensi daerah menjadi kekuatan daerah, serta meminimalisir potensi bencana alam. Ketangguhan daerah dicirikan dengan kemandirian daerah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.3. Pesisir Barat Berkelanjutan

Pesisir Barat yang Berkelanjutan mengandung makna setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan selalu dilandasi dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitanya dengan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masa depan dan jangka panjang, tidak hanya kepentingan pembangunan praktis sesaat. Berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan dengan arif dan bijaksana.

Pembangunan berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sesaat. Pembangunan berkelanjutan juga identik dengan kemampuan dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan perkembangan jaman, mampu melihat peluang pengembangan wilayah dengan tetap mengedepankan kelestarian dari sumber daya alam serta kebudayaan.

Indikasi dari terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, ditandai dengan tercapainya Sasaran Visi berikut:

1. Pendapatan perkapita dalam kategori tinggi, dengan indikator :
 - a. Pendapatan per kapita (Juta Rupiah);
 - b. Pertumbuhan Ekonomi (Persen);
 - c. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI);
 - d. Kontribusi Sektor Industri dalam PDRB (Persen).
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan rendah, dengan indikator :
 - a. Persentase Penduduk Miskin (%);
 - b. Indeks gini (Indeks);
 - c. Persentase Desa Mandiri (%)
3. Daya saing daerah, dengan indikator :
 - a. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks);
 - b. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi (%);
4. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat, dengan indikator :
 - a. Indeks Modal Manusia;
 - b. Indeks Pembangunan Manusia
5. Penurunan Intensitas Emisi GRK, dengan indikator :
 - a. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO₂e);
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat di atas telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Penyeragaman Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Pendapatan perkapita dalam kategori tinggi	a. Pendapat an per Kapita (Juta Rupiah)	52,14 – 52,46	328,03-384,39	Pendapatan perkapita dalam kategori tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	33,82-34,20	212,95-258,38
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		b. Pertumbu han Ekonomi (Persen)	4,90-5,30	5,52-6,97		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,58 - 3,88	6,0
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	23,43	65,16		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	23,43	65,16
						d. Kontribusi sektor Industri dalam PDRB(%)	18,50 – 19,40	26 - 28		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB(%)	3,92	12,0 – 12,8
2	Kemiskinan menurun dan	a. Tingkat Kemiskin	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasa n	a. Tingkat Kemiskin	10,00-9,50	2,5-2,00	Pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk	12,18 -	5,0 – 4,6

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ketimpangan berkurang	an (%)			kemiskinan dan ketimpangan rendah	an (%)	(2023)		dan ketimpangan rendah	Miskin (%)	12,43	
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Indeks gini (Indeks)	0, 321- 0,318	0,256 – 0,266		Indeks gini (Indeks)	0,310- 0,312	0,220 – 0,260
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Persentase Desa Mandiri (%)	10,00	31,00 – 35,00		Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	9,483
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02	3,76-4,0	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,42 - 2,52	3,2-3,54
						Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,17	2,50		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (persen)	1,28 - 1,30	1,88 - 1,90

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Kualitas sumber daya manusia yang meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54	0,68 – 0,70	Kualitas sumber daya manusia yang meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54	0,68 – 0,70
						Indeks Pembangunan Manusia	73,00	79,00 – 80,00		Indeks Pembangunan Manusia	71,2	77,2 – 78,0
5	Intensitas emisi GRK menurun	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,79	93,17	Penurunan intensitas emisi GRK	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	105,990.58	220,592.01
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	78,16		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,45	81,50

Tabel 4.2 Penyeragaman Indikator dan Target Sasaran Visi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”									Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat: Maju, Mandiri dan Berkelanjutan						
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target				Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045				Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82-95,94	158,77-176,23	267,5-296,9	328,03 - 384,39	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	32,36	33,82 - 34,20	58,55 - 67, 26	97,06 - 135,29	163,22 - 190,77	212,95 - 258,38
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-6,97	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,42	3,58 - 3,88	4,2 - 4,5	4,5-5,5	5,5	6
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26-28	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	3,76	3,92	4,08 - 5,56	5,74 - 7,65	8,12 - 11,34	12,0 - 12,8
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*	Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,49	12,18 - 12,43	9,50 - 10,05	8,18 - 9,43	6,50 - 7,05	5,0 - 4,6
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,290-0,310	0,275-0,280	0,270-0,274	0,256 - 0,266	Indeks Gini	0,315	0,310 - 0,312	0,305 - 0,310	0,286 - 0,290	0,265 - 0,270	0,220 - 0,260

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”									Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat: Maju, Mandiri dan Berkelanjutan						
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target				Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045				Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 - 15,13	Persentase Desa Mandiri (%)	2,59 (IDM)	0,00	0,862	2,586	5,172	9,483
3.	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00	IDSD	-	2,42 - 2,52	2,70 - 2,80	2,90 - 3,00	3,10 - 3,20	3,20 - 3,54
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50	Kontribusi PDRB Kabupaten	1,28	1,28 - 1,30	1,30 - 1,35	1,36 - 1,56	1,57 - 1,87	1,88 - 1,90
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan	Kualitas Sumber Daya Manusia													
		- IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 – 80,00	IPM	70,40	71,2	71,21 - 73,70	73,71 - 75,00	75,01 - 77,10	77,2 - 78,0
		- IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70	IMM	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”									Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat: Maju, Mandiri dan Berkelanjutan						
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target				Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045				Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (ton CO2e)	n/a	105,990.58	131,076 .70	158,951 .26	185,117 .68	220,592 .01
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,17	76,45	77,46	78,72	79,99	81,50

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai tahun 2045.

Dalam perumusan misi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan dengan menganalisis faktor-faktor lingkungan strategis (eksternal dan internal) yang dinilai berpengaruh serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi-misi RPJPD tersebut disusun dalam upaya untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) memajukan daerah; (iii) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (iv) menyelesaikan persoalan daerah; (v) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional; dan (vi) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Pesisir Barat ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru, karena langkah reformasi saja dirasa tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Pesisir Barat juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh seperti halnya yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Barat 2045 “Maju, Mandiri dan Berkelanjutan” akan ditempuh melalui 8 Misi (Agenda) Pembangunan, yaitu : 1) Transformasi Sosial; 2) Transfromasi Ekonomi; dan 3) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 agenda Landasan Transformasi, yaitu 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; dan 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta 8) Kestinambungan Pembangunan.

Dengan memperhatikan visi pembangunan Pesisir Barat Mandiri, Maju dan Berkelanjutan diformulasikan misi pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut berikut dengan penjelasannya:

Transformasi Daerah :

4.2.1. Misi ke 1, Transformasi Sosial

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan *competitiveness human capital* dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai adanya kemajuan teknologi yang disruptif. Untuk dapat *survive*, unggul dan sukses dimasa depan, sumber daya manusia di Pesisir Barat harus sehat, berpengetahuan dan berketerampilan serta berkarakter positif yang kuat.

Akses dan kualitas terhadap kesehatan dan pendidikan bagi penduduk akan semakin diperluas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah, tanpa memandang latar belakang status sosial maupun tingkat ekonomi. Penduduk yang kurang mampu secara ekonomi ataupun memiliki keterbatasan fisik dan mental, perlu dilindungi hak-haknya sebagai warganegara untu dapat mengenyam pendidikan dan menerima layanan kesehatan. Selanjutnya penduduk yang sehat dan berilmu, harus dapat mengaktualisasikan kapasitas SDM-nya dalam aktifitas yang produktif diberbagai bidang pembangunan, baik secara individu maupun komunal, sehingga dapat menempatkan harkat dan martabat manusia menjadi lebih bermakna, serta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam peningkatan taraf kesejahteraan keluarga, bangsa dan negara.

4.2.2. Misi ke 2, Transformasi Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi; membangun ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antardaerah; meningkatkan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan; serta mewujudkan pembangunan ekonomi antarwilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan.

Misi ini juga merupakan upaya penguatan ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata dan berkelanjutan. Ekonomi berbasis agro terus diperkuat, lalu ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru dalam bentuk PMA dan PMDN harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Tumbuhnya investasi harus berdampingan dengan kultur sosial dan menjunjung hak asasi manusia. Kebijakan pemerataan ekonomi harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin, serta tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

4.2.3. Misi ke 3, Transformasi Tata Kelola

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel. Juga merupakan upaya dari

Pemerintah Daerah menuju Pesisir Barat yang Maju. Dimana pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator dan kolaborator harus mampu menjadi sori teladan bagi masyarakat. Pembangunan tata kelola adalah pelaksanaan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk pelaksanaan pelayanan publik yang mudah & murah, pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas serta penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasinya. Pemerintahan daerah harus mampu berinovasi yang mempermudah kinerja dan meningkatkan produktivitas ASN. Transformasi tata kelola diarahkan kepada tata kelola regulasi dan kelembagaan, SDM aparatur serta pelayanan publik.

Landasan Transformasi Daerah :

4.2.4. Misi ke 4, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang memihak kepada masyarakat dan menghadirkan rasa adil dan aman bagi semua pihak. Dengan didukung keadilan dan keamanan bagi masyarakat, dapat tercipta ketentraman, ketertiban umum serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menciptakan stabilitas daerah.

4.2.5. Misi ke 5, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Penciptaan harmonisasi dan kolaborasi atau artikulasi seluruh elemen agama, budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sosial bermasyarakat untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pemerintah wajib menjamin keberlanjutan kebudayaan daerah untuk menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, dengan tetap membuka diri dari perkembangan kebudayaan luar.

Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender dengan tetap memperhatikan kualitas dan pemanfaatan ekologi juga menjadi perhatian penting dalam menuju visi pembangunan.

Kerangka Implementasi Transformasi Daerah :

4.2.6. Misi ke 6, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah. Fokus pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan melalui berbagai pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

4.2.7. Misi ke 7, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berkualitas menjadi kebutuhan setiap masyarakat dengan tetap

memperhatikan dan menjaga lingkungan.

4.2.8. Misi ke 8, Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antarperiode dan antarkenjang pemerintahan serta terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan yang mencirikan kemandirian.

Perwujudan Visi Pesisir Barat 2045 membutuhkan partisipasi semua pelaku pembangunan. Oleh sebab itu, RPJPD harus menjadi acuan oleh lembaga-lembaga yang mempresentasikan negara, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

4.3. Upaya Super Prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioitas (*game changer*) pembangunan daerah tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain :

No	Transformasi Daerah	Upaya Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) Daerah	
A	Transfromasi Ekonomi	1.	Industrilisasi: hilirisasi industri berbasis SDA komoditas unggulan, indutri padat karya terampil didorong oleh riset dan inovasi, serta berorientasi ekspor
		2.	Percepatan transformasi digital dan talenta digital
		3.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)
B	Transformasi Sosial	4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
		5.	Pemenuhan pelayanan kesehatan primer berstandar, penuntas <i>stunting</i> , pengendalian penyakit menular, tidak menular dan <i>new emerging disease</i>
		6.	Penanggulangan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
C	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi pelayanan publik berbasis satu data
		8.	Penerapan sistem merit pada birokrasi pemerintahan
D	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
		10.	Integrasi infrasturktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah dan antar pulau
		11.	Percepatan aktivitas ekonomi pada kawasan industri

		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
--	--	-----	--

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan dalam RPJPD menjabarkan rangkaian tahapan ataupun langkah langkah sistematis perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui pentahapan RPJMD. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan juga sebagai alat untuk membedah indikator capaian masing-masing sasaran. Sekaligus memandu rentang waktu penggunaan strategi dijalankan dalam kurun waktu 2025-2045 dalam upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan harus memiliki keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan RPJMD dilaksanakan pada tiap 5 (lima) tahunan selama 4 (empat) periodesasi. Untuk itu dalam penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah diperlukan pendekatan yang terencana, terpadu dan terukur, antara lain: (i) Konsistensi menjaga arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dalam 4 (empat) periodesasi RPJMD; (ii) Menyusun prioritas pentahapan RPJPD dengan memperhatikan perkembangan daerah; (iii) Disusun secara komprehensif, simultan dan berkelanjutan, dan (iv) Pemenuhan tujuan akhir pembangunan berkelanjutan.

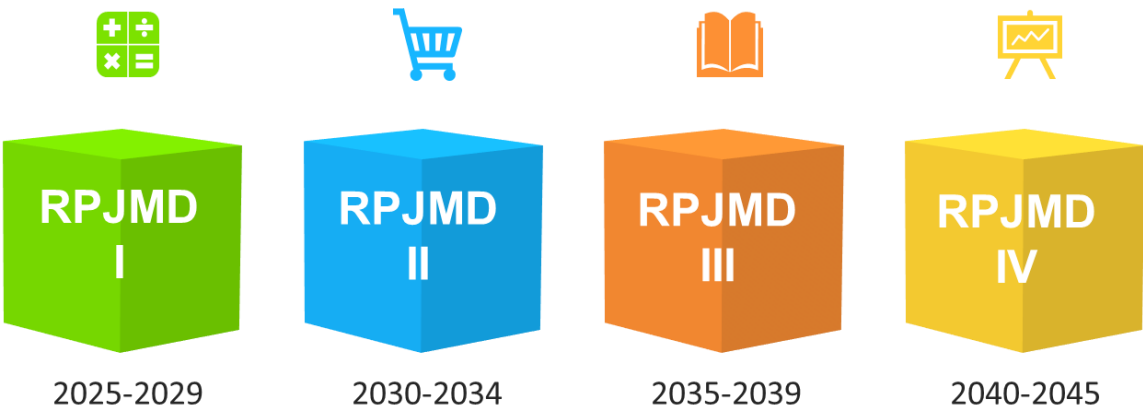
5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Penekanan fokus atau prioritas dalam setiap tahapan/periode dapat saja berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode RPJMD ke periode RPJMD lainnya.

Arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan mengarahkan rumusan sasaran pokok untuk lebih terarah dalam mencapai sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus dalam setiap pentahapan berbeda-beda, tetapi berkesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu periode RPJMD ke periode RPJMD berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan RPJPD dapat dijalankan dalam 1 (satu) periode RPJMD, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu periode RPJMD. Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) pentahapan RPJMD dalam kerangka besar arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

Gambar 5.1. Pentahapan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045



Gambaran keberhasilan yang hendak dicapai tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1. Pentahapan dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

4 Tahapan Pembangunan RPJPD			
Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan	Percepatan Transformasi Pembangunan	Eksistensi Daerah Skala Nasional	Perwujudan Visi Pembangunan

Berikut ini dijelaskan pentahapan arah kebijakan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Pada periode RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat pondasi transformasi pembangunan daerah. Penguatan pondasi ini penting karena selama pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 (periode efektif 2016-2025) pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat masih cenderung stagnan walaupun telah banyak perbaikan di segala sektor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Pesisir Barat masuk kedalam daftar daerah tertinggal yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang berada di Provinsi Lampung.

Tentunya pada periode RPJMD Tahun 2025-2029, Kabupaten Pesisir Barat diharapkan sudah keluar dari status daerah tertinggal, sehingga fondasi yang

dimaksud pada pentahapan ke I ini adalah bagaimana daerah mempersiapkan seluruh bidang pembangunan, khususnya (i) Perekonomian Masyarakat; (ii) Sumber Daya Manusia; (iii) Sarana Dan Prasarana; (iv) Kemampuan Keuangan Daerah; (v) Aksesibilitas; dan (vi) Karakteristik khusus Daerah untuk dapat mempercepat tujuan pembangunan daerah.

Penguatan fondasi daerah pada agenda transformasi sosial utamanya dilakukan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial secara penuh. Pada agenda transformasi ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi; penguatan produktivitas tenaga kerja; dan event pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat menjadi rangkaian agenda Kementerian/nasional. Sedangkan pada agenda transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan digital; penataan jabatan fungsional; dan kualitas ASN berbasis merit. Penguatan ketangguhan keamanan dan kemantapan ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan adalah arah kebijakan pada agenda keamanan tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Serta fokus pada agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Tahap ke II RPJPD untuk periode RPJMD Tahun 2030-2034, pembangunan daerah lima tahunan diarahkan untuk percepatan transformasi pembangunan dengan memperbaiki kekurangan yang mungkin masih ada dari pelaksanaan pembangunan Tahap I RPJPD. Dengan telah terciptanya pondasi dan gambaran pembangunan yang lebih nyata, pembangunan pada tahap II RPJPD fokus pada percepatan transformasi pembangunan menuju daerah maju. Pada agenda transformasi sosial dititikberatkan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Untuk agenda transformasi ekonomi diarahkan pada hilirisasi SDA khususnya pada sektor pertanian dan perikanan; dan percepatan penguatan promosi pariwisata. Fokus agenda transformasi tata kelola adalah pemenuhan reformasi birokrasi secara utuh; pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi; dan peningkatan kesejahteraan ASN. Pada agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada percepatan pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan. Dan fokus pada ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Setelah melalui fase percepatan pembangunan menuju daerah maju berdasarkan hasil-hasil pembangunan daerah pada tahap I dan II RPJPD. Pada periode Tahap III (2035-2039), daerah diharapkan telah ditahap stabil dan keberadaannya telah dikenal pada skala nasional. Fokus transformasi sosial pada

penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada pemantapan kemandirian daerah; eksistensi Pesisir Barat di Indonesia dan internasional; dan pariwisata maju dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Di agenda transformasi tata kelola diarahkan pada pemerintahan yang efektif; dan ASN yang produktif dan kompetitif. Pada agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro dan eksistensinya diakui di Indonesia. Sedangkan arah kebijakan pada agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada periode RPJMD Tahun 2040-2045 diarahkan pada Perwujudan Visi Pembangunan Daerah. Pada akhir tahapan ke IV ini diasumsikan daerah telah mampu mencapai kehidupan yang mandiri, maju dan berkelanjutan, dimana fokus utama pada transformasi sosial adalah SDM Pesisir Barat yang unggul. Titik berat transformasi ekonomi untuk perwujudan masyarakat maju dan mandiri; dan masyarakat sipil yang produktif dan unggul. Di agenda transformasi tata kelola diarahkan pada regulasi dan tata kelola yang berintegritas; pemerintahan yang adaptif dan taat asas; serta keberlanjutan ASN yang inovatif. Arah kebijakan di agenda keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah Pesisir Barat yang aman, nyaman, berdemokrasi substansial dan berpengaruh di Indonesia. Dan mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan adalah fokus pada agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Lebih lanjut, hubungan antara pentahapan pembangunan daerah serta arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025-2045 pada masing-masing misi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Arah Kebijakan dan Tahapan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan	Percepatan Transformasi Pembangunan	Eksistensi Daerah Skala Nasional	Perwujudan Visi Pembangunan
1	Misi 1 Transformasi Sosial	▪ Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	▪ Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	▪ Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	▪ SDM Pesisir Barat yang Unggul
IE. 1	Kesehatan untuk semua	▪ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan ▪ Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan universal ▪ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan ▪ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	▪ Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan ▪ Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan ▪ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	▪ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ▪ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	▪ Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> ▪ Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
IE 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	▪ Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah ▪ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) ▪ Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	▪ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) ▪ Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi ▪ Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah ▪ Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	▪ Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik ▪ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan ▪ Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		▪ Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan ▪ Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	▪ Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan ▪ Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ▪ Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK ▪ Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)		
IE 3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	▪ Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan ▪ Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan	▪ Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat ▪ Pengembangan/	▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	▪ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan	peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand ▪ Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat ▪ Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat		sasaran, tepat guna, dan efisien
		▪ Percepatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi,	▪ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi,	▪ Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi,	▪ Akses infrastruktur pelayanan dasar yang handal (antara lain air baku/air minum, sanitasi,

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion ■ Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat ■ Percepatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi ■ Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah ■ Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan,	rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion ■ Peningkatan penyediaan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat ■ Peningkatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi ■ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah ■ Percepatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian	rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion ■ Perluasan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat ■ Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi ■ Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah ■ Perluasan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan	rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion ■ Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, ■ Ketersediaan layanan Air Minum dan Sanitasi yang handal dan Memadai ■ Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup melalui akses yg memadai dan terjangkau pada rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	wilayah Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan dengan pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
2	Misi 2 Transformasi Ekonomi	- Peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi - Penguatan produktivitas tenaga kerja - Event pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat menjadi rangkaian agenda Kementerian/nasional	- Hilirisasi SDA khususnya pada sektor pertanian dan perikanan - Percepatan penguatan promosi pariwisata	- Pemantapan kemandirian daerah - Eksistensi Pesisir Barat di Indonesia dan internasional - Pariwisata maju dan pertumbuhan ekonomi tinggi	- Perwujudan masyarakat maju dan mandiri - Masyarakat sipil yang produktif dan unggul

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
IE 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	▪ Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata ▪ Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ▪ Penguatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Penguatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	▪ Peningkatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar ▪ Peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pembangunan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ▪ Peningkatan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Peningkatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan	▪ Percepatan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar ▪ Percepatan kualitas produksi dan daya saing produk pertanian dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity serta pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung secara masif ▪ Percepatan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global.	▪ Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global ▪ Perwujudan Ketahanan pangan dan kualitas produk pertanian yang tinggi dari bibit dan varietas unggul secara merata, dan bernilai tinggi dengan menciptakan permintaan pasar global. ▪ Perwujudan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global ▪ Perwujudan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		▪ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. ▪ Penguatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Penguatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian ▪ Penguatan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah ▪ Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian. ▪ Peningkatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Peningkatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian ▪ Peningkatan implementasi ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah ▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk	▪ Percepatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Percepatan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. ▪ Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Percepatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian ▪ Percepatan ekonomi biru wilayah dengan	ekonomis. ▪ Perwujudan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. ▪ Perwujudan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Perwujudan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian ▪ Perwujudan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global. ▪ Perwujudan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak ▪ Penguatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Penguatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Penguatan penyediaan instrumen pengendali	perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Peningkatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Peningkatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas	peningkatan peran pada pasar global. ▪ Percepatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Percepatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Percepatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Perwujudan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Perwujudan penyediaan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk ▪ Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan	perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Peningkatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk ▪ Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi	▪ Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan ▪ Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Percepatan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif ▪ Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan	terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Perwujudan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif ▪ Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca,

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk	petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi	lainnya). ▪ Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak	dan lainnya). ▪ Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Penguatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif ▪ Penguatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan	guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan	nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Perwujudan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			insentif dan disinsentif ▪ Peningkatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ▪ Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ▪ Perwujudan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
IE 5.	Penerapan Ekonomi Hijau	▪ Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan	▪ Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan	▪ Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah ▪ Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan	▪ Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi ▪ Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, dengan layanan Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Penguatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Peningkatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan zero solid waste city yang mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
IE 6.	Transformasi Digital	▪ Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi	▪ Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ▪ Peningkatan akses	▪ Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ▪ Pemantapan akses informasi bagi pelaku	▪ Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat ▪ Perwujudan teknologi terapan dengan akses

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan ▪ Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam	informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan ▪ Perluasan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan	ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan ▪ Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu	informasi yang meningkatkan produktivitas ▪ Perwujudan transformasi digital yaitu: (i) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan digitalisasi di sektor strategis (iii) masyarakat dengan literasi digital tinggi, dengan kemampuan SDM digital atau digital skill tinggi.

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya perluasan literasi digital bagi masyarakat, meningkatkan keamanan informasi dan siber serta peningkatan SDM digital berkualitas atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
IE 7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	▪ Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal ▪ Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar	▪ Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal ▪ Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	▪ Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal ▪ Percepatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global.	▪ Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global ▪ Perwujudan komoditas

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		eksport/global. ▪ Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	▪ Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah ▪ Peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	▪ Percepatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah ▪ Percepatan dukungan tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global ▪ Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah ▪ Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
IE 8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	▪ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi,	▪ Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui	▪ Percepatan penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi,	▪ Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Ekonomi	akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan	peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Peningkatan akses	akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan	dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan ▪ Perwujudan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		perkotaan. ▪ Penguatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Mendorong penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative	infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Mendorong peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan pembangunan ekonomi	perkotaan. ▪ Percepatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan	perkotaan yang merata dan handal ▪ Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan yang berkualitas. ▪ Mendorong perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan pembangunan ekonomi

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration ▪ Penguatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. ▪ Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ▪ Mendorong Penguatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada	antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration ▪ Peningkatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. ▪ Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan	prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration ▪ Percepatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan ▪ Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. ▪ Percepatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Percepatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ▪ Mendorong Percepatan pembangunan Jalan Tol	antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration ▪ Perwujudan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. ▪ Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Perwujudan pengelolaan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-GedongtaanPringsewuKotaagung-LiwaKrui; Terbanggi Besar-KotabumiBlambangan Umpu; dan Metro - Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpan g Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung ▪ Penguatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara. ▪ Mendorong Pengutana penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan	desa. ▪ Mendorong Peningkatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-GedongtaanPringsewuKotaagung-LiwaKrui;Terbanggi Besar-KotabumiBlambangan Umpu; dan MetroSukadana Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung ▪ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara	Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:BandarlampungGedongtaanPringsewuKotaagungLiwa-Krui; Terbanggi BesarKotabumiBlambangan Umpu; dan Metro-Sukadana Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simp ang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung ▪ Percepatan sarana dan prasarana bandar udara ▪ Mendorong Percepatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang	jalan daerah dan jalan desa yang handal ▪ Perwujudan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: BandarlampungGedongtaanPringsewuKotaagung-LiwaKrui; Terbanggi Besar-KotabumiBlambangan Umpu; dan MetroSukadana. Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung ▪ Perwujudan sarana dan prasarana bandar udara

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan ▪ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global ▪ Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ▪ Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	▪ Mendorong Peningkatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan ▪ Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global ▪ Peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, ▪ Percepatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global ▪ Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ▪ Percepatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi	▪ Perwujudan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan. ▪ Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global ▪ Perwujudan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		▪ Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Penguatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia ThailandGrowth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan	▪ Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth	komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Percepatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia ThailandGrowth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses	pajak karbon. ▪ Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Perwujudan rantai nilai global melalui skemaskema kerjasama

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Penguatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Penguatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan	Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Peningkatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Peningkatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik	pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Percepatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Percepatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan;	regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Perwujudan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Perwujudan produktivitas BUMD. ▪ Perwujudan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor	dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi)	(iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian	dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
3	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	▪ Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital ▪ Penataan Jabatan Fungsional	▪ Pemenuhan reformasi birokrasi secara utuh ▪ Pelaksanaan pemerintahan berbasis	▪ Pemerintahan yang efektif ▪ ASN yang produktif dan kompetitif	▪ Regulasi dan tata kelola yang berintegritas ▪ Pemerintahan yang adaptif dan taat asas

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		▪ Kualitas ASN berbasis merit	teknologi informasi ▪ Peningkatan kesejahteraan ASN		▪ Keberlanjutan ASN yang inovatif
IE 9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	▪ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah ▪ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	▪ Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat ▪ Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. ▪ Penguatan integritas partai politik	▪ Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah ▪ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi ▪ Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	▪ Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
4	Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	▪ Memperkuat ketangguhan keamanan dan kemantapan ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	▪ Percepatan pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	▪ Pemantapan keamanan, stabilitas ekonomi makro dan eksistensinya diakui di Indonesia	▪ Pesisir Barat yang aman, nyaman, berdemokrasi substansial dan berpengaruh di Indonesia
IE 10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah	▪ Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	▪ Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	▪ Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	▪ • Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
IE 11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	▪ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan	▪ Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan	▪ Percepatan kapasitas pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan	▪ Perwujudan pusatpusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ▪ Penguatan pengendalian inflasi daerah.	kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ▪ Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	memperhatikan keberlanjutan lingkungan ▪ Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ▪ Percepatan pengendalian inflasi daerah.	▪ Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ▪ Perwujudan pengendalian inflasi daerah.

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
IE 12.	Daya Saing Daerah	▪ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ▪ Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. ▪ Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada ▪ penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi ▪ Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkal an/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya	▪ Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ▪ Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan ▪ Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	▪ Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal ▪ Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan ▪ Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	▪ Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah ▪ Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja ▪ Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
5	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan
IE 13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila - Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila - Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	- Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila - Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
IE 14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan	- Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
IE 15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	- Penguatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan - Penguatan upaya pembangunan	- Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan - peningkatan upaya pembangunan	- Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan - Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap	- Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan - Perwujudan infrastruktur

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan ▪ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ▪ Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ▪ Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan ▪ Pengimplementasi an pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis . ▪ Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ▪ Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ▪ Pengembangan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ▪ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ▪ Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ▪ Pemantapan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan ▪ Perwujudan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami ▪ Perwujudan hutan lestari melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi ▪ Perwujudan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
IE 16.	Berketahanan Energi, Air, dan	▪ Mendorong penguatan konsumsi listrik per	▪ Mendorong Peningkatan Penuntasan dalam	▪ Mendorong Percepatan Konsumsi Listrik per	▪ Perwujudan Konsumsi Listrik yang handal

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	Kemandirian Pangan	Kapita ▪ Mendorong Penguatan intensitas energi/primer ▪ Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan ▪ Penguatan kapasitas air baku ▪ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Penguatan diversifikasi pangan ▪ Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	pemenuhan konsumsi listrik per Kapita ▪ Mendorong Peningkatan pemenuhan intensitas energi/Primer ▪ Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku ▪ Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Peningkatan diversifikasi pangan ▪ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis	Kapita ▪ Mendorong Percepatan intensitas energi/primer ▪ Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan ▪ Percepatan kapasitas air baku ▪ Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Percepatan diversifikasi pangan ▪ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis	▪ Intensitas energi/primer yang handal ▪ Konsumsi Pangan yang handal ▪ Kapasitas air baku yang handal ▪ Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal ▪ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Perwujudan diversifikasi pangan ▪ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			sumber daya alam dan kearifan lokal	sumber daya alam dan kearifan lokal	
IE 17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	▪ Penguatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana ▪ Penguatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim; ▪ Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ▪ Pengelolaan risiko bencana dengan	▪ Peningkatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ▪ Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ▪ Peningkatan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ▪ Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan	▪ Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ▪ Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ▪ Pemantapan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ▪ Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan	▪ Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ▪ Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ▪ Perwujudan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ▪ Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan

Visi Pesisir Barat Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan					
No	Misi dan Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air

5.2. Sasaran Pokok

Arah Pembangunan Daerah yang dituangkan sebagai Sasaran Pokok pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan nasional.

Suatu sasaran pokok pembangunan RPJPD pada dasarnya adalah kuantifikasi dari visi dan misi pembangunan pada akhir periode RPJPD. Sasaran menjelaskan tentang target dari capaian pembangunan jangka panjang daerah pada akhir periode RPJPD atau selama 20 (dua puluh) tahun.

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan.

Sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat merupakan proses kontinu yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yaitu berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas setidaknya harus memiliki: (i) data, (ii) kinerja, (iii) kerja, (iv) indikator, (v) target, dan (vi) *input*. Sasaran pokok akan menjelaskan bagaimana kinerja yang akan dicapai oleh RPJPD Tahun 2025-2045. Bahwa sasaran pokok, indikator kinerja dan target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 disusun secara bersinergi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 sebagai satu kesatuan SPPN dalam rangka daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional.

Sasaran pokok RPJPD dan indikator kinerja berjangka waktu untuk waktu 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu nomenklatur/diksi pada sasaran pokok dipilih yang bersifat besar dan tidak kaku sementara untuk indikator kinerjanya dipilih yang bersifat besar atau makro dan mampu menggambarkan gambaran besar pencapaian kinerja (lintas urusan pemerintahan daerah). Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 beserta dengan indikator sasaran yang hendak dicapai serta hubungannya dengan 17 (tujuh belas) arah tujuan RPJPN (kecuali arah tujuan 12, Ketangguhan Diplomasi yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah) pada setiap akhir Pentahapan RPJMD disajikan sebagai berikut:

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Berikut arah pembangunan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2025-2045 :

Tabel 5.3 Arah Pembangunan Daerah

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah
	Stabilitas Ekonomi Makro
	Daya Saing Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial							Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.1.	Kesehatan untuk semua											
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	80,00-82,00	Usia Harapan Hidup	73,75	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	81,20 - 82,20
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:											
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	100-105	70-75	40-45	10-15	AKI (Kasus)	5	4	3	2	2
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,20	9,00-10,50	7,50-8,90	5,00-6,00	3,00 - 4,00	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,7	12,5 - 11,2	9,7 - 8,6	7 - 6	5 - 4
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	71,00	72,00-80,00	81,00-86,00	87,00-92,00	93,00 - 95,00	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	41	43-48	56-68	72-77	90

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial							Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,91*	97,18	97,45	97,72	98,00*	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,0	92,0	94,0	95,0	97,0
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-97,00	98 - 100	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata											
5)	Hasil pembelajaran											
a.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :											
	(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33	Literasi Membaca	13,33 – 14,00	15,00 – 25,00	26,00 – 35,00	36,00-45,00	46,00 – 60,00

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial							Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	(ii) Numerasi	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67	Numerasi	0,00 – 2,00	5-15	20-30	31-40	41-55
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :											
	(i) Literasi Membaca	30,75 - 32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61	Literasi Membaca	30,76 – 32,00	35,00 - 42,00	44,00 - 48,00	53,00 - 62,00	63,00 - 65,00
	(ii) Numerasi	20,35 - 22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49	Numerasi	20,6 – 22,6	26,0 – 32,0	33,0 – 38,0	39,0 – 44,0	45,0 – 51,6
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,72 - 8,78	8,80 - 8,90	9,05 - 9,25	9,50 - 9,80	10,10 - 10,80
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,25	12,26 - 12,60	12,61 - 12,80	12,81 - 13,20	13,21 - 14,10
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi	7,43	7,5	7,6	7,8	8,0

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial							Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
							Pendidikan Tinggi (%)					
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42*	75,00	77,00	79,00	80,00*	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	57,23	59,4	62,0	66,0	70,00
IE.3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif											
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00	Tingkat Kemiskinan	12,18 - 12,43	9,50 - 10,05	8,18 - 9,43	6,50 - 7,05	5,0 - 4,6
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan (%)	26,69	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 -80

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-1 : Transformasi Sosial							Misi ke-1 : Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi											
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,50 - 19,40	20,66 – 19,58	22,60 – 22,36	24,53 – 25,14	26,47 – 28,00	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,76	4,2 - 5,5	6,4 - 7,6	8,0 -10,0	12,0-12,8
12)	Pengembangan Pariwisata											
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	1,91	2,2	2,49	2,77	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,16	3,32	4,5	5,5	6,5
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,90	6,09	7,31	8,53	9,75	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	1000	2000	4000	8000	16000
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	4,2 - 5,5	6,4 - 7,6	8,0 -10,0	12,0-12,8
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD											

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Provinsi (%)	9,10	9,70	10,40	11,01	11,61	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Kabupaten (%)	NA	9,70	10,40	11,01	11,61
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,36	3,27	4,18	5,09	6,0	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	1520	1570	1650	1750	1800
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	1,32	2,02	2,83	3,42	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Program Koperasi	21,20	21,65	22,04	23,68	24,56
15)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,00	2,83 -3,6	2,39-3,2	2,40-2,80	1,36-2,38	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,47	3,19	2,94	2,70	2,49

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040- 2045
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*	...	...	...	...	...	...
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82*	61,58	64,35	67,13	69,9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72,35	75,24	78,25	81,38	84,64
17)	Tingkat penguasaan IPTEK											
a.	Index Inovasi Daerah	57	59-61	61-62	63-65	66-68	Index Inovasi Daerah	44,4	47,95	51,79	55,93	60,41
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau											
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau											
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06	69,92	70,79	74,65
							Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (ton CO2e)	105.990,58	131.076,70	158.951,26	185.117,68	220.592,0 1
IE.6.	Transformasi Digital											

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global											
20)	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,51	32,50-33,75	33,75-34,00	34,00-35,25	35,25-36,5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	22,59	22,88	23,22	23,57	23,92
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00-23,00	23,00-24,50	24,50-26,00	26,50-28,00	28,5-30,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	3,28	3,58	3,90	4,25	4,63
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi											
23)	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan											

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi							Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi (%)	18,35	18,35 - 19,00	19,00 - 20,00	20,00 - 21,00	21,00 - 22,00	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	1,28-1,30	1.30 – 1.35	1.36-1,56	1,57 - 1,87	1.88- 1.90
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,922	90,685	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,92	90,68	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 -15,13	Persentase Desa Mandiri	0,00	0,862	2,586	5,172	9,483

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola							Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif											
24)	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100*	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100*
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	4,30	4,50	4,80	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,32	2,67	3,07	3,53	4,06
26)	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,60	4,70	4,80	5,00	Indeks Pelayanan Publik	3,01	3,51	4,01	4,51	5,00
27)	Anti Korupsi											
a.	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	71,86	78,5 6	81,56	85,56	86,56	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	73	75,56	80,56	85,56	86,56

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah											
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	115	105	98	85	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	115	105	98	85
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	70	78	85	93	100	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	100	100	100	100	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	65	70	75	80	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	65	70	75	80
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7 **	75,7	80,7	85,7	89,08	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	71,7 **	75,7	80,7	85,7	89,08

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00 (tinggi)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36 - 82,61	83 - 85	85 - 86	86 -87	87 - 90
IE.11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah											
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,10-1,3	1,45	1,6	1,75	1,9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,229	0,45	0,75	1,1	1,4
32)	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	2,4 – 3,5	1,95 – 3,35	1,48 – 3,18	1 – 3	Tingkat Inflasi	1,5-3,5	2,4 - 3,5	1,95 - 3,35	1,48 - 3,18	1 - 3
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan											
a.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0	Total Kredit/PDRB (%)	15	24	33	42	51
34)	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2
							Jumlah Lembaga Perbankan	4	5	6	7	8
IE.12.	Daya Saing Daerah											

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
35)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	80	90	100	100	Efektivitas Kerjasama Daerah	N/A	80	90	100	100
36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100	Persentase Penurunan Konflik	20	60	80	90	100

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi					
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045		Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju											
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 – 81,94	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 - 74,13	76,07 - 77,95	78,07 - 79,95	80,07 - 81,00	81,24 - 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif											
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 - 71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 - 76,38	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,07	67,07 – 67,99	69,07 – 70,00	70,42 – 71,42	71,84 – 72,23
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64*	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83 - 85	Indeks Perlindungan Anak	60,27	68,27-70,46	71,38-73,26	74,76-76,92	78,22-80,25
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53*	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53	60,53-65,00	65,53 - 70,00	70,53 - 75,00	75 - 78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415 - 0,414*	0,40-0,35	0,34-0,30	0,27-0,22	0,195 - 0,186*	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,597	0,573	0,533	0,480	0,417

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas											
41)	Kualitas Lingkungan Hidup											
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,45	77,46	78,72	79,99	81,50
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3,40	27,20	43,70	60,20	85,00	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,59	20,74	28,00	40,59	62,92
d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	14,46	31,568	52,953	74,338	100	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	14,46	31,568	52,953	74,338	100
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan											
42)	Ketahanan energi, air, dan pangan											
a.	Ketahanan Energi											

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	680	750	1.223	1.696	2.170	(ii) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	723.79	760.30	790.83	821.66	852.78
	(iii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137	(iv) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan											
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2	4,75	3,30	1,80	0,42	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,23	7, 00	5,7	4,4	3,4
c.	Ketahanan Air											
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kab Pesisir Barat					
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi							Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	31,568	52,953	74,338	100	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,06	23,48	35,22	52,83	79,24
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim											
43)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	129,97	126.11-122.80	121.29-113.84	116.47-104.88	110.68-94.13	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	187,50	180,22	167,60	152,52	137,26
44)	Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2e)											
a.	Kumulatif	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69	Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2e)	105,990.58	131,076.70	158,951.26	185,117.68	220,592.01

Bahwa pencapaian dan keberhasilan dari sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 merupakan tanggung jawab dari (i) pemerintah daerah, (ii) swasta dan (iii) masyarakat dalam koridor dukungan dan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota tetangga. Pencapaian sasaran pokok juga sangat bergantung dari keberhasilan daerah dalam pengelolaan manajemen perencanaan berupa (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) monitoring dan evaluasi dan (iv) umpan balik dari ketiga tahapan sebelumnya.

Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan RPJPD itu sendiri, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Kinerja APBN di daerah, bahwa pencapaian RPJPD di daerah yang dalam proses penyusunannya mendukung RPJPD dalam koridor kesatuan SPPN. Khususnya pada target-target daerah yang masuk dalam rencana pengembangan oleh pemerintah pusat.
- b. Kinerja APBD, bahwa seluruh perencanaan perlu ditindaklanjuti dengan penganggaran. Sehingga idealnya, target yang ditetapkan telah memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
- c. Kinerja RPJMD, sebagaimana dipahami bahwa RPJPD akan diturunkan ke RPJMD. Bahwa penyusunan RPJMD wajib berpedoman pada RPJPD. Sehingga siapapun kepala daerah yang akan menyusun visi, misi, hingga program dalam RPJMD idealnya tidak mengabaikan target dari RPJPD.
- d. Faktor Eksternal, dalam penyusunan RPJPD tentunya telah mengakomodir isu strategis yang mungkin terjadi dalam kurun 20 (dua puluh) tahunan. Namun demikian, tentunya ada hal-hal di luar kendali dari pemerintah daerah yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, gangguan politik dan sebagainya.

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu kunci dalam proses pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik dan berkualitas diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025—2045 memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan yang baik dan berkualitas tentunya tetap membutuhkan kemampuan eksekusi yang baik (*smart execution* dan *smart leadership*) dari kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) oleh pelaku pembangunan, khususnya bagi perencanaan dalam lingkup pemerintah daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam mewujudkan Visi “Pesisir Barat Maju, Mandiri dan Berkelanjutan” dalam proses pencapaiannya setidaknya perlu didukung oleh kondisi: (1) Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas daerah yang aman; (2) Kesiambungan proses perencanaan daerah yang baik dan berkualitas; (3) Pemerataan Pembangunan Daerah, baik dari sisi materil infrastruktur dan juga immaterial manusia; (4) Peran serta aktif dari masyarakat, DPRD serta seluruh pelaku pembangunan daerah, dari proses penjangkaran aspirasi hingga pengawasan; dan (5) Dukungan pendanaan daerah yang memadai.

6.1. Pedoman Transisi

RPJPD sebagai dokumen yang menyajikan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun disusun dengan berpedoman dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037.

RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat untuk 4 (empat) periodisasi RPJMD serta untuk 20 (dua puluh) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut, RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah untuk Pemilukada Serentak Tahun 2024 dalam penyusunan Visi dan Misi untuk RPJMD Tahun 2025-2029, dengan arahan:

- a. Tema dalam RPJPD menjadi arahan Visi calon kepala daerah;
- b. Arah kebijakan RPJPD menjadi arahan Misi calon kepala daerah;

- c. Sasaran Pokok RPJPD menjadi arahan Tujuan dan/atau Sasaran calon kepala daerah.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan mencakup : 1) konsistensi perencanaan dan pendanaan, 2) kerangka pengendalian, 3) kerangka regulasi dan kelembagaan, 4) sistem insentif, dan 5) mekanisme perubahan, serta 6) komunikasi dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 sehingga berkontribusi terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional 2025-2045. Penerapan kaidah pelaksanaan akan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang terpadu dan handal.

6.2.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Diperlukan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJPD, RPJM, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai alternatif pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dalam belanja daerah, pemerintah juga dapat memanfaatkan beberapa skema pendanaan pembangunan yang dapat berupa dari pinjaman daerah, hibah, ataupun obligasi daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan

tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.2.2 Kerangka Pengendalian dan penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis (Logical Framework)

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, diperlukan keselarasan RPJPD antara RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024; maka untuk memastikan pencapaian Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045), Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Adapun penyelarasan tersebut bertujuan untuk :

1. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di Tingkat Pusat dan Daerah.
2. Mewujudkan RPJPD Kabupaten/Kota yang harmonis dan selaras dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045, terutama pada aspek periodisasi, muatan materi dan sistematika penulisan dokumen perencanaan.
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah Kabupaten/Kota terhadap pencapaian visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan indikator utama pembangunan provinsi dan nasional.
5. Memastikan ruang yang memadai bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, **penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis (Logical Framework)** dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan RPJPD Lampung dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung akan menjadi alat bantu dalam penilaian hasil pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kerangka Kerja Logis akan

menggambarkan hubungan antara input-process-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan nasional. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan nasional ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/ pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan nasional terkait dalam aspek lokasi dan karakteristik wilayah.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, ResultOriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Guna memastikan kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; secara imperative indikator dalam RPJP Nasional menjadi acuan dan bagian dari RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya, sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Penerapan **prinsip KKL akan diaktualisasikan dalam wujud dokumen penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan hingga ke level perangkat daerah** selaku pengampu teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya penyusunan rencana peta jalan (atau istilah lainnya), hingga desain proyek dari program, kegiatan dan proyek prioritas; secara lintas sektor maupun antar jenjang pemerintahan, sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah. Lebih lanjut, dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan

berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045 disajikan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 6.1 Kerangka Pengendalian RPJPD Tahun 2025-2045



Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur dan pemerintah pusat. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

- a. **Pengendalian perencanaan.** Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, dan RPJMD ke dokumen rencana strategis Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKP, keselarasan dokumen RKP Kabupaten/Kota dengan dokumen RKP Provinsi dan RKP nasional, serta dokumen RKP ke dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

- b. **Pengendalian pelaksanaan.** Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah dan kontribusi terhadap nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan Nasional.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja pemerintah daerah dan perangkat terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. **Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.** Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal.

6.2.3 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tegas meletakkan peran penting pada RPJPN sebagai acuan dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Selanjutnya, Pasal 18 Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang akan menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan yang direncanakan.

Berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan negara sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam pembentukan regulasi. Demikian pula adanya beberapa hambatan Regulasi/peraturan perundang-undangan yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak; memerlukan evaluasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, dinamika tersebut perlu diwadahi dalam suatu sistem perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak dan berbagai bidang pembangunan, khususnya dari sisi regulasi. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kerangka regulasi guna memastikan pembangunan terjadi secara berkelanjutan.

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang disusun dalam sistem perencanaan nasional, dimana perencanaan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan tersebut. Regulasi akan menjadi sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah, atau bentuk formal suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan ; yang dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arahan kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta berbagai dampak lain yang sangat signifikan bagi masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan baik sejak proses perencanaan. Di samping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Selanjutnya, sesuai Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Ke depan, dalam rangka mengimplementasikan visi jangka panjang RPJPN Tahun 2025-2045 dan dan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, maka pembentukan instrumen hukum dalam pembangunan daerah **perlu dituangkan pada tahapan pembangunan jangka menengah daerah**, dengan mengadopsi strategi yang bersifat harmonisasi dan transformatif serta sejalan dengan koridor penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya ruang lingkup pembangunan yang direncanakan di dalam RPJPD Tahun 2025-2045, perlu memilah sektor-sektor tertentu yang akan dikaji dan proyeksi kebutuhan regulasinya. Pemilahan sektor dilakukan dengan mengidentifikasi **sektor prioritas** yang selaras dengan visi yang ditetapkan di dalam RPJPN dan RPJPD serta RPJMN dan RPJMD.

Demikian pula dengan peran kelembagaan dalam proses pembangunan. Kelembagaan yang baik yang juga menjadi kunci sukses dalam kelancaran dan berjalannya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala aktivitas pembangunan baik secara global, nasional maupun regional yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pembentukan suatu kelembagaan harus sangat diperhatikan.

Kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok masyarakat harus dibangun secara matang, antisipatif dan adaptif agar tidak menjadi penghambat dan menimbulkan gesekan kepentingan pada saat menjalankan tugas suatu lembaga atau organisasi dalam proses pembangunan. Sejalan dengan RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045, pembentukan kelembagaan perlu diarahkan pada pencapaian visi pembangunan, yang diikuti dengan penataan proses bisnis yang efektif dan efisien; yang sejalan dengan prinsip-prinsip : (i) mengacu pada desentralisasi dan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan, (ii) adanya keterkaitan, kontribusi dan peran dalam mencapai tujuan, (iii) mengutamakan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis, (iv) transparan, (v) mendukung perwujudan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan, (vi) didasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan. Lebih lanjut, peran kelembagaan perlu dikolaborasikan dengan tetap bertanggung jawab sesuai struktur organisasi dan kewenangan yang jelas, sesuai dengan regulasi. Kelembagaan yang efektif dan efisien akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

6.2.4 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja aparatur terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.2.5 Mekanisme Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung (RTRW) Tahun 2023-2043 dan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Selanjutnya, Visi, Misi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 tentunya menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten akan dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan

jangka menengah. Oleh karenanya, Pengendalian dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 akan menjadi instrumen yang penting dan menjadi kunci dalam proses mitigasi risiko, sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan pembangunan tetap adaptif.

Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, goncangan geopolitik dan geoekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, dan atau pemekaran daerah, perubahan regulasi dan kebijakan nasional; maka RPJPD dapat dilakukan perubahannya, atau target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Perubahan dan pemutakhiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Langkahlangkah pemutakhiran sebagaimana dimaksud tentunya ditempuh dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan.

6.2.6 Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dalam proses perencanaan

Komunikasi dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan; baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Komunikasi dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan melalui pendekatan proses perencanaan, yaitu: teknokratik, partisipatif, politik dan pendekatan atas-bawah (*top-down*) serta bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari komponen pemerintah dan non pemerintah. Keterlibatan pemerintah pusat, perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar dapat memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Pendekatan pendekatan politis dilaksanakan dengan melibatkan lembaga DPRD dalam proses perencanaan pembangunan, melalui tahap perencanaan awal, pembahasan dan kesepakatan bersama hingga penetapan rencana pembangunan menjadi peraturan perundangan. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) proses perencanaan yang dilaksanakan

untuk memperkuat keselarasan rencana pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam forum-forum musyawarah dan koordinasi pembangunan

6.3 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Barat Maju, Mandiri dan Berkelanjutan 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan perlu didukung dengan kebijakan pendanaan pembangunan yang searah. Untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan pembangunan dan pemanfaatannya secara optimal, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

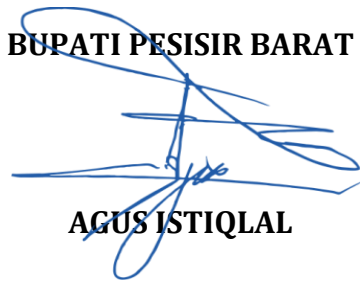
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang inovatif, hingga optimalisasi peran sektor keuangan pemerintah maupun non pemerintah.

Selain melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas belanja daerah, pendanaan pembangunan juga dapat ditempuh oleh pemerintah dengan memanfaatkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah lainnya dan peran swasta. Untuk mewujudkan pembiayaan yang memadai beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: peningkatan inovasi sumber pendanaan pembangunan seperti penguatan dan perluasan KPBU; pemanfaatan hibah dengan terarah; kerjasama antar daerah maupun kerjasama bilateral; peningkatan produktivitas asset, penerbitan obligasi daerah; kesertaan daerah dalam investasi strategis, atau pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif dan berhati-hati; yang ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Selanjutnya optimalisasi peran sektor keuangan secara inklusif juga perlu dilanjutkan yang diarahkan pada: (i) penguatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan utamanya peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit/pembiayaan ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya, peningkatan distribusi dan pengelolaan penghimpunan dana masyarakat di luar perbankan; (ii) peningkatan inklusi keuangan yang meliputi: peningkatan edukasi dan sosialisasi keuangan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi keuangan untuk lebih menjangkau masyarakat, serta peningkatan akses keuangan, terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan formal, termasuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan; (iii) penguatan, inovasi,

dan pemanfaatan digitalisasi keuangan; serta (iv) perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.

BUPATI PESISIR BARAT



AGUS ISTIQLAL